



# **LAPORAN AKHIR**

## **KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

## **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

## **KABUPATEN DHARMASRAYA**

**TAHUN 2021-2026**



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap Kebijakan, Rencana dan/atau Program wajib melakukan penyusunan KLHS, baik itu penyusunan atau evaluasi.

KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Lingkup KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Meliputi Kajian Umum Pembangunan berkelanjutan, Kondisi Umum wilayah, Capaian Indikator TPB, Pembagian Peran, Kondisi Pencapaian TPB, Skenario Pembangunan Berkelanjutan, Isu Strategis, Permasalahan dan Sasaran Strategis.

Penyusunan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 ini merupakan atas kerjasama tim penyusun dan masukan dari berbagai pihak dan stakeholder yang terlibat dalam penyusunannya. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026.

Pulau Punjung, Juni 2021

**BUPATI DHARMASRAYA**

**SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Dasar Hukum.....	4
1.5 Sistematika Pembuatan KLHS.....	6
1.6 Sistematika Laporan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	9
2.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD).....	11
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	15
2.4. Metodologi Penyusunan.....	17
<b>BAB III KONDISI UMUM DAERAH.....</b>	<b>19</b>
3.1 Sejarah Kabupaten Dharmasraya.....	19
3.2. Aspek Geografis dan Demografi.....	20
3.2.1. Kondisi Geografis.....	20
3.2.2. Kondisi Topografi.....	21
3.2.3. Kondisi Klimatologi.....	22
3.2.4. Kondisi Geologi.....	23
3.2.5. Kondisi Hidrologi.....	266
3.2.6. Penggunaan Lahan.....	26
3.2.7. Wilayah Rawan Bencana.....	27
3.2.8. Kondisi Demografi.....	28



3.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	31
3.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	31
3.3.2. Laju Inflasi.....	35
3.3.3. PDRB per Kapita.....	36
3.3.4. Gambaran Keuangan Daerah.....	37
3.3.5. Indeks Gini.....	48
3.3.6. Tingkat Kemiskinan.....	49
3.3.7. Indeks Pembangunan Manusia.....	49
3.3.8. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	51
3.3.9. Pendidikan.....	53
3.3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	56
3.3.11. Kesehatan.....	57
3.3.12. Potensi Pariwisata dan Budaya.....	58
3.4. Aspek Pelayanan Umum.....	59
3.4.1. Jaringan Listrik.....	59
3.4.2. Air Bersih.....	60
3.4.3. Sistem Jaringan Air Kotor dan Pengolahan Air Limbah.....	61
3.4.4. Sistem Persampahan.....	63
3.4.5. Jaringan Jalan.....	67
3.4.6. Sarana Sosial.....	69
3.4.7. Perdagangan dan Jasa.....	71
3.5. Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	71
3.5.1. Jasa Ekosistem Penyediaan.....	72
3.5.2. Jasa Ekosistem Pengaturan (Regulasi).....	75
3.5.3. Jasa Ekosistem Budaya.....	79
3.5.4. Jasa Ekosistem Pendukung.....	79
3.6. Peran Filantropi.....	85
<b>BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....</b>	<b>87</b>
4.1. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya ...	89
4.1.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)...	92
4.1.2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)...	98
4.1.3. Indikator yang Belum Memiliki Data (NA).....	105



4.2. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Pilar .....	109
4.2.1. Pilar Sosial .....	109
4.2.2. Pilar Ekonomi .....	109
4.2.3. Pilar Lingkungan .....	110
4.2.4. Pilar Hukum dan Tata Keola .....	111
4.3. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	112
4.4. Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB/SDGs.....	113
<b>BAB V RUMUSAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>116</b>
5.1 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Konsultasi Publik.....	116
5.2 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung.....	118
5.2.1 Analisis DDDTLH: Supply dan Demand (Daya Dukung Ril).....	123
5.2.1.1 Daya Dukung Pangan.....	123
5.2.1.2 Daya Dukung Air.....	126
5.2.1.3 Daya Dukung Fungsi Lindung.....	128
5.2.2 Analisis DDDTLH: Jasa Ekosistem.....	1299
5.3 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Evaluasi TPB yang Belum Tercapai dan Tidak Ada Data.....	132
<b>BAB VI. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI KLHS.....</b>	<b>140</b>
6.1. Rekomendasi terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik Kabupaten Dharmasraya.....	140
6.2. Rekomendasi terkait Isu Strategis Dari DDDTLH.....	143
6.3. Rekomendasi terkait Isu strategis Hasil Analisis TPB yang Belum Tercapai Berdasarkan SPM.....	143
6.4 Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Dharmasraya dengan Rekomendasi KLHS dan Visi Misi Kepala Daerah Terkait Indikator TPB SB dan NA.....	143
6.5 Pengintegrasian Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ke Dalam Dokumen RPJMD Kab. Dharmasraya 2021 – 2026.....	143
6.6 Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Dharmasraya dengan Rekomendasi KLHS dan Visi Misi Kepala Daerah Terkait Indikator TPB SB dan NA.....	143
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>213</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Nagari dan Jorong pada Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	19
Tabel 2. Luas Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	20
Tabel 3. Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	22
Tabel 4. Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Dharmasraya.....	22
Tabel 5. Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	24
Tabel 6. Kejadian Bencana Menurut Kecamatan (Jumlah Desa/Nagari yang Mengalami Bencana).....	28
Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya.....	29
Tabel 8. Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya.....	30
Tabel 9. Produk Regional Domestik Bruto Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020....	31
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya.	32
Tabel 11. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dharmasraya.....	34
Tabel 12. Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2016-2020.....	36
Tabel 13. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah.....	38
Tabel 14. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta).....	39
Tabel 15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	50
Tabel 16. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dharmasraya.....	52
Tabel 17. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020.....	52
Tabel 18. Capaian Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020.....	54
Tabel 19. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan.....	56
Tabel 20. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya.....	57
Tabel 21. Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Dharmasraya.....	61
Tabel 22. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya.....	68
Tabel 23. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya.....	68
Tabel 24. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya.....	69
Tabel 25. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	70
Tabel 26. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.....	71
Tabel 27. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Dharmasraya...	71
Tabel 28. Ringkasan Daya Dukung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Penyediaan....	72



Tabel 29. Ekoregion dan Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Penyediaan.....	74
Tabel 30. Ringkasan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Pengaturan..	75
Tabel 31. Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Pengaturan.....	79
Tabel 32. Ringkasan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Budaya.....	80
Tabel 33. Ekoregion dan Tutupan Lahan yang memberikan Daya Dukung Sangat Tinggi dan Tinggi pada Jasa Budaya.....	81
Tabel 34. Ringkasan Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Pendukung.....	81
Tabel 35. Ekoregion dan tutupan lahan yang meberikan daya dukung dan daya tampung Sangat Tinggi dan Tinggi untuk Jasa Pendukung.....	84
Tabel 36. Peran Filantropi Dalam Pembangunan Kabupaten Dharmasraya.....	85
Tabel 37. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Bukan Kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya.....	90
Tabel 38. Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya.....	91
Tabel 39. Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya.....	92
Tabel 40. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	93
Tabel 41. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya.....	98
Tabel 42. Indikator yang Sudah Dilakukan dan Belum Mencapai Target (SB).....	99
Tabel 43. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Dharmasraya.....	105
Tabel 44. Indikator yang Belum Memiliki Data (NA).....	106
Tabel 45. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial.....	109
Tabel 46. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi.....	110
Tabel 47. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan.....	110
Tabel 48. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	111
Tabel 49. Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya.....	113
Tabel 50. Peran OPD Kabupaten Dharmasraya dalam Pencapaian Target TPB/SDGs..	114
Tabel 51. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Hasil Konsultasi Publik.....	117
Tabel 52. Isu Prioritas Kabupaten Dhamasraya.....	117
Tabel 53. Perhitungan Produksi dan Kebutuhan Beras Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	117
Tabel 54. Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Dharmasraya.....	1255
Tabel 55. Proyeksi Produksi Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030.....	125
Tabel 56. Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030.....	127
Tabel 57. Potensi Ketersediaan Sumber Air Kabupaten Dharmasraya.....	127
Tabel 58. Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya.....	128
Tabel 59. DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya.....	131



Tabel 60. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Evaluasi TPB.	132
Tabel 61. Rekomendasi terkait isu strategis Hasil Konsultasi Publik Kabupaten Dhamasraya.....	140
Tabel 62. Bidang Pendidikan Kategori SPM.....	151
Tabel 63. Bidang Kesehatan Kategori SPM.....	156
Tabel 64. Bidang Kesehatan Non SPM.....	160
Tabel 65. Bidang Pekerjaan Umum Kategori SPM.....	164
Tabel 66. Bidang Pekerjaan Umum Kategori NON SPM.....	168
Tabel 67. Bidang Perumahan Rakyat Kategori SPM.....	170
Tabel 68. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kategori SPM.....	171
Tabel 69. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat Kategori NON SPM.....	176
Tabel 70. Bidang Sosial Kategori SPM.....	178
Tabel 71. Bidang Sosial Kategori NON SPM.....	180
Tabel 72. Arah Kebijakan Kategori Bidang Lainnya.....	184



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indikator TPB Global dan Indikator TPB Indonesia.....	12
Gambar 2. Tahapan Pembuatan KLHS RPJMD.....	15
Gambar 3. Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	17
Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	21
Gambar 5. Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	24
Gambar 6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020.....	30
Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2020.....	33
Gambar 8. Distribusi PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha.....	35
Gambar 9. PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Periode 2016-2020.....	37
Gambar 10. Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta).....	40
Gambar 11. Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020.....	48
Gambar 12. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Jumlah Penduduk Dalam Ribu Orang).....	49
Gambar 13. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat.....	51
Gambar 14. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020.....	52
Gambar 15. Skenario Capaian APK SD/MI/ sederajat; SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/MA/ Sederajat Terhadap Target TPB/SDGs.....	55
Gambar 16. Skenario Capaian APM SD/MI/ sederajat; SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/MA/ Sederajat Terhadap Target TPB/SDGs.....	56
Gambar 17. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	58
Gambar 18. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Dharmasraya.....	59
Gambar 19. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Dharmasraya.....	72
Gambar 20. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya.....	73
Gambar 21. Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat Kabupaten Dharmasraya.....	73
Gambar 22. Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan Bakar Kayu dan Fosil Kabupaten Dharmasraya.....	73
Gambar 23. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Dharmasraya.....	74
Gambar 24. Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Dharmasraya.....	76
Gambar 25. Daya Dukung Jasa Pengaturan Aliran Air dan Banjir Kabupaten Dharmasraya.....	76



Gambar 26. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	76
Gambar 27. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya.....	77
Gambar 28. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Kabupaten Dharmasraya.....	77
Gambar 29. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya.....	77
Gambar 30. Daya Dukung Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Dharmasraya.....	78
Gambar 31. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Dharmasraya.....	78
Gambar 32. Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Dharmasraya.....	80
Gambar 33. Daya Dukung Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Dharmasraya.....	80
Gambar 34. Daya Dukung Jasa Budaya Estetika (alam) Kabupaten Dharmasraya.....	81
Gambar 35. Daya Dukung dan Daya Tampung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Dharmasraya.....	82
Gambar 36. Daya Dukung dan Daya Tampung Siklus hara (nutrient cycle) Kabupaten Dharmasraya.....	82
Gambar 37. Daya Dukung dan Daya Tampung Produksi Primer Kabupaten Dharmasraya.....	83
Gambar 38. Daya Dukung dan Daya Tampung Biodiversitas Kabupaten Dharmasraya.....	83
Gambar 39. Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar Pembangunan.....	91
Gambar 40. Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional.....	92
Gambar 41. Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya.....	93
Gambar 42. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya.....	99
Gambar 43. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Dharmasraya.....	106
Gambar 44. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial.....	109
Gambar 45. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi.....	110
Gambar 46. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan.....	111
Gambar 47. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	112
Gambar 48. Grafik Capaian TPB/SDGs berdasarkan SPM.....	113
Gambar 49. Grafik Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras Kab. Dharmasraya Lima tahun Terakhir (ton/tahun).....	124
Gambar 50. Daya Dukung Pangan dengan Metode Supply dan Demand.....	126
Gambar 51. Daya Dukung Air Permukaan dengan Metode Supply dan Demand.....	128
Gambar 52. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya.....	129





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Tim Pembuat KLHS.....	Lampiran 1-1
Lampiran 2 Kompetensi Tenaga Ahli.....	Lampiran 2-1
Lampiran 3 Pendokumentasian KLHS.....	Lampiran 3-1
Lampiran 4 Penjaminan Kualitas.....	Lampiran 4-1
Lampiran 5 Capaian Indikator TPB.....	Lampiran 5-1
Lampiran 6 Penelaahan/Pengintegrasian Rekomendasi KLHS Kedalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.....	Lampiran 6-1



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengalaman pembangunan di banyak negara atau daerah yang tidak mempertimbangkan secara saksama aspek lingkungan (*environment*) dan sosial demi mengejar pertumbuhan ekonomi telah membawa kehancuran ekologis. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pembangunan tersebut justru menimbulkan akibat baru yang seakan meniadakan keberhasilan ekonomi. Udara dan air yang semakin kotor, pertumbuhan lahan kritis serta peningkatan berbagai penyakit makin menurunkan kualitas hidup yang justru ingin ditingkatkan melalui pembangunan.

Menyadari hal tersebut banyak pihak di dunia mencoba mencari bentuk perencanaan pembangunan yang sejak awal melihat secara holistik dan integratif aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Bentuk perencanaan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka pikir seperti itu secara bertahap sejak konferensi Stockholm di Swedia pada tahun 1972 telah digagas banyak cara untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen Internasional seperti *Millenium Development Goals* (MDGs)/ Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah disepakati sebagai panduan umum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian dari tujuan TPM yakni 49 dari 67 indikator. Itu berarti ada sejumlah indikator yang harus dicapai melalui pelaksanaan TPB/SDGs.

Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Implementasi Peraturan Presiden tersebut lebih jauh dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD yang mewajibkan setiap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



didahului dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang mempertimbangkan capaian TPB/SDGs. Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan sebagai berikut:

- Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan
- Tujuan 2. Tanpa Kelaparan
- Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas
- Tujuan 5. Kesenjaraan Gender
- Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- Tujuan 7. Energi bersih dan Terjangkau
- Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan
- Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
- Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim
- Tujuan 14. Ekosistem Lautan
- Tujuan 15. Ekosistem Daratan
- Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam rangka pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 menyusun RPJMD 2021-2026. Penyusunan RPJMD sesuai amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib menyusun Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS).



Dalam Penyusunan KLHS sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 7/2018 perlu dipelajari dan dianalisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu perlu diketahui pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha serta Akademisi. Selanjutnya hasil KLHS yang berupa rekomendasi perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Dengan demikian diharapkan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan pencapaian TPB/SDGs.

Lebih jauh penyusunan kebijakan, rencana dan program yang akan dituangkan dalam RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diinginkan, yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam sewaktu menyusun KLHS.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan KLHS dimaksudkan untuk:

1. Menjamin bahwa prinsip – pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD.
2. Memastikan bahwa publik telah terlibat secara aktif dalam penyusunan RPJMD melalui proses konsultasi publik.
3. Mengupayakan pemahaman yang lebih holistik tentang perlunya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta potensi dan ketahanan keanekaragaman hayati.

## 1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya mencakup:

1. Kondisi Umum Daerah



Kondisi umum daerah ini akan memuat antara lain kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi geografis, demografis dan keuangan daerah.

2. Dasar Teori dan Metodologi.
3. Capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tercermin dari capaian indikator-indikator TPB/SDGs.
4. Pembagian peran, yang tercermin dari kontribusi Pemerintah, Pemerintah Daerah serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha dan akademisi serta pihak terkait lainnya.
5. Skenario pencapaian TPB/SDGs yang masih belum mencapai target dan arah kebijakan untuk mewujudkan TPB/SDGs.

#### 1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan dan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025;



## 1.5 Sistematika Pembuatan KLHS

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD
  - a) Pemerintah daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
  - b) Tim pembuat KLHS RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.
  - c) Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pengkajian pembangunan berkelanjutan  
Dilakukan oleh tim mencakup:
  - a) Kondisi umum daerah, memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografi dan keuangan daerah
  - b) Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
  - c) Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan  
Perumusan skenario mengacu pada analisa perkembangan pencapaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya, proyeksi capaian indikator TPB/SDGs tahun 2030, analisis gap antara target TPB/SDGs dengan proyeksi capaian TPB/SDGs di daerah, menentukan isu strategis berdasarkan indikator TPB/SDGs, analisis permasalahan dalam pencapaian indikator TPB/SDGs serta menentukan sasaran pencapaian.
4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD  
Penjaminan kualitas KLHS RPJMD dilakukan oleh Bupati dan ditandatangani langsung oleh Bupati tersebut. Validasi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat / Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.



## 1.6 Sistematika Laporan

Sistematika Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 terdiri dari:

Laporan Akhir pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya ini, terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan penjelasan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika pelaporan dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026.

### **BAB II : DASAR TEORI**

Berisi penjelasan tentang teori yang digunakan pada laporan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya.

### **BAB III : KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

Berisi penjelasan tentang gambaran kondisi secara umum wilayah kajian baik itu kondisi fisik wilayah, demografis, kondisi keuangan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Dharmasraya, peran Filantropi serta peran pemangku kepentingan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya.

### **BAB IV : ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KABUPATEN DHARMASRAYA**

Berisi penjelasan tentang hasil capaian indikator pembangunan berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya terhadap indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan serta dikelompokkan menurut pilar dan status capaian masing-masing indikator yaitu capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut kategori capaian dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut pilar. Selain itu juga disampaikan penilaian dan analisis capaian indikator TPB/SDGs setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk





program yang berkaitan dengan TPB/SDGs yang menjadi tugas, pokok dan fungsi OPD. Dalam bab ini dijabarkan capaian indikator TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD; analisis capaian indikator berdasarkan DDDTLH dan proporsi anggaran; serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung OPD menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai target dalam TPB/SDGs.

## **BAB V : RUMUSAN ISU STRATEGIS**

Berisikan penjabaran isu strategis berdasarkan penjaringan isu pembangunan berkelanjutan melalui konsultasi publik, isu berdasarkan ketidak tercapaian indikator TPB/SDGs dan isu berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB VI : ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI KLHS RPJMD**

Berisikan alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari DDDTLH serta ketercapaian terhadap TPB/SDGs. Pada bab ini terdiri dari : alternatif skenario dan rekomendasi DDDTLH daerah; alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMD (sebelumnya), serta indikator yang belum memiliki data; alternatif skenario tanpa upaya tambahan (*BAU-business as usual*) yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMD (sebelumnya). Rekomendasi untuk RPJMD yang didasarkan rumusan isu strategis yang disusun. Rekomendasi ditujukan untuk misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu tambahan rekomendasi yang ditujukan untuk keseluruhan dokumen RPJMD untuk beberapa bagian termasuk latar belakang, kondisi umum serta isu strategis Kabupaten Dharmasraya.

## **BAB VII : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dari laporan KLHS RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis DDDTLH daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB/SDGs, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta kesimpulan rekomendasi bagi Kabupaten Dharmasraya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### 2.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selain itu, disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 2 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 mengenai tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan dalam mengatur pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kemendagri mengawal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi KLHS untuk:

1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
2. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempumaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
  - a. Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu;
  - b. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.
  - c. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar.
  - d. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya.
  - e. Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
  - a. Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar;
  - b. Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara,
  - c. atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UUPPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b.
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; Layanan atau fungsi ekosistem yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
  - a. Layanan fungsional (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll.
  - b. Layanan regulasi (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
  - c. Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
  - d. Layanan pendukung kehidupan (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air dll.



4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;  
Nilai manfaat sumber daya alam, dapat diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan  
Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
  - a. Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun atau meningkat.
  - b. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

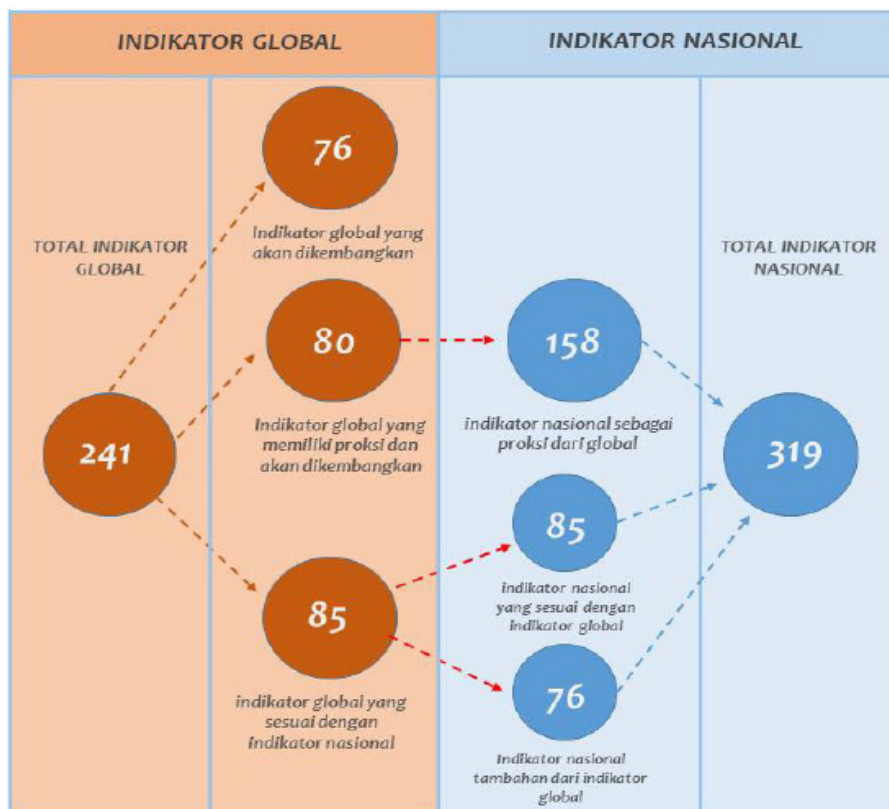
Apabila hasil kajian enam muatan KLHS tersebut telah menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; serta segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Muatan kajian dapat pula mencakup selain keenam muatan tersebut diatas, tergantung karakteristik wilayah, kondisi dan isu pembangunan berkelanjutan serta muatan kebijakan, rencana, dan/atau program.

## **2.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB/SDGs dan mengakomodir isu strategis TPB/SDGs yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs.

KLHS RPJMD memuat kajian pembangunan berkelanjutan serta perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi dan analisis data kondisi umum daerah, capaian indikator TPB/SDGs yang relevan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya; sedangkan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan alternatif proyeksi untuk pencapaian target dengan dan/atau tanpa upaya tambahan.

Dalam pencapaian TPB/SDGs secara global terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB/SDGs di Indonesia. Rincian dari 319 indikator tersebut yaitu 158 indikator berupa proyeksi dari 80 indikator global, 85 indikator berupa indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, dan 76 indikator sebagai tambahan indikator global.



**Gambar 1. Indikator TPB Global dan Indikator TPB Indonesia**

Setiap wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis TPB/SDGs dengan jumlah indikator yang berbeda. Apabila ditelaah lebih lanjut



berdasarkan pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap 303 indikator, pemerintah provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator, dan pemerintah kota 222 indikator. Selain itu terdapat 21 indikator yang memiliki kriteria khusus dan hanya ditujukan untuk wilayah-wilayah tertentu.

Pemanfaatan KLHS RPJMD untuk RPJMD dan RAD TPB/SDGs terbagi dalam beberapa tahapan, antara lain tahap pembuatan, pemanfaatan, penelaahan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi. Untuk masing-masing RPJMD dan RAD TPB/SDGs memiliki pemanfaatan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Secara umum, dalam tahap pembuatan KLHS RPJMD terdapat kegiatan pengkajian dan perumusan skenario.

Dalam pengkajian, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data berupa kondisi umum daerah, capaian indikator TPB/SDGs, dan pembagian peran. Sedangkan dalam perumusan skenario, kegiatan yang dilakukan adalah membuat alternatif proyeksi. Alternatif proyeksi dibagi dalam alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan atau BAU (*business as usual*) dan alternatif proyeksi dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi ini dibuat berdasarkan isu strategis, permasalahan, serta sasaran strategis.

**Pemanfaatan untuk RPJMD:** KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan sebagai gambaran umum, hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis, serta penentuan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Dalam penyusunan RPJMD, KLHS berperan sebagai rancangan teknokratis yang digunakan sebagai rancangan awal. Rancangan awal RPJMD ditelaah kesesuaiannya dengan rancangan teknokratis sebelum menjadi rancangan dokumen rencana daerah (dokrenda). Rancangan dokrenda menjadi instrumen utama yang akan dibahas di musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) daerah. Setelah dokumen mendapat masukan, kemudian dokumen tersebut ditetapkan sebagai rancangan akhir dan ditetapkan sebagai dokrenda.

**Pemanfaatan untuk RAD:** Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, RAD TPB/SDGs merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung



pencapaian TPB/SDGs yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. KLHS untuk RAD TPB/SDGs dimanfaatkan sebagai penentuan usulan program dan kegiatan baik untuk daerah, pemerintah pusat di daerah, maupun untuk non pemerintah. Dalam tahap persiapan, pembuatan, dan pelaksanaan KLHS RPJMD, pemanfaatan untuk RAD TPB/SDGs dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

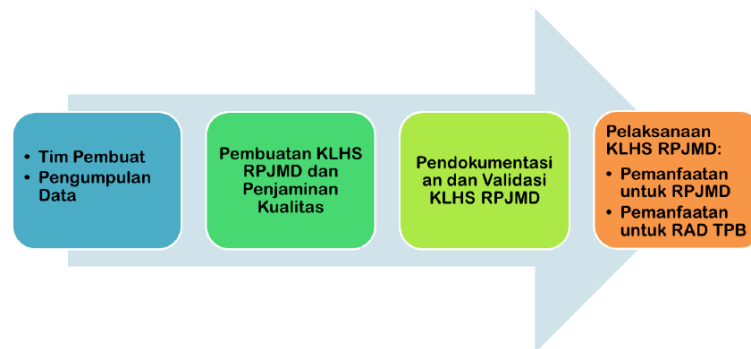
- a. Pembentukan tim pelaksana;
- b. Sidang pleno;
- c. Analisis situasi dan tantangan;
- d. Perumusan kebijakan target program kegiatan dan indikator;
- e. Alokasi pagu indikatif;
- f. Perumusan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembahasan draft;
- h. Pleno penyempurnaan;
- i. Pengesahan;
- j. Sosialisasi dan finalisasi.

Waktu penyusunan KLHS dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan revisi RTRW. Tahapan penyusunan KLHS RPJMD ini mengacu pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 3 dimulai dari tahap persiapan, pembuatan, hingga pelaksanaan.

- 1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Tim ini terdiri dari anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji dan pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian sejenis.
- 2) Pengumpulan data terkait kebutuhan analisis laporan KLHS RPJMD. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan/Perumusan Isu Strategis. Kajian ini meliputi tahap analisis data, konsultasi publik, dan penetapan isu. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan melihat kondisi saat ini dan pencapaiannya terhadap target. Analisis isu biasanya ditinjau dari (namun tidak terbatas) kondisi lingkungan hidup (kajian 6 muatan KLHS, lihat Pasal 13 PP 46/2016), isu strategis RPJMD (dapat berupa rancangan awal/dokumen teknokratik), visi misi kepala daerah, dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*.
- 3) Perumusan Skenario dan Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan. Tahap ini untuk merumuskan alternatif atau proyeksi kondisi capaian di beberapa tahun mendatang

serta memberikan rekomendasi kebijakan dan arahan program yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan isu/permasalahan yang ada. Pada tahapan ini juga dilakukan konsultasi publik.

- 4) Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan telah tepatnya proses pembuatan maupun isi KLHS RPJMD, serta telah diintegrasikannya rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD.
- 5) Tahap penyusunan KLHS RPJMD yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan berdasarkan pemanfaatannya untuk RPJMD dan RAD TPB/SDGs Provinsi. Berikut ini merupakan skema penyusunan KLHS RPJMD.



**Gambar 2. Tahapan Pembuatan KLHS RPJMD**

Dalam rangkaian penyusunan KLHS, baik untuk (namun tidak terbatas pada) RTRW maupun RPJMD, terdapat kegiatan Konsultasi Publik/Uji Publik yang dilakukan khususnya pada tahap perumusan isu strategis dan perumusan skenario dan rekomendasi. Konsultasi/Uji publik ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penyusunan KLHS sudah melibatkan pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah (asas partisipatif).

### 2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah.





Pasca Protokol Kyoto 2012, Indonesia memegang kewajiban turut secara aktif mencegah pelepasan karbon secara tak terkendali. Perubahan tata guna lahan dan perubahan kawasan hutan adalah sebab utama pelepasan karbon ke udara oleh Indonesia hingga saat ini. Minimal diharapkan dari Indonesia untuk menyelamatkan hutan dan tanah gambut, untuk menyerap karbon, mengurangi ancaman perubahan iklim, dan untuk menyelamatkan keanekaragaman plasma-nutraf, genetika, spesies dan ekosistem yang hanya tumbuh dalam hutan-hujan tropis dan marin-lautan tropis. Menjelang akhir tahun 2015, Indonesia dihadapkan pada tantangan mencapai sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)* memberantas kemiskinan dan ketertinggalan kesehatan dan pendidikan.

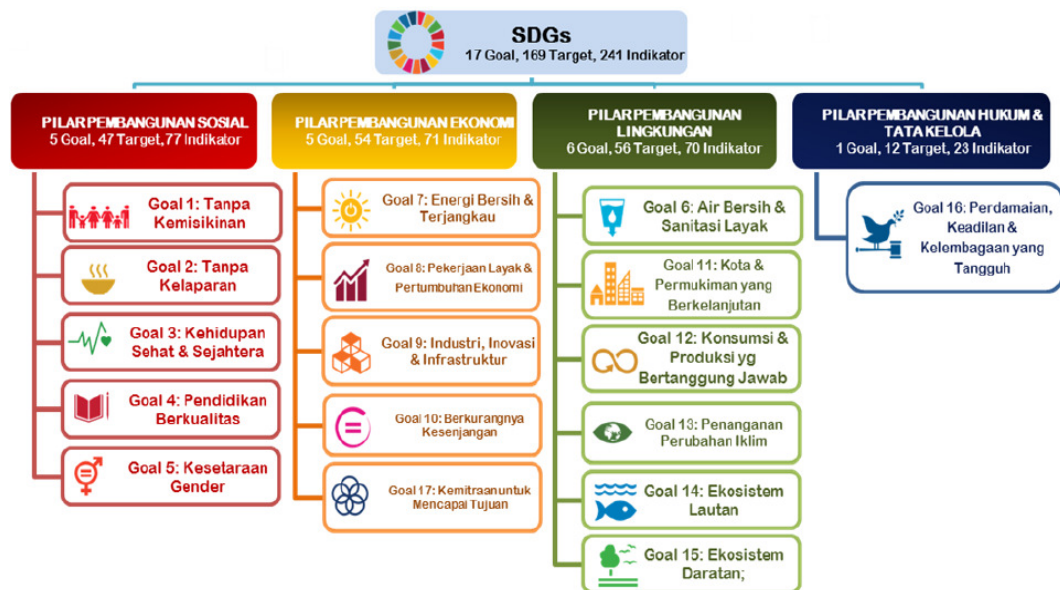
Untuk melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada tahun 2015, disepakati bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi agenda pembangunan global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB/SDGs merupakan kesepakatan global tentang pembangunan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*".

TPB/SDGs di Indonesia bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Indonesia, TPB/SDGs diterjemahkan ke dalam 4 (empat) pilar (pembangunan sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola). Empat pilar ini kemudian diturunkan dalam 17 Tujuan, 116 target, dan 319 indikator.

Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Peraturan presiden ini, menegaskan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019, yang selaras dengan TPB/SDGs yang dituangkan dalam lampiran tersebut, yang bertujuan untuk

menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian untuk pelaksanaannya disinkronkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD). KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Di dalam lampiran Pemendagri tersebut, dicantumkan indikator TPB/SDGs di Indonesia dan formula penghitungan dari indikator tersebut.



Gambar 3. Penjabaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

## 2.4. Metodologi Penyusunan

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat melalui pendekatan *ex-ante*. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan ketika penyusunan dokumen



KLHS dan diaplikasikan pada proses penyusunan Kebijakan Rencana Program (KRP) atau terintegrasi ke dalam proses penyusunan dokumen RPJMD 2021 – 2026.

#### **A. Metodologi Analisis TPB**

1. Penyampaian pencapaian indikator TPB/SDGs dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016 s/d 2020).
2. Verifikasi terkait data capaian indikator TPB/SDGs.
3. Analisis capaian indikator TPB/SDGs dan penggambaran klasifikasi capaian indikator TPB/SDGs (Sudah dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS), Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target Nasional (SB) dan Data yang belum tersedia (NA)
4. Penyelenggaran Konsultasi Publik untuk mendapatkan isu strategis pencapaian indikator TPB/SDGs.
5. Penelaahan peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis jasa ekosistem.
6. Penelaahan Program Unggulan Bupati.

#### **B. Metodologi Penyusunan Skenario Pencapaian TPB**

1. Pengolahan capaian indikator TPB/SDGs dengan tingkat ketercapaian target TPB/SDGs yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Analisis capaian indikator TPB/SDGs dengan skenario *Business As Usual* (BAU) dan dengan upaya tambahan.
3. Analisis Isu Strategis (Hasil Konsultasi Publik untuk pencapaian indikator TPB/SDGs)
4. Analisis keterkaitan Program Unggulan Bupati dengan isu-isu lingkungan.



## BAB III KONDISI UMUM DAERAH

### 3.1. Sejarah Kabupaten Dharmasraya

Aktivitas Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara resmi telah berjalan sejak dilantiknya Pejabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004. Mulai tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Bupati definitif hasil pemilihan Kepala Daerah Langsung. Ketika ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, dimana jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 (empat) kecamatan menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2009 melalui Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari terdapat beberapa nagari yang dimekarkan dari 21 Nagari menjadi 52 Nagari. Sementara jumlah Jorong menjadi 260 yang selanjutnya dimekarkan lagi menjadi 461 Jorong pada tahun 2017. Tujuan dari pemekaran ini agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih luas sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel berikut :

**Tabel 1. Jumlah Nagari dan Jorong pada Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya**

NO	KECAMATAN	NAGARI		JORONG		
		2005	2009	2005	2009	2017
1	Sungai Rumbai	6	4	26	24	43
2	Koto Besar	-	7	-	32	43
3	Asam Jujuhan	-	5	-	22	22
4	Koto Baru	7	4	38	26	73
5	Koto Salak	-	5	-	27	44
6	Tiumang	-	4	-	17	30
7	Padang Laweh	-	4	-	17	17
8	Sitiung	3	4	20	22	52
9	Timpeh	-	5	-	21	40
10	Pulau Punjung	5	6	25	31	62
11	IX Koto	-	4	-	21	35
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>52</b>	<b>109</b>	<b>260</b>	<b>461</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya



### 3.2. Aspek Geografis dan Demografi

#### 3.2.1. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 km<sup>2</sup> (296.113 ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas daerah 3.025,99 km<sup>2</sup> (302.599 ha) atau dengan prosentase luas terhadap Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,197%. Kabupaten Dharmasraya berada pada Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kota Padang, Pekanbaru dan Jambi. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya terletak pada koordinat 00 ° 47'07"- 1 ° 41'56" LS (Lintang Selatan) dan 101 ° 09'21" - 101 ° 54'27" BT (Bujur Timur). Secara administrasi Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan dan 52 nagari yang berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Provinsi Riau)
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan
4. Sebelah Timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi

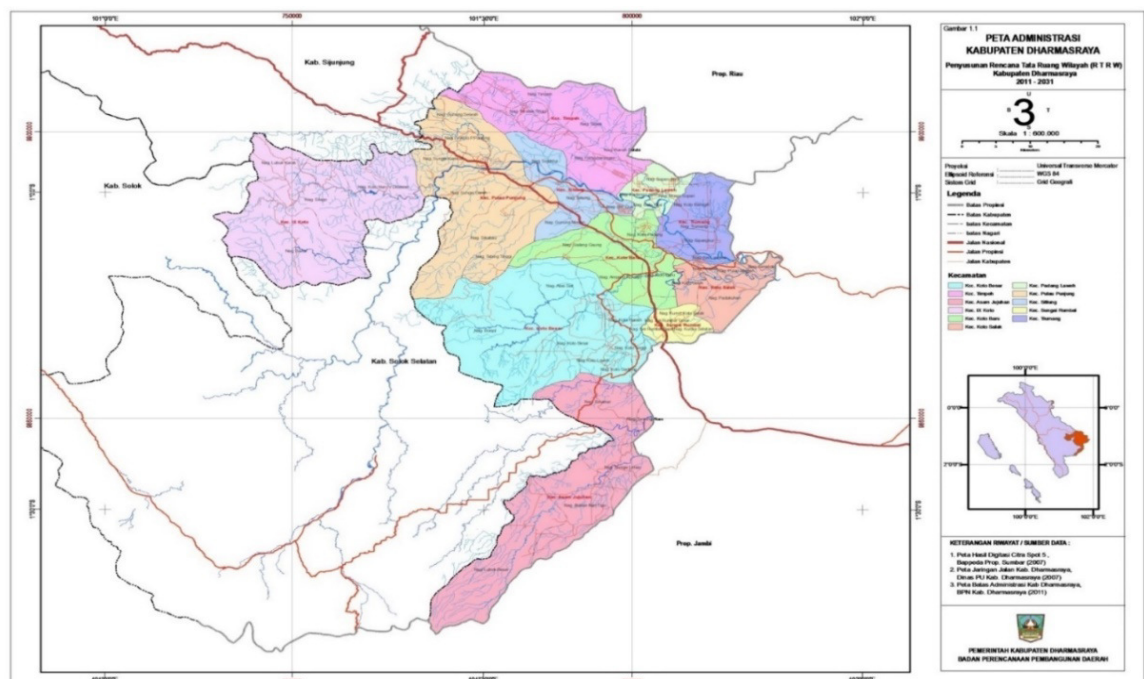
Kecamatan terluas di Kabupaten Dharmasraya adalah Kecamatan Koto Besar, yaitu dengan luas 488,19 km<sup>2</sup> dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sungai Rumbai dengan luas 47,63 ha. Untuk lebih jelasnya mengenai luas kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya pada dapat dilihat Kabupaten Dharmasraya secara administrasi.

**Tabel 2. Luas Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	47,63
2	Koto Besar	Koto Besar	488,19
3	Asam Jujuhan	Sungai Limau	257,72
4	Koto Baru	Koto Baru	251,35

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )
5	Koto Salak	Koto Salak	464,39
6	Tiumang	Tiumang	129,18
7	Padang Laweh	Padang Laweh	59,76
8	Sitiung	Sitiung	87,68
9	Timpeh	Tabek	237,93
10	Pulau Punjung	Sungai Dareh	482,50
11	IX Koto	Sembilan Koto	454,80
	<b>Jumlah Total</b>		<b>2.961,13</b>

Sumber : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka, 2021



Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031

### 3.2.2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya yang berbukit dengan sedikit lahan yang datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian mulai dari 82 meter dpl pada bagian Kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.525 meter dpl pada bagian Kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat



curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumatera Barat (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut.

**Tabel 3. Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya**

No	Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
			(Ha)	(%)
1	Datar	0-3	23.155	7,65
2	Agak Landai	3-8	68.786	22,73
3	Landai	8-15	72.339	23,91
4	Agak Curam	15-25	74.730	24,70
5	Curam	25-40	29.023	9,59
6	Sangat Curam	40-60	34.567	11,42
<b>Jumlah</b>			<b>302.559</b>	<b>100,00</b>
Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031				

Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya, sekitar 21.797,3 Ha adalah kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 tentang Fungsi dan Status Kawasan Hutan, untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya seluas 92.150 Ha adalah kawasan hutan dimana 74.755 Ha adalah hutan produksi dan sisanya 17.395 Ha adalah hutan lindung, taman nasional dan cagar alam.

### 3.2.3. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimate L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Berikut dapat dilihat curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Dharmasraya

**Tabel 4. Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Dharmasraya**

No	Bulan	2019		2020	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	182	11	296	14
2	Februari	296	13	206	12
3	Maret	148	8	274	13
4	April	226	15	464	16
5	Mei	123	7	246	11
6	Juni	217	12	123	10





No	Bulan	2019		2020	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
7	Juli	123	3	127	7
8	Agustus	128	7	82	8
9	September	103	5	362	13
10	Oktober	67	6	160	13
11	November	309	10	456	17
12	Desember	560	19	200	10
	TOTAL	2482	116	2996	144

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya

### 3.2.4. Kondisi Geologi

Berdasarkan RTRW, Struktur geologi yang ada di daerah Dharmasraya relatif aman. Adanya interpretasi struktur geologi /kelurusan-kelurusan geologi yang terdapat di daerah dekat sungai Batanghari yaitu di Koto Baru arah ke Solok/Padang terdapat jalur Sesar Turun (diperkirakan) yang memanjang dengan arah Barat laut – Tenggara, dimana daerah Gunung Medan merupakan sebagian dari jalur sesar tersebut. Ditemukan juga perlipatan-perlipatan kecil, dimana struktur yang ada hanya sebagian saja yang tidak stabil. Daerah sesar ini merupakan bagian dari sesar Sumatera Fault Zone yang terbentang sepanjang pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi tersebut maka Kabupaten Dharmasraya, khususnya daerah bagian barat daya-barat laut yang mengikuti arah pulau Sumatera termasuk daerah rawan gempa/bencana alam meskipun dengan intensitas yang kecil.

Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari:

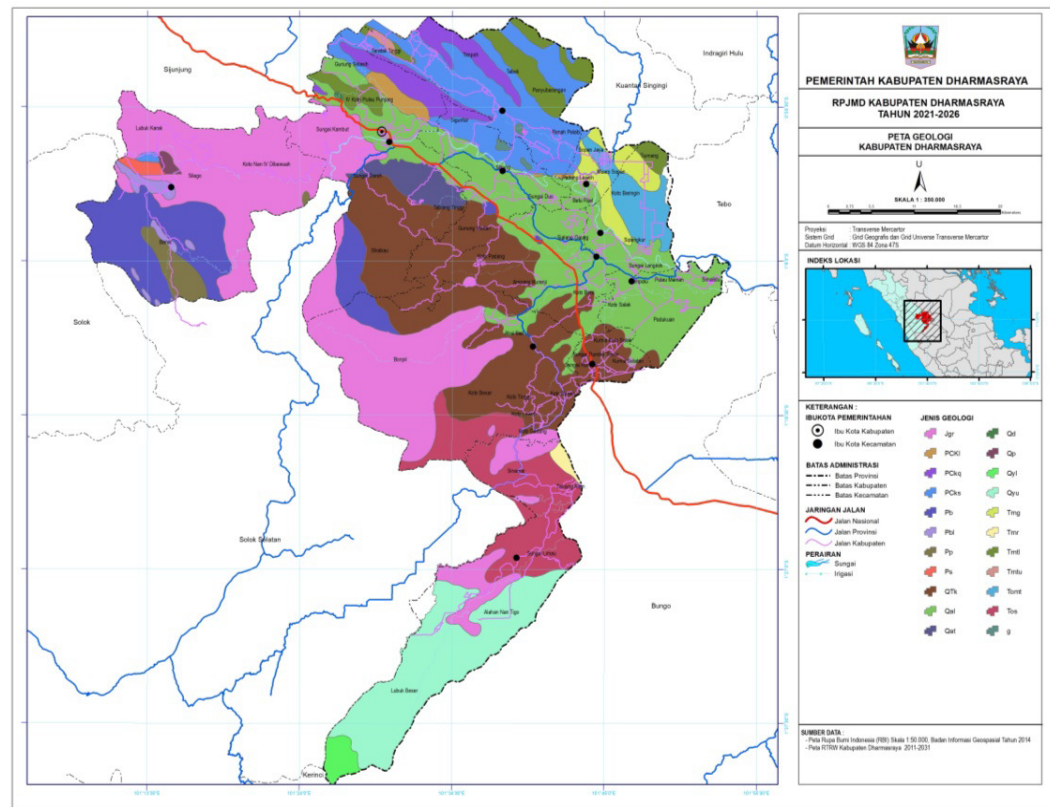
1. Aluvium
2. Endapan Undak
3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan
4. Lava
5. Formasi Kasai
6. Formasi Rantaukil
7. Formasi Telisa, Anggota bawah
8. Formasi Gumai
9. Formasi Talang Akar
12. Porfir Kuarsa
13. Granodiorit
14. Formasi Barisan, Anggota batugamping
15. Formasi Barisan
16. Formasi Pelepat
17. Diabas, Basal
18. Formasi Silungkang
19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah
20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih



10. Formasi Sinamar  
11. Granit

21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 5. dan Gambar 5.



Gambar 5. Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

Tabel 5. Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

No	Simbol	Umur	Formasi	Litologi
1	Qal	Holosen	Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil
2	Qat	Holosen	Endapan Undak	Bongkah, kerikil dan pasir; setempat tingginya 30-40 m di atas permukaan sungai
3	Qyu / Qvkb	Kuarter	Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan	Breksi Gunungapi, lahar, breksi tuf, bersusunan baslt sampai andesit. Batuan berasal dari G. Kerinci dan G. Tujuh
4	Qvl	Kuarter	Lava	Susunan dan asalnya sama dengan Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar lereng G. Kerinci dan G. Tujuh
5	Qtk	Plio-Plistosen	Formasi Kasai	Tuf batuapung bersifat asal, batupasir tufan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang membatu biasa ditemukan, berumur Plio-Plistosen, tebal maksimal 700 m.
6	Tmr	Miosen	Formasi	Batupasir lempungan, batupasir tufan, batupasir



			Rantaukil	gampingan, batulempung tufan, napal dan lensa tipis batugamping.
7	Tmtl	Miosen	Formasi Telisa, Anggota bawah	Napal lempungan dengan lensa-lensa rijang hitam, batupasir lignit, tuf dan breksi andesit dan batupasir glaukonit
8	Tmg	Miosen	Formasi Gumai	Serpih, batugamping napalan, lapisan tipis tuf andesitan dan mengandung foraminifera kecil, terutama Globigerinidae; tebal maksimum 800 m.
9	Tomt	Oligo-Miosen	Formasi Talang Akar	Napal dengan lensa rijang hitam, batupasir lignitan, tuf andesitan, breksi andesitan, dengan batupasir glokonitan; tebal maksimum 1.500 m.
10	Tos	Oligosen	Formasi Sinamar	Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosan, batulempung, napal, batulempung pasir, lapisan batubara dan batugamping koral.
11	Jgr	Yura Awal	Granit	Granit biotit hornblenda sampai granodiorit. Bintik-bintik mineral mafik, oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi, setempat apatit; sebagai stok; granodiorit lebih muda.
12	g	Trias	Granit	Leuko-granit sampai monzonit kuarsa, faneritik-porfiritik. Umurnya 112;24 juta tahun.
13	qp	Trias	Porfir Kuarsa	Fenokris-fenokris kuarsa dan feldspar dalam masadasar berbutir sedang, hamper besar dari mineral mafik.
14	gd	Trias	Granodiorit	Bertekstur porfirit-faneritik, berwarna abu-abu muda, bersusunan anderin-oligoklas, ortoklas, kuarsa, hornblenda, biotit dan magnetit ikutan.
15	Pbl	Perem	Formasi Barisan, Anggota batugamping	Batugamping. Terpualamkan, terhablur dan pejal.
16	Pb	Perem	Formasi Barisan	Filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewake meta.
17	Pp	Perem	Formasi Pelepat	Terutama lava, tuf sela hablur dan tuf sela andesitic; terpropilitkan, pirit, tembaga dan molibden. Lava basaltik dan riolitik tersebar tidak beraturan.
18	d	Permo-Karbon	Diabas, Basal	Keras, retak-retak, berongga, abu-abu tua, bintik-bintik hitam. Bertekstur trakit, feldspar dan mineral mafik dalam masadasar mikrolitik; sisipan dalam filit dan kuarsit.
19	Ps	Permo-Karbon	Formasi Silungkang	Bagian bawah, andesit hornblenda dan augit, meta-andesit dengan sisipan tuf, batugamping, srph dan batupasir. Bagian atas batugamping pasir, batupasir gpab dan serpih lpan dengan sedikit tuf, agl, lava and augit dan basalt
20	PCkq	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Bawah	Kuarsit dan batupasir kuarsa dengan sisipan-sisipan filit, batusabak terkersikkan, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang coklat.
21	PCka	Karbon	Formasi Kuantan,	Serpih dan filit kemerahan-coklat, sekisan,



22	PCKl	Karbon	Anggota Filit dan Serpih	sisipan batusabak, qzt, blanau, rijang abu tua dan lava and basalt. Menjadi sekis, genes dan batutanduk pada ktk dengan batu intrusi.
			Formasi Kuantan, Anggota Batugamping	Batugamping pejal berongga, berwarna putih, abu-abu dan kemerah-merahan. Mengandung sisipan-sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkersitkan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut

### 3.2.5. Kondisi Hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum, daerah Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada daerah aliran sungai (*catchment*) area dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi pelepasan (*discharge*) air di bawah permukaan daerah ini. sebagian wilayah tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (*aquifer*) setempat dan pada rekahan (*joint*), umumnya cadangan air langka. Didaerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (*aquifer*) yang tinggi.

### 3.2.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### 1. Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 99.314 Ha (33,52% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan (sawit dan karet) seluas 89.647 Ha (30,9%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 9.652 Ha (1,89%) yang terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah tadah hujan. Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering seluas 3.973 Ha (1,34%).



## 2. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 172.707 Ha (58,29% dari luas wilayah). Tutupan hutan dengan vegetasi primer di Kabupaten Dharmasraya seluas 7.290 Ha dan hutan dengan vegetasi sekunder (yang umumnya bercampur dengan kebun rakyat) seluas 157.836 Ha, dan hutan tanaman seluas 6.115 Ha.

## 3. Permukiman

Luas kawasan permukiman 5.07 Ha (1,71% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang di arah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu berdasarkan peta citra spot 5 Provinsi Sumatera Barat tahun 1997 terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 20.805 Ha (7,02%).

### 3.2.7. Wilayah Rawan Bencana

Sesuai dengan karakteristik wilayah dan perkembangan kondisi kekinian, maka bencana yang rawan terjadi di Dharmasraya ada 2 (dua) jenis yaitu bencana banjir dan kebakaran.

#### 1. Banjir

Dengan karakteristik daerah yang memiliki banyak aliran sungai terutama daerah aliran sungai Batanghari, serta kontur daerah yang agak landai, pada musim hujan sering terjadi banjir pada beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Pulau Punjung (Jorong Kampung Surau), beberapa jorong di Kecamatan Timpeh serta di Kecamatan Padang Laweh. Hal ini mesti ditanggulangi dengan berbagai strategi, seperti memprioritaskan daerah yang sering mengalami banjir dengan membangun gorong-gorong, bronjong serta normalisasi aliran sungai.

#### 2. Kebakaran Lahan

Bencana kebakaran lahan seperti yang terjadi pada tahun 2015 lalu diiringi oleh kabut asap yang menyelimuti seluruh kecamatan, dampaknya juga pada masalah kekeringan di sejumlah wilayah, hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam



mendapatkan air bersih, hal ini terjadi Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Timpeh. Penanganan dampak dari kebakaran ini adalah sulitnya dalam penanganan pemadaman kebakaran lahan baik yang disengaja maupun tidak. Keterbatasan ini ada pada jumlah mobil pemadam yang masih sedikit, keterbatasan jumlah personil pemadam maupun lokasi kebakaran yang sulit terjangkau oleh mobil pemadam.

Kejadian bencana berdasarkan kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 6. Kejadian Bencana Menurut Kecamatan (Jumlah Desa/Nagari yang Mengalami Bencana)**

No	Kecamatan	Jenis Bencana			Jumlah
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor	
1	Sungai Rumbai	0	4	0	4
2	Koto Besar	1	7	0	8
3	Asam Jujuhan	0	5	0	5
4	Koto Baru	0	4	0	4
5	Koto Salak	0	5	0	5
6	Tiumang	4	4	0	8
7	Padang Laweh	1	4	0	5
8	Sitiung	2	0	0	2
9	Timpeh	5	0	0	5
10	Pulau Punjung	5	5	0	10
11	IX Koto	4	4	4	12
<b>Kabupaten Dharmasraya</b>		<b>22</b>	<b>42</b>	<b>4</b>	<b>68</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

### 3.2.8. Kondisi Demografi

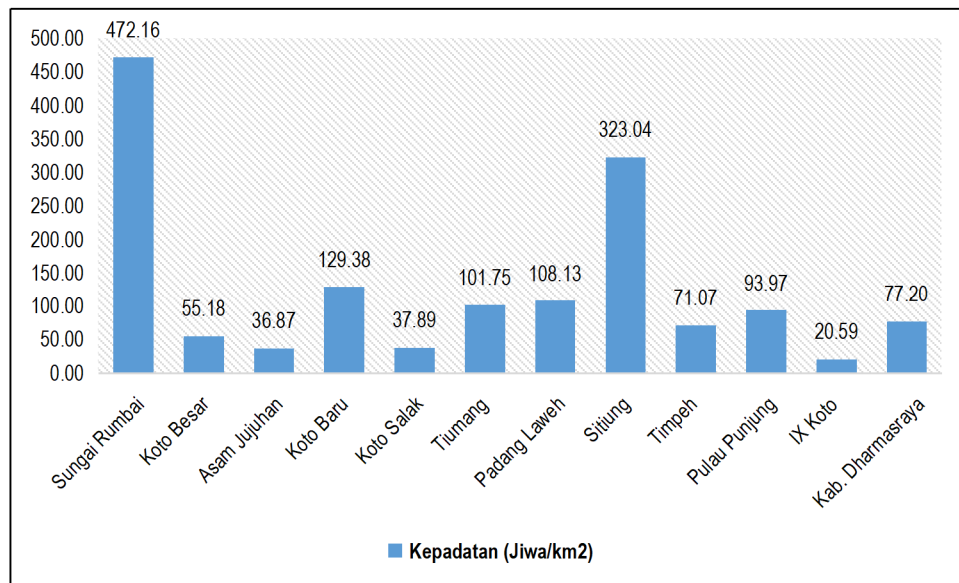
Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS tahun 2020 adalah 288.555 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 2,78%. Dilihat dari rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki terhadap perempuan) menunjukkan di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase Luas (%)	2020		2019		2018	
				Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Sungai Rumbai	47,63	1,61%	22.489	472,16	26.518	556,75	25.535	536,11
2	Koto Besar	488,19	16,49%	26.939	55,18	26.136	53,54	25.879	53,01
3	Asam Jujuhan	257,72	8,70%	9.502	36,87	20.004	77,62	18.736	72,70
4	Koto Baru	251,35	8,49%	32.519	129,38	34.981	139,17	34.405	136,88
5	Koto Salak	464,39	15,68%	17.598	37,89	17.112	36,85	16.956	36,51
6	Tiumang	129,18	4,36%	13.144	101,75	11.775	91,15	11.754	90,99
7	Padang Laweh	59,76	2,02%	6.462	108,13	8.564	143,31	8.175	136,80
8	Sitiung	87,68	2,96%	28.324	323,04	27.118	309,28	26.762	305,22
9	Timpeh	237,93	8,04%	16.909	71,07	15.604	65,58	15.425	64,83
10	Pulau Punjung	482,5	16,29%	45.339	93,97	50.769	105,22	49.103	101,77
11	IX Koto	454,8	15,36%	9.366	20,59	8.998	19,78	8.841	19,44
<b>TOTAL</b>		<b>2.961,13</b>	<b>100%</b>	<b>228.591</b>	<b>77,20</b>	<b>247.579</b>	<b>83,61</b>	<b>241.571</b>	<b>81,58</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2020

Pada tabel di atas, dilihat dari luas wilayah tercatat seluas 2.961,13 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 228.591 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Koto Besar merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 488,19 km<sup>2</sup> atau 16,49% dari total luas wilayah, sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sungai Rumbai yaitu hanya 47,63 km<sup>2</sup> atau 1,61% dari total luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Dilihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu 45.339 jiwa atau 19,83% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Padang Laweh yaitu 6.462 jiwa atau hanya 2,83% dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Sementara dilihat berdasarkan kepadatan penduduk brutto atau kepadatan berdasarkan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Dharmasraya sebesar 77,2 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Sungai Rumbai memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 472,16 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Sungai Rumbai merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan IX Koto yaitu 20,59 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 6. Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020**

Dengan demikian dapat dilihat masing-masing kecamatan memiliki karakter wilayah dan demografi yang berbeda, hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor sejarah pelaksanaan transmigrasi dan perkembangan perekonomian daerah, terutama pada sub sektor perkebunan yang masih menjadi sub sektor andalan dalam mendukung perekonomian daerah, yaitu berasal dari untuk komoditi karet dan sawit, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 8. Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	10.389	10100	20489
5-9	10.049	9898	19947
10-14	10.849	9974	20823
15-19	9.879	9370	19249
20-24	9.560	9038	18598
25-29	9.484	9732	19216
30-34	9.888	10014	19902
35-39	9.380	9565	18945
40-44	8.990	8422	17412
45-49	7.614	7068	14682





Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
50-54	6.358	5690	12048
55-59	5.003	4447	9450
60-64	3.559	3321	6880
65-69	2.473	2348	4821
70-74	1.448	1640	3088
75+	1.387	1654	3041
<b>TOTAL Penduduk</b>	<b>116310</b>	<b>112281</b>	<b>228591</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

### 3.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Dharmasraya.

#### 3.3.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat perekonomian secara makro adalah data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

**Tabel 9. Produk Regional Domestik Bruto Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020**

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Juta Rupiah)	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Juta Rupiah)
1	2016	6.490.285,83	8.437.660,72
2	2017	6.843.182,09	9.054.276,65
3	2018	7.204.465,92	9.697.640,71
4	2019	7.560.324,96	10.344.514,24
5	2020	7.454.968,15	10.242.190,77

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021





Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yakni pada tahun 2016 Rp. 8,437 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp. 10,344 triliun pada tahun 2019 (ADHB). Pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan menjadi Rp. 10,242 triliun atau turun sebesar Rp. 0,1 triliun atau Rp. 102.323.470.000,-. Sedangkan berdasarkan harga konstan Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, menunjukkan kecenderungan penurunan sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut.

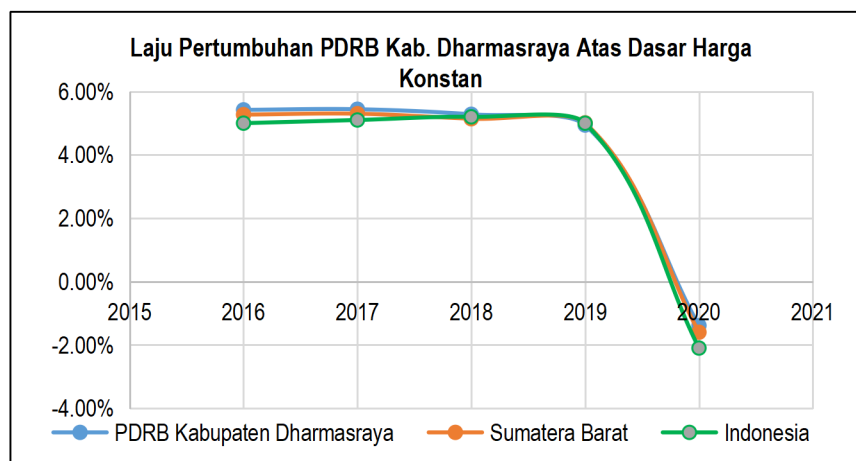
**Tabel 10. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Dharmasraya**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Penurunan 2019 ke 2020
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	5,22	4,01	4,99	2,34	-0,76	3,10
2	Pertambangan dan Penggalian	-9,21	-5,51	-2,23	3,61	0,69	2,92
3	Industri Pengolahan	6,51	4,73	2,44	-4,88	-3,35	-1,53
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,50	4,12	4,14	2,53	-6,52	9,05
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	4,41	2,46	3,79	-2,08	5,87
6	Konstruksi	10,36	8,70	6,81	7,91	-5,31	13,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,91	8,34	6,74	6,97	-0,34	7,31
8	Transportasi dan Pergudangan	8,34	8,42	7,82	8,31	-13,18	21,49
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	9,24	6,89	6,50	6,75	-15,19	21,94
10	Informasi dan Komunikasi	10,31	9,88	8,02	9,13	7,89	1,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,74	2,65	1,26	2,62	0,73	1,89
12	Real Estate	5,65	6,64	4,74	5,41	0,04	5,37
13	Jasa Perusahaan	6,23	2,91	4,64	4,33	-5,67	10,00
14	Administrasi pemerintahan,	4,03	5,16	6,37	6,73	-0,93	7,66



No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	Penurunan 2019 ke 2020
	pertanahan dan jaminan sosial						
15	Jasa Pendidikan	8,67	9,61	8,05	8,54	4,11	4,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	9,13	7,85	7,52	7,11	0,41
17	Jasa Lainnya	10,92	11,35	8,29	9,33	-9,40	18,73
	<b>PDRB Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>5,42</b>	<b>5,44</b>	<b>5,28</b>	<b>4,94</b>	<b>-1,39</b>	<b>6,33</b>
	<b>PDRB Sumatera Barat</b>	<b>5,27</b>	<b>5,30</b>	<b>5,14</b>	<b>5,01</b>	<b>-1,60</b>	<b>6,61</b>
	<b>Nasional</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,10%</b>	<b>5,20%</b>	<b>5,00%</b>	<b>-2,10%</b>	<b>7,10</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021



**Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2020**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

Data pada tabel dan grafik di atas menunjukkan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan dari tahun 2017, dan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar 6,63%. Penurunan terjadi hampir pada semua sektor lapangan usaha. Penurunan pada tahun 2020 dipicu karena pandemic Corona Virus Disease atau Covid-19 yang telah mengganggu aktivitas ekonomi. Sektor ekonomi yang masih menunjukkan pertumbuhan yang masih positif adalah pertambangan dan penggalan (0,69), informasi dan komunikasi (7,89), jasa keuangan dan asuransi (0,73), real estate (0,04), Pendidikan (4,11) serta jasa Kesehatan dan kegiatan sosial (7,11). Namun pada setiap sektor tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Lapangan



usaha yang terdampak paling besar yakni sektor penyediaan akomodasi makan dan minum serta sektor transportasi dan pergudangan yakni sebesar 21,94% dan 21,49%. Sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan yaitu industri pengolahan sebesar 1,53% dari sebelum -4,88% menjadi -3,35%. Selanjutnya pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha.

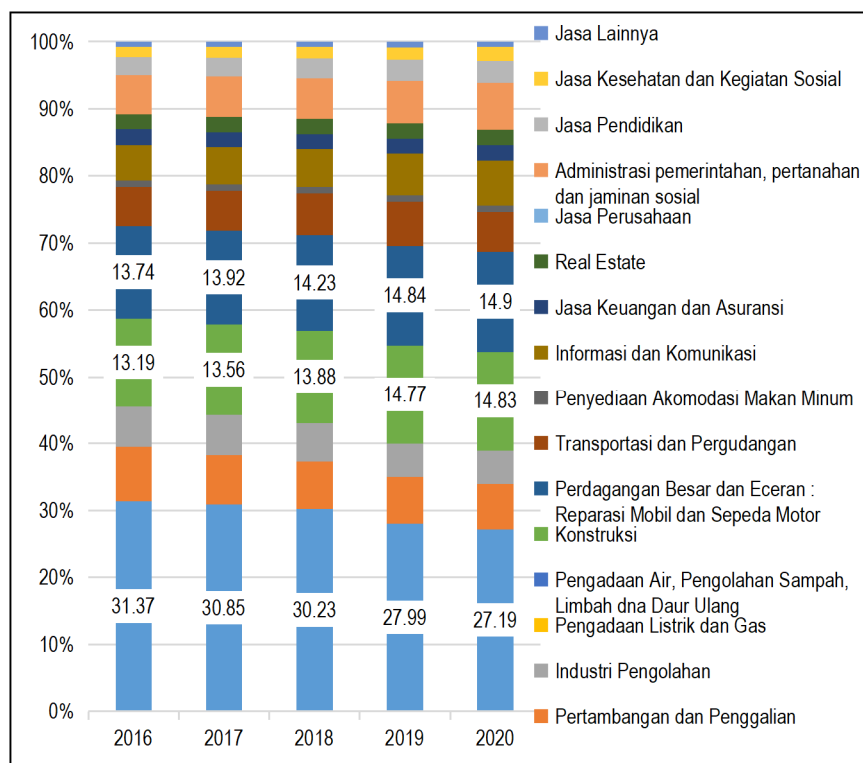
**Tabel 11. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Dharmasraya**

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	31,37	30,85	30,23	27,99	27,19
2	Pertambangan dan Penggalian	8,11	7,44	7,09	7,04	6,74
3	Industri Pengolahan	6,06	6	5,73	4,92	5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi	13,19	13,56	13,88	14,77	14,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,74	13,92	14,23	14,84	14,9
8	Transportasi dan Pergudangan	5,86	6	6,2	6,51	5,96
9	Penyediaan Akomodasi Makan Minum	0,95	0,96	0,98	1,05	0,91
10	Informasi dan Komunikasi	5,3	5,51	5,67	6,16	6,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,24	2,19	2,22	2,29
12	Real Estate	2,21	2,23	2,25	2,29	2,32
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial	5,84	6,05	6,07	6,34	6,94
15	Jasa Pendidikan	2,66	2,76	2,89	3,12	3,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,6	1,65	1,72	1,81	2,02
17	Jasa Lainnya	0,73	0,77	0,81	0,87	0,81

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

Tabel di atas menunjukkan distribusi PDRB di Kabupaten Dharmasraya terbesar adalah di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 27,19%. Sektor selanjutnya yang memberikan kontribusi terhadap ekonomi Kabupaten Dharmasraya adalah sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan

sepeda motor. Gambar di bawah ini memperlihatkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Dharmasraya ditunjang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; serta sektor perdagangan besar dan eceran.



**Gambar 8. Distribusi PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

### 3.3.2. Laju Inflasi

Untuk melihat kondisi kecenderungan fluktuasi harga barang pada umumnya, dengan belum adanya perhitungan inflasi Dharmasraya, meskipun fluktuasi harga provinsi tidak sepenuhnya mewakili fluktuasi harga Kabupaten Dharmasraya, namun adanya keterkaitan ekonomi antar wilayah maka perlu mempedomani angka inflasi Provinsi Sumatera Barat, perkembangan inflasi provinsi Sumatera Barat di tahun 2020 tercatat sebesar 2,11% sedangkan pada tahun sebelumnya (2019) sebesar 1,31%. Jika dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi provinsi Sumatera Barat tahun 2020 berada di atas inflasi nasional. Rendahnya angka inflasi ini karena melambatnya perekonomian sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019.



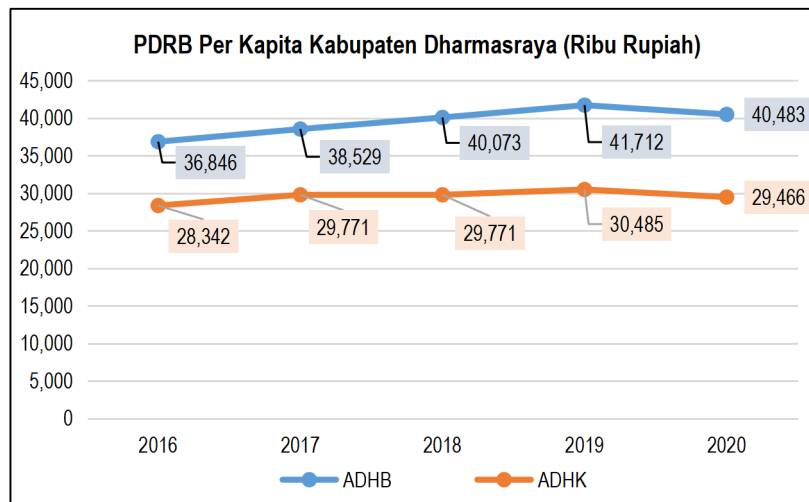
Pandemi Covid-19 berdampak terhadap hampir semua sektor usaha. Melambatnya perekonomian ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

### 3.3.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator makro tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah, dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Trend PDRB per kapita Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PDRB perkapita menurut ADHB maupun ADHK sama-sama mengalami penurunan. PDRB perkapita ADHB pada 2020 sebesar 40,48 juta rupiah, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 41,71 juta rupiah. Sementara PDRB perkapita ADHK pada tahun 2020 mencapai 29,47 juta rupiah, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang sudah sebesar 30,48 juta rupiah. Lebih rinci PDRB perkapita Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 12. Nilai PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Dharmasraya Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), 2016-2020**

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB	8.438	9.054	9.698	10.345	10.242
ADHK	6.490	6.843	7.204	7.560	7.455
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	36.846	38.529	40.073	41,712	40.483
ADHK	28.342	29.771	29.771	30.485	29.466
Jumlah Penduduk (ribu orang)	229	235	242	248	253
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	2,69	2,62	2,98	2,48	2.02
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021					



**Gambar 9. PDRB Per Kapita Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Periode 2016-2020**

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

### 3.3.4. Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;



6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap seluruh pendapatan pada APBD baik berasal dari PAD maupun dari dana transfer pusat dan provinsi. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pola hubungan kemandirian keuangan daerah dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 13. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	➤ 25 - 50	Konsultatif
Sedang	➤ 50 - 75	Partisipatif
Tinggi	➤ 75 - 100	Delegatif

1. Pola hubungan *Instruktif*, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah
2. Pola hubungan *konsultatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah
3. Pola hubungan *partisipatif*, yaitu peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu untuk melaksanakan otonomi daerah
4. Pola hubungan *delegatif*, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.



#### a) Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Selama 5 tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya pernah menghasilkan kemampuan keuangan yang relatif tinggi 2 digit yaitu pada tahun 2017 sebesar 10,43%. Namun kinerja ini tidak mampu dipertahankan, karena pada tahun-tahun berikutnya, kemampuan keuangan Kabupaten Dharmasraya hanya 1 digit saja dan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 kemampuan keuangan Kabupaten Dharmasraya adalah 9,11%, dan turun menjadi 7,74% pada tahun 2019, dan turun menjadi 6,68% pada tahun 2020. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 14. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)**

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Persentase (%)
2016	56.453,46	857.195,93	6,45
2017	98.937,39	949.023,48	10,43
2018	84.116,20	923.540,95	9,11
2019	78.882,92	1.019.358,07	7,74
2020	64.053,09	958.555,53	6,68

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya (Rancangan Teknokratik, RPJMD Kab. Dharmasraya, 2021)

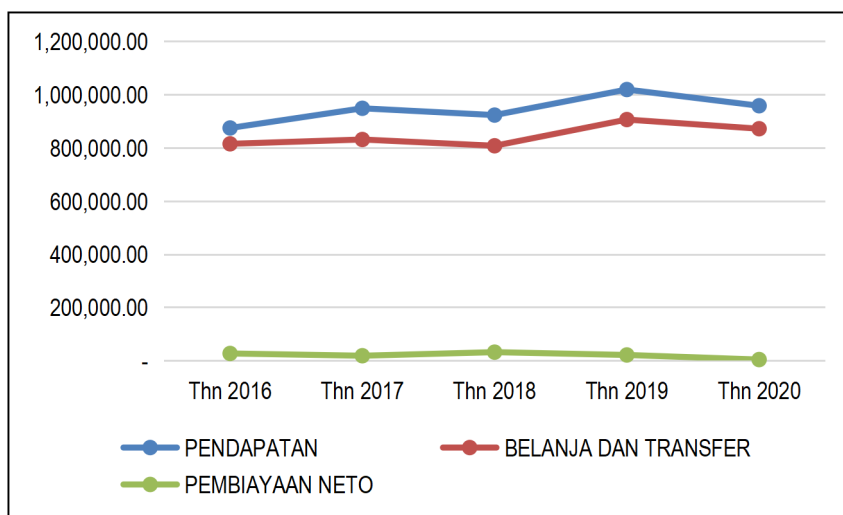
#### b) Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran





yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 10. Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020 (diolah)

Bagian ini menjelaskan mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja serta pembiayaan daerah selama periode 2016 sampai dengan tahun 2020. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan nilai APBD, realisasi APBD terhadap perubahan APBD, serta proporsi APBD.

### 1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Secara keseluruhan nilai pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp875.195,93 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.019.358,07 juta pada tahun 2019, dan turun kembali menjadi Rp958.555,53 juta di tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena kebijakan pemerintah pusat mengurangi jumlah DAU untuk mengatasi kebutuhan dana pemerintah pusat untuk menanggulangi Covid-19.



### (a) Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Besaran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat dijadikan ukuran kemandirian fiskal, jika semakin tahun semakin besar peranan PAD maka tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan maupun sumber lain akan semakin berkurang.

Dilihat dari perkembangan nilai PAD pada tahun 2017, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Jika pada tahun 2016 nilai PAD tercatat sebesar Rp56.453,46 juta rupiah naik menjadi Rp98.937,39 juta pada tahun 2017, namun di tahun berikutnya turun menjadi Rp84.116,20 juta rupiah dan turun lagi menjadi Rp78.882,92 juta di tahun 2019, dan menjadi Rp64.053,09 juta pada tahun 2020.

**(1) Hasil Pajak Daerah**, secara definisi, berdasarkan UU 28/2009 bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan. Selain sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.

Dilihat dari perkembangannya, di tahun 2016 dari 13 jenis pajak yang dilaksanakan, hanya 2 jenis pajak yang mencapai tingkat realisasi tinggi di atas 90%, yaitu pajak restoran dan pajak penerangan jalan, dimana kedua jenis pajak ini memiliki kontribusi cukup besar yaitu 72,8% terhadap total pajak daerah, sedangkan 9 jenis pajak lainnya realisasinya berada di bawah 50%. Misalkan, PBB-P2 dari Rp3,62 juta yang ditargetkan hanya terealisasi sebesar Rp1,54 juta atau sebesar 42,63%.

**(2) Hasil Retribusi Daerah**, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau



badan. Dilihat dari perkembangannya, nilai penerimaan retribusi daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2016 realisasinya tercatat sebesar Rp4.708,62 juta, namun hingga tahun 2019 justru terus menurun hingga menjadi Rp3.054,85 juta dan menjadi Rp1.856,27 juta pada tahun 2020.

- (3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**, sumber pendapatan berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyertaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR.

Dilihat dari perkembangan nilai realisasinya, maka pendapatan jenis ini juga mengalami kecenderungan menurun, yaitu dari Rp4.216,46 juta di tahun 2016 menjadi Rp3.590,31 juta di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan turunnya deviden dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi mengalami peningkatan kembali menjadi Rp 4.063,75 juta pada tahun 2020.

- (4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**, jenis pendapatan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Lain-lain PAD yang sah ini merupakan sumber PAD terbesar dari tahun 2016 hingga tahun 2020, meskipun nilainya cenderung naik, namun dilihat dari perkembangan tahunannya terlihat cukup fluktuatif, jika di tahun 2016 tercatat sebesar Rp35.985,59 juta, nilainya sempat mencapai Rp75.983,33 juta rupiah di tahun 2017, namun turun lagi menjadi Rp40.405,72 juta di tahun 2020.

**(b) Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**(1) DBH pajak/bukan pajak,** Pendapatan daerah dari DBH mulai tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Jika realisasi DBH tahun 2016 sebesar Rp22.848,09 juta rupiah, namun turun menjadi Rp15.147,51 juta pada tahun 2020.

**(2) Dana Alokasi Umum (DAU),** Sesuai dengan peningkatan iklim ekonomi nasional maupun realisasi APBN, maka penerimaan DAU yang diterima oleh Dharmasraya dari tahun ke tahun juga terus meningkat, rata-rata meningkat sekitar 2,46% tiap tahunnya, di tahun 2016 nilainya sebesar Rp507.913,22 juta rupiah dan nilainya mengalami sedikit kenaikan hingga Rp524.888,50 juta rupiah pada tahun 2019, kenaikan ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendanaan lainnya seperti peningkatan belanja dana desa serta pertumbuhan ekonomi nasional yang masih rendah. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan menjadi Rp478.355,77 juta karena kebijakan pemerintah pusat mengurangi alokasi DAU guna menutupi kebutuhan penanggulangan Covid-19.

**(3) Dana Alokasi Khusus (DAK),** Dilihat dari realisasi DAK yang diterima Kabupaten Dharmasraya selalu meningkat sesuai dengan usulan yang disetujui pusat. Tahun 2016 nilainya masih berada pada angka Rp210.035,49 juta rupiah meningkat pesat menjadi Rp237.995,16 juta rupiah di tahun 2020.

**(c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau



Pemerintah Daerah Lainnya., selama periode tahun 2016 sampai 2020 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat.

- (1) **Pendapatan hibah**, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Dharmasraya. Nilai pendapatan hibah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu meningkat, yaitu dari Rp2.985,27 juta rupiah di tahun 2016 menjadi Rp33.699,98 juta rupiah pada tahun 2019, dan turun menjadi Rp22.076,29 juta pada tahun 2020.
- (2) **Bagi hasil pajak dari provinsi**, Perkembangan penerimaan bagi hasil dari provinsi selalu meningkat tiap tahunnya, namun peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2019, dari Rp36.193,54 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi Rp47.598,14 pada tahun 2019, tetapi turun menjadi Rp41.101,03 pada tahun 2020. Kenaikan pada tahun 2019 didorong oleh perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Dharmasraya, baik kendaraan baru maupun kendaraan mutasi dari luar daerah.
- (3) **Dana penyesuaian dan otonomi khusus**, Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. alokasi dana penyesuaian tersebut yang telah ada yaitu penyaluran tunjangan Profesi Guru PNSD, dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, bantuan keuangan kepada desa/nagari dalam bentuk dana desa. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai “uang singgah” dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang berasal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran alokasi dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Sejalan dengan peningkatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas



penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut.

- (4) **Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya,** merupakan dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat khusus maka kabupaten dapat mengaplikasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya.

## 2) **Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan serta prasarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan Mandatory Spending diamanatkan untuk pemenuhan belanja Pendidikan 20%, belanja Kesehatan 10%, belanja Alokasi Dana Desa 10% dan belanja Infrastruktur sebesar 25%, oleh karenanya Pemerintah Daerah tahun ketahun terus berupaya untuk memenuhi dan mempertahankan sesuai dengan ketentuan tersebut.

### (a) **Realisasi Belanja dan Transfer**

Realiasi belanja Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari Rp 804.052,99 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 823.724,60 juta pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,61%. Disamping itu, Transfer Bagi Hasil ke Desa menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2016 jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa berjumlah Rp77.828,61 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp107.270,60 juta pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 8,35%. Akibatnya, jumlah Belanja dan Transfer Bagi Hasil Desa mengalami peningkatan dari



Rp881.881,60 juta pada tahun 2016 menjadi Rp930.995,20 juta pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,36%.

Secara umum kinerja Belanja Kabupaten Dharmasraya relatif kurang baik karena pertumbuhan rata-rata pertahun dari Belanja Pegawai jauh lebih tinggi dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Pegawai meningkat dari Rp355.126,50 juta pada tahun 2016 menjadi Rp417.967,34 juta pada tahun 2020, atau meningkat rata-rata sebesar 4,16% pertahun, sedangkan Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan dari Rp166.760,73 juta pada tahun 2016 menjadi Rp207.300,13 juta pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 turun menjadi Rp156.875,64 juta. Dengan demikian, dalam kurun 5 tahun terakhir tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar minus 1,52% per tahun. Jumlah Belanja Modal turun dari Rp265.428,16 juta pada tahun 2016 menjadi Rp226.598,09 juta pada tahun 2019 dan menjadi Rp184.997,90 juta pada tahun 2020, atau menurun rata-rata sebesar minus 8,63% pertahun. Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang lebih rendah dibandingkan dengan Belanja Pegawai seperti ini harus dirubah pada masa datang dengan membuat berbagai kebijakan.

Penurunan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang terjadi pada tahun 2020 terutama untuk mengatasi kebutuhan dana mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan belanja yang signifikan dari Belanja Tak Terduga pada tahun 2020, yang meningkat menjadi Rp154,67 juta pada tahun 2020, padahal tahun 2019 hanya berjumlah Rp24.924,27 juta. Tabel 3.4 berikut menyajikan perkembangan realisasi belanja dan transfer Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – tahun 2020.

#### **(b) Proporsi Elemen Belanja**

Pertumbuhan rata-rata pertahun dari Belanja Pegawai yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan diatas, mengakibatkan proporsi Belanja Pegawai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,76% rata-rata pertahun. Jika pada tahun 2016, proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Dharmasraya sebesar 40,27%, dan turun menjadi 44,89% pada tahun 2020. Sebaliknya, proporsi Belanja Barang dan Jasa naik dari 18,91% pada tahun 2016 menjadi 20,00%, dan pada tahun 2020



turun menjadi 16,85% pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar minus 2,84%. Proporsi Belanja Modal juga mengalami penurunan dari 30,10% pada tahun 2016, menjadi 19,87% pada tahun 2020. Peningkatan proporsi pengeluaran daerah juga terjadi untuk Transfer Bagi Hasil ke Desa, yaitu dari 8,83% pada tahun 2016, menjadi 11,52% pada tahun 2020.

**(c) Pembiayaan daerah dan Silpa tahun berjalan**

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan yang dikelola oleh daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung bersifat fluktuatif. Pengeluaran Pembiayaan untuk penambahan Penyertaan Modal hanya terjadi sebesar Rp3.716,00 pada tahun 2017 dan Rp2.500,00 pada tahun 2019.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Berkenaan, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Silpa tahun 2016 nilainya berkisar berjumlah Rp26.671,81 juta dan turun menjadi Rp3.893,45 juta pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa pengelolaan belanja Kabupaten Dharmasraya dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

**3) Neraca Daerah**

Analisis kinerja Neraca Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 – tahun 2020 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 86,57%, 3,22%, dan 1,06% sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2020.

Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp2.119.569,75 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp2.429.453,623 juta pada tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,47%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar.



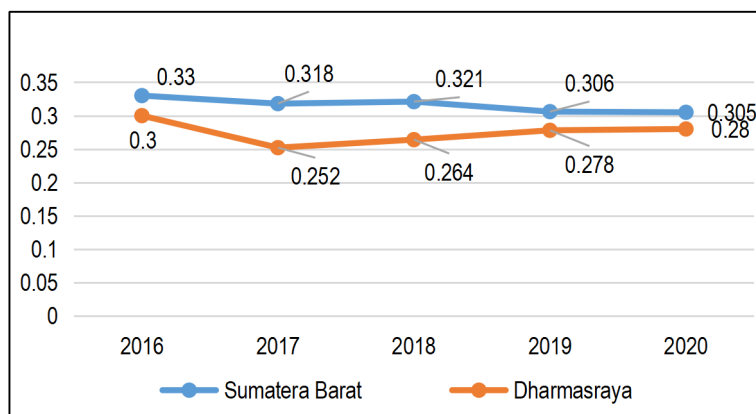


Dari 4 sumber peningkatan aset Kabupaten Dharmasraya tersebut, pertumbuhan jumlah Aset lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Aset Lainnya adalah 7,98%, yaitu dari Rp175.066,84 juta pada tahun 2016 dan menjadi Rp237.979,05 juta pada tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah Investasi Jangka Panjang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,11%, yaitu dari Rp21.236,00 juta pada tahun 2016 dan menjadi Rp24.952,00 juta pada tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Aset Tetap dengan pertumbuhan 3,02% dan Aset Lancar sebesar 3,01%.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah ekuitas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah kewajiban, yaitu 3,47% berbanding 3,72%. Namun karena komposisi jumlah ekuitas jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan jumlah kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas.

### 3.3.5. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk dapat mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antara kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.



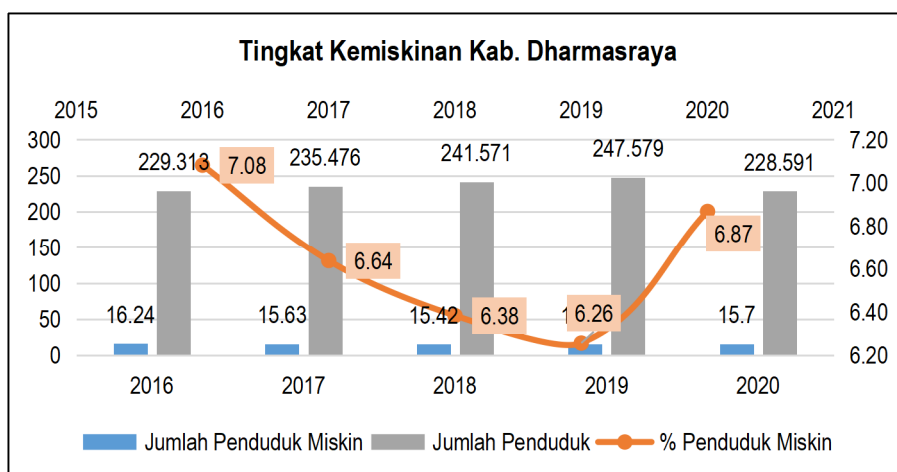
Gambar 11. Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat 2016-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar di atas menunjukkan angka indeks gini Kabupaten Dharmasraya berada dibawah indeks gini Provinsi Sumatera Barat namun cenderung mengalami kenaikan.

### 3.3.6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 menunjukkan trend penurunan hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terlihat adanya peningkatan persentase penduduk miskin. Kondisi ini masih diindikasikan dipicu oleh adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. Pada gambar berikut dapat dilihat tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya.



**Gambar 12. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Jumlah Penduduk Dalam Ribuan Orang)**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

### 3.3.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi yakni umur Panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;
3. IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum.



Sejak tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

IPM Kabupaten Dharmasraya peringkat ke 10 dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pada table berikut dapat dilihat peringkat IPM Kabupaten Dharmasraya terhadap 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020**

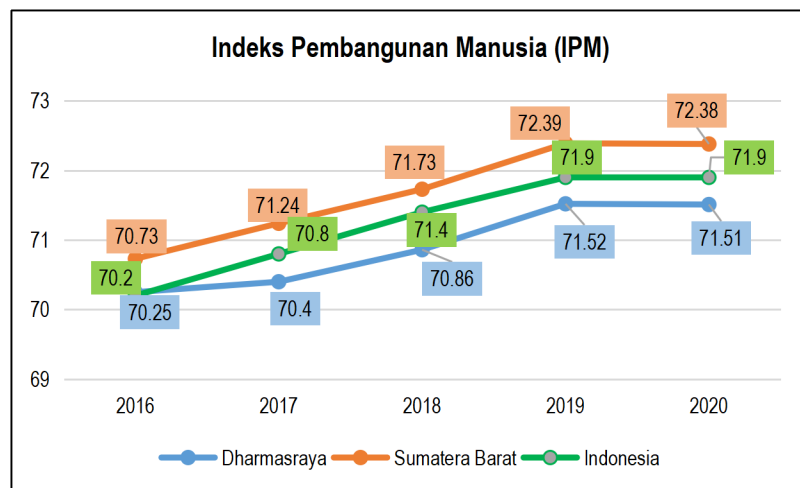
No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp. 000)	IPM	Rangking
	<b>Kabupaten</b>						
1	Kepulauan Mentawai	64,73	12,82	7,09	936,93	61,09	19
2	Pesisir Selatan	70,86	13,32	8,26	1.104,21	69,90	12
3	Solok	68,58	13,04	7,26	1.053,71	69,08	14
4	Sijunjung	66,21	12,37	8,11	1.053,70	67,74	17
5	Tanah Datar	69,94	14,33	8,61	1.108,02	72,33	9
6	Padang Pariaman	68,79	13,67	7,87	599,29	70,61	11
7	Agam	72,37	13,87	8,96	1.065,72	72,46	8
8	Lima Puluh Kota	69,79	13,29	7,99	1.049,04	69,47	13
9	Pasaman	67,40	12,80	8,09	964,20	66,64	18
10	Solok Selatan	67,81	12,71	8,28	1.186,05	69,04	15
<b>11</b>	<b>Dharmasraya</b>	<b>71,33</b>	<b>12,43</b>	<b>8,47</b>	<b>1.304,49</b>	<b>71,51</b>	<b>10</b>
12	Pasaman Barat	67,82	13,61	8,19	1.013,42	68,49	16
	<b>Kota</b>						
13	Padang	73,65	16,52	11,58	1.700,49	82,82	1
14	Solok	73,61	14,32	11,03	1.472,74	78,29	4
15	Sawahlunto	70	13,17	10,17	1.355,34	72,64	7
16	Padang Panjang	72,82	15,06	11,62	1.726,58	77,93	5
17	Bukittinggi	74,38	14,97	11,33	1.657,94	80,58	2



No	Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Rp. 000)	IPM	Rangking
18	Payakumbuh	73,74	14,26	10,73	1.562,19	78,90	3
19	Pariaman	70,28	14,53	10,59	1.497,75	76,90	6
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>69,47</b>	<b>14,02</b>	<b>8,99</b>	<b>1.235,05</b>	<b>72,38</b>	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

Capaian IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2019 meningkat dari 70,25 menjadi 71,52. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi dan Nasional, nilai IPM Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia. Nilai IPM Kabupaten Dharmasraya dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 13. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat**

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021)

### 3.3.8. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks pembangunan gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Jika IPG mendekati 100,

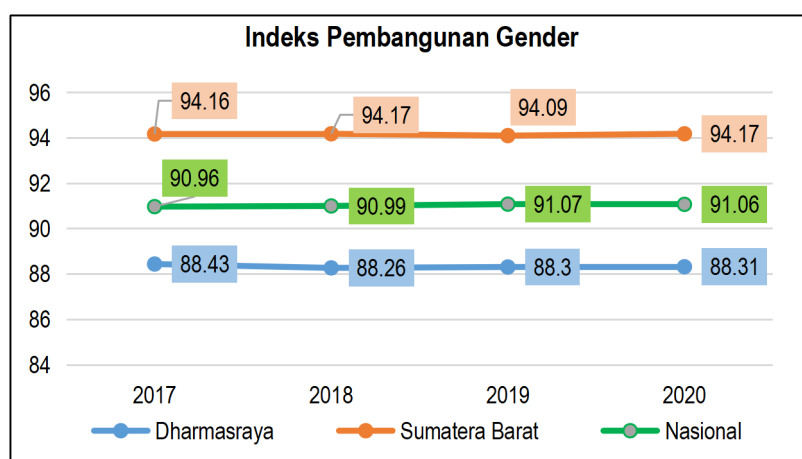


maka semakin kecil ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, jika IPG menjauhi 100 maka semakin besar ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Berikut dapat dilihat IPG Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 16. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Dharmasraya**

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
IPG Dharmasraya	88,43	88,26	88,3	88,31
IPG Sumatera Barat	94,16	94,17	94,09	94,17
IPG Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020



**Gambar 14. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2020**

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021)

Berdasarkan data pada table di atas, terlihat bahwa indeks pembangunan gender Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah IPG Provinsi Sumatera Barat dan nasional yang sudah berada di atas 90. Berdasarkan data statistik, IPG Kabupaten Dharmasraya terendah di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 17. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020**

No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	Rangking
<b>KABUPATEN</b>						
1	Kepulauan Mentawai	89,13	89,45	89,33	89,59	18
2	Pesisir Selatan	94,98	94,62	95,16	95,12	10
3	Solok	95,73	96,20	96,17	96,18	8



No	Kabupaten	2017	2018	2019	2020	Rangking
4	Sijunjung	93,4	93,21	93,01	93,03	14
5	Tanah Datar	98,51	97,58	97,55	97,57	5
6	Padang Pariaman	93,79	93,07	92,92	92,69	15
7	Agam	97,16	96,92	96,84	97,01	7
8	Lima Puluh Kota	94,62	94,93	94,77	95,03	12
9	Pasaman	93,00	92,61	92,59	92,45	16
10	Solok Selatan	94,54	94,92	95,03	95,08	11
11	Dharmasraya	88,43	88,26	88,3	88,31	19
12	Pasaman Barat	88,97	89,59	90,06	90,26	17
<b>KOTA</b>						
13	Padang	93,77	93,77	93,48	93,64	13
14	Solok	96,70	97,24	97,13	97,05	6
15	Sawahlunto	95,50	95,68	95,51	95,48	9
16	Padang Panjang	97,76	97,77	97,50	97,70	4
17	Bukittinggi	98,78	98,80	98,77	98,89	1
18	Payakumbuh	98,53	98,54	98,51	98,46	3
19	Pariaman	98,95	98,61	98,19	98,49	2
	<b>Sumatera Barat</b>	<b>94,16</b>	<b>94,17</b>	<b>94,09</b>	<b>94,17</b>	
	<b>Nasional</b>	<b>90,96</b>	<b>90,99</b>	<b>91,07</b>	<b>91,06</b>	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

### 3.3.9. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan dalam kurun waktu 2016-2020 ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini tercermin dari meningkatnya capaian angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK maupun APM merupakan dua indikator yang menunjukkan keberhasilan bidang pendidikan untuk melihat tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang menduduki bangku sekolah, semakin tinggi angka APK atau pun APM maka semakin baik pembangunan bidang pendidikan. APK menunjukkan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Sedangkan APM merupakan menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Pada table berikut dapat dilihat capaian angka melek huruf, harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 sampai tahun 2020.



**Tabel 18. Capaian Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata Lama Sekolah, APK dan APM Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020**

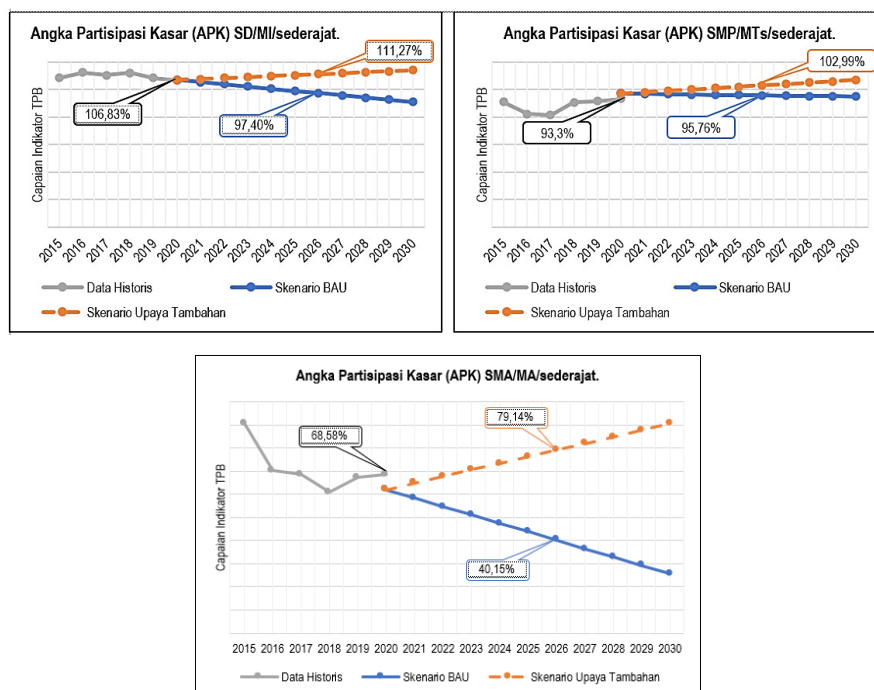
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf (AMH)	92,74	90,93	89,21	90,34	93,42
2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12,39	12,4	12,41	12,42	12,43
3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
4	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	- APK SD/MI	112,43	110,44	112,06	108,54	106,83
	- APK SMP/MTs	82,17	81,36	90,62	91,7	93,3
	- APK SMA/MA	70,18	68,73	61,1	67,41	68,58
5	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	- APK SD/MI	98,24	98,87	99,31	99,24	99,04
	- APK SMP/MTs	72,61	73,88	77,17	76,88	76,76
	- APK SMA/MA	54,36	56,77	55,55	54,76	56,85

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dari total penduduk berusia 15 tahun ke atas di Dharmasraya. Untuk kondisi 2016 menunjukkan angka 92,74% dan capaian ini menurun jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (2011 : 97,27; 2012 : 97,29; 2013 : 97,33; 2014 : 97,48; 2015 : 97,53, Sumber: RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021). Kondisi tersebut menunjukkan hanya sedikit saja masyarakat yang buta huruf atau kurang dari 7% namun meningkat jika dibandingkan 2011 hingga 2015 yang hanya kurang dari 3%. Capaian 2016-2020 ini menunjukkan penurunan sampai tahun 2017 dan 2018. Namun kemudian terus meningkat pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mencapai 93,42%. Capaian ini masih harus ditingkatkan, mengingat target yang sudah ditetapkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah 96,1%. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintahan Kabupaten Dharmasraya pada periode selanjutnya. Sedangkan APK SMA, pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan sampai angka 61,1%. Dan selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami peningkatan hingga mencapai 68,58% pada tahun 2020.

Untuk angka rata-rata lama sekolah menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 telah mencapai 8,47 tahun. Sedangkan capaian APK dan APM secara umum dari tahun 2016 hingga tahun 2020 relatif fluktuatif. Di semua jenjang pendidikan

SD/MI, SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA menunjukkan nilai APK yang masih belum memenuhi target tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Nilai APK SD/MI terus mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sedangkan target TPB yang harus dicapai adalah 114,09%. Untuk APK SMP/MTs, walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020 namun masih belum mencapai target. Sedangkan APK SMA/MA/Sederajat jika dilihat perbandingan angka capaian 2016 terhadap tahun 2020 cenderung menurun. Berikut dapat dilihat skenario capaian APK dan APM SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Dharmasraya.



**Gambar 15. Skenario Capaian APK SD/MI/ sederajat; SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/MA/ Sederajat Terhadap Target TPB/SDGs**

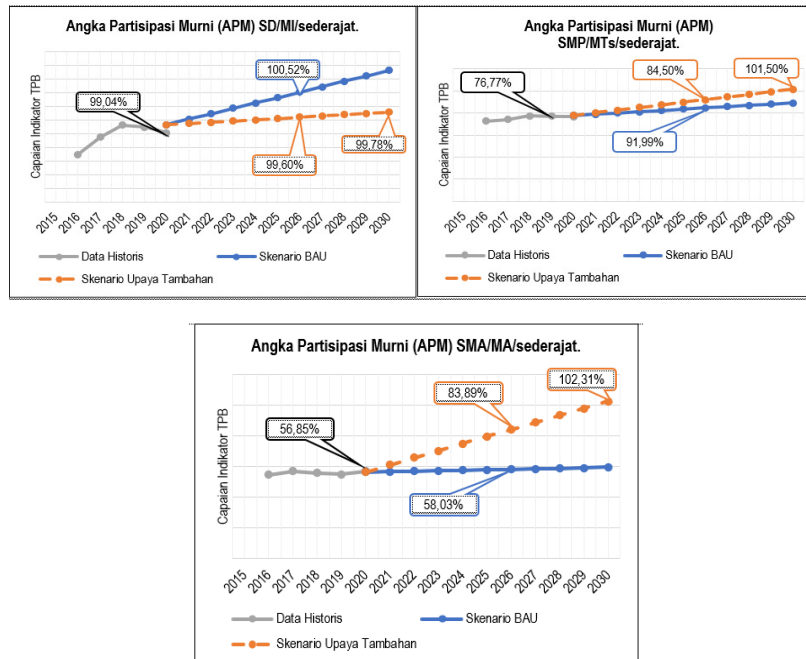
(Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021)

Berdasarkan grafik skenario di atas dapat dilihat bahwa jika tidak ada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan APK, maka capaian Kabupaten Dharmasraya cenderung menurun dan menjauhi target tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga gap capaian akan terus melebar terhadap target. Sedangkan APM untuk SD/MI/ sederajat cenderung menunjukkan peningkatan dan dapat mencapai target TPB/SDGs dengan scenario business as usual (BAU). Sedangkan APM SMP/MTs/ sederajat dan APM





SMA/MA/ sederajat menunjukkan peningkatan namun pada kondisi BAU belum dapat mencapai target yang ditetapkan TPB/SDGs. Grafik capaian APM di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 16. Skenario Capaian APM SD/MI/ sederajat; SMP/MTs/ Sederajat dan SMA/MA/ Sederajat Terhadap Target TPB/SDGs**

(Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021)

### 3.3.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Dharmasraya menunjukkan adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2017 TPAK di Kabupaten Dharmasraya sebesar 64,53 persen, kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 tercatat sebesar 72,72 persen atau dengan kata lain, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 72 sampai 73 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja. TPAK Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 19. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan**

No	Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja	47,88	52,12	47,37	52,63
	Bekerja	47,95	52,05	47,43	52,57
	Pengangguran Terbuka	46,3	53,7	46,27	53,73



No	Jenis Kegiatan	2017	2018	2019	2020
2	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	52,21	42,79	50,5	49,5
	Sekolah	54,98	45,02	49,85	50,15
	Mengurus Rumah Tangga	50,47	49,53	52,14	47,86
	Lainnya	54,21	45,69	42,94	57,06
	Jumlah	49,33	50,67	48,26	51,74
3	<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>	64,53	68,37	70,17	72,72
4	<b>Tingkat Pengangguran</b>	3,69	3,94	5,08	5,31

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2020

### 3.3.11. Kesehatan

#### 1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan

Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi (usia dibawah 1 tahun) dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

**Tabel 20. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Dharmasraya**

Bidang Urusan (Indikator)	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi	1,75	3,23	2,56	2,44	2,31
Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun)	7	12	10	9	9
Jumlah Kelahiran Hidup	4056	3671	3911	3854	3895
Angka Kematian ibu melahirkan (AKI)	99	217	102	156	77

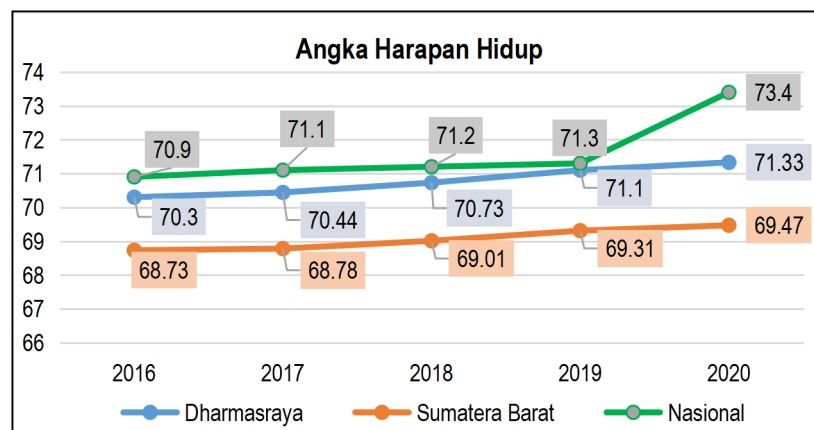
Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, angka kematian bayi masih tergolong tinggi, AKB tertinggi tercatat sebesar 17,95 di tahun 2010, dan terendah pada angka 5,86 di tahun 2011. Masih relatif tingginya AKB ini perlu menjadi perhatian khusus ke depan. Dengan banyaknya kejadian kasus kematian bayi ini membutuhkan perhatian khusus dan strategi ke depan untuk menekan AKB sekaligus menekan jumlah kematian bayi, baik dengan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan (bidan dan dokter), penanganan komplikasi kebidanan serta peningkatan kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kondisi kehamilannya kepada tenaga Kesehatan.

#### 2. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka usia harapan hidup penduduk di Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 telah melampaui angka usia harapan hidup Provinsi

Sumatera Barat. Pada tahun 2020 angka usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya mencapai 73,4 tahun, sedangkan angka usia harapan hidup provinsi pada tahun 2020 sebesar 69,47 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di Kabupaten Dharmasraya telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 17. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020**

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021)

### 3.3.12. Potensi Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Dharmasraya yang memiliki penduduk multi etnis menjadi salah satu potensi kekayaan budaya yang bisa dikembangkan, salah satunya melalui event budaya yang dapat dijadikan daya tarik kunjungan wisata dan pelestarian budaya yang ada di Dharmasraya. Pembangunan bidang kebudayaan saat ini telah berjalan dengan baik. dengan adanya berbagai etnis di Kabupaten Dharmasraya memungkinkan terjadinya akulturasi budaya sehingga budaya masyarakat akan semakin berkembang menuju kebaikan. Budaya merupakan ujung dari peradaban manusia, maka dengan berbagai campuran budaya yang ada diharapkan hal-hal yang baik dari budaya masing-masing etnis akan dapat mengembangkan masyarakat Dharmasraya menjadi lebih baik. Dengan adanya keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Dharmasraya baik berupa yang tampak (*tangible*) maupun yang tidak tampak (*intangible*) perlu mendapatkan perhatian

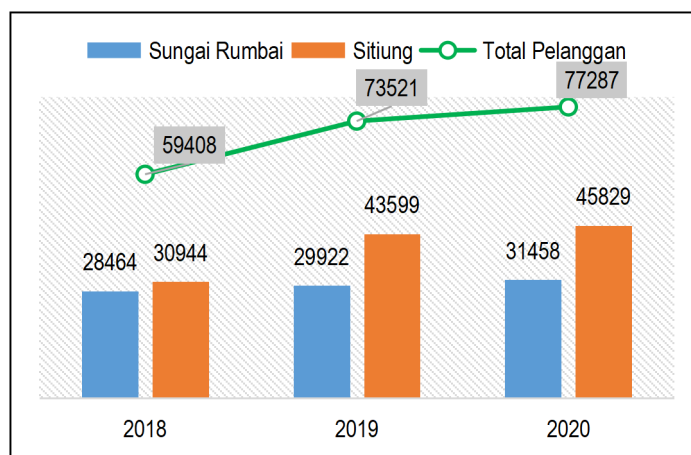
yang lebih dimasa yang akan datang karena banyaknya peninggalan budaya yang ada di Dharmasraya sehingga identitas Dharmasraya dapat dimunculkan.

Di Kabupaten Dharmasraya peran sektor pariwisata dalam pembangunan ekonomi masih belum optimal, tempat-tempat wisata yang ada belum dikembangkan dan dikelola dengan serius. Oleh karena itu, sampai saat ini, Kabupaten Dharmasraya belum mempunyai hotel berbintang.

### 3.4. Aspek Pelayanan Umum

#### 3.4.1. Jaringan Listrik

Pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Dharmasraya terus ditingkatkan. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, sehingga jumlah pelanggan listrik juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan akan terus diperluas di seluruh kecamatan sehingga seluruh masyarakat akan mendapatkan aliran listrik yang sangat berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari sekaligus menunjang perekonomian masyarakat. Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan IX Koto sampai tahun 2014 sudah dimasuki listrik oleh PLN walaupun belum secara keseluruhan, sehingga sangat diharapkan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan listrik supaya daerah tersebut lebih cepat berkembang.



Gambar 18. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Dharmasraya

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2021)



Jumlah pelanggan listrik di Dharmasraya sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 77.287 pelanggan. Dari jumlah itu, 45.829 pelanggan tercatat sebagai pelanggan di PLN Ranting Sitiung dan sisanya yaitu 31.458 pelanggan tercatat sebagai pelanggan di PLN Ranting Sungai rumbai.

### 3.4.2. Air Bersih

Pelayanan di bidang air bersih yang dipercayakan kepada PDAM sampai dengan tahun 2018 baru mampu melayani Sebagian kecil masyarakat di Dharmasraya. Indikasi ini dapat ditunjukkan dengan jumlah unit pengelola air bersih yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya hanya berada di Kecamatan Pulau Punjung dan Sitiung. Sedangkan untuk Kecamatan Sungai Rumbai dan Koto Baru tidak beroperasi.

Jumlah pelanggan air PDAM Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 tercatat sejumlah 1327 pelanggan dimana didominasi oleh pelanggan rumah tangga yaitu sebesar 1.285 pelanggan, 25 pelanggan social dan 7 pelanggan dari instansi pemerintah.

Air yang disalurkan pada tahun 2018 adalah sebesar 99.999 m<sup>3</sup>. Sejumlah 94.954 m<sup>3</sup> disalurkan untuk pelanggan rumah tangga dan sisanya 5.045 m<sup>3</sup> disalurkan untuk pelanggan social dan instansi pemerintah. Nilai yang dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar 280.730.700 rupiah. 257.560.700 rupiah dihasilkan dari pelanggan rumah tangga dan sisanya 23.170.000 rupiah dihasilkan dari pelanggan social dan instansi pemerintah.

Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem penyediaan air minum perpipaan ini ada yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun nagari setempat. Sistem perpipaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih dibawah pengelolaan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan belum dapat dikatakan PDAM tetapi masih bersifat BPAM (Badan Pengelolaan Air Minum) Sistem non perpipaan pada umumnya dikelola secara individu oleh masyarakat yang pada umumnya tidak dilayani oleh perpipaan melalui sumur gali, system penampung hujan (SPA), sumur pompa tangan dan lain-lain.

Sistem pelayanan air bersih bagi masyarakat menggunakan dua system, yakni system perpipaan dan sistem non perpipaan. Sistem non perpipaan menggunakan sumur



gali dan tingkat pelayanan sistem ini mencapai 58,62%. Manajemen pengelolaan SPAM perpipaan Sebagian besar dikelola oleh SPAM Pamsimas dan unit pelayanan air minum pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun pada wilayah pedesaan terdapat SPAM perpipaan yang dikelola oleh masyarakat Nagari/Jorong. Tingkat pelayanan Air Minum di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 terlihat pada table berikut.

**Tabel 21. Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Dharmasraya**

No	Sistem Pelayanan	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	% Pelayanan
	Sistem Perpipaan		
1	Dikelola UPTD	7.525	3,07
2	SPAM Pamsimas	32.452	14,52
3	Dikelola Nagari/Jorong	2.095	0,86
	Sistem Non Perpipaan		
1	Sumur Gali	149.585	58,62
Sumber : DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2019			

Pelayanan air minum melalui SPAM Pamsimas terus meningkat setiap tahunnya. Program pembangunan SPAM oleh Pamsimas di Kabupaten Dharmasraya ini dilakukan setiap tahunnya dengan tingkat pelayanan yang bervariasi. Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan pembangunan 17 unit SPAM Pamsimas yang mampu melayani 2.473 penduduk atau sekitar 1,18% dari jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Dengan adanya penambahan pembangunan SPAM Pamsimas ini diharapkan nantinya akan meningkatkan pelayanan penyediaan air minum yang layak kepada masyarakat. Pada Tahun 2019, tingkat pelayanan air minum sistem perpipaan mencapai 17%.

### 3.4.3. Sistem Jaringan Air Kotor dan Pengolahan Air Limbah

Permukiman masyarakat merupakan sumber pencemar air yang tergolong kepada limbah domestik berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan. Sumber limbah domestik umumnya berasal dari daerah permukiman penduduk. Limbah domestik berupa limbah cair dan limbah padat dari rumah tangga pun dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap kondisi sumber air dan kualitas air. Kondisi fasilitas pengolahan air limbah domestik pada perumahan dan permukiman penduduk di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah yang memadai. Khusus untuk rumah yang berada pada kompleks perumahan air limbah yang dihasilkan dari kamar mandi dan dapur disalurkan langsung ke drainase yang ada dipekarangan



rumah warga. Sedangkan air limbah dari closet disalurkan ke septic tank. Untuk rumah yang ada di permukiman penduduk, air limbah domestik biasanya akan ditampung pada bak penampungan di belakang rumah seperti kolam sederhana dan biasanya tidak dialirkan ke badan air dan dibiarkan saja meresap ke dalam tanah.

Pembuangan air limbah di Kabupaten Dharmasraya semuanya menggunakan sistem setempat, data statistik kesejahteraan rakyat kabupaten Dharmasraya tahun 2020 menunjukkan 80% penduduk sudah memiliki Tangki Septik, namun tidak diketahui apakah tangki septik tersebut layak sesuai standar keamanan lingkungan. Sedangkan 20% lainnya memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan sendiri atau bersama.

Hingga tahun 2019, Kabupaten Dharmasraya telah memiliki sarana IPAL Komunal sebanyak 11 (sebelas) unit dimana 3 (tiga) unit dibangun pada tahun 2019, 7 (tujuh) unit dibangun pada tahun 2018, serta 1 (satu) unit dibangun pada tahun 2017. Sumber pendanaan pembangunan IPAL pada tahun 2017 berasal dari APBN, tahun 2018 pendanaan 2 (dua) unit IPAL berasal dari APBN dan 5 (lima) unit dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan tahun 2019 seluruh pendanaan berasal dari DAK. Ketersediaan sarana IPAL Komunal Skala Permukiman belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga pembangunan IPAL komunal dibutuhkan terus bertambah. Kecamatan IX koto dan Asam Jujuhan merupakan wilayah dengan masyarakat yang menggunakan sungai sebagai fasilitas MCK. Meskipun di Kecamatan fasilitas MCK sebagian besar telah milik sendiri atau komunal, namun saluran akhir limbah domestiknya masih cenderung dibuang ke badan air melalui saluran terbuka yang dapat menyerap ke tanah atau bahkan langsung ke badan air. Hal inilah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber air baik itu air sungai, embung ataupun air tanah/sumur.

Selain limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, terdapat sumber limbah lainnya yakni dari kegiatan industri atau jasa lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup terhadap 23 (dua puluh tiga) usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan pada tahun 2019. Kegiatan yang diawasi tersebut terdiri dari perkebunan dan Industri Kelapa Sawit, Industri Pengolahan Karet Mentah, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), fasilitas pelayanan kesehatan, stone crusher, pertambangan, instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan



HPHTI. Dari hasil pengawasan terhadap 23 (dua puluh tiga) usaha dan/atau kegiatan, 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan sedang berhenti beroperasi sehingga evaluasi ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air hanya dilakukan terhadap 22 (dua puluh dua) usaha dan/atau kegiatan dengan tingkat ketaatan sebesar 5% tidak taat terhadap pengelolaan dan pengendalian pencemaran air, 50% kurang taat dan hanya sebesar 45% yang taat.

#### 3.4.4. Sistem Persampahan

Sistem dan infrastruktur persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum dikelola sepenuhnya dan pengelolaan masih bersifat lokal. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya dapat digolongkan menjadi

- a. Sampah yang tidak terproses (Sampah yang dibuang ke sungai/kali/Saluran drainase lainnya),
- b. Sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat dengan cara dibakar, dibuang ke dalam lubang dan ditutup kembali atau sampah dibuang ke dalam lobang dan tidak ditutup kembali.
- c. Sampah yang terangkut ke TPA atau Akses Layak dimana sampah yang bersumber dari rumah tangga dikumpulkan dan diantarkan ke TPS yang sudah tersedia ataupun sampah dengan jenis tertentu yang dikumpulkan oleh kolektor informal yang mendaur ulang.

Pengelolaan limbah padat dilakukan dengan penimbunan sampah di TPA Robusa V yang terletak di Kecamatan Sitiung. TPA ini berjenis sanitary landfill dengan luas 6 Ha dan kapasitas 16.000 m<sup>3</sup>. Dengan volume eksisting 11 m<sup>3</sup>. Secara sarana dan prasarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan, pada Kecamatan Pulau Punjung telah terbentuk system pengelolaan sampah tetapi belum optimal. Dari TPS sampah pada beberapa titik lokasi di Kecamatan Pulau Punjung dilakukan penjemputan oleh truk sampah Dinas Lingkungan Hidup dan dilakukan penimbunan pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah yang ada di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung yang berjarak 20 km dari Kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan pada Kecamatan Sungai Rumbai, sistem pengelolaan sampah masih dikelola oleh nagari atau desa, dimana nagari





tersebut melakukan penjemputan sampah pada beberapa titik lokasi dan dilakukan pembuangan pada TPA sementara (yakni dilakukan penimbunan pada suatu lokasi).

Selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya, saat ini untuk lingkup Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung telah berjalan sistem pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan dengan pusat sistem pengelolaan sampah domestik Kabupaten Dharmasraya pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah yang ada pada Nagari Gunung medan Kecamatan Sitiung. Konsep pengelolaan sampah yang akan dan telah terbangun pada Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan program Gerakan Nagari Bersih, Sehat, Teduh dan Indah (GENARSIH SEHATI) antara lain:

## 1. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah yang telah dan akan dilakukan:

- a. Pembatasan timbulan sampah (*Reduce*): Dalam upaya untuk mengurangi terjadinya timbulan sampah maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Himbuan Penyediaan Hidangan Rapat Bebas Kemasan Plastik dan Surat Edaran tentang Himbuan Penggunaan Tumbler/Botol Minuman dan Penyediaan Tempat Sampah di Mobil Dinas.
- b. Pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*): dengan program GENARSIH SEHATI, dimana kita memberdayakan kelompok dasawisma untuk menggerakkan masyarakat memanfaatkan kembali sampah, seperti kaleng bekas menjadi tong sampah, kemasan detergen atau minyak goreng untuk pot bunga atau sayuran dipekarangan rumah, dan lain-lain.
- c. Pendaauran ulang sampah (*Recycle*); mendaur sampah plastik menjadi hiasan (*ecobrick*), atau menjadi peralatan rumah tangga (tas belanja, sajadah, tikar, tempat minuman, tempat tisu, dll) yang selain untuk pemakaian pribadi bisa juga bernilai ekonomi.

## 2. Penanganan Sampah

- a. Pemilahan sampah

Dengan adanya GENARSIH SEHATI sampah sudah dan akan dilakukan pemilahan dari sumbernya (rumah tangga, perkantoran dan



pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya).

Pemilahan yang telah dan akan dilakukan yaitu:

- Sampah organik dimanfaatkan sebagai kompos dengan menggunakan komposter atau dengan membuat lobang di belakang atau di samping rumah, dan atau untuk pakan budidaya maggot/ *Black Soldier Fly* (BSF). Maggot sudah dibudidayakan di Nagari Gunung Medan.
- Sampah anorganik yang mempunyai nilai guna dijual ke Bank Sampah dan TPS 3R.
- Sampah anorganik yang tidak mempunyai nilai guna atau residu dikirimkan ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Sampah.

Dalam kegiatan pemilahan tersebut tempat sampah yang digunakan oleh rumah tangga bisa tong sampah, goni/karung, kantong kresek, galon isi ulang bekas, drum bekas, dll.

b. Pengumpulan sampah

Pengelola Wilayah, Perkantoran, Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menyediakan TPS atau bekerja sama dengan DLH dalam penyediaan TPS/kontainer untuk tempat pengumpulan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA. Pengumpulan yang ada di kabupaten Dharmasraya berupa: TPS di rumah tangga, perkantoran dan 17 unit kontainer serta 1 unit TPS 3R di Kecamatan Tiumang. TPS 3 R atau TPS terpadu dibentuk system terpadu yakni disediakan pemilahan II, dimana dilakukan pemilahan lagi oleh kelompok usaha masyarakat atau nagari untuk memilah sampah yaitu:

- Sampah organik dimanfaatkan sebagai kompos menggunakan komposter pada TPS sampah
- Sampah anorganik yang mempunyai nilai guna dijual ke Bank Sampah
- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah berbahaya dan beracun



- Sampah anorganik yang tidak mempunyai nilai guna atau residu dikirimkan ke TPA

c. Pengangkutan sampah

Pengangkutan sampah menggunakan becak motor dari TPS ke alat angkut *dumpruck* dan kontainer yang ada angkut dengan *armroll* untuk diangkut ke TPA. Pelayanan pengangkutan sampah masih terpusat di Kecamatan pulau punjung. Untuk daerah lain seperti kecamatan Sitiung, Kecamatan koto baru, Kecamatan Tiumbang, Kecamatan Sungai Rumbai dan Beberapa kawasan Industri pengangkutan menggunakan alat angkut bantuan DLH dan atau mandiri.

d. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah yang telah dan akan dilaksanakan:

- Pemadatan: pemadatan sampah sudah dilakukan di beberapa bank sampah, bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang ada.
- Pengomposan: pengomposan dengan skala rumah tangga, skala kawasan (TPS3R) dan atau composting skala kota. Pengembangan budidaya maggot merupakan potensi besar dalam pengolahan sampah organik selain nilai ekonomi yang tinggi juga bisa mengurangi sampah organik dalam jumlah besar.
- Daur ulang materi: mendaur ulang sampah menjadi produk lain yang berdaya guna.
- Daur ulang energy dengan pengolahan sampah menjadi energy listrik, dll.

e. Pemrosesan Akhir Sampah

Sampah yang masuk ke TPA juga akan dilakukan pemilahan seperti sampah organik akan dijadikan kompos, sampah anorganik yang berguna dijual. Pemulung juga berperan dalam pemilahan sampah di TPA. Sampah yang tidak bisa diolah/urair akan dilakukan penimbunan dengan tanah yang seyogyanya dilakukan tiap hari, tetapi Karena kekurangan anggaran dan sarana prasarana baru bisa dilakukan pengurugkan sekali dalam setahun.



Selain dalam pelaksanaan operasional pelayanan persampahan pada perkotaan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga sedang giatnya menggalakkan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya melalui program GENARSIH SEHATI dengan memberdayakan kelompok daswisma yang ada di Nagari. Terkait pembinaan dan operasional Bank Sampah, saat ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mendorong 20 Unit Bank Sampah baik yang dikelola oleh masyarakat sendiri maupun oleh sekolah-sekolah. Dalam pelayanan persampahan selain dengan dana dari APBD juga dibantu dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari beberapa perusahaan yang ada di kabupaten Dharmasraya seperti kontainer, alat penjepit sampah, tumbler/botol minuman, tempat sampah, tempat sampah terpilah dan karung/goni.

Walaupun sudah tersedia tempat pembuangan sampah yang ada di pusat-pusat kawasan dan di jalan-jalan utama baik berupa TPS container, TPS kayu, TPS batu, TPS kembar tapi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat dari masih adanya pembuangan sampah di sembarang tempat, seperti ke sungai, pinggir jalan, lahan kosong dan sebagainya.

#### 3.4.5. Jaringan Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Dharmasraya adalah sepanjang 1.184,26 Km dengan rincian panjang jalan negara 60,62 Km, jalan provinsi 70,5 Km, Jalan kabupaten 1.053,14 Km. Jalan negara melalui 4 (empat) Kecamatan yakni Kecamatan Sungai Rumbai, Koto Baru, Sitiung, dan Pulau Punjung. Sedangkan jalan provinsi juga melalui 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Koto Baru, Koto Salak, Sitiung dan Pulau Punjung. Secara umum, fungsi jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri atas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, dan jalan lokal. Jalan arteri primer di Kabupaten Dharmasraya merupakan akses keluar-masuk Kabupaten Dharmasraya. Jalan arteri sekunder menjadi penghubung jalan arteri primer ke pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Dharmasraya. Sebagian besar kondisi jalan kabupaaten di Dharmasraya sudah baik yakni sepanjang 328,4 km (31,18% dari total panjang jalan kabupaten). Jalan kabupaten dengan kondisi rusak hingga rusak berat lebih mendominasi yakni dalam kondisi rusak sepanjang 87,8 km (8,34% dari total panjang jalan kabupaten) dan kondisi rusak berat sepanjang



441,45 km (41,92% dari total panjang jalan kabupaten). Berikut dapat dilihat kondisi jalan di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 22. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Kondisi Jalan				Total (km)
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Sungai Rumbai	14,85	19,29	22,54	9,15	65,83
2	Koto Besar	11,25	28,78	3,35	119,5	162,88
3	Asam Jujuhan	22,63	1,32	3,55	73,22	100,72
4	Koto Baru	30,65	27,5	3,51	38,51	100,17
5	Koto Salak	27,78	14,84	14,63	4,28	61,53
6	Tiumang	30,48	10,04	12,4	21,5	74,42
7	Padang Laweh	10,79	14,7	2,02	16,43	43,94
8	Sitiung	49,54	18,99	0	15,63	84,16
9	Timpeh	43,91	3,57	11,35	52,17	111
10	Pulau Punjung	69,59	15,86	7,59	26,53	119,57
11	IX Koto	16,93	40,6	6,86	64,53	128,92
	<b>Dharmasraya</b>	<b>328,4</b>	<b>195,49</b>	<b>87,8</b>	<b>441,45</b>	<b>1053,14</b>
	<b>Persentase</b>	<b>31,18</b>	<b>18,56</b>	<b>8,34</b>	<b>41,92</b>	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

Selain itu masih ada jalan dengan perkerasan tanah yaitu jalan-jalan lingkungan yang menghubungkan antar kawasan permukiman yang berada di pinggiran pusat Kabupaten Dharmasraya. Pada tabel berikut dapat dilihat Panjang jalan kabupaten menurut kecamatan dan jenis permukaan jalan.

**Tabel 23. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan				Total (km)
		Aspal	Rigid	Kerikil	Tanah	
1	Sungai Rumbai	35,66	21,27	2,4	6,49	65,82
2	Koto Besar	27,91	4,47	26,13	104,37	162,88
3	Asam Jujuhan	22,05	5,45	38,99	34,23	100,72
4	Koto Baru	46,67	14,99	25,35	13,16	100,17
5	Koto Salak	50,53	6,72	3,2	1,08	61,53
6	Tiumang	42,35	9,61	20,46	2	74,42
7	Padang Laweh	21,83	5,68	15,01	1,42	43,94
8	Sitiung	64,36	5,94	6,85	7	84,15
9	Timpeh	45,1	18,59	35,11	12,22	111,02
10	Pulau Punjung	83,95	10,57	19,69	5,37	119,58



No	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan				Total (km)
		Aspal	Rigid	Kerikil	Tanah	
11	IX Koto	47,65	21,85	27,22	32,19	128,91
	<b>Dharmasraya</b>	<b>488,06</b>	<b>125,14</b>	<b>220,41</b>	<b>219,53</b>	<b>1053,14</b>
	<b>Persentase</b>	<b>46,34</b>	<b>11,88</b>	<b>20,93</b>	<b>20,85</b>	

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

### 3.4.6. Sarana Sosial

#### A. Sarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya antara lain 2 unit Rumah Sakit Umum, 21 unit Klinik Pratama, 6 unit Puskesmas dengan pelayanan rawat inap, 8 unit Puskesmas non pelayanan rawat inap dan 214 unit Posyandu.

**Tabel 24. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	RSU	RSK	Puskesmas		Klinik Pratama	Posyandu
				Rawat Inap	Non Rawat Inap		
1	Sungai Rumbai	1	0	0	1	4	21
2	Koto Besar	0	0	0	1	2	21
3	Asam Jujuhan	0	0	1	0	2	13
4	Koto Baru	0	0	1	0	3	32
5	Koto Salak	0	0	0	1	1	25
6	Tiumang	0	0	0	1	2	15
7	Padang Laweh	0	0	1	0	1	10
8	Sitiung	0	0	1	1	2	16
9	Timpeh	0	0	1	1	0	17
10	Pulau Punjung	1	0	0	2	4	28
11	IX Koto	0	0	1	0	0	16
	<b>Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>214</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021



## B. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan dibidang fisik harus diimbangi dan dilengkapi dengan pembangunan dibidang mental spiritual, sehingga diharapkan akan ada keseimbangan dan keserasian antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan beragama yang harmonis antara umat beragama di daerah ini telah terjalin dengan kokoh. Sarana peribadatan yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya antara lain 210 unit Mesjid dan 741 unit Musholla.

**Tabel 25. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	Masjid	Langgar/Mushalla
1	Sungai Rumbai	15	69
2	Koto Besar	23	94
3	Asam Jujuhan	9	11
4	Koto Baru	29	152
5	Koto Salak	26	51
6	Tiumang	11	26
7	Padang Laweh	8	14
8	Sitiung	27	89
9	Timpeh	27	36
10	Pulau Punjung	23	139
11	IX Koto	12	60
	<b>Dharmasraya</b>	<b>210</b>	<b>741</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

## C. Fasilitas Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan sarana penting untuk mendukung kemajuan suatu kota. Salah satu keberhasilan pembangunan disuatu daerah adalah apabila didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas melalui jalur pendidikan. Pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pada tahun 2020 jumlah SD Negeri sebanyak 147 unit dan SD Swasta 14 unit serta terdapat 6 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah SMP yakni 33 unit negeri dan 5 unit swasta serta terdapat 19 unit MTs. Jumlah SMA yakni 16 unit negeri dan 1 unit swasta serta terdapat 15 unit MA dan 9 unit SMK. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi (PT), di Kabupaten Dharmasraya terdapat 3 Perguruan Tinggi, yakni Universitas Andalas, Universitas Dharmas Indonesia dan STITNU Sakinah Dharmasraya. Pada table berikut dapat dilihat jumlah fasilitas Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya per kabupaten.

**Tabel 26. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya**

No	Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	PT
1	Sungai Rumbai	12	0	3	2	2	1	1	0
2	Koto Besar	16	2	5	2	1	1	1	0
3	Asam Jujuhan	9	0	1	0	1	0	0	0
4	Koto Baru	18	0	5	5	3	5	2	2
5	Koto Salak	13	1	3	0	1	0	0	0
6	Tiumang	12	1	1	1	1	0	0	0
7	Padang Laweh	5	0	1	0	0	0	1	0
8	Sitiung	21	0	3	4	3	4	1	0
9	Timpeh	11	1	4	1	1	1	1	0
10	Pulau Punjung	29	1	9	3	3	3	2	1
11	IX Koto	15	0	3	1	1	0	0	0
	<b>Kabupaten Dharmasraya</b>	<b>161</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

#### 3.4.7. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan perdagangan di Kabupaten Dharmasraya didukung oleh ketersediaan sarana perdagangan. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 27. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Dharmasraya**

No	Sarana Perdagangan	2017	2018	2019	2020
1	Pasar	36	36	36	37
2	Toko	58	56	70	85
3	Kios	5	7	71	109
4	Warung	28	31	45	56

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, 2021

### 3.5. Profil Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Profil daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya terdiri atas 20 jasa ekosistem yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok jasa, yaitu: jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung. Kabupaten Dharmasraya telah menyusun dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup tersebut.





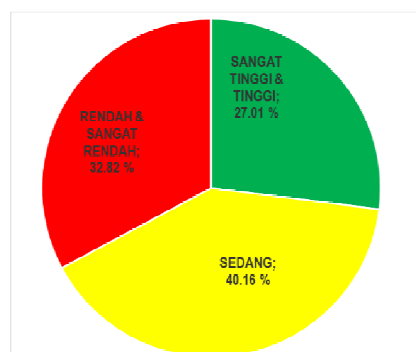
### 3.5.1. Jasa Ekosistem Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Daya dukung Kabupaten Dharmasraya untuk jasa penyediaan berdasarkan rata-rata persentase luas dari kelima jasa penyediaan masih cukup tinggi untuk kategori sangat tinggi dan tinggi, seperti terlihat pada Tabel 28. Daya dukung jasa penyediaan Kabupaten Dharmasraya secara umum adalah sangat tinggi dan tinggi adalah sebagian besar. Jasa penyediaan pangan yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi adalah Jasa penyediaan serat 99,06% dan jasa penyediaan Bahan Bakar 76,07%. Jasa ekosistem penyediaan yang sebagian besar rendah dan sangat rendah daya dukungnya adalah jasa penyediaan air bersih, hanya 8,60%, jasa penyediaan Pangan, 27,01%, dan jasa penyediaan Sumberdaya Genetik, 25,55% dari total luas lahan di Kabupaten Dharmasraya.

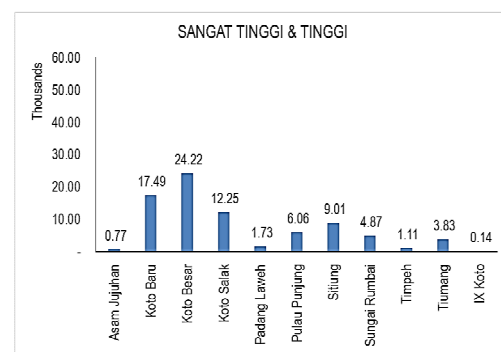
**Tabel 28. Ringkasan Daya Dukung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Penyediaan**

No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pangan	27,01	40,16	32,82
2	Air Bersih	8,60	41,84	49,56
3	Serat	99,06	0,24	0,70
4	Bahan Bakar	76,07	19,05	4,88
5	Sumberdaya Genetik	25,55	39,19	35,26

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

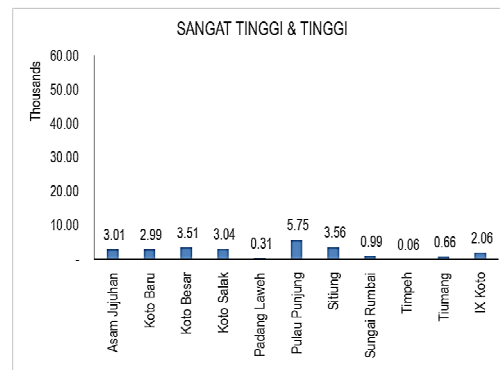
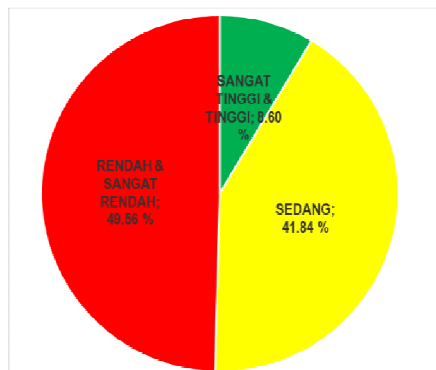


Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan



Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

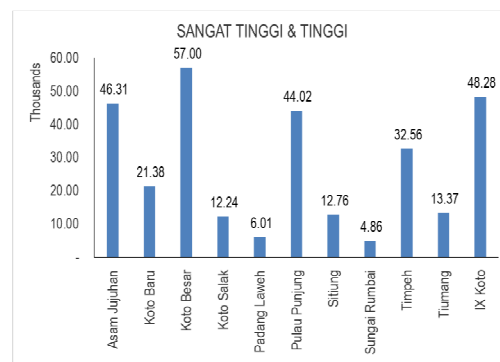
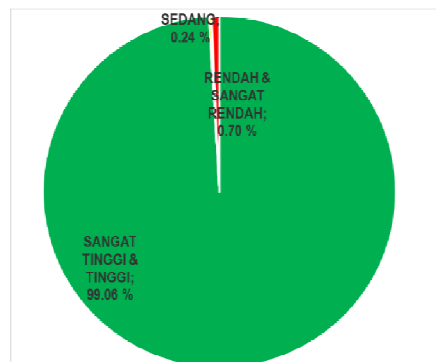
**Gambar 19. Daya Dukung Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Dharmasraya**



Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih

Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih  
Sangat Tinggi dan Tinggi menurut  
Kecamatan

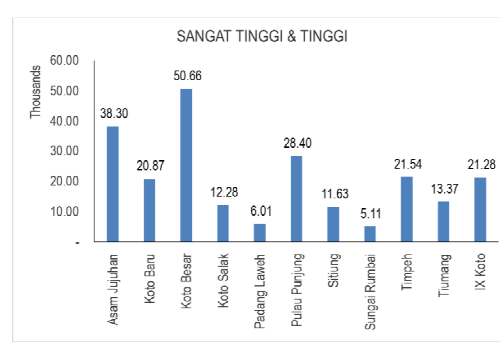
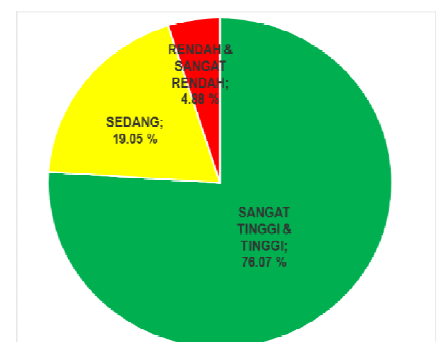
**Gambar 20. Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya**



Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat  
(Fiber)

Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat  
(Fiber) Sangat Tinggi dan Tinggi menurut  
Kecamatan

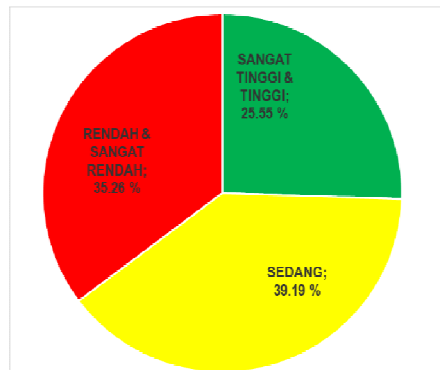
**Gambar 21. Daya Dukung Jasa Penyediaan Serat Kabupaten Dharmasraya**



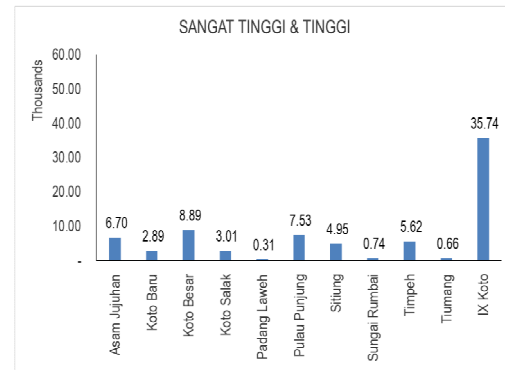
Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan  
Bakar Kayu dan Fosil

Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan  
Bakar Kayu dan Fosil Sangat Tinggi dan  
Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 22. Daya Dukung Jasa Penyediaan Bahan Bakar Kayu dan Fosil Kabupaten  
Dharmasraya**



Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumber  
Daya Genetik



Daya Dukung Jasa Penyediaan Sumber  
Daya Genetik Sangat Tinggi dan Tinggi  
menurut Kecamatan

**Gambar 23. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Dharmasraya**

**Tabel 29. Ekoregion dan Tutupan Lahan yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Dukung Jasa Penyediaan**

No	Nama Jasa Penyediaan	Sangat Tinggi & Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentase (dari luas Kab)	Dataran Fluvio Gunungapi	Lembah antar perbukitan/Pegunungan Lipatan (Intermountain Basin)	Perkebunan Kelapa Sawit	Ladang/Tegalan dengan Palawija	Perkebunan Karet
1	Pangan	81,481.49	27.01	60.08	1.85	78.02	5.71	5.27
2	Air Bersih	25,943.12	8.60	31.59	16.47	-	17.93	24.06
3	Serat	298,806.10	99.06	16.40	39.59	62.58	2.57	13.45
4	Bahan Bakar	229,452.90	76.07	21.66	41.17	75.73	2.03	3.95
5	Sumberdaya Genetik	77,057.71	25.55	9.86	7.17	-	6.04	15.84

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

Tinggi rendahnya daya dukung tersebut dipengaruhi oleh ekoregion dan tutupan lahan yang mendukung jasa penyediaan tersebut. Dalam jasa penyediaan, ekoregion yang berpengaruh untuk kategori sangat tinggi dan tinggi diantaranya adalah Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan (*Intermountain Basin*) dan dataran fluvio gunung api. Daya dukung yang tinggi atas jasa-jasa serat dan bahan bakar sebagian besar berada wilayah dimana ekoregionnya adalah Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan (*Intermountain Basin*) dan dataran fluvio gunungapi, sebagaimana terlihat dalam Tabel 29. Sedangkan tutupan lahan yang berpengaruh antara lain adalah perkebunan kelapa sawit dan



perkebunan karet. Rincian dan persentase untuk setiap jasa penyediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

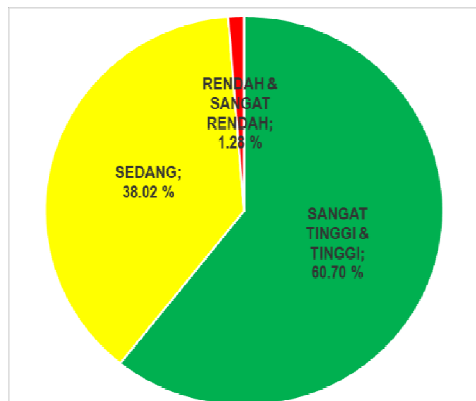
### 3.5.2. Jasa Ekosistem Pengaturan (Regulasi)

Jasa ekosistem pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia.

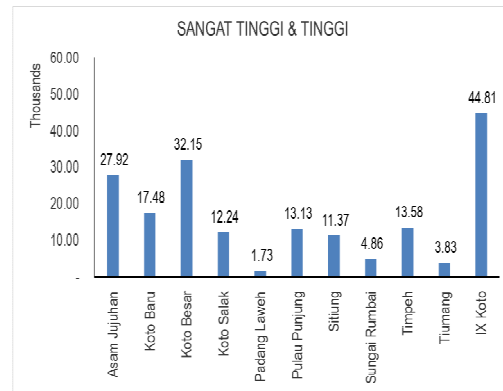
Daya tampung jasa pengaturan Kabupaten Dharmasraya bervariasi dari 8 jenis jasa, seperti terlihat pada Tabel 30 berikut. Ada tiga jenis jasa ekosistem yang daya tampungnya relatif rendah, dilihat dari persentase daya tampung yang sangat tinggi dan tinggi yang rendah, yaitu jasa pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, pengolahan dan penguraian limbah. Sementara lima jenis jasa ekosistem lainnya adalah memiliki daya tampung yang sangat tinggi dan tinggi sebagian besarnya.

**Tabel 30. Ringkasan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Pengaturan**

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Sangat Rendah & Rendah
1	Iklim	60,70	38,02	1,28
2	Tata aliran air dan banjir	21,75	39,37	38,88
3	Pencegahan dan perlindungan dan bencana	27,98	29,00	43,02
4	Pemurnian air	54,34	44,81	0,85
5	Pengolahan dan pemurnian limbah	16,98	26,28	56,74
6	Kualitas udara	98,78	0,34	0,80
7	Penyerbukan alami (pollination)	57,97	40,77	1,25
8	Pengendalian hama dan penyakit	49,49	41,09	9,42
Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya				

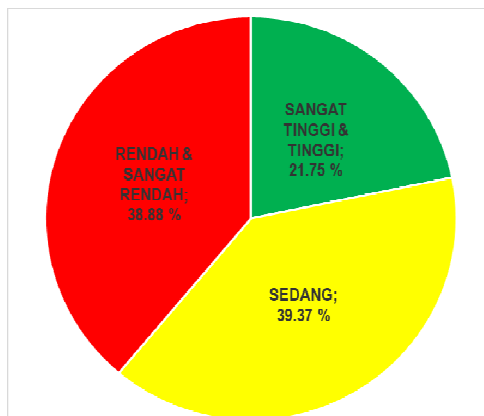


Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim

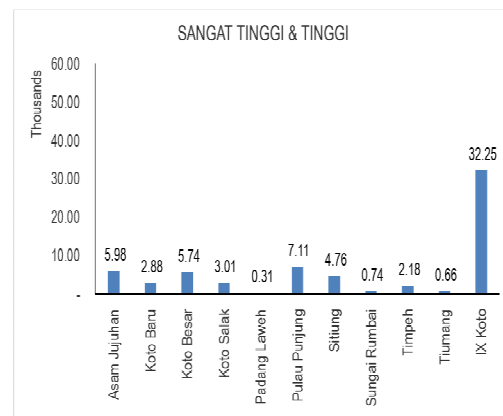


Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 24. Daya Dukung Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Dharmasraya**

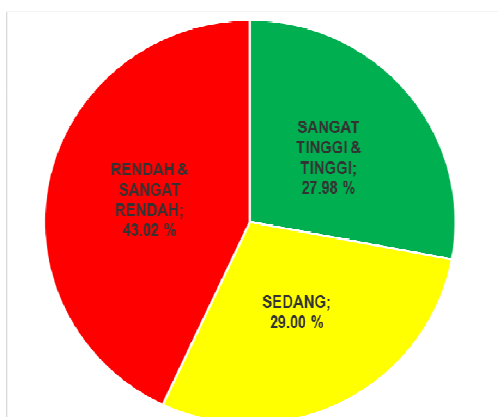


Daya Dukung Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

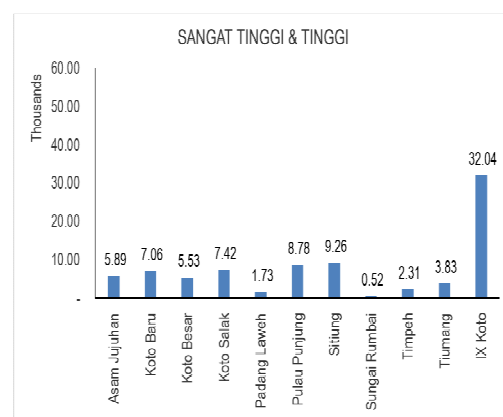


Daya Dukung Jasa Pengaturan Tata Aliran air dan Banjir Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 25. Daya Dukung Jasa Pengaturan Aliran Air dan Banjir Kabupaten Dharmasraya**

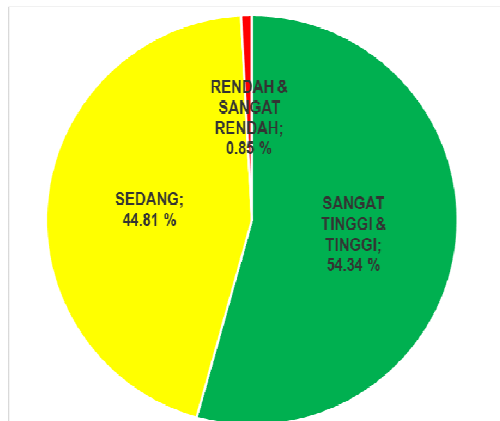


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

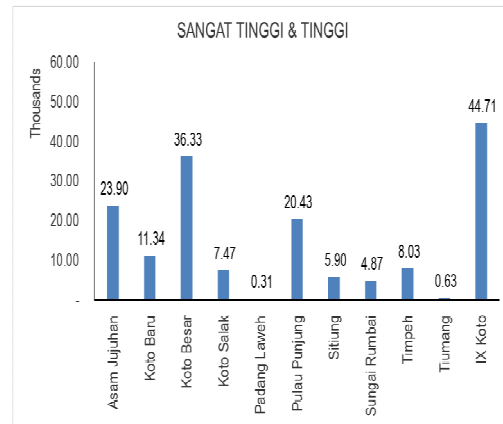


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 26. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Dharmasraya**

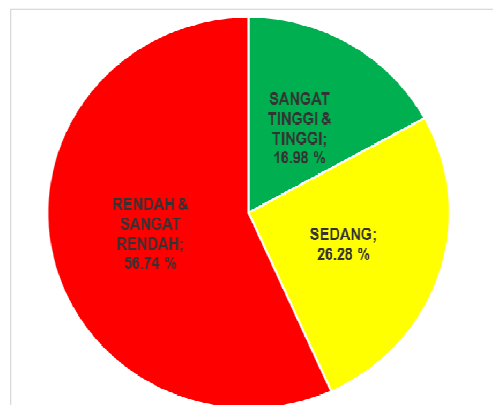


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air

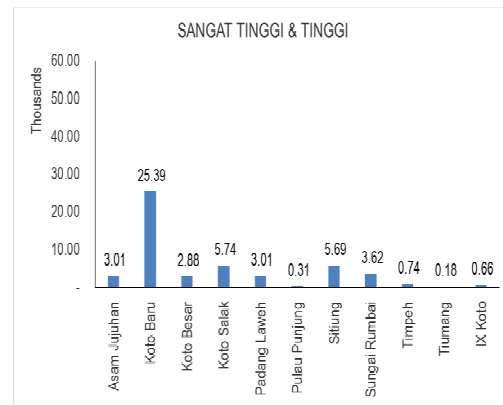


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 27. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya**

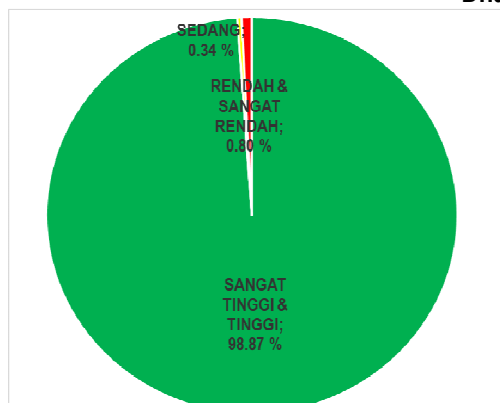


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah

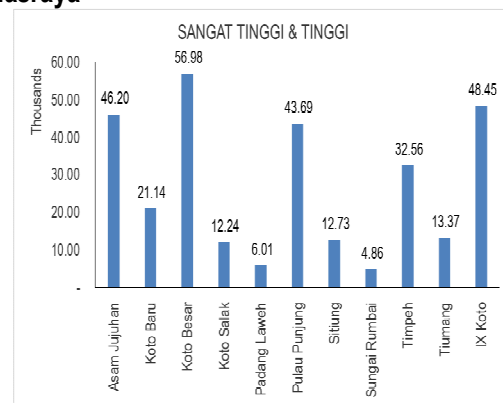


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 28. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pengolahan dan Pemurnian Limbah Kabupaten Dharmasraya**

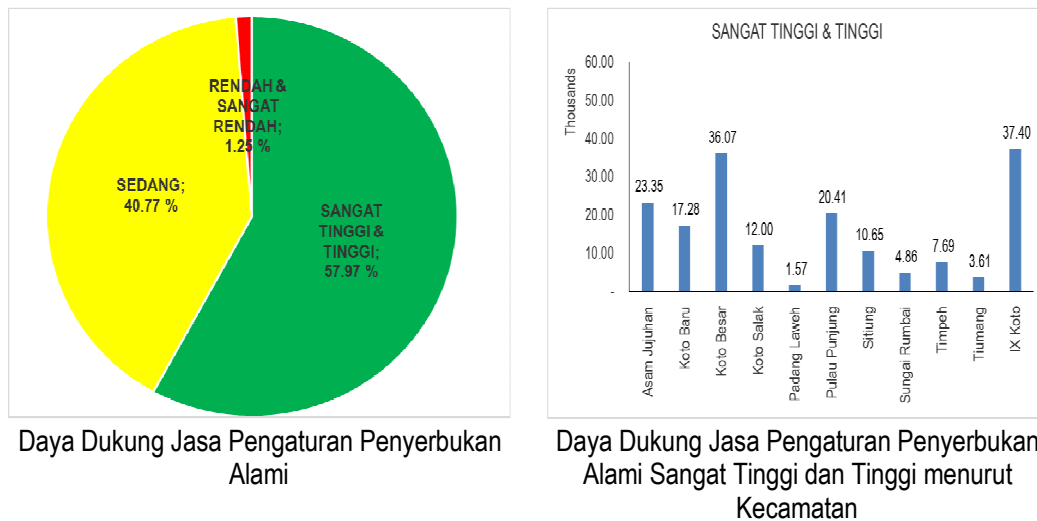


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara

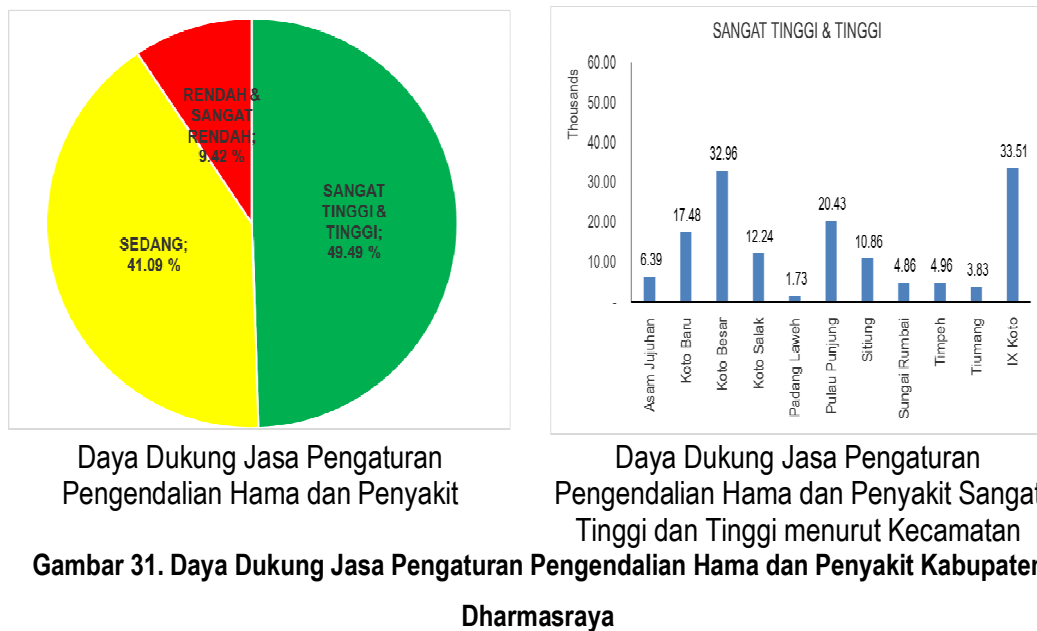


Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 29. Daya Dukung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya**



**Gambar 30. Day Dukung Jasa Pengaturan Penyerbukan Alami Kabupaten Dharmasraya**



**Gambar 31. Day Dukung Jasa Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kabupaten Dharmasraya**

Ekoregion yang mempengaruhi kategori sangat tinggi dan tinggi untuk lima jenis jasa pengaturan tersebut adalah dataran aluvial dan dataran fluvio gunung api, seperti terlihat pada Tabel 31. Sedangkan tutupan lahan yang mempengaruhi secara umum adalah perkebunan kelapa sawit dan hutan lahan kering primer.



**Tabel 31. Ekoregion yang Mempengaruhi Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Pengaturan**

No	Nama Jasa Pengaturan	Sangat Tinggi & Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)	
		Luas (Ha)	Persentase (dari luas Kab)	Dataran Aluvial	Dataran Fluvio Gunungapi	Perkebunan Kelapa Sawit	Hutan Lahan Kering Primer Kerapatan Sedang
1	Iklim	183,099.97	60.70	17.81	26.72	52.76	3.16
2	Tata Aliran Air dan Banjir	65,605.28	21.75	30.90	15.15	-	60.50
3	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	84,389.79	27.98	38.64	5.87	26.24	2.49
4	Pemurnian Air	163,914.59	54.34	5.16	29.91	35.25	1.56
5	Pengolahan dan Penguraian Limbah	51,216.06	16.98	20.46	14.70	-	9.08
6	Kualitas Udara	298,227.61	98.87	10.93	16.43	62.70	2.58
7	Penyerbukan Alami (Pollination)	174,877.82	57.97	17.94	27.91	45.70	2.96
8	Pengendalian Hama dan Penyakit	149,276.86	49.49	21.90	32.77	42.59	3.12

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

### 3.5.3. Jasa Ekosistem Pendukung

Jasa Ekosistem Pendukung adalah jasa ekosistem yang diperlukan untuk menghasilkan jasa ekosistem lainnya. Daya dukung dan daya tampung jasa pendukung di Kabupaten Dharmasraya dengan kategori sangat tinggi dan tinggi untuk semua jenis jasa bervariasi dari sekitar 20% hingga 90% yang menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung dan daya tampung yang cukup tinggi untuk jasa pendukung ini, sebagaimana terlihat pada Tabel 34.

### 3.5.4. Jasa Ekosistem Budaya

Jasa ekosistem budaya adalah jasa yang dihasilkan oleh lingkungan hidup yang dapat mendukung manusia dalam menopang kehidupan sosial dan budaya. Jasa ini berupa jasa non-material melalui pengayaan budaya, perkembangan kognitif, refleksi, rekreasi dan estetika. Lingkungan hidup memiliki daya dukung bagi manusia dalam memanfaatkan jasa ekosistem bagi tujuan sosial budaya tersebut, dan pada saat yang bersamaan juga menyerap limbah dari kegiatan sosial dan budaya tersebut. Jasa ekosistem budaya ini memberikan daya dukung dan sekaligus juga daya tampung.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 32 bahwa daya dukung jasa budaya Kabupaten Dharmasraya relatif lebih rendah. Tidak ada satupun jasa ekosistem yang daya dukung



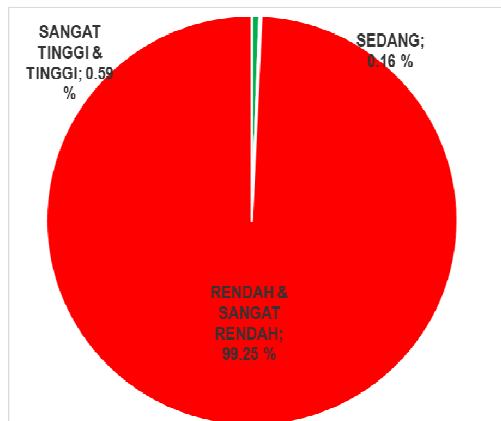


sangat tinggi dan tinggi di atas 30%, bahkan satu dari tiga jasa memiliki daya dukung dibawah 1%.

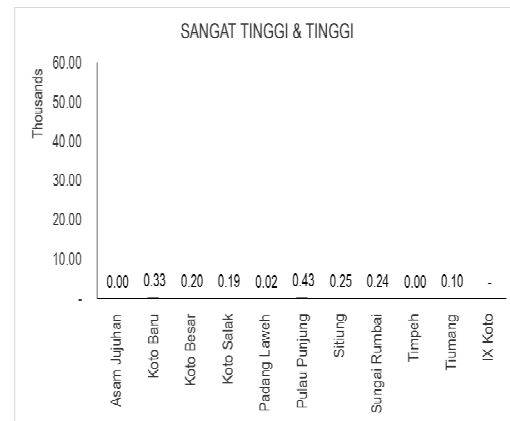
**Tabel 32. Ringkasan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Budaya**

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Sangat Rendah & Rendah
1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,59	0,16	99,25
2	Rekreasi dan Ecotourism	21,84	55,25	19,91
3	Estetika	23,0	11,76	64,33

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

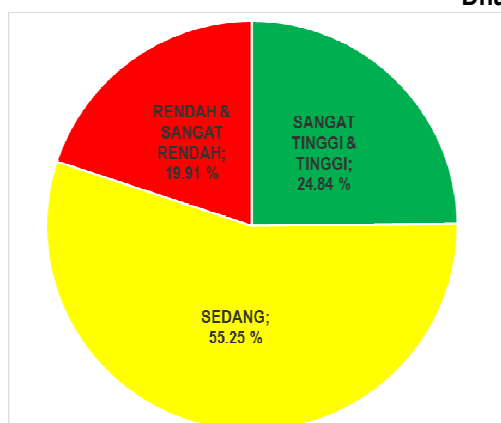


Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

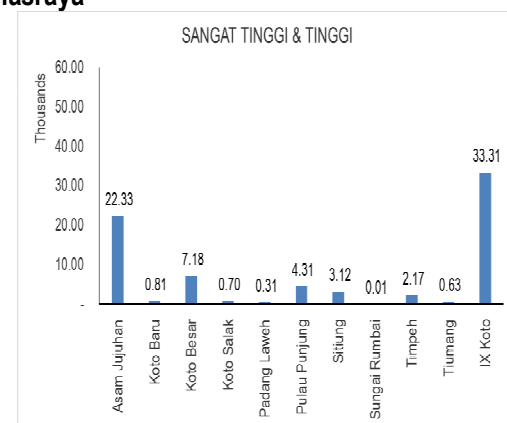


Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 32. Daya Dukung Jasa Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten Dharmasraya**

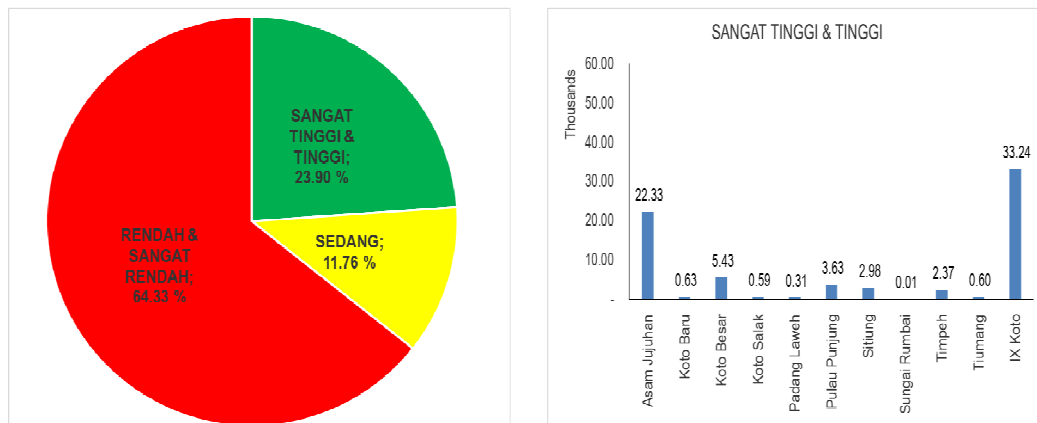


Daya Dukung Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism



Daya Dukung Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 33. Daya Dukung Jasa Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kabupaten Dharmasraya**



Daya Dukung Jasa Budaya Estetika (alam)

Daya Dukung Jasa Budaya Estetika (alam)  
Sangat Tinggi dan Tinggi menurut Kecamatan**Gambar 34. Daya Dukung Jasa Budaya Estetika (alam) Kabupaten Dharmasraya**

Secara umum, ekoregion yang memberikan daya dukung sangat tinggi dan tinggi untuk jasa budaya adalah dataran fluvio gunung api, dataran aluvial dan kaki gunung api (Tabel 33). Sementara itu, tutupan lahan yang mempengaruhi adalah bangunan pemukiman desa, bangunan pemukiman kota dan hutan lahan primer kerapatan tinggi.

**Tabel 33. Ekoregion dan Tutupan Lahan yang memberikan Daya Dukung Sangat Tinggi dan Tinggi pada Jasa Budaya**

No	Nama Jasa Budaya	Sangat Tinggi & Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)			Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentase (dari luas Kab)	Dataran Aluvial	Dataran Fluvio Gunungapi	Kaki Gunungapi	Bangunan Permukiman Desa	Bangunan Permukiman Kota	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi
1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	1,786.21	0.59	66.49	33.51	-	66.71	33.29	-
2	Rekreasi dan Ecotourism	74,862.21	24.84	8.30	0.26	26.70	0.05	0.02	45.52
3	Estetika	72,104.53	23.90	7.00	0.27	27.72	0.05	0.02	47.29

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

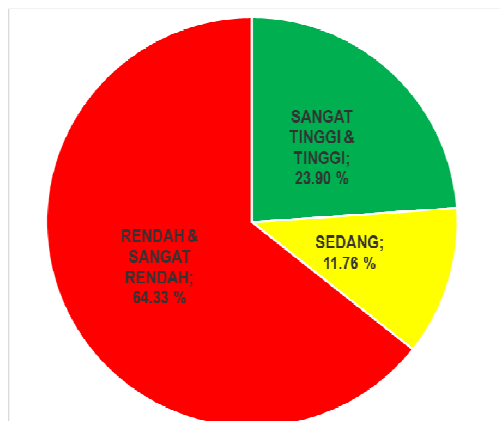
**Tabel 34. Ringkasan Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Dharmasraya dalam Jasa Pendukung**

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Sangat Rendah & Rendah
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	21,18	29,89	48,93

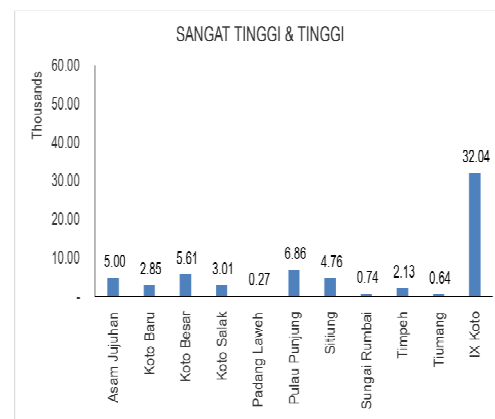


No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Sangat Rendah & Rendah
2	Siklus hara (nutrient cycle)	80,21	11,51	8,28
3	Produksi primer	42,60	18,69	38,70
4	Biodiversitas	93,19	5,99	0,82

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

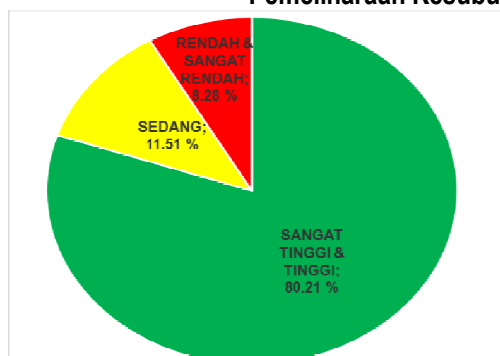


Daya Dukung dan Daya Tampung  
Pembentukan lapisan tanah dan  
pemeliharaan kesuburan

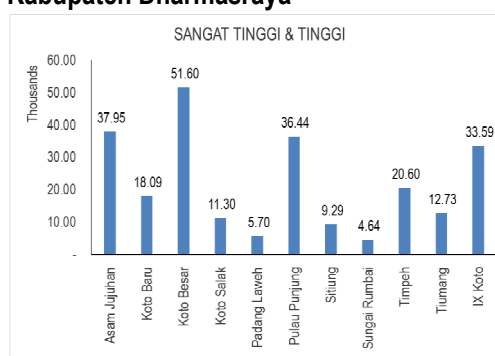


Daya Dukung dan Daya Tampung  
Pembentukan lapisan tanah dan  
pemeliharaan kesuburan Sangat Tinggi dan  
Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 35. Daya Dukung dan Daya Tampung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kabupaten Dharmasraya**



Daya Dukung dan Daya Tampung Siklus  
hara (nutrient cycle)

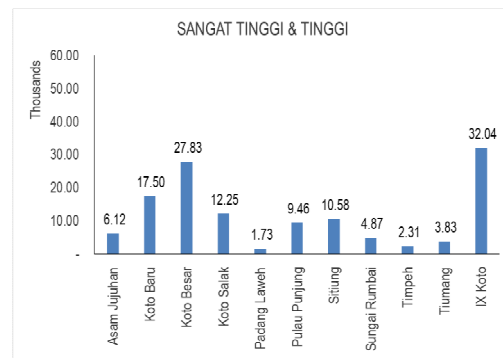


Daya Dukung dan Daya Tampung Siklus  
hara (nutrient cycle) Sangat Tinggi dan  
Tinggi menurut Kecamatan

**Gambar 36. Daya Dukung dan Daya Tampung Siklus hara (nutrient cycle) Kabupaten Dharmasraya**

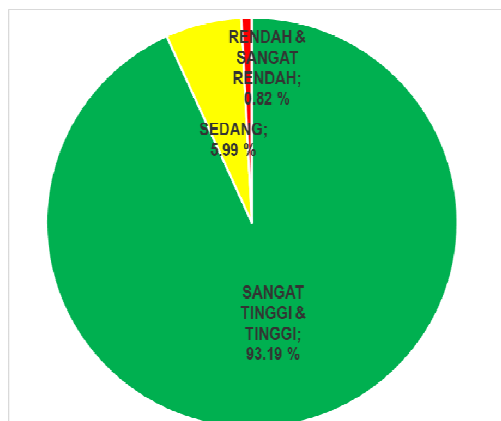


Daya Dukung dan Daya Tampung  
Produksi Primer

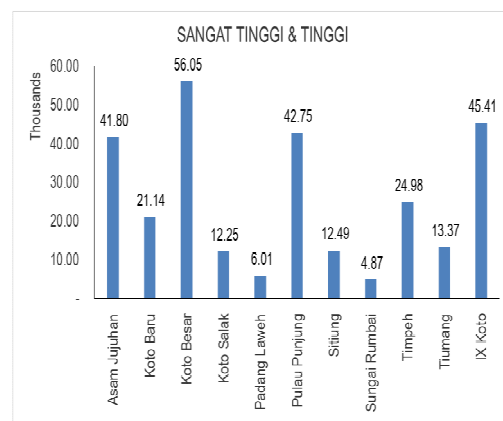


Daya Dukung dan Daya Tampung Produksi  
Primer Sangat Tinggi dan Tinggi menurut  
Kecamatan

**Gambar 37. Daya Dukung dan Daya Tampung Produksi Primer Kabupaten Dharmasraya**



Daya Dukung dan Daya Tampung  
Biodiversitas



Daya Dukung dan Daya Tampung  
Biodiversitas Sangat Tinggi dan Tinggi  
menurut Kecamatan

**Gambar 38. Daya Dukung dan Daya Tampung Biodiversitas Kabupaten Dharmasraya**

Ekoregion yang memberikan daya dukung dan daya tampung sangat tinggi dan tinggi untuk jasa ini sebagian besar adalah dataran aluvial dan dataran fluvio gunungapi. Sementara itu, tutupan lahan yang memberikan daya dukung dan daya tampung sangat tinggi dan tinggi adalah perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet dan hutan lahan kering primer, seperti terlihat pada Tabel 35.



**Tabel 35. Ekoregion dan tutupan lahan yang memberikan daya dukung dan daya tampung Sangat Tinggi dan Tinggi untuk Jasa Pendukung**

No	Nama Jasa Pendukung	Sangat Tinggi & Tinggi		Persentase Ekoregion Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		Persentase Tutupan Lahan Terbesar (dari luasan kategori sangat tinggi dan tinggi)		
		Luas (Ha)	Persentase (dari luas Kab)	Dataran Aluvial	Dataran Fluvio Gunungapi	Perkebunan Kelapa Sawit	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	Perkebunan Karet
1	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	63,899.77	21.18	16.37	11.75	-	53.36	9.77
2	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	241,937.92	80.21	10.58	18.99	70.39	13.16	10.84
3	Produksi Primer	128,510.11	42.60	25.44	38.15	49.47	26.53	5.25
4	Biodiversitas	281,111.03	93.19	11.63	17.44	60.58	12.13	14.30

Sumber : DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

### 3.6. Peran Filantropi

Pembangunan di Kabupaten Dharmasraya selain bersumber dari dana APBD dan APBN juga terlaksana atas pendanaan dari masyarakat berupa bersumber dari pendanaan pribadi dan kelompok masyarakat serta badan swasta. Berikut dapat dilihat peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 36. Peran Filantropi Dalam Pembangunan Kabupaten Dharmasraya**

No	Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	Perkiraan Biaya (Rp)	Tahun	Nama Yayasan-Badan-Penanggungjawab Kegiatan	Peran Dalam Pencapaian TPB/SDGs
1	Objek Wisata	Km 7 Pulau Punjung	1.200.000.000,00	2019	Swadaya kelompok	TPB 8 dan 9
2	Pusat Hiburan Masyarakat	Km 2 Pulau Punjung	150.000.000,00	2019	Perorangan	TPB 8 dan 9
3	Perbaikan Jembatan Gantung Jorong Koto Lamo	Lubuk Karak		2020	LPHN dan masyarakat	
4	Pembangunan fasilitas wisata	Lubuk Karak		2020	LPHN dan masyarakat	TPB 8 dan 9
5	Perluasan masjid Al-Hidayah	Tebing Tinggi		2021	Pengurus mesjid	
6	Pembangunan Mushalla	Tk Pembina Blok B	130.000.000,00	2019	TK Pembina (Komite)	
7	SD Al- Ihsan	Koto Baru	2.000.000.000,00	2017	Yayasan	TPB 4
8	SMP IT Albina	Koto Baru	2.500.000.000,00	2018	Yayasan	TPB 4
9	Tempat berwudhu' Mesjid Jamik	Jorong Sitiung	250.000.000,00	2018-2019	Pengurus Mesjid	
10	Lembaga keuangan mikro Agribisnis (LKM-A)	Sei Duo Sitiung	1.500.000.000,00	2020	LKMA Prima Agung	TPB 9
11	Pembangunan Mesjid	Sidomulyo Tebing Tinggi	500.000.000,00	2020	Pengurus Mesjid	
12	Mesjid Al-Wasilah	Sikabau	1.500.000.000,00	2020-sekarang	Pengurus Mesjid	
13	Lapangan Volly	Sikabau	500.000,00	2020	RT	TPB 3
14	Pandam Pakuburan	Sikabau	200.000.000,00	2015	Panitia Pembangunan	
15	Mushalla	Tebing Tinggi	400.000.000,00	2017		



No	Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	Perkiraan Biaya (Rp)	Tahun	Nama Yayasan-Badan-Penanggungjawab Kegiatan	Peran Dalam Pencapaian TPB/SDGs
16	SD IT / MI	Pulau Punjung			Yayasan	TPB 4
17	Mesjid	Pulau Punjung			Swadaya masyarakat	
18	Pondok Tahfidz	Pulau Punjung			Yayasan pengelola	TPB 4
19	Jasa transportasi sampah ke TPA	Pulau Punjung			Swadaya masyarakat	TPB 11
20	Teras masjid		12.000.000,00	2021	Pengurus Mesjid Babul Fallah	
21	Pembuatan gantungan sampah		5.000.000,00	2019	PT Incasi Raya Pangian	TPB 11
22	Masjid al-Wasilah	Sikabau	1.000.000.000,00	2013-2021	Masyarakat	
23	Mushalla	Koto Nan IV dibawah	400.000.000,00	2020		
24	MDA Taqwa	Koto Baru	150.000,00	2019	Baharudin Zein	TPB 11
25	Panti Asuhan Pastabikul Khairat	Koto Baru	250.000,00	2017	H Ade	TPB 1
26	Mushalla	Jorong Padang Sidondang Sitiung	100.000.000,00	2009-sekarang	Tokoh masyarakat	
27	Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	Jorong Padang Sidondang Sitiung	60.000.000,00	2020	PKBM Goka Utama Cahaya	TPB 1 dan 4
28	Pembangunan Mesjid	Koto Baru	150.000.000,00	2018	Walinagari dan Ninik Mamak	
29	Lubuk Larangan	Jorong Kampung Surau			Masyarakat	TPB 15



## BAB IV

### ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen menglobal dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesenjangan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarwilayah (Berkurangnya Kesenjangan);





11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millennium (*Millenium Development Goals / MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.



#### 4.1. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapai Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang bukan kewenangan

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)).

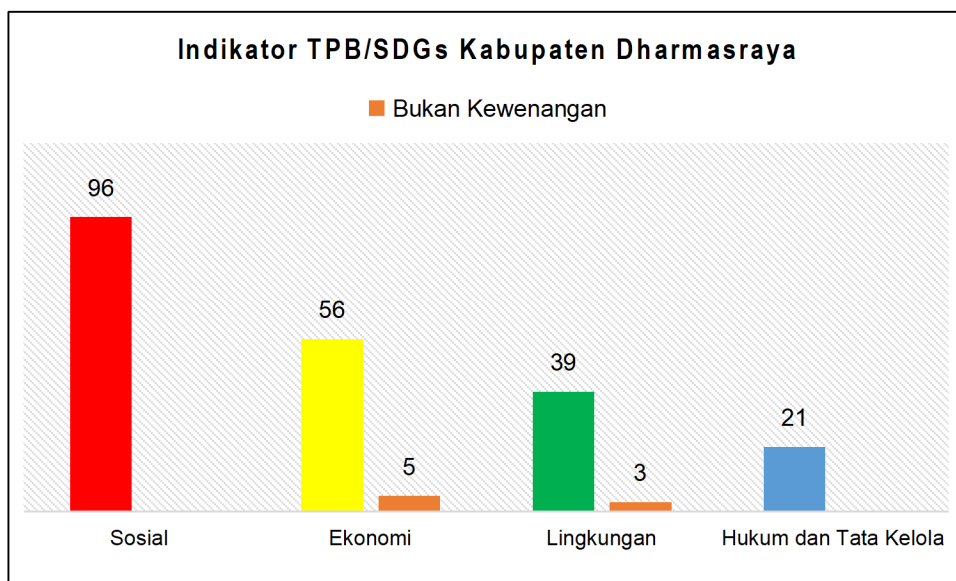
Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya yakni :



**Tabel 37. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Bukan Kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya**

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	PILAR
<b>TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</b>				Lingkungan
1	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLH	
<b>TPB 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</b>				Ekonomi
2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	DINAS ESDM PROVINSI	
3	7.3.1*	Intensitas energi primer.	DINAS ESDM PROVINSI	
<b>TPB 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</b>				Ekonomi
4	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas Perhubungan	
5	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	
6	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	
<b>TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</b>				Lingkungan
7	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	DPUPR	
8	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DPUPR	

Dengan demikian, jumlah indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah 212 indikator.



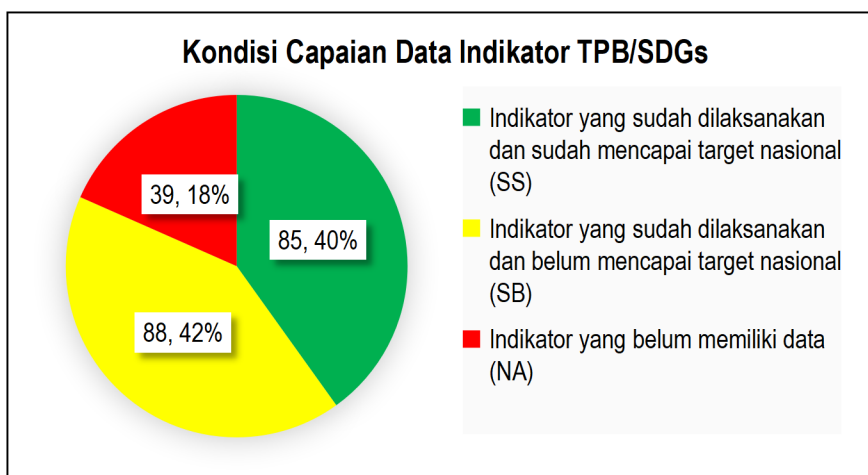
**Gambar 39. Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar Pembangunan**

Kondisi Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 85 indikator (40,09%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 88 indikator (41,51%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 39 indikator (18,40%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya.

**Tabel 38. Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya**

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	85	40,09%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	88	41,51%
3.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	39	18,40%
<b>TOTAL</b>		<b>212</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2021



**Gambar 40. Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional**

#### 4.1.1. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 85 indikator atau dengan persentase 40,09%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada Tabel 39 dan Gambar 41.

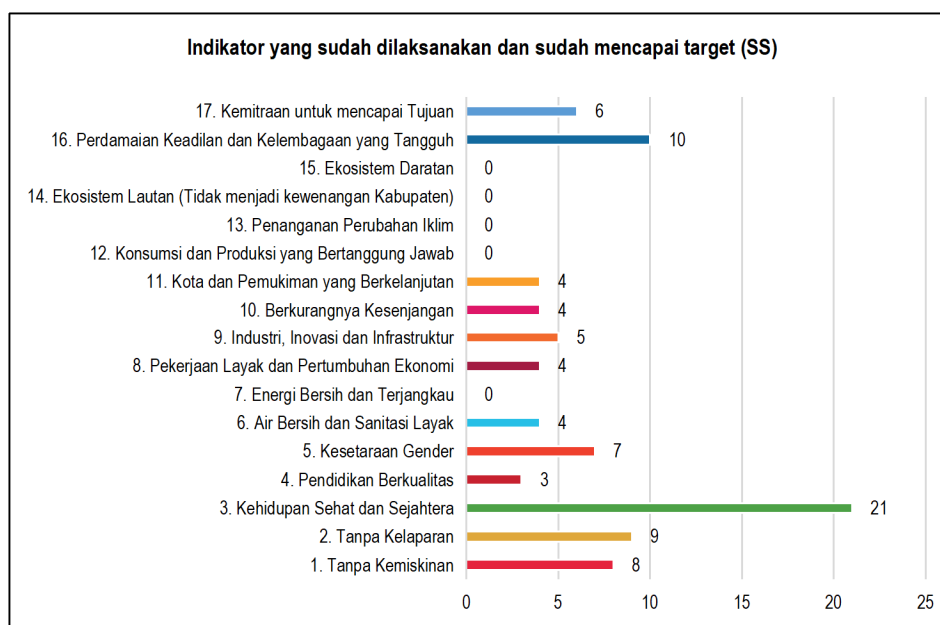
**Tabel 39. Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya**

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	8	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	9	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	21	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	3	Sosial
5	Kesetaraan Gender	7	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	Lingkungan
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	4	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	Lingkungan



No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	0	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	10	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	Ekonomi
	<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021



**Gambar 41. Jumlah Indikator pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Dharmasraya**

**Tabel 40. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinsos P2KBP3A
2	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan
3	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinsos P2KBP3A
4	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan
5	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM)	Dinas Pendidikan



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
		SMP/MTs/ sederajat.	
6	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil
7	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
8	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BPKD
9	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ).	Dispakan
10	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita.	Dinas Kesehatan
11	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dispakan
12	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan
13	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan
14	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan
15	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan
16	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan
17	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dispakan
18	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan
19	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan
20	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
21	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
22	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan
23	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan
24	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan
25	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Dinas Kesehatan
26	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
27	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan
28	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan
29	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ tahun.	Dinas Kesehatan
30	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan
31	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan
32	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinsos P2KBP3A
33	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinsos P2KBP3A
34	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinsos P2KBP3A
35	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan
36	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan
37	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan
38	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan
39	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan
40	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan
41	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Dinas Pendidikan
42	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinsos P2KBP3A
43	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinsos P2KBP3A
44	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinsos P2KBP3A
45	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinsos P2KBP3A





No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
46	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinsos P2KBP3A
47	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BKPSDM
48	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDM
49	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan
50	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perkim & DPUPR
51	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perkim & DPUPR
52	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas LH
53	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Disnakertrans
54	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Diskumperdag
55	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Disnakertrans
56	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Disnakertrans
57	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Diskumperdag
58	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS
59	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Kominfo
60	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Kominfo
61	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Kominfo
62	10.1.1*	Koefisien Gini.	Bappeda
63	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Bappeda
64	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMD
65	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum
66	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Disbudparpora
67	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim	BPBD



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
		serta kebencanaan.	
68	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas LH
69	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DPUPR
70	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Kesbangpol
71	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinsos P2KBP3A
72	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinsos P2KBP3A
73	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinsos P2KBP3A
74	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKD
75	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi
76	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinsos P2KBP3A
77	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil
78	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil
79	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Bagian Hukum
80	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Kominfo
81	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Kominfo
82	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS
83	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Disdukcapil



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
84	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS
85	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS

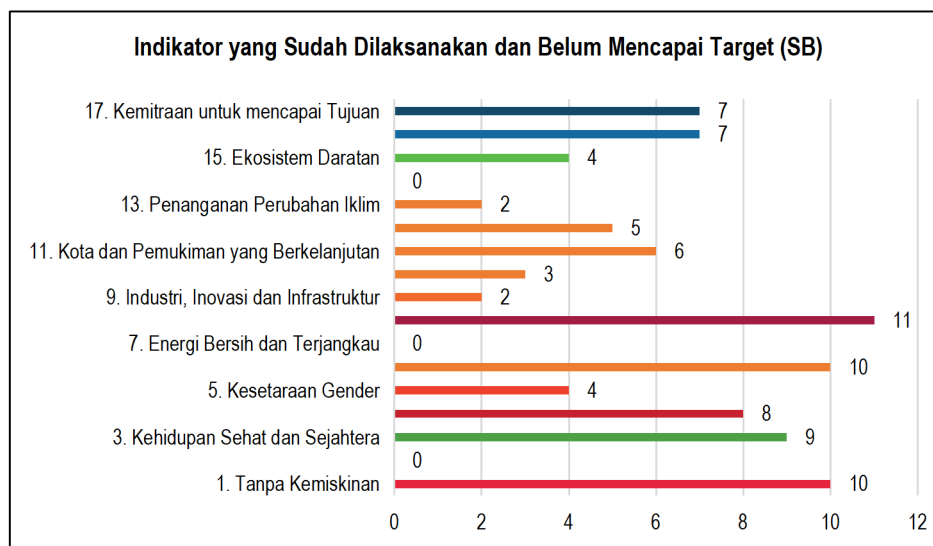
#### 4.1.2. Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 88 indikator atau dengan persentase 41,51%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Tabel 41 dan Gambar 42.

**Tabel 41. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya**

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	10	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	0	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	9	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	8	Sosial
5	Kesetaraan Gender	4	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	10	Lingkungan
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	11	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	6	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	4	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	7	Ekonomi
	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021



**Gambar 42. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Dharmasraya**

**Tabel 42. Indikator yang Sudah Dilakukan dan Belum Mencapai Target (SB)**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnakertrans
3	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinsos P2KBP3A
4	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinsos P2KBP3A
5	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Bagian Perekonomian dan SDA
6	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD
7	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinsos P2KBP3A
8	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinsos P2KBP3A
9	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan	Dinas Pendidikan



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
		layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	
10	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD
11	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
12	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan
13	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan
14	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan
15	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan
16	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan
17	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinsos P2KBP3A
18	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan
19	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan
20	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan
21	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan
22	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan
23	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
24	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan
25	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan
26	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Dinas Pendidikan
27	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan
28	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinsos P2KBP3A
29	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinsos P2KBP3A
30	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinsos P2KBP3A
31	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinsos P2KBP3A
32	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUPR
33	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DPUPR
34	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Perkim & DPUPR
35	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan
36	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Perkim & DPUPR
37	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas LH



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
38	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	DPUPR
39	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DPUPR
40	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas LH
41	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas LH
42	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Bappeda
43	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Bappeda
44	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS
45	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	BPS
46	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Disnakertrans
47	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnakertrans
48	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Disnakertrans
49	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Disnakertrans
50	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Disbudparpora
51	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disbudparpora
52	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DPMPTSP
53	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan
54	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	BPS
55	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DPMD
56	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	DPMD
57	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnakertrans



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
58	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perkim
59	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DPUPR
60	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
61	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD
62	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas LH
63	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD
64	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LH
65	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas LH
66	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LH
67	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas LH
68	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas LH
69	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD
70	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD
71	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH
72	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH
73	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Dinas LH
74	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas LH





No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
75	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kesbangpol
76	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Kesbangpol
77	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BKD
78	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bag. ADM Pembangunan
79	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi
80	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM
81	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Kominfo
82	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BKD
83	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BKD
84	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BKD
85	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag. ADM Pembangunan
86	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bag. ADM Pembangunan
87	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS
88	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS



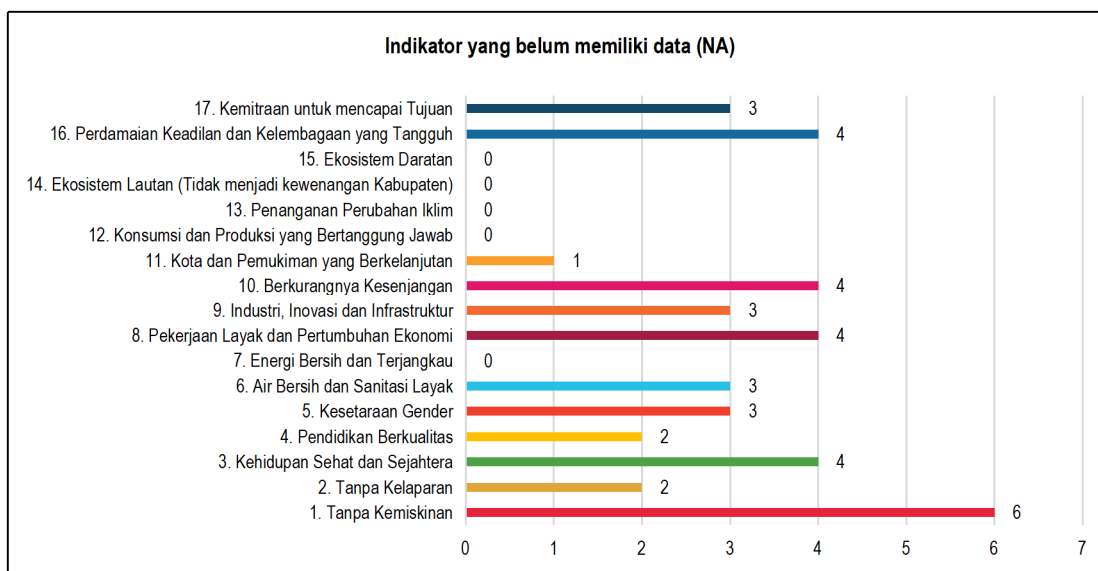
#### 4.1.3. Indikator yang Belum Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang tidak memiliki data adalah sebanyak 39 indikator atau 18,40%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Tabel 43. dan Gambar 43

**Tabel 43. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Dharmasraya**

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	6	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	2	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	4	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	2	Sosial
5	Kesetaraan Gender	3	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	Lingkungan
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	4	Ekonomi
11	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	1	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	0	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	0	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	4	Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	3	Ekonomi
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021



**Gambar 43. Jumlah Indikator Pada Setiap TPB/SDGs yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Dharmasraya**

**Tabel 44. Indikator yang Belum Memiliki Data (NA)**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan
2	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Perkim & DPUPR
3	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Perkim & DPUPR
4	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD
5	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD
6	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Bappeda
7	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dispan



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
8	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian
9	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun.	Dinas Kesehatan
10	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq 15$ tahun dalam satu tahun terakhir.	Dinas Kesehatan
11	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinsos P2KBP3A
12	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun.	Dinas Kesehatan
13	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Kominfo
14	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan
15	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinsos P2KBP3A
16	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinsos P2KBP3A
17	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Kominfo
18	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DPUPR
19	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan
20	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Perkim & DPUPR
21	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Disbudparpora
22	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Disbudparpora
23	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DPMPTSP



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD Penyedia Data
24	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Diskumperdag
25	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DPMPTSP
26	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Diskumperdag
27	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Bappeda
28	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Bappeda
29	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	DPMD
30	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DinsosP2KB P3A
31	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kesbangpol
32	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD
33	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Kesbangpol
34	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat
35	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bag. Organisasi
36	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Disdukcapil
37	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar ( <i>fixed broadband</i> ) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Kominfo
38	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Kominfo
39	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda

## 4.2. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Pilar

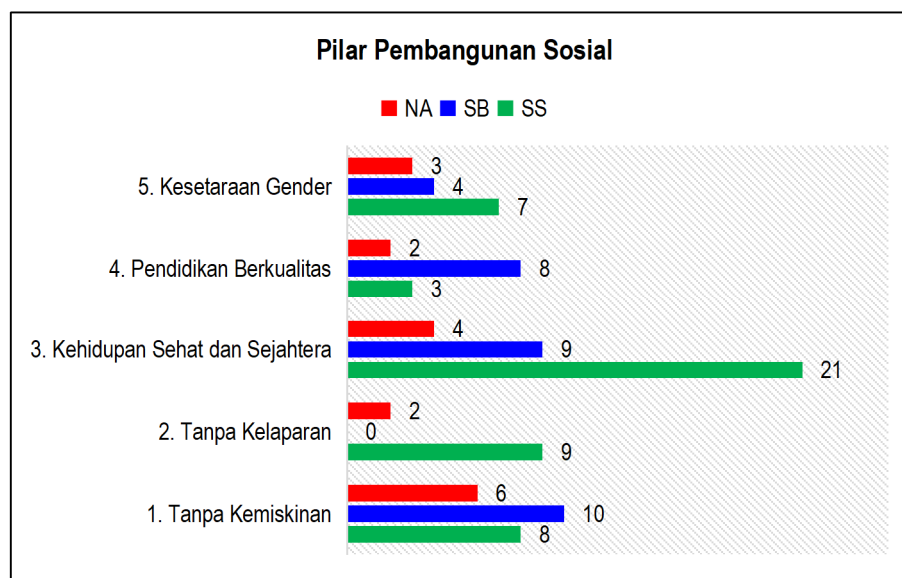
### 4.2.1. Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4 dan Tujuan 5. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 45. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial**

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
1. Tanpa Kemiskinan	8	10	6	24
2. Tanpa Kelaparan	9	0	2	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	21	9	4	34
4. Pendidikan Berkualitas	3	8	2	13
5. Kesetaraan Gender	7	4	3	14
<b>Jumlah</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>96</b>

Sumber : Hasil Analisis TPB Tahun 2021



**Gambar 44. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial**

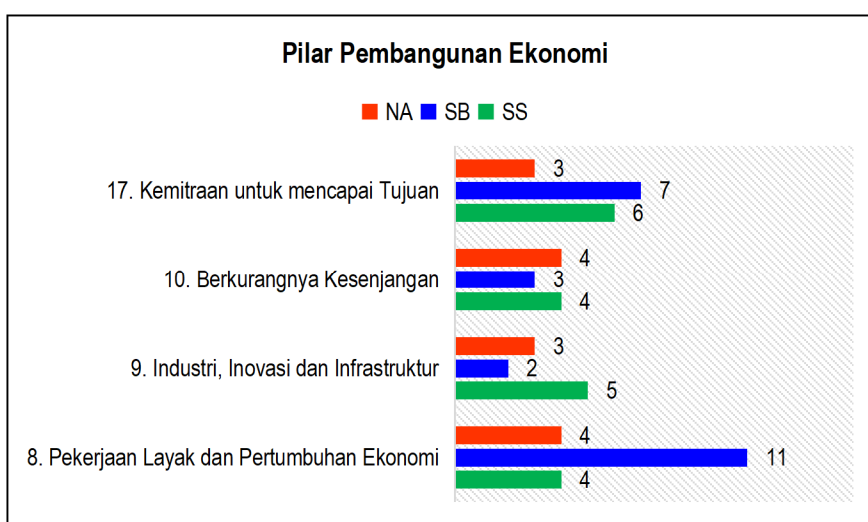
### 4.2.2. Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10 dan Tujuan 17. Pada indikator pilat ekonomi terdapat 5 indikator yang bukan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 46. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi**

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	0
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	11	4	19
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	2	3	10
10. Berkurangnya Kesenjangan	4	3	4	11
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	6	7	3	16
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>56</b>

Sumber : Hasil Analisis TPB Tahun 2021

**Gambar 45. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi**

#### 4.2.3. Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Pada indikator pilar lingkungan terdapat 3 indikator yang bukan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

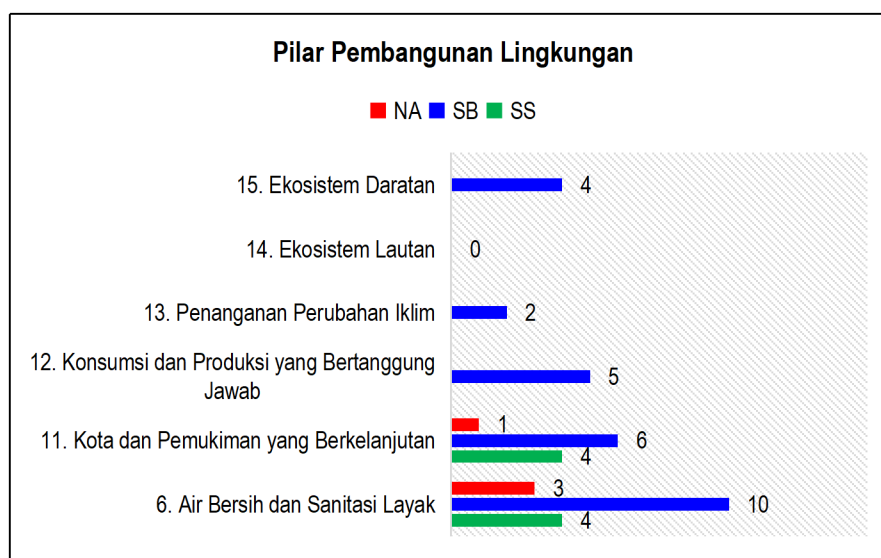
**Tabel 47. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan**

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	10	3	17
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	4	6	1	11
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	5	0	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	0	2	0	2



TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
14. Ekosistem Lautan	0	0	0	0
15. Ekosistem Daratan	0	4	0	4
<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>39</b>

Sumber : Hasil Analisis TPB Tahun 2021



Gambar 46. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan

#### 4.2.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

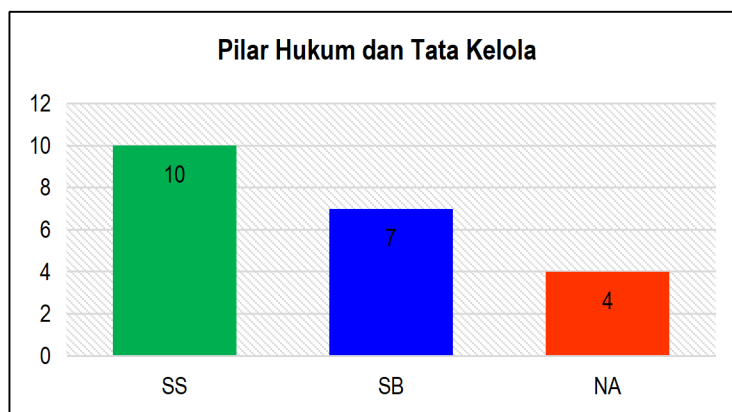
Indikator yang merupakan pilar hukum dan tata Kelola adalah Tujuan 16, yakni Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Capaian indikator untuk TPB/SDGs 16 ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 48. Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	10	7	4	21

Sumber : Hasil Analisis TPB Tahun 2021





Gambar 47. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

#### 4.3. Capaian Indikator TPB/SDGs Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 60 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73%, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

1. SPM Kesehatan

SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82% dari seluruh indikator TPB dan 43,33 % dari indikator SPM

2. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,67% dari indikator SPM

3. SPM Pekerjaan Umum

SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,67 % dari indikator SPM

4. SPM Pendidikan

SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91% dari seluruh indikator TPB dan 21,67 % dari indikator SPM

5. SPM Perumahan Rakyat

SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45% dari seluruh indikator TPB dan 1,67 % dari indikator SPM

6. SPM Sosial

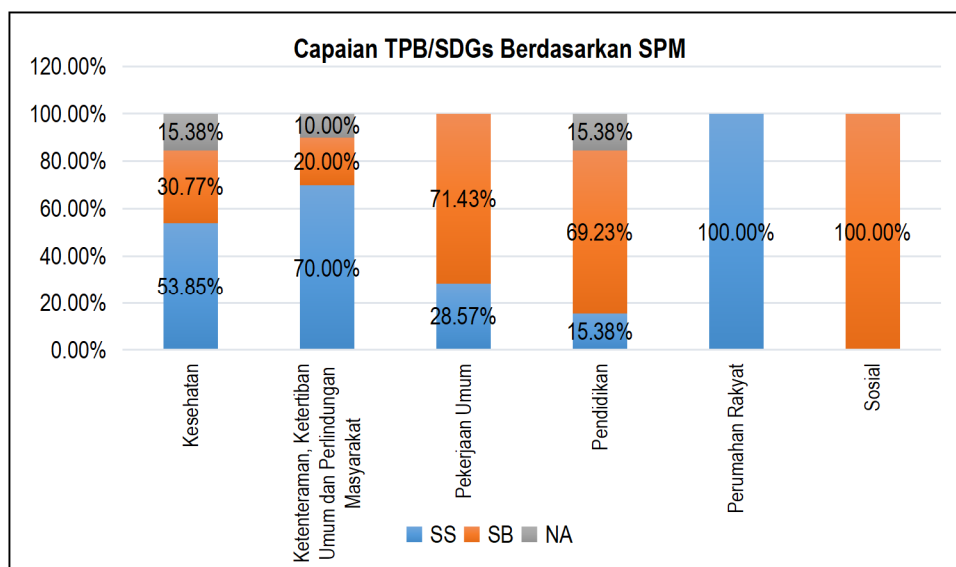
SPM Sosial sebanyak 3 indikator atau 1,36% dari seluruh indikator TPB dan 5% dari indikator SPM.



Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan SPM sebagaimana dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 49. Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya**

No	SPM	SS		SB		NA		Total	% TPB	% SPM
1	Kesehatan	14	53,85%	8	30,77%	4	15,38%	26	11,82%	43,33%
2	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	70,00%	2	20,00%	1	10,00%	10	4,55%	16,67%
3	Pekerjaan Umum	2	28,57%	5	71,43%	0	0,00%	7	3,18%	11,67%
4	Pendidikan	2	15,38%	9	69,23%	2	15,38%	13	5,91%	21,67%
5	Perumahan Rakyat	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1	0,45%	1,67%
6	Sosial	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	3	1,36%	5,00%
		26		27		7		60	27,27%	



**Gambar 48. Grafik Capaian TPB/SDGs berdasarkan SPM**

Lebih rinci daftar indikator TPB/SDGs yang merupakan SPM, dapat dilihat pada lampiran 5.

#### 4.4. Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat



pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “*No one left behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan focus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Dharmasraya dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 50. Peran OPD Kabupaten Dharmasraya dalam Pencapaian Target TPB/SDGs**

No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
1	Bag Adm Pembangunan	Tujuan 16; 17
2	Bagian Organisasi	Tujuan 16
3	Bagian Hukum	Tujuan 16
4	Bag. Perekonomian dan SDA	Tujuan 1
5	Bappeda	Tujuan 1; 8; 9; 10; 17
6	BKD	Tujuan 1; 16; 17
7	BKPSDM	Tujuan 5
8	BPBD	Tujuan 1; 11; 13
9	BPS	Tujuan 8; 9; 17
10	Dinas Kesehatan	Tujuan 1; 2; 3; 6
11	Diskominfo	Tujuan 4; 5; 9; 16; 17
12	DLH	Tujuan 6; 11' 12; 15
13	Dinas Pangan dan Perikanan	Tujuan 2
14	Dinas Perhubungan	Tujuan 9
15	Dinas Perkim	Tujuan 1; 6; 11
16	Dinas Pertanian	Tujuan 2



No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
17	Dinsos P2KBP3A	Tujuan 1; 3; 5; 10; 16
18	Disbudparpora	Tujuan 8; 11
19	Dinas Pendidikan	Tujuan 1; 4
20	Disdukcapil	Tujuan 1; 16; 17
21	Diskumperdag	Tujuan 8; 9
22	Disnakertrans	Tujuan 1; 8; 10
23	DPMD	Tujuan 10
24	DPMPTSP	Tujuan 8; 9
25	DPUPR	Tujuan 6; 11
26	Inspektorat	Tujuan 16
27	Kesbangpol	Tujuan 10; 16

Sumber : Hasil Analisis TPB Tahun 2021

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan peran dalam pelaksanaan TPB/SDGs baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendisemiasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.



## BAB V

### RUMUSAN ISU STRATEGIS

#### 5.1 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Konsultasi Publik

Konsultasi publik untuk merumuskan isu strategis dilaksanakan pada 26 Januari 2021. Rumusan isu strategis yang diperoleh dari hasil penjangkaran dengan melibatkan peserta konsultasi publik adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Kualitas Air
2. Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya
3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
4. Peningkatan kasus narkoba
5. Illegal Mining
6. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan
7. Kurangnya peluang dan informasi kerja
8. Infrastruktur jalan
9. Minimnya pengembangan perumahan
10. Masih rendahnya jumlah dan kualitas destinasi wisata
11. Alih fungsi lahan
12. Meningkatnya kenakalan remaja
13. Fasilitas sanitasi dan drainase yang minimal
14. Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat
15. Peningkatan kapasitas SDM yang minim
16. Rendahnya nilai tambah produk pertanian
17. Tingginya Pemakaian Pupuk Kimia

Setelah itu, dilakukan penapisan dengan menggunakan 5 kriteria berikut:

1. Karakteristik Wilayah
2. Tingkat Penting dan Luasnya Potensi Dampak
3. Keterkaitan antara Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan Isu Utama RPPLH

### 5. Keterkaitan dengan Isu DIKPLHD

Hasil penapisan isu strategis hasil konsultasi publik berdasarkan nilai pembobotan skoring tersebut dapat dilihat pada tabel 51.

**Tabel 51. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Hasil Konsultasi Publik**

Ranking	No isu	Isu PB STRATEGIS	Jumlah Skor
1	1	Penurunan Kualitas Air	657
2	2	Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya	628
3	5	Illegal Mining	627
4	11	Alih fungsi lahan	561
5	3	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	550
6	16	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	524
7	4	Peningkatan kasus narkoba	522
8	8	Infrastruktur jalan	517
9	6	Rendahnya kualitas infrastruktur jalan	514
10	12	Meningkatnya kenakalan remaja	508
11	13	Fasilitas sanitasi dan drainase yang minimal	503
12	15	Peningkatan kapasitas SDM yang minim	502
13	14	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	480
14	7	Kurangnya peluang dan informasi kerja	476
15	10	Masih rendahnya jumlah dan kualitas destinasi wisata	468
16	9	Minimnya pengembangan perumahan	424
17	17	Tingginya Pemakaian Pupuk Kimia	318

Setelah dilakukan penapisan isu strategis diatas berdasarkan pembobotan tertinggi dan melalui pertimbangan faktual, serta diskusi bersama peserta yang hadir, maka disepakati bahwa diperoleh 7 (tujuh) isu prioritas Kabupaten Dharmasraya yaitu:

**Tabel 52. Isu Prioritas Kabupaten Dhamasraya**

Ranking	No isu	Isu PB STRATEGIS	Jumlah Skor
1	1	Penurunan Kualitas Air	657
2	2	Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya	628

3	5	Illegal Mining	627
4	11	Alih fungsi lahan	561
5	3	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	550
6	16	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	524
7	14	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	480

Berdasarkan isu Isu Prioritas Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tabel 52, di atas adapun kondisi isu prioritas sebagai berikut :

#### 1. Penurunan Kualitas Air

Salah satu isu prioritas lingkungan Kabupaten Dharmasraya adalah penurunan kualitas air, yang selalu menjadi trending topik setiap tahunnya. Pencemaran air masih terjadi pada air permukaan atau sungai yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Beberapa sungai telah menjadi sumber air yang digunakan oleh penduduk setempat untuk melakukan aktifitas sehari-hari, seperti mencuci, mandi, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Beberapa SPAM (sistem Pengelolaan Air Minum) untuk pelayanan masyarakat masih bersumber dari air sungai.

Pencemaran air merupakan suatu perubahan kualitas fisik, kimia dan biologi air yang tidak diinginkan, sehingga dapat menimbulkan kerugian karena mempengaruhi sistem kehidupan, sehingga nantinya perlu dilakukan langkah konkrit berupa kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi isu pencemaran air ini, sehingga dampak positif upaya pemulihannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sumber pencemar terhadap kualitas air ini diindikasikan berasal dari Limbah pabrik yang tidak dilakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Limbah Pertanian dan Limbah domestik, Penambangan di Sungai, Pembuangan sampah ke Sungai.

Merujuk kepada Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan hidup (DIKPLHD kab. Dharmasraya Tahun 2020) menunjukkan bahwa kualitas air sumur memperlihatkan masih ada parameter yang tidak memenuhi baku mutu, diantaranya yaitu: Total Fosfat, Klorin Bebas, Sianida, Flourida, Mangan, Besi, Fecal Coliform dan Total Coliform, sedangkan kualitas air sungai memperlihatkan bahwa beberapa parameter fisika



mengalami perubahan yang cukup signifikan. Status 12 (dua belas) sungai dengan 17 (dua puluh dua sungai) titik pantau terindikasi tercemar ringan hingga sedang.

## 2. Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya

Salah satu permasalahan lingkungan yang mengakibatkan dampak dalam skala daerah serta menjadi topik pembicaraan adalah pengelolaan sampah. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna, atau bahan yang berasal dari proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah penduduk sekitar 288.555 jiwa dan luas daerah 302.599 Km<sup>2</sup>, dengan perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan sekitar 260,11 M3/hari dan kondisi timbulan sampah ini terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Selain dari aktivitas domestik penduduk, timbulan sampah juga berasal dari aktivitas ekonomi yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya.

Organisasi yang bertanggungjawab pada pengelolaan sampah Kabupaten Dharmasraya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan tipe B yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Terdapat 26 (dua puluh enam) personil pasukan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari personil pasukan penyapu jalan 6 (Enam) orang, Taman 6 (Enam) orang, Petugas TPA 2 (Dua) orang, Petugas Becak motor 4 (Empat) orang, Pasukan mobil 6 (Enam) orang dan Sopir 2 (dua) orang. Pasukan ini membantu dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah mulai dari pembersihan fasilitas umum di lokasi tertentu, hingga pengumpulan, pengangkutan dan penimbunan sampah di TPA.

Sebagai pendukung pengelolaan sampah wilayah, Kabupaten Dharmasraya memiliki sarana prasarana berupa 92 (Sembilan puluh dua) unit tempat penampungan sementara berupa container dan tong sampah, alat pengumpulan sampah berupa 15 (lima belas) unit becak motor, alat pengangkutan sampah berupa 4 (empat) unit dump truck dan 2 (dua) unit arm roll truck, serta 1 (satu) unit alat komposter. Tempat penampungan sampah sementara berupa tong sampah terpilah tersebar di beberapa titik seperti kantor





pemerintahan dan sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan yang selanjutnya kan dilakukan pengangkutan oleh petugas untuk dipindahkan ke container terdekat. Sedangkan container sampah ditempatkan pada titik-titik tertentu, seperti perumahan, pasar, tempat umum, untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan secara rutin dengan peta jalur yang telah ditentukan setiap harinya. Becak motor tersebar di beberapa nagari untuk membantu operasional Bank Sampah namun terdapat beberapa dalam kondisi rusak berat.

Kabupaten Dharmasraya memiliki 1 (satu) tempat pembuangan akhir (TPA) Robusa V yang berlokasi di Kecamatan Sitiung dengan luas area 6 Ha dan kapasitas maksimum 16.000 m<sup>3</sup>. Hingga saat ini volume TPA terpakai adalah 11.000 m<sup>3</sup>.

### 3. Illegal mining

Dengan banyak beroperasinya kegiatan penambangan batuan yang dilakukan secara illegal atau tanpa izin maka kegiatan penambangan dilakukan tanpa memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang mendorong terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Secara kronologisnya, sejarah penambangan emas pada Kabupaten Dharmasraya sejak dari nenek moyang dahulu tetapi aktifitasnya menggunakan peralatan sederhana yakni mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan penambangan emas rakyat mulai berubah teknologi dengan menggunakan peralatan relative modern yakni menggunakan mesin sedot yakni dompeng. Keadaan ini mulai berkembang dengan munculnya investor dan tenaga kerja dari luar yakni dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sehingga masyarakat lokal lebih banyak sebagai penyedia lahan bagi aktifitas tersebut.

Faktor penyebab kegiatan illegal mining ini antara lain minimnya peluang mata pencaharian, tingginya permintaan bahan galian dan lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat.

Gambaran aktifitas PETI pada Kabupaten Dharmasraya terbagi pada 2 (dua) aktifitas yaitu terjadi pada badan air yakni menggunakan kapal yang dilengkapi dengan mesin penyedot. Kegiatan penambangan emas menggunakan kapal ini terjadi pada beberapa titik pada alur Sungai Batanghari pada Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya adalah aktifitas PETI dengan menggunakan mesin dompeng yakni dengan melakukan



peyemprotan dinding sungai dan bantaran sungai kemudian dilakukan penyedotan dan dialirkan pada pemisahan secara fisik berdasarkan berat jenis pada filter/karpet. Aktivitas dompeng ini dominan terjadi pada anak-anak Sungai Batanghari yakni Sungai Palangko, Sungai Nyunyo, Sungai Piruko, Sungai Batang Momong, Sungai Koto Balai (secara administrasi pada bagian Barat wilayah Kabupaten Dharmasraya).

#### 4. Alih fungsi lahan

Pertumbuhan populasi atau penambahan penduduk suatu daerah diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dan sosial yang secara eksponensial menjadi permasalahan lingkungan, sehingga terjadinya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban seperti pengembangan infrastruktur, pemukiman dan kebutuhan lahan perkebunan serta penambahan akan kebutuhan produksi pangan, dan juga peningkatan kebutuhan energi, yang mana masing-masing kebutuhan ini memiliki implikasi pada lingkungan sehingga kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian akan meminta konversi lahan hutan.

Merujuk kepada DIKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Luas penggunaan lahan seperti lahan non pertanian, lahan sawah, lahan kering, lahan perkebunan, lahan hutan dan lahan badan air setiap tahun mengalami perubahan, terutama lahan kering mengalami penurunan sebesar 8,9% dari tahun sebelumnya.

#### 5. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Munculnya isu rendahnya derajat kesehatan masyarakat bukan hanya dari pandangan atau pendapat pada saat konsultasi publik, namun bila dilihat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebanyak 9 Indikator yang belum mencapai target dan 4 indikator yang tidak ada data, yaitu ;

- a. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
- b. Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.
- c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).



- d. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.
- e. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.
- f. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
- g. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- h. Persentase merokok pada penduduk umur  $\leq 18$  tahun.
- i. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur  $\geq 15$  tahun dalam satu tahun terakhir.
- j. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).
- k. Persentase merokok pada penduduk umur  $\geq 15$  tahun.

Disamping itu, pada saat konsultasi publik terhimpun beberapa masukan dari penyebab rendahnya kesehatan masyarakat antara lain belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat dan rendahnya pengetahuan Kesehatan dan perilaku hidup sehat.

6. Rendahnya nilai tambah produk pertanian

Beberapa pendapat pada saat konsultasi publik menunjukkan bahwa penyebab rendahnya nilai tambah produksi pertanian adalah belum bertumbuhnya industri pengolahan hasil dan belum optimalnya pengembangan pasar produk pertanian, Bila dilihat dari kondisi capaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) belum memiliki data.

7. Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat

Isu ini merupakan hasil interpestasi dari isu – isu lain yang muncul ada saat konsultasi publik seperti peningkatan kasus narkoba dan meningkatnya kenakalan remaja, adapun salah satu penyebabnya adalah tingginya intensitas perkembangan budaya *hedonic* atau *hedonisme*. *Hedonisme* adalah pandangan hidup atau gaya hidup yang mana sebuah kenikmatan dan kebahagiaan diri sendiri menjadi tujuan utama seseorang untuk menjalani hidup. Atau dengan kata lain hedonisme adalah orang-orang yang



mencari kesenangan hidup semata. Hedonisme telah mempengaruhi semua orang di era globalisasi ini. Hedonisme sudah menjadi budaya yang sangat buruk bagi semua kalangan bahkan para kaum muda. Hedonisme mampu merubah hidup seseorang yang dari biasa-biasa seketika berubah jadi luar biasa dengan cara yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Karena gaya hidup yang hedonisme, seseorang mampu melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan kesenangan semata.

Banyak dampak buruk yang dihasilkan dari budaya hedonisme antara lain : pergaulan bebas (sex bebas, clubbing dan pesta narkoba), individualisme, materialis, tidak bertanggung jawab, pemalas, tidak disiplin, plagiat, dan diskriminasi.

## 5.2 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung

Rumusan isu strategis berdasarkan DDDTLH dilakukan dengan dua metode perhitungan yaitu:

1. Metode *Supply* dan *Demand*;
2. Metode Jasa Ekosistem

Metode perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang digunakan adalah perbandingan ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

### 5.2.1 Analisis DDDTLH: Supply dan Demand (Daya Dukung Ril)

Daya dukung ini terdiri dari:

1. Daya dukung pangan;
2. Daya dukung air bersih; dan
3. Daya dukung fungsi lindung.

#### 5.2.1.1 Daya Dukung Pangan

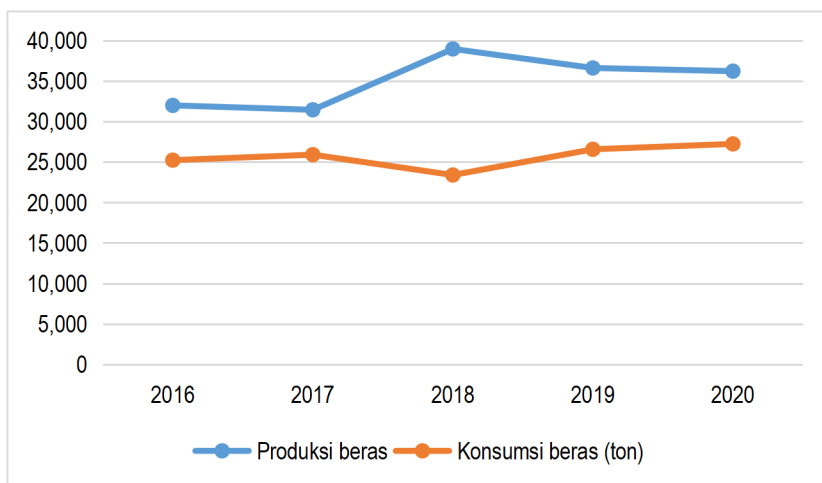
Kondisi eksisting daya dukung pangan (padi) Kabupaten Dharmasraya dengan metode ketersediaan dan kebutuhan pangan adalah surplus, artinya produksi lebih besar dari pada konsumsi. Data trend produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Dharmasraya dari

Tahun 2016 s/d 2020 pada Tabel 53, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir produksi beras masih menunjukkan angka surplus berkisar antara 5.000 s/d 11.000 ton/tahun.

**Tabel 53. Perhitungan Produksi dan Kebutuhan Beras (Surplus/Defisit) Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 -2020**

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Produksi</b>					
- Produksi GKP (ton)	59.279	58.266	72.204	67.842	67.114
- Konversi GKP – GKG	86,02%	86,02%	86,02%	86,02%	86,02%
- Produksi GKG	50.992	50.120	62.110	58.358	57.731
- Konversi GKG – beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%
- <b>Produksi beras</b>	<b>31.992</b>	<b>31.446</b>	<b>38.968</b>	<b>36.614</b>	<b>36.221</b>
<b>Konsumsi lokal</b>					
- Jumlah penduduk	229.313	235.476	212.653	241.517	247.579
- Tingkat konsumsi beras / tahun	110	110	110	110	110
- Konsumsi beras (kg)	25.224.430	25.902.360	23.391.830	26.566.870	27.233.690
- <b>Konsumsi beras (ton)</b>	<b>25.224</b>	<b>25.902</b>	<b>23.392</b>	<b>26.567</b>	<b>27.234</b>
<b>Surplus/defisit beras</b>	<b>6.768</b>	<b>5.543</b>	<b>15.576</b>	<b>10.047</b>	<b>8.987</b>

Sumber : 1. Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian  
2. Dharmasraya Dalam Angka 2016 sampai 2020



**Gambar 49. Grafik Perbandingan Produksi dan Konsumsi Beras Kab. Dharmasraya Lima tahun Terakhir (ton/tahun)**

Secara umum, daya dukung pangan Kabupaten Dharmasraya saat ini dapat dikategorikan rentan dalam penyediaan pangan karena terdapat 5 kecamatan dengan daya

dukung pangan defisit. Kondisi eksisting daya dukung pangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 54.

**Tabel 54. Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Kecamatan	Rata-Rata Produksi Padi (ton) <sup>*)</sup>	Rata-Rata Produksi Beras (ton) <sup>**)</sup>	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton) <sup>***)</sup>	Daya Dukung Pangan	Evaluasi
1	Sungai Rumbai	0	0	26.520	3.311	-	Defisit
2	Koto Besar	216,24	135,67	26.140	3.264	0,04	Defisit
3	Asam Jujuhan	394,48	247,50	20.000	2.497	0,10	Defisit
4	Koto Baru	6.688,27	4196,22	34.980	4.368	0,96	Defisit
5	Koto Salak	6.980,17	4379,36	17.110	2.136	2,05	Surplus
6	Tiumang	983,49	617,04	11.780	1.471	0,42	Defisit
7	Padang Laweh	5.100,63	3200,14	8.560	1.069	2,99	Surplus
8	Sitiung	15.806,12	9916,76	27.120	3.386	2,93	Surplus
9	Timpeh	4.194,86	2631,86	15.600	1.948	1,35	Surplus
10	Pulau Punjung	12.147,41	7621,29	50.770	6.339	1,20	Surplus
11	Sembilan Koto	5.751,51	3608,50	9.000	1.124	3,21	Surplus
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>58263,18</b>	<b>36554,32</b>	<b>247.580</b>	<b>30.913</b>	<b>1,18</b>	<b>Surplus</b>

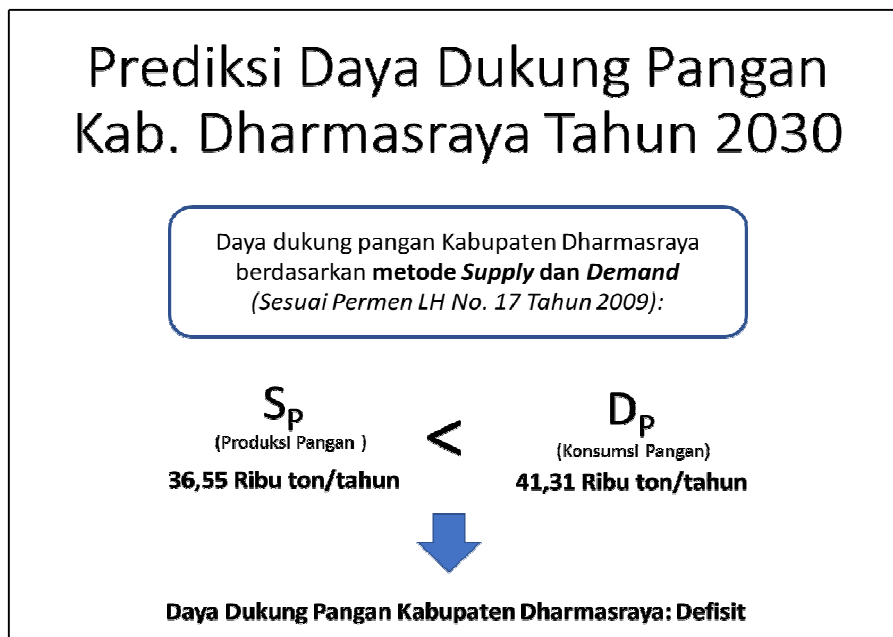
**Tabel 55. Proyeksi Produksi Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030**

No	Nama Kecamatan	Rata-Rata Produksi Padi (ton) <sup>*)</sup>	Rata-Rata Produksi Beras (ton) <sup>**)</sup>	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton) <sup>***)</sup>	Daya Dukung Pangan	Evaluasi
1	Sungai Rumbai	0	0,00	40.183	5.017	-	Defisit
2	Koto Besar	216,24	135,67	29.132	3.637	0,04	Defisit
3	Asam Jujuhan	394,48	247,50	41.112	5.133	0,05	Defisit
4	Koto Baru	6.688,27	4.196,22	41.970	5.240	0,80	Defisit
5	Koto Salak	6.980,17	4.379,36	18.923	2.363	1,85	Surplus
6	Tiumang	983,49	617,04	12.015	1.500	0,41	Defisit
7	Padang Laweh	5.100,63	3.200,14	14.277	1.783	1,80	Surplus
8	Sitiung	15.806,12	9.916,76	31.362	3.916	2,53	Surplus
9	Timpeh	4.194,86	2.631,86	17.710	2.211	1,19	Surplus
10	Pulau Punjung	12.147,41	7.621,29	73.261	9.147	0,83	Defisit
11	Sembilan Koto	5.751,51	3.608,50	10.928	1.364	2,64	Surplus
<b>Kab. Dharmasraya</b>		<b>58.263,2</b>	<b>36.554,32</b>	<b>330.874</b>	<b>41.313</b>	<b>0,88</b>	<b>Defisit</b>

Sumber : Hasil Analisis DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

Prediksi konsumsi beras Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 41.313 ton sedangkan prediksi produksi diperkirakan hanya 36.554,32 ton, seperti terlihat pada Tabel 55. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada tahun 2030 diperkirakan daya dukung pangan di Kabupaten Dharmasraya adalah defisit seperti terlihat pada Tabel 55.

Terdapat 6 Kecamatan yang diprediksi mengalami defisi pangan yaitu Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru. Kondisi ini jika dibiarkan tanpa upaya tambahan akan menyebabkan Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan mengalami defisit pangan pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 50. Daya Dukung Pangan dengan Metode Supply dan Demand

#### 5.2.1.2 Daya Dukung Air

Proyeksi kebutuhan air Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 56. Diperkirakan kebutuhan air untuk kebutuhan domestik mencapai 529,4 juta m<sup>3</sup>/tahun, untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan adalah 930,9 m<sup>3</sup>/tahun, jadi proyeksi total kebutuhan air Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 adalah 2,39 milyar m<sup>3</sup>/tahun.

Potensi penyediaan air bersih Kabupaten Dharmasraya pada saat ini berasal dari 18 sungai dengan total potensi ketersediaan air 2,8 milyar m<sup>3</sup>/tahun. Kondisi daya dukung air permukaan Kabupaten Dharmasraya adalah surplus karena potensi ketersediaan air lebih besar dari prediksi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel 57. Pada Gambar 51. terlihat

perkiraan Daya Dukung Air Permukaan surplus berdasarkan perhitungan kebutuhan air dengan metode supply dan demand (PermenLH 17 Tahun 2009).

**Tabel 56. Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030**

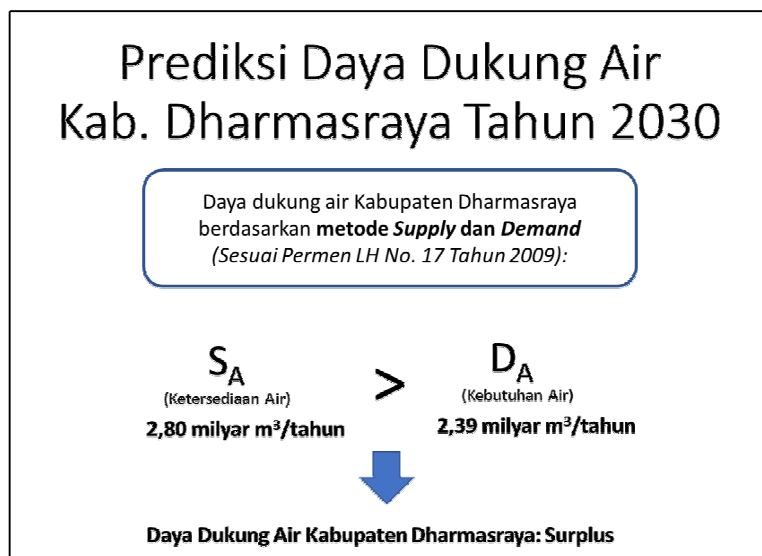
Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /org/tahun)	m <sup>3</sup> /tahun
Jumlah Penduduk	330.874	orang	1.600	529.398.011
Uraian	Besaran Luas Lahan (Alokasi RTRW)	Satuan	Kebutuhan Air (litr/detik/Ha)	m <sup>3</sup> /tahun
Kawasan Perkebunan	173.061,00	Ha	0,3	1.637.295.509
Kawasan Pertanian Lahan Basah	4.822,00	Ha	1	152.066.592
Kawasan Pertanian Lahan Kering	7.664,00	Ha	0,3	72.507.571
<b>TOTAL</b>				<b>2.391.267.683</b>

Sumber : Hasil Analisis DDDTLH Kabupaten Dharmasraya

**Tabel 57. Potensi Ketersediaan Sumber Air Kabupaten Dharmasraya**

No	Nama Sungai	Debit Min (m <sup>3</sup> /dtk)	m <sup>3</sup> /tahun
1	Batang Hari*	45	1.419.120.000
2	Batang Siat*	0,43	13.560.480
3	Batang Pangian*	4,83	152.318.880
4	Sungai Pangian*	3,09	97.446.240
5	Batang Muaro Momongan	6,83	215.390.880
6	Batang Timpeh	2,94	92.715.840
7	Batang Piruko*	4,93	155.472.480
8	Batang Sinamar	5,13	161.779.680
9	Sungai Jujuhan	4,09	128.982.240
10	Batang Sipotar	1,02	32.166.720
11	Batang Timpeh Usau	1,2	37.843.200
12	Batang Labo	0,09	2.838.240
13	Batang Mimpi	4,01	126.459.360
14	Batang Bungo	0,99	31.220.640
15	Sungai Betung	1,12	35.320.320
16	Batang Siraho	0,21	6.622.560
17	Sungai Asam	2,03	64.018.080
18	Sungai Nabuan	0,92	29.013.120
<b>Kab. Dharmasraya</b>			<b>2.802.288.960</b>





Gambar 51. Daya Dukung Air Permukaan dengan Metode Supply dan Demand

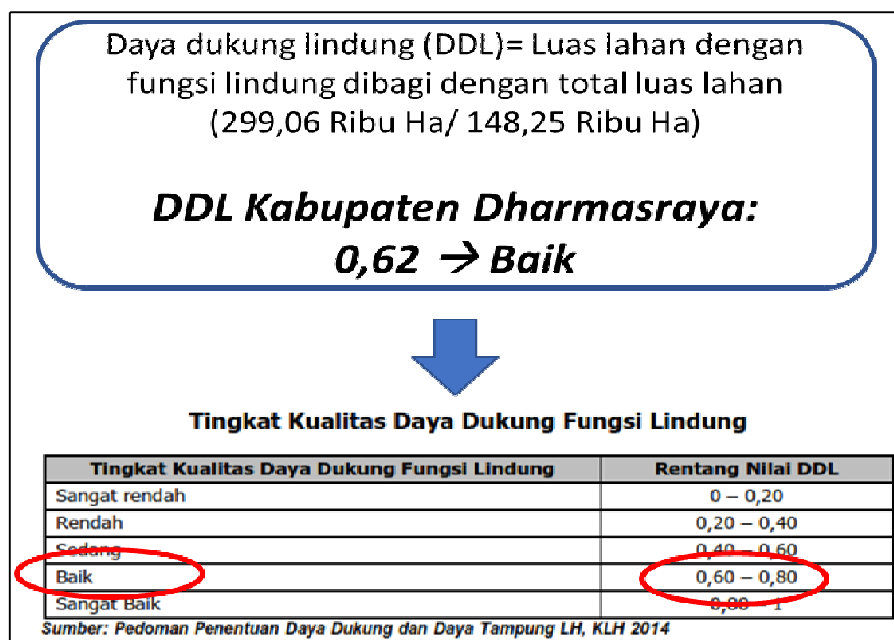
### 5.2.1.3 Daya Dukung Fungsi Lindung

Dari total luas lahan di Kabupaten Dharmasraya sekitar 299.062 Ha, sekitar 184.225,16 Ha yang mempunyai fungsi lindung. Fungsi lindung terluas terdapat pada rencana pola ruang kawasan perkebunan. Daya dukung lahan Kabupaten Dharmasraya dihitung berdasarkan rasio kawasan dengan fungsi lindung dengan total peruntukan lahan pada dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 58. Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas lahan dengan fungsi lindung
1	Hutan Lindung	11.406,00	0,98	11.177,88
2	Suaka Alam	5.372,00	0,98	5.264,56
3	Sempadan Sungai	6.605,00	0,98	6.472,90
4	Kawasan Cagar Budaya	918	0,98	899,64
5	Hutan Produksi	27.237,00	0,98	26.692,26
6	Hutan Produksi Konversi	17.901,00	0,98	17.542,98
7	Hutan Produksi Terbatas	28.296,00	0,98	27.730,08
8	Pertanian Lahan Basah	4.822,00	0,46	2.218,12
9	Pertanian Lahan Kering	7.664,00	0,46	3.525,44
10	Kawasan perkebunan	173.061,00	0,46	79.608,06
11	Kawasan Pertambangan	3.433,00	0,18	617,94
12	Kawasan Cadangan Pertanian	903	0,46	415,38
13	Kawasan Permukiman	11.444,00	0,18	2.059,92
	<b>Kab. Dharmasraya</b>	<b>299.062,00</b>		<b>184.225,16</b>

Daya dukung lahan Kabupaten Dharmasraya adalah 0,62. Nilai ini termasuk kategori sedang seperti terlihat pada Gambar 52. Oleh karena itu, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Dharmasraya membutuhkan upaya tambahan.



Gambar 52. Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya

### 5.2.2 Analisis DDDTLH: Jasa Ekosistem

Berdasarkan hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 59, dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air.
- Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan



pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir.

- Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak.
- Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah.
- Disisi lain, Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah.



Tabel 59. DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya

No	Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
	<b>Jasa Penediaan</b>			
1	Pangan	27,01	40,16	32,82
2	Air Bersih	8,60	41,84	49,56
3	Serat	99,06	0,24	0,70
4	Bahan Bakar	76,07	19,05	4,88
5	Sumberdaya Genetik	25,55	39,19	35,26
	<b>Jasa Pengaturan</b>			
1	Iklim	60,70	38,02	1,28
2	Tata Aliran Air dan Banjir	21,75	39,37	38,88
3	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	27,98	29,00	43,02
4	Pemurnian Air	54,34	44,81	0,85
5	Pengolahan dan Penguraian Limbah	16,98	26,28	56,74
6	Kualitas Udara	98,87	0,34	0,80
7	Penyerbukan Alami (Pollination)	57,97	40,77	1,25
8	Pengendalian Hama dan Penyakit	49,49	41,09	9,42
	<b>Jasa Budaya</b>			
1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,59	0,16	99,25
2	Rekreasi dan Ecotourism	24,84	55,25	19,91
3	Estetika	23,90	11,76	64,33
	<b>Jasa Pendukung</b>			
1	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	21,18	29,89	48,93
2	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	80,21	11,51	8,28
3	Produksi Primer	42,60	18,69	38,70
4	Biodiversitas	93,19	5,99	0,82

### 5.3 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Evaluasi TPB yang Belum Tercapai dan Tidak Ada Data

Pada Tabel 60. terlihat rumusan isu strategis Kaupaten Dharmasraya berdasarkan evaluasi TPB untuk Indikator SPM dan Non SPM sebagai berikut:

**Tabel 60. Rumusan Isu Strategis Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Evaluasi TPB**

No	Bidang	Isu Strategis
1	Pendidikan	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum banyak daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.</li> <li>4. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.</li> <li>5. Belum tercapainya target peningkatan Rata-rata lama sekolah penduduk umur <math>\geq 15</math> tahun.</li> <li>6. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</li> <li>7. Belum tercapainya target keseimbangan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.</li> <li>8. Belum tercapainya target peningkatan Persentase angka melek aksara penduduk umur <math>\geq 15</math> tahun.</li> <li>9. Belum tercapainya target peningkatan Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.</li> <li>10. Belum dilakukan upaya meningkatkan Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.</li> </ol>



No	Bidang	Isu Strategis
		<p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedia data proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.</li> </ol>
2.	Kesehatan	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</li> <li>2. Belum tercapainya target penurunan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.</li> <li>4. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.</li> <li>5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</li> <li>6. Belum dilakukan upaya penurunan Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).</li> </ol> <p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.</li> <li>2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.</li> <li>3. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis</li> <li>4. Belum tercapainya target penurunan Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.</li> <li>5. Belum tercapainya target Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.</li> <li>6. Belum tercapainya target Cakupan Jaminan Kesehatan</li> </ol>



No	Bidang	Isu Strategis
		<p>Nasional (JKN).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Belum tercapainya target penurunan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).</li> <li>8. Belum tercapainya target peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.</li> <li>9. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur <math>\leq 18</math> tahun.</li> <li>10. Belum dilakukan upaya penurunan Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur <math>\geq 15</math> tahun dalam satu tahun terakhir.</li> <li>11. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur <math>\geq 15</math> tahun.</li> </ol>
3	Pekerjaan Umum	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</li> <li>4. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.</li> <li>5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.</li> <li>6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.</li> </ol> <p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</li> <li>2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan</li> </ol>



No	Bidang	Isu Strategis
		<p>dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Belum tercapainya target Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.</li> <li>4. Belum tercapainya target Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.</li> <li>5. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.</li> <li>6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.</li> </ol>
4	Perumahan Rakyat	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</li> </ol> <p>NON SPM</p> <p>-</p>
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah</li> <li>2. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</li> <li>3. Belum tercapainya target penurunan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</li> <li>4. Belum tercapainya target penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).</li> <li>5. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</li> <li>6. Belum dilakukan upaya penurunan Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</li> </ol> <p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target penurunan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.</li> <li>3. Belum dilakukan upaya penurunan Jumlah kerugian</li> </ol>





No	Bidang	Isu Strategis
		<p>ekonomi langsung akibat bencana.</p> <p>4. Belum dilakukan upaya penurunan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.</p>
6	Sosial	<p>SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.</li> <li>3. Belum adanya pendampingan psikosial korban bencana sosial</li> </ol> <p>NON SPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.</li> <li>2. Belum ada upaya peningkatan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.</li> <li>3. Belum ada data Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.</li> <li>4. Belum ada upaya penurunan Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.</li> </ol>
7	Lingkungan Hidup (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target penyediaan Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</li> <li>2. Belum tercapainya target jumlah Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase sampah perkotaan yang tertangani.</li> <li>4. Belum tercapainya target Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).</li> <li>5. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.</li> <li>6. Belum tercapainya target Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.</li> <li>7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.</li> </ol>



No	Bidang	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Belum tercapainya target Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.</li> <li>9. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.</li> <li>10. Belum tercapainya target Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.</li> <li>11. Belum tercapainya target penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.</li> </ul>
8	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak (Non SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).</li> </ul>
9	Ketenagakerjaan (Non SPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan."</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.</li> <li>3. Belum tercapainya target penurunan Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.</li> <li>4. Belum tercapainya target peningkatan Persentase tenaga kerja formal.</li> <li>5. Belum tercapainya target penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.</li> <li>6. Belum tercapainya target penurunan Tingkat setengah pengangguran.</li> <li>7. Belum tercapainya target penurunan Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).</li> <li>8. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.</li> <li>9. Belum dilakukan upaya peningkatan Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).</li> <li>10. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan</li> </ul>



No	Bidang	Isu Strategis
		komunikasi (TIK).
10	Statistik (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per kapita.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan PDB per kapita.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.</li> <li>4. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).</li> <li>5. Belum dilakukan pengukuran Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).</li> </ol>
11	Pangan (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target penurunan Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.</li> </ol>
12	Kuangan (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</li> <li>4. Belum tercapainya target peningkatan Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</li> <li>5. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.</li> <li>6. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</li> <li>7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).</li> <li>8. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi.</li> </ol>
13	Kependudukan dan Cacatan Sipil (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya data Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.</li> </ol>
	komunikasi &	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah kepemilikan</li> </ol>



No	Bidang	Isu Strategis
	informatika (Non SPM)	<p>sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belum ada data Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.</li> <li>3. Belum dilakukan upaya peningkatan penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.</li> <li>4. Belum ada data Proporsi penduduk terlayani mobile broadband</li> </ol>
	Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.</li> <li>2. Masih kurangnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.</li> </ol>
	Pariwisata (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah wisatawan mancanegara.</li> <li>3. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.</li> <li>4. Tidak ada data Jumlah devisa sektor pariwisata.</li> </ol>
	Pemberdayaan masyarakat & desa (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target penurunan Jumlah desa tertinggal.</li> <li>2. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah Desa Mandiri.</li> <li>3. Tidak ada data Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.</li> </ol>
	Perindustrian (Non SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.</li> <li>2. Belum ada data Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.</li> <li>3. Belum ada data Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.</li> </ol>

## BAB VI. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI KLHS

Memperhatikan isu strategis hasil konsultasi publik, kondisi DDDTLH dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Kabupaten Dharmasraya, maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

### 6.1. Rekomendasi terkait Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik Kabupaten Dharmasraya

Atas isu yang disampaikan dari hasil konsultasi publik, pada Tabel 61 berikut rekomendasi arah kebijakan dan indikasi program. Arah kebijakan dan indikasi program ini dapat menjadi perhatian dan pertimbangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026.

**Tabel 61. Rekomendasi terkait isu strategis Hasil Konsultasi Publik Kabupaten Dharmasraya**

No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Arah Kebijakan
1	Penurunan Kualitas Air	Erosi, Limbah pabrik, Limbah Pertanian dan Limbah domestik, Penambangan di Sungai, Pembuangan sampah ke Sungai,	1. Meningkatkan pengendalian erosi melalui peningkatan tutupan vegetasi, 2. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah domestik. (IPAL Komunal) 3. Mengendalikan kegiatan pertambangan di Sungai 4. Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah industri 5. Memperkuat tata Kelola pengendalian pencemaran dan implementasi regulasi.



No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Arah Kebijakan
2	Peningkatan Timbulan Sampah	Peningkatan ragam sumber sampah, Rendahnya kapasitas pengelolaan,	Mengembangkan pengelolaan sampah 3R  Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.  Mendorong pemanfaatan sampah untuk energi
3	Illegal Mining	1. Minimnya Peluang Mata Pencaharian  2. Tingginya permintaan bahan galian  3. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat	1. Mengembangkan ragam usaha dan peningkatan akses permodalan usaha  2. Meningkatkan upaya pencarian bahan alternatif diperbaharui dan daur ulang  3. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk penegakan hukum.
4	Alih Fungsi lahan	Peningkatan pemukiman  Pengembangan infrastruktur jalan dan Gedung  Pemanfaatan hutan untuk perkebunan	Mengembangkan pemukiman hemat lahan (rumah susun sewa).  Mengembangkan rekayasa pembangunan infrastruktur (jalan layang)  Mengembangkan pengendalian pemanfaatan ruang  Menguatkan implementasi regulasi pemanfaatan ruang.  Mengembangkan LP2B dan mengembangkan insentif implementasi regulasi.



No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Arah Kebijakan
5	Rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat	<p>1. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan masyarakat</p> <p>2. Rendahnya pengetahuan Kesehatan dan perilaku hidup sehat.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan</p> <p>Mengembangkan infrastruktur pendukung pola hidup sehat (lapangan olah raga dll)</p> <p>Mengintensifkan pengembangan pengetahuan pola hidup sehat</p>
6	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	<p>Belum bertumbuhnya industri pengolahan hasil</p> <p>Belum optimalnya pengembangan pasar produk pertanian</p>	<p>Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian</p> <p>Meningkatkan kapasitas pengolahan pasca panen</p> <p>Mengembangkan kelembagaan pemasaran yang sehat dan Tangguh.</p>
7	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat	Tingginya intensitas perkembangan budaya hedonic.	<p>Meningkatkan Pendidikan keagamaan formal dan non formal.</p> <p>Mengembangkan infrastruktur peningkatan kualitas implementasi ajaran agama (perpustakaan, museum, rumah tahfiz).</p> <p>Mengembangkan Pendidikan agama dalam keluarga.</p> <p>Meningkatkan partisipasi Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam implementasi nilai-nilai agama.</p>



## 6.2. Rekomendasi terkait Isu Strategis Dari DDDTLH

Beberapa rekomendasi terkait isu strategis dari hasil kajian DDDTLH sebagai berikut:

1. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
2. Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah
4. Memberikan perlindungan terhadap sumberdaya genetik
5. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
6. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
7. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri
8. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertikal
9. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
10. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energy baru dan terbarukan.

## 6.3. Rekomendasi terkait Isu strategis Hasil Analisis TPB yang Belum Tercapai Berdasarkan SPM

Untuk pencapaian target tentu saja arah kebijakan dan program yang telah dijalankan saat ini perlu dilanjutkan. Perlu diketahui bahwa target yang ditetapkan dalam TPB adalah target pada tahun 2030, sehingga bila memang saat ini target tersebut belum tercapai perlu dibuat target antara sampai akhir periode RPJMD (tahun 2026).

Memperhatikan lebih jauh kondisi pencapaian target saat ini diperkirakan penyebab belum tercapainya target tersebut karena beberapa hal di bawah ini:





1. Target yang ditetapkan adalah target nasional dan merupakan target yang dirumuskan sesuai Perpres No 59/2017.
2. Adanya perbedaan nomenklatur dalam indikator untuk pencapaian target.
3. Belum adanya kesesuaian antara arah kebijakan departemen terkait yang membawahi OPD pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. OPD pelaksana masih merujuk pada indikator dan target yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Misalnya Dinas Kesehatan tentu lebih memprioritaskan pencapaian target sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan
4. Terlalu detailnya indikator yang terdapat dalam pencapaian TPB yang sebagian sudah tercakup dalam indikator yang telah ada.
5. Terdapat indikator yang secara budaya dan pandangan hidup masyarakat memerlukan penyesuaian kembali. Indikator tentang gender dan HAM yang merujuk kepada standard internasional perlu didiskusikan lebih saksama.

Untuk itu arah kebijakan yang telah ada memerlukan penyesuaian sedemikian rupa sehingga dapat diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang memang terarah kepada pencapaian target.

Berdasarkan hasil perumusan arah kebijakan dan indikasi program telah dituangkan target capaian TPB dan indikasi anggaran Kabupaten Dharmasraya untuk kurun waktu Tahun 2021 - 2026 seperti tercantum pada Lampiran 5.5. Untuk total perkiraan kebutuhan anggaran untuk program yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) untuk Tahun 2021-2026 adalah Rp. 273.106.611.344, sedangkan kebutuhan anggaran untuk program yang belum ada data (NA) adalah sebesar Rp. 93.346.196.896. Total kebutuhan anggaran untuk TPB yang SB dan NA adalah RP. 366.452.808.240. Sementara total anggaran yang diakomodir dalam RPJMD adalah sebesar Rp. 267.338.718.490 yaitu senilai 73% dari total kebutuhan anggaran. Hal ini disebabkan kondisi dan kemampuan daerah yang belum memungkinkan untuk mengakomodir semua program kegiatan hasil rekomendasi KLHS berdasarkan TPB.



#### **6.4. Penetapan Target dan Indikasi Anggaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kabupaten Dharmasraya sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV menunjukkan bahwa sebanyak 212 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS) sebanyak 85 indikator (40,09 %), sudah dilaksanakan belum mencapai (SB) target 88 indikator (41,51 %) dan tidak ada data (NA) sebanyak 39 indikator (18,40 %) telah ditetapkan target pencapaian sampai dengan masa priode RPJMD Kabupaten 2021 – 2026 untuk SB dan NA dengan Total Indikasi Alokasi Anggaran untuk TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) sebanyak Rp. 273.106.611.344 dan Total Indikasi Alokasi Anggaran untuk TPB yang tidak ada data (NA) sebesar Rp. 93.346.196.896 secara rinci dapat dilihat sebagaimana lampiran 5.5.

#### **6.5. Pengintegrasian Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ke Dalam Dokumen RPJMD Kab. Dharmasraya 2021 – 2026**

Hasil analisis pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutans sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya secara umum dari 17 tujaun pembangunan Berkelanjutan telah terintergasi kedalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, namun hanya 15 indikator dari 212 indikator yang baru dapat diintegarikan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari penjabaran visi dan misi. Kondisi ini mengingat dalam dokumen RPJMD belum secara rinci menggambarkan kegiatan dari program-program yang telah disusun dan mengingat keterbatasan anggaran yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Secara lengkap dapat dilihat sebagaimana lampiran 6.



#### **6.6. Sinkronisasi Program Unggulan Bupati Dharmasraya dengan Rekomendasi KLHS dan Visi Misi Kepala Daerah Terkait Indikator TPB SB dan NA**

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Kepala Daerah menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut “ Terwujudnya Kabupaten Dharasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya periode 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Untuk mendukung misi tersebut Kepala Daerah mencanangkan 14 Program Unggulan, dimana semua program unggulan ini sudah sesuai dengan rekomendasi KLHS, baik berdasarkan isu prioritas, berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung serta berdasarkan TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target dan yang tidak ada data (NA). Adapun 14 (empat belas) program unggulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



### **1. Lanjutan Pembangunan Islamic Center**

Keberadaan Islamic Center secara prospektif ke depan akan kami jadikan pusat kajian keislaman yang dilakukan oleh para ulama melalui forum diskusi atau muzakarah para ulama. Hasil kajian ulama akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah khususnya di bidang keagamaan dan adat istiadat dalam rangka mewujudkan filosofi “adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah”.

Selain itu, Islamic Center juga akan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat dalam bentuk usaha yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri, misalnya rest area dengan segala perlengkapannya. Program ini terkait dengan rekomendasi KLHS berdasarkan isu strategis berdasarkan hasil Konsultasi Publik.

### **2. Penyediaan Pasar Online dan Bantuan Modal UMKM**

Sejak diberlakukannya program pengurusan izin satu pintu, jumlah UMKM mengalami peningkatan sekitar 100% lebih dari 5.000 menjadi 10.017 UMKM. Untuk memicu pertumbuhan yang lebih tinggi, akan diberi bantuan modal pengembangan berupa alat produksi dan informasi pasar yang up to date. Untuk itu, sesegeranya akan dibuatkan Marketplace atau Pasar Online khusus bagi UMKM Dharmasraya dalam membentuk pemasaran yang lebih luas.

### **3. Rumah Digital & Kreativitas Milenial**

Rumah digital dan kreativitas akan dibangun di setiap kecamatan. Keberadaan rumah digital ini adalah untuk beradaptasi dengan persaingan global ke depan, Rumah Digital dan kreativitas akan dilengkapi sarana dan mentor. Selain bidang IT dan Marketing Online, juga akan diisi dengan pelatihan keterampilan konvensional seperti pelatihan Otomotif, Desainer Pakaian, Elektro dan bidang lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

### **4. Taman Budaya & Pengembangan Kelompok Seni**

Untuk menunjang kreativitas seni dan melawan pengaruh budaya negatif dari luar, kelompok seni yang aktif akan diberi dukungan perlengkapan sesuai kebutuhan. Taman



Budaya akan menjadi ajang untuk pentas pertunjukkan dan pusat diskusi pelaku seni dan budayawan untuk melestarikan dan menanamkan nilai-nilai budaya ke masyarakat.

#### **5. Memperkuat Program BPJS**

Berobat gratis untuk masyarakat Dharmasraya sudah kita mulai sejak 2017 secara bertahap. Tujuan untuk membuka akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Sampai tahun ini, warga Dharmasraya yang sudah memiliki jaminan kesehatan berdasarkan UU BPJS & UU SJSN mencapai 73% dari total warga Dharmasraya. Target kita di 2022 sudah mencapai 100%. Untuk pencapaian angka 100% akan dilakukan secara bertahap karena kita juga butuh dana yang cukup besar khususnya dalam mempersiapkan segala sarana dan infrastruktur menuju pelayanan yang prima.

#### **6. Kursus Bahasa Asing Gratis**

Kursus bahasa asing gratis dan pelatihan untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri ataupun kampus-kampus terbaik dalam negeri khusus untuk masyarakat Dharmasraya. Bagi yang mendapatkan beasiswa di luar negeri atau kampus-kampus terbaik di Indonesia, akan dibantu biaya selama pengurusan administrasinya sampai selesai.

#### **7. Pelayanan Publik Online**

Seluruh pelayanan publik seperti urusan dokumen dan perizinan, telah harus dilakukan secara online tanpa datang ke kantor tempat proses perizinan. Program ini sudah dimulai dengan aplikasi pengurusan dokumen catatan sipil dan aplikasi Si Ampuh untuk pengurusan izin. Sehingga masyarakat bisa dimanjakan dengan pelayanan yang efektif.

#### **8. Insentif Sekolah dan Seragam Gratis**

Walaupun iuran sekolah sudah ditanggung oleh Dana BOS, tapi untuk pengembangan sekolah, Komite masih memerlukan beberapa pungutan. Agar tidak memberatkan wali murid, setiap sekolah diberikan dana insentif oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan operasional sekolah yang selama ini Pemerintah Daerah sudah



mengucurkan Rp 25 juta untuk TK, Rp 50 juta untuk SD dan Rp 75 juta untuk SLTP. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah juga akan memberikan seragam gratis bagi siswa baru.

#### **9. Alat Mesin Pertanian & Bibit Gratis**

Dalam rangka pengembangan usaha-usaha pertanian dalam arti luas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana untuk saat ini Pemerintah Pusat telah memberikan pupuk bersubsidi, maka pemerintah daerah bertugas memastikan petani untuk mendapatkan bibit gratis dan bantuan alat mesin pertanian. Sampai saat ini sudah ada 481 alat mesin pertanian yang dibagikan ke petani melalui kelompok tani. Selain bibit sawit, karet, padi dan tanaman palawija, ke depan Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan bibit tanaman rempah yang bisa ditanam tumpang sari dengan sawit dan karet yang kesemuanya itu diarahkan untuk meningkatkan ekonomi petani.

#### **10. Peningkatan TPP 50% & Beasiswa Tugas Belajar**

Untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di periode kami sebelumnya, telah dilakukan kenaikan Tunjangan Pegawai sebesar 120%. Ke depan akan dinaikkan 50%. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi para ASN, akan disediakan beasiswa tugas belajar.

#### **11. Kartu Ajaib Jaminan Hari Tua**

Jumlah masyarakat Lanjut Usia di Dharmasraya mencapai angka 20 ribu. Sekitar 7 ribu berasal dari keluarga belum sejahtera. Tahun lalu sudah diberi bantuan langsung oleh Pemda Rp. 1 juta per jiwa. Ke depan, akan dilanjutkan sehingga mencapai angka 100% dari 7 ribu tersebut. Para lanjut usia tersebut akan diberikan kartu yang bisa digunakan untuk menerima berbagai bantuan sosial dari Pemerintah Daerah seperti bantuan modal usaha, sembako, pengobatan gratis, dan lainnya.

#### **12. Insentif Tokoh Agama dan Adat**

Dalam upaya peningkatan kualitas penghayatan nilai-nilai keagamaan oleh masyarakat, maka program pemberian insentif kepada imam, khatib, garis masjid, guru ngaji, dan perangkat ninik mamak di setiap nagari akan tetap dilanjutkan. Karena beliau-



beliau inilah yang memegang peranan penting dalam membentuk karakter generasi penerus dan sosial masyarakat yang sesuai “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”.

### **13. Pengaspalan Jalan dan Jembatan Baru**

Selama ini kami membuat kebijakan mengaspal atau betonisasi dan membangun jembatan baru di semua jalan poros nagari, terutama daerah yang belum pernah tersentuh pembangunan. Ke depan, semua jalan poros nagari di Dharmasraya yang sudah rusak, akan diaspal atau beton, termasuk jalan pertanian, sehingga akan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat khususnya para petani.

### **14. Restorasi Sungai dan Hutan**

Aktivitas tambang rakyat yang sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu, menyisakan lahan-lahan yang tidak produktif dan merusak lingkungan. Beberapa program yang sudah berjalan seperti menjadikan bekas tambang sebagai taman bambu akan dilanjutkan. Selain itu, akan ada bibit tanaman produktif gratis untuk lahan di pinggiran Batanghari dan sungai lainnya. Tanamannya berupa pohon manggis, durian, jengkol dan tanaman tua lainnya.



## A. Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

Tabel 62. Bidang Pendidikan Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Mengembangkan system Pendidikan layanan khusus	<p>Pengembangan SDM untuk Pendidikan layanan khusus</p> <p>Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana Pendidikan layanan khusus</p> <p>Pengembangan model Pendidikan layanan khusus</p> <p>Pengembangan regulasi Pendidikan layanan khusus</p> <p>Peningkatan peran serta stakes holder dalam pengembangan Pendidikan layanan khusus</p>	<p>1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum.</p>
2	4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)	Meningkatkan kompetensi siswa terhadap literasi dan numerasi	<p>Peningkatan sarana prasarana penunjang pencapaian kompetensi minimum</p> <p>Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan</p> <p>Peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pencapaian standar kompetensi minimum</p> <p>Pengembangan perpustakaan masyarakat</p>	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.





NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	matematika.			
3	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan	<p>Penyediaan reward dan punishment bagi keluarga anak usia SD</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan bantuan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu</p> <p>Penguatan Kerjasama dengan Lembaga dan pihak swasta terkait</p> <p>Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang Pendidikan</p> <p>Peningkatan muatan bahan ajar berbasis keagamaan dan muatan lokal.</p> <p>Peningkatan akhlak pendidik dan tenaga kependidikan.</p>	<p>Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.03 s.d. 05.</p>
4	4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan SMP/MTs/ sederajat.	<p>Peningkatan sarana dan prasarana SMP sesuai dengan standar kelayakan</p> <p>Pengembangan transportasi untuk Pendidikan</p> <p>Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang pendidikan</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan bantuan Pendidikan</p>	<p>Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.03 s.d. 05.</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			bagi keluarga kurang mampu  Pengembangan muatan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat	
5	4.1.1.(g)  Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan  Mendorong pengembangan dan peningkatan mutu perguruan tinggi di Dharmasraya	Peningkatan kampanye atau sosialisasi tentang Pendidikan  Pemberian beasiswa atau bantuan bagi siswa yang kurang mampu  Pengembangan SMK yang relevan  Penguatan program satu rumah satu sarjana  Pengembangan Kerjasama dengan PTN dan PTS  Pengembangan kemudahan pendirian kampus	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.
6	4.2.2.(a)  Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatkan sistem pengelolaan dan kualitas PAUD	Penataan sarana dan prasarana PAUD sesuai dengan standar  Peningkatan SDM  Pengembangan kurikulum PAUD (termasuk Pendidikan keagamaan)  Peningkatan peran nagari dalam	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.  1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum.



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>pengembangan PAUD</p> <p><b>Note.</b> Memikirkan alternatif pengelolaan PAUD</p>	
7	<p>4.5.1*</p> <p>Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.</p>	<p>Meningkatkan kualitas Pendidikan dasar dan menengah</p> <p>Meningkatkan akses ke perguruan tinggi</p>	<p>Peningkatan akreditasi sekolah dari SD, SMP, dan SMA</p> <p>Peningkatan peran stakeholder dalam mendorong angka partisipasi sekolah</p> <p>Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar dan menengah</p> <p>Peningkatan kualitas administrasi pendidikan</p> <p>Pengembangan Kerjasama dengan PTN dan PTS</p> <p>Penguatan program satu rumah satu sarjana</p> <p>Peningkatan peran serta</p>	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.
8	<p>4.6.1.(a)</p> <p>Persentase angka melek aksara penduduk umur</p>	<p>Mengembangkan Pendidikan keaksaraan fungsional</p>	<p>Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal</p>	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	≥15 tahun.		<p>Pengembangan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional</p> <p>Peningkatan dukungan penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan fungsional</p>	1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9	<p>4.c.1*</p> <p>Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.</p>	Meningkatkan kompetensi profesional Tenaga Pendidik	<p>Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik</p> <p>Peningkatan Kesempatan Untuk memenuhi standar kompetensi professional</p> <p>Pengembangan klinik menuju peningkatan akreditasi</p> <p>Peningkatan koordinasi untuk mendorong peningkatan peluang akreditasi</p>	<p>1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>
10	<p>4.6.1.(b)</p> <p>Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.</p>	Meningkatkan kesempatan untuk mengikuti program paket A, paket B, dan paket C	<p>Pengembangan Lembaga Pendidikan non formal</p> <p>Pengembangan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional</p> <p>Peningkatan infrastruktur Pendidikan keaksaraan</p>	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.



## B. Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

Tabel 63. Bidang Kesehatan Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan layanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan  Meningkatkan system pendataan sasaran	Peningkatan koordinasi dengan jaring dan jejaring  Peningkatan sistem rujukan Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang persalinan di Faskes Peningkatan verifikasi dan validasi data  Pengembangan sarana prasarana pendukung sistem pendataan	1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat  1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan
3	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran	Meningkatkan layanan kesehatan pada balita	Peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	hidup.		<p>Peningkatan sarana prasarana</p> <p>Peningkatan kuantitas dan pemerataan tenaga kesehatan</p> <p>Pengembangan sistem rujukan</p> <p>Pengembangan Kerjasama dengan lintas sektor, tokoh masyarakat</p> <p>Peningkatan sosialisasi tentang kesehatan balita</p>	<p>masyarakat</p> <p>1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Kesehatan</p> <p>1.02.04 Program sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman</p>
4	3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Mengembangkan persepsi publik tentang pentingnya imunisasi dasar.	<p>Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan MUI, lintas sektor, tokoh adat dan TOMA</p>	<p>1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat imunisasi</p> <p>Peningkatan promosi Kesehatan melalui sosial media</p>	
9	<p>1.4.1.(a)</p> <p>Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.</p>	Meningkatkan layanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan bagi masyarakat miskin	<p>Peningkatan akses pelayanan dan dukungan persalinan bagi masyarakat miskin</p> <p>Peningkatan verifikasi dan validasi data</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan</p>	<p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan</p>
5	<p>3.7.1*</p> <p>Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.</p>	Meningkatkan keterlibatan PUS dalam ber-KB	<p>Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap program KB</p> <p>Peningkatan jumlah tenaga penyuluh KB di Kecamatan dan kader KB</p> <p>Peningkatan akses terhadap layanan KB</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja</p>	<p><b>Program</b> : pembinaan keluarga berencana (kb)</p> <p><b>Sub Program:</b></p> <p>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</p> <p>Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB  Pengembangan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga  Pengembangan system insentif dan dis insentif terhadap peserta KB	Budaya Lokal  Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas  Lapangan KB (PKB/PLKB)
12	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Meningkatkan kualitas pengelolaan keluarga berencana	Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi sehat  Peningkatan koordinasi dan regulasi ketersediaan data berbasis gender  Pendewasaan usia kawin  Peningkatan pembangunan keluarga dan genre  Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait tentang kesehatan reproduksi  Peningkatan pengetahuan kelompok sasaran terhadap reproduksi sehat dan program KB	2 08 04 Program peningkatan kualitas keluarga  2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb)





Tabel 64. Bidang Kesehatan Non SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatkan sistem pendataan kependudukan	Peningkatan kualitas SDM pendataan kependudukan Peningkatan verifikasi dan validasi data	Program perlindungan dan jaminan social (social) 1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (dinkes)
5	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Meningkatkan sistem pencatatan  Meningkatkan kepedulian sosial	Peningkatan kerjasama lintas sektor dan instansi terkait Peningkatan SDM Pengembangan prasarana pendukung Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Peningkatan sistem pencatatan kependudukan di tingkat nagari Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat Peningkatan kualitas hubungan kemasyarakatan	1.02.05 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
6	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan	Peningkatan sosialisasi tentang asuransi kesehatan di masyarakat  Pengembangan insentif untuk nagari dengan cakupan 100%	
7	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan cakupan JKN (Total Corporate)	Penguatan regulasi  Peningkatan pengawasan  Peningkatan pembiayaan dari pemerintah	
8	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana      Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KB	Peningkatan kualitas pelayanan KB  Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB  Penguatan regulasi tentang program KB  Peningkatan Pengendalian pengelolaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi  Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang KB  Pengembangan system insentif dan disentif terhadap peserta KB	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana  (KB)



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Peningkatan peran ninik mamak dan alim ulama	
9	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatkan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang program KB	<p>Peningkatan kualitas dan frekuensi penyuluhan dan konseling KB</p> <p>Pengembangan sarana edukasi penyuluhan KB</p> <p>Pendampingan Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui kampung KB</p> <p>Pengembangan konseling pranikah</p>	<p>2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana</p> <p>(kb)</p>
10	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur $\leq 18$ tahun.	Meningkatkan kualitas hidup remaja	<p>Peningkatan Sosialisasi tentang bahaya merokok dan pandangan agama terhadap kebiasaan merokok di sekolah dan masyarakat</p> <p>Penguatan peran keluarga dalam mencegah perokok pada anak dan remaja</p> <p>Penguatan implementasi dan pengawasan PERDA rokok</p> <p>Pengembangan regulasi tentang rokok di sekolah</p>	<p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Pengembangan sarana prasarana pendukung</p> <p>Pemberian reward dan punishment pada nagari dan komunitas remaja dalam penegakan PERDA rokok</p> <p>Pengembangan komunitas remaja anti rokok</p> <p>Peningkatan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan</p>	
11	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur $\geq 15$ tahun dalam satu tahun terakhir.	Meningkatkan kualitas hubungan sosial di kalangan remaja	<p>Pengawasan tempat – tempat peredaran alkohol di masyarakat</p> <p>Pengembangan regulasi bahaya mengkonsumsi alkohol</p> <p>Kerjasama dengan pihak sekolah dalam penanganan siswa pencandu alkohol</p> <p>Peningkatan apresiasi dan insentif pada komunitas remaja yang tidak mengkonsumsi alkohol</p> <p>Pengembangan komunitas remaja anti alkohol</p>	<p>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
12	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatkan kualitas kesehatan remaja dan dewasa	Peningkatan Sosialisasi tentang bahaya rokok ke masyarakat  Penguatan implementasi dan pengawasan PERDA rokok  Pengembangan sarana prasarana pendukung	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat  Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Pemberian reward dan punishment pada nagari dan komunitas dalam penegakan PERDA rokok  Pengembangan komunitas anti rokok	

### C. Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 65. Bidang Pekerjaan Umum Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatkan kepedulian dan partisipasi parapihak dan masyarakat dalam pengembangan sanitasi layak	Pengembangan basis data untuk penyediaan sanitasi yang layak  Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat  Pengembangan kapasitas kelompok untuk pengelola sanitasi komunal	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Pengembangan pemanfaatan sistem pengolahan air limbah setempat dan terpusat</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan tokoh masyarakat lokal / pemangku adat/ ulama dalam upaya merubah perilaku masyarakat.</p> <p>Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi</p>	
1	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum	<p>Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air minum yang tersedia di Kabupaten Dharma Raya.</p> <p>Pengembangan partisipasi pemangku adat, nagari dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.</p> <p>Pengembangan regulasi dalam menjaga k3 sumber daya air.</p> <p>Pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan bagi masyarakat</p> <p>Peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM pengelola sumber daya air</p>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas	Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air baku yang tersedia di	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	(K3) sumber Air Baku	<p>Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>Peningkatan Kerjasama dengan pemangku adat, nagari dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.</p> <p>Pengembangan regulasi dalam menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) sumber daya air.</p> <p>Pengembangan sistem sistem sarana dan prasarana air baku (embung, waduk sebagai cadangan sumber air baku)</p>	
4	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) air minum	<p>Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air minum yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat (pemangku adat, nagari) dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.</p> <p>Pengembangan regulasi dalam menjaga K3 sumber daya air.</p> <p>Peningkatan infrastruktur penyediaan air minum</p>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
5	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Mengembangkan dukungan untuk ketersediaan sanitasi yang layak	<p>Pengembangan basis data untuk penyediaan sanitasi yang layak</p> <p>Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat</p> <p>Pembentukan kelompok pengguna pengelola sanitasi komunal</p> <p>Pengembangan pemanfaatan sistem pengolahan air limbah setempat dan terpusat</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat</p>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
6	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan implementasi konservasi sumber air minum	<p>Pengembangan basis data penduduk yang memiliki sumber air minum aman dan berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan Kerjasama konservasi sumber-sumber air antar para pihak</p> <p>Penguatan Kerjasama dengan tokoh adat/pemangku adat/nagari untuk menjaga kelestarian hutan</p> <p>Pengembangan infrastruktur pengolahan air minum</p>	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum





Tabel 66. Bidang Pekerjaan Umum Kategori NON SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
8	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatkan cakupan nagari STBM	<p>Peningkatkan PHBS di masyarakat</p> <p>Peningkatan akses masyarakat memanfaatkan air bersih</p> <p>Peningkatan percepatan Universal Akses terhadap jamban sehat, atau pencapaian status Open Defecation Free (ODF)</p> <p>Peningkatan sarana prasarana</p> <p>Penguatan kelembagaan TBM</p>	<p>1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</p> <p>1.02.05 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</p>
2	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Mengembangkan tatakelola menuju pengelolaan lumpur tinja optimal	<p>Peningkatan jumlah lumpur tinja yang masuk dan dikelola IPLT</p> <p>Peningkatan regulasi pengelolaan limbah tinja</p> <p>Peningkatan infrastruktur IPLT</p> <p>Pengembangan kerjasama pengangkutan lumpur tinja ke IPLT</p>	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			dengan pihak ketiga (swasta) Pengembangan lembaga pengelola layanan lumpur tinja Pengembangan insentif pengelolaan lumpur tinja	
4	6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak pemakai air dengan pihak jasa penyedia air dan antar pemanfaat air.	Peningkatan intensitas koordinasi antara pihak pengguna air dengan pihak penyedia air	Program pengelolaan sumber daya air
5	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	-	-	-
13	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Pemicuan dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
6	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Mengembangkan sarana prasarana (infrastruktur) pengelolaan lumpur tinja yang aman dan berkelanjutan	Pengembangan regulasi pengelolaan limbah tinja Peningkatan infrastruktur IPLT Pengembangan kerjasama pengangkutan lumpur tinja ke	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			IPLT.  Pengembangan lembaga pengelola layanan lumpur tinja	

#### D. Arah Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 67. Bidang Perumahan Rakyat Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
3	11.1.1.(a)  Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatkan dukungan bagi ketersediaan rumah layak huni serta PSU yang layak	Peningkatan kerjasama penyediaan rumah layak huni  Pengembangan basis data untuk penyediaan hunian layak  Peningkatan pemahaman masyarakat tentang urgensi rumah layak huni	Program pengembangan perumahan  Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh  Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)



## E. Arah Kebijakan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, &amp; Perlindungan Masyarakat

Tabel 68. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, &amp; Perlindungan Masyarakat Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana terhadap warga Negara yang berada di daerah rawan bencana	<p>Peningkatan system dasar penanggulangan bencana daerah (termasuk peningkatan koordinasi antar sektor)</p> <p>Peningkatan kapasitas satgas dalam penanggulangan bencana</p> <p>Pengembangan basis data penanggulangan bencana</p> <p>Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan warga Negara yang berada pada daerah rawan bencana</p> <p>Peningkatan infrastruktur ramah lingkungan yang berfungsi mencegah dan mengurangi dampak bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>
2	1.5.3* Dokumen strategi	Mengembangkan basis data spasial kebencanaan	Pengembangan dokumen KRB, RPB, dan dokumen rencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		kontigensi  Peningkatan koordinasi antar sektor menuju pengembangan infrastruktur tangguh bencana  Pengembangan regulasi menuju terwujudnya bangunan tangguh bencana  Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur kebencanaan.	Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota  Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
3	11.5.1*  Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Mengembangkan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana	Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana  Peningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan dan penurunan resiko bencana  Peningkatkan kerjasama dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah  Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
4	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunkan tingkat resiko bencana	<p>Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana</p> <p>Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana</p> <p>Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>
5	11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Mengembangkan sistem pengurangan resiko bencana	<p>Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana</p> <p>Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana</p> <p>Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
6	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mengembangkan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur berbasis mitigasi bencana  Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana  Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
7	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menekan jumlah korban bencana yang diakibatkan perubahan iklim	Pengembangan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim  Peningkatan partisipasi publik dalam mitigasi perubahan iklim.  Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan perubahan iklim.  Peningkatan koordinasi lintas	Program Penanggulangan Bencana Daerah  Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota  Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana  Pelayanan Penyelamatan dan



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
8	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Meningkatkan kapasitas pengendalian dampak bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi	<p>sektor</p> <p>Optimalisasi penataan ruang (pada pusat-pusat pertumbuhan)</p> <p>Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana</p> <p>Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana</p> <p>Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana</p> <p>Pengembangan regulasi penurunan risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi</p> <p>Peningkatan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana</p>	<p>Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p> <p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>





Tabel 69. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, &amp; Perlindungan Masyarakat Kategori NON SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Meningkatkan Jaminan Keamanan Masyarakat	Peningkatan Paham Keagamaan Kepada Masyarakat  Peningkatkan Penerapan Norma Sosial dalam Kehidupan  Penguatan Kapasitas dan Koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu POLRI dan TNI  Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
2	16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatkan Jaminan Keamanan Masyarakat	Peningkatan Paham Keagamaan Kepada Masyarakat  Peningkatkan Penerapan Norma Sosial dalam Kehidupan  Penguatan Kapasitas dan Koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu POLRI dan TNI	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
9	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi bencana	<p>Peningkatan ketahanan sosial ekonomi dan budaya dalam menghadapi bencana</p> <p>Peningkatan sarana prasarana untuk pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat</p> <p>Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana</p> <p>Pengembangan system penyediaan pangan cadangan pasca bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>
10	11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Mengembangkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan dampak bencana.	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam penanggulangan dampak bencana.</p> <p>Pengembangan infrastruktur</p> <p>Peningkatan kapasitas pemulihan sarana prasarana fasilitas public</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana	
4	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Meningkatkan Jaminan Keamanan Masyarakat	Peningkatan Paham Keagamaan Kepada Masyarakat Peningkatan Penerapan Norma Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat Penguatan Kapasitas dan Koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu POLRI dan TNI Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

#### F. Arah Kebijakan Bidang Sosial

Tabel 70. Bidang Sosial Kategori SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
1	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan	Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan	Pengembangan regulasi pelayanan publik yang inklusif Peningkatan infrastruktur publik	<b>Program :</b> Rehabilitasi sosial <b>Sub Program:</b>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	terhadap layanan publik	<p>yang ramah disabilitas</p> <p>Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan</p> <p>Pengembangan teknologi pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas</p> <p>Peningkatan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas baik secara psikis maupun fisiologis</p>	<p>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas</p> <p>Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,</p> <p>serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p>
3	1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Mengembangkan tata kelola penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	<p>Peningkatan kemampuan petugas dalam penyediaan layanan tanggap bencana (tagana)</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana layanan tanggap bencana</p> <p>Peningkatan koordinasi system layanan tanggap bencana</p> <p>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</p>	<p><b>Program:</b> penanganan bencana</p> <p><b>Sub Program:</b></p> <p>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
4	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Mengembangkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pendampingan psikososial	Peningkatkan kualitas SDM tenaga pendamping korban bencana sosial  Peningkatan sarana dan prasarana pendampingan psikososial  Peningkatan partisipasi masyarakat lokal (ada pelibatan guru BK, Alim Ulama, ninik mamak)	<b>Program:</b> Penanganan bencana  <b>Sub Program:</b> Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Tabel 71. Bidang Sosial Kategori NON SPM

NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
2	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data DTKS sebagai syarat penerima bantuan tunai bersyarat/PKH	Peningkatan kemampuan petugas pendata DTKS  Pengembangan regulasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data (kaitkan dengan program pelayanan kesehatan, kriteria PKH)	Program: perlindungan dan jaminan sosial  Sub Program :



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
		Meningkatkan kemandirian keluarga penerima PKH	<p>Peningkatan sarana verifikasi dan validasi data</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam verifikasi dan validasi data</p> <p>Peningkatan kualitas pendampingan terhadap penerima PKH</p> <p>Peningkatan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam indikator program PKH</p> <p>Pengembangan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemandirian KPM</p>	<p>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p>
3	<p>1.a.1*</p> <p>Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.</p>	<p>Meningkatkan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan</p> <p>Mengembangkan upaya untuk menurunkan angka</p>	<p>Peningkatan kualitas dan validitas data kemiskinan,</p> <p>Pengembangan akses permodalan usaha bagi penduduk miskin.</p> <p>Pengembangan infrastruktur bagi peningkatan produktivitas</p>	<p>rogram perlindungan dan jaminan sosial</p> <p>Program pelayanan izin usaha simpan pinjam</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
		kemiskinan	<p>masyarakat miskin.</p> <p>Pengembangan beasiswa pendidikan bagi Keluarga miskin</p> <p>Pengembangan pola pembayaran upah buruh tani</p> <p>Peningkatan kualitas Penjaminan pelayanan kesehatan bagi KK miskin</p>	<p>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)</p> <p>Program pengembangan UMKM</p> <p>fasilitasi bantuan modal kerja bagi KK miskin oleh Baznas</p> <p>Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>Program Pengelolaan Pendidikan (untuk SD dan SMP) yang dilakukan melalui belanja bansos</p> <p>Fasilitasi Penyaluran beasiswa oleh Baznas</p> <p>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <p>Program penyuluhan pertanian program</p>



NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
				pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
11	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang hidup di bawah 50 persen berdasarkan Kesetaraan Gender dan inklusif	<p>Peningkatan koordinasi dan regulasi ketersediaan data</p> <p>Peningkatan penyediaan lapangan kerja berbasis gender dan inklusif</p> <p>Peningkatan akses permodalan bagi disabilitas dalam pengembangan usaha</p> <p>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan berdasarkan Kesetaraan Gender dan inklusif</p>	<p>Program pengarusutamaan gender dan</p> <p>Pemberdayaan perempuan Program peningkatan kualitas keluarga</p> <p>Program pengelolaan sistem data Gender dan anak</p>
3	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Meningkatkan peluang kerja dan kesempatan berusaha penduduk miskin di daerah tertinggal	<p>Pengembangan proyek padat karya yang mempekerjakan penduduk miskin.</p> <p>Penguatan lembaga bumhag dalam peningkatan usaha</p>	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa





NO	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			penduduk miskin  Peningkatan keterampilan penduduk miskin dalam pengembangan usaha.  Peningkatan dana UMKM untuk masyarakat miskin	

#### G. Arah Kebijakan Bidang Lainnya

Tabel 72. Arah Kebijakan Kategori Bidang Lainnya

JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
Keuangan	16.6.1.(c)  Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Memberikan apresiasi bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Peningkatan sarana dan prasarana system e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa  Peningkatan kapasitas SDM pengguna system e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa  Peningkatan system aplikasi (software) e-procurement  Peningkatan akses layanan informasi terkait pengadaan barang	Program pengadaan barang dan jasa



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
Keuangan	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Mengidentifikasi potensi-potensi kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU	dan jasa	Program Perekonomian dan Pembangunan
Keuangan			Pemetaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui program KPBU	
Keuangan			Identifikasi Badan Usaha yang memiliki potensi untuk dapat dikerjasamakan  Penyusunan regulasi dalam mendukung program KPBU	
Keuangan	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Meningkatkan alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan KPBU	Penentuan volume dan alokasi kegiatan KPBU yang proporsional	Program Perekonomian dan Pembangunan
Balitbang Daerah	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan	Memberikan apresiasi bagi unit layanan publik yang mematuhi standar pelayanan publik	Pemberian penghargaan bagi unit layanan publik yang mematuhi standar pelayanan publik	Program Penataan Organisasi



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
Balitbang Daerah  Balitbang Daerah	pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Pemberian insentif bagi unit layanan publik yang memperoleh nilai terbaik dalam kepatuhan standar pelayanan publik  Pemberian tambahan anggaran bagi perangkat daerah yang telah mematuhi standar pelayanan publik	
energi & sumber daya mineral	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik khususnya untuk MBR	Pelaksanaan pendataan MBR yang terverifikasi dan tervalidasi  Peningkatan pelaksanaan program listrik subsidi  Pemetaan daerah yang berpotensi untuk Pengembangan energi terbarukan (PLTMH dan Solar Cell)	Program Perekonomian Dan Pembangunan
statistik  statistik	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Mendorong nilai tambah sektor yang memberi kontribusi dominan terhadap PDRB	Peningkatan kapasitas petani guna meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui sekolah lapang dan pelatihan teknis	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian  Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
statistik				Program Penyuluhan Pertanian
statistik			Peningkatan kapasitas dan kualitas peralatan dan infrastruktur pertanian	
statistik			Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan pasca panen guna mendorong nilai tambah pertanian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
statistik				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
statistik			Peningkatan ruang lebih besar UMKM untuk pemasaran yang lebih besar	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
statistik				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
statistik				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
statistik				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
statistik				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
statistik				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umk)
statistik			Mendorong perkembangan IKM pengolahan hasil pertanian lokal	Program Pengembangan Umkm
Kuangan	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkatkan pendapatan daerah  Meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah dari dana transfer	Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PDRD) Peningkatan tatakelola PDRD Peningkatan sarana prasarana pendukung PDRD Peningkatan tatakelola pelaporan kinerja pemerintah daerah	
	17.1.1.(a)  Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Meningkatkan pendapatan daerah	Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PDRD) Peningkatan tatakelola PDRD	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			Peningkatan sarana prasarana pendukung PDRD	
	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Melakukan pendekatan anggaran dengan rencana strategis dan rencana kerja tahunan pemerintah	Penyusunan KUA dan PPAS sesuai Renstra dan RKPD Pemda; Penyusunan anggaran kas dan time schedule pelaksanaan pekerjaan yang lebih rasional; Percepatan dan optimalisasi serapan belanja dengan tetap menjaga kualitas hasil.	
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkatkan pajak daerah	Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PDRD) Peningkatan tatakelola PDRD  Peningkatan sarana prasarana pendukung PDRD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
komunikasi & informatika	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan	Peningkatan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan transparansi	Program informasi dan komunikasi publik



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	informasi dan dokumentasi publik	informasi publik Penguatan kelembagaan PPID Peningkatan kualitas jangkauan informasi dokumentasi daerah	
lingkungan hidup	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Meningkatkan penataan penggunaan air untuk lahan pertanian/perkebunan dan industri	Pengembangan regulasi penataan penggunaan air, <i>Cleaner production</i> bagi industry, dan regulasi menuju penerapan <i>polluter must pay principle</i>  Peningkatan infrastruktur penataan penggunaan air  Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok pengguna air  Penguatan kelembagaan kelompok pengguna air  Pengembangan kerjasama pemanfaatan air berbasis jasa	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>ekosistem</p> <p>Peningkatan pemanfaatan limbah agro industri.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparat pengelola sumber daya air.</p>	
kehutanan	<p>6.5.1.(f)</p> <p>Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.</p>	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai	<p>Peningkatan kepedulian masyarakat pada lokasi tangkapan sungai</p> <p>Pengembangan regulasi terkait daerah tangkapan sungai</p> <p>Peningkatan pelestarian daerah tangkapan sungai</p> <p>Pengembangan kerjasama pengelolaan daerah tangkapan sungai berbasis jasa ekosistem dengan daerah tetangga</p> <p>Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai</p> <p>Sinkronisasi pengembangan pemeliharaan daerah tangkapan</p>	<p>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup</p> <p>Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p>





JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			air.  Pengembangan Kerjasama pengelolaan daerah tangkapan sungai dengan instansi vertikal	
lingkungan hidup	6.5.1.(g)	Mengembangkan koordinasi dengan Lembaga-lembaga pengelola sumber daya air	Pengembangan basis Kerjasama dalam penataan kelembagaan sumber daya air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
lingkungan hidup	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Pengembangan forum pengelolaan Sungai Batanghari	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
lingkungan hidup				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
lingkungan hidup	11.6.1.(a)	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan
lingkungan hidup	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
			<p>Pengembangan dan peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah berbasis 3R</p> <p>Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan sampah</p> <p>Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan sampah</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah</p> <p>Pengembangan regulasi dalam pengelolaan sampah</p> <p>Pengembangan pengelolaan sampah berbasis <i>sircular economy</i>.</p> <p>Pengembangan kapasitas pengelolaan sampah spesifik</p> <p>Pengembangan Kerjasama menuju waste energy</p> <p>Pengembangan regulasi pengurangan sampah dari sumber</p>	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
lingkungan hidup	12.4.2.(a)	Meningkakan pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan	Pengembangan regulasi pengelolaan limbah B3 dan Proporsi limbah B3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
lingkungan hidup	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		Penguatan pentaatan perizinan pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
lingkungan hidup			Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3	
lingkungan hidup			Peningkatan SDM pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3	
lingkungan hidup			Peningkatan insfrastruktur pengelolaan limbah B3 dan Proporsi limbah B3	
lingkungan hidup			Pengembangan regulasi menuju penerapan <i>polluter must pay principle</i>	
lingkungan hidup	12.5.1.(a)	Meningkatkan tanggungjawab penghasil sampah dalam	Pengembangan regulasi pengelolaan sampah untuk penghasil sampah (Perda 9/2015,	Program Pengelolaan Persampahan



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
lingkungan hidup	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	pengelolaan sampah	Perbub jakstrada)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
lingkungan hidup			Pengembangan punishment dan reward bagi penghasil sampah	
lingkungan hidup			Peningkatkan Kerjasama dengan penghasil sampah dalam pengelolaan persampahan	
lingkungan hidup			Peningkatan advokasi penggunaan produk atau bahan baku ramah lingkungan oleh penghasil sampah	
lingkungan hidup			Peningkatan intensitas implementasi regulasi	
lingkungan hidup	12.6.1.(a)	Mengembangkan dukungan menuju penerapan standar sertifikasi lingkungan.	Peningkatan edukasi kepada pelaku agroindustry dalam penerapan sertifikasi ISO 14001	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)  Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
lingkungan hidup	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		Pengembangan insentif dan reward	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
lingkungan hidup			Pengembangan regulasi untuk akselerasi sertifikasi (ISO, ISPO, RSPO dan lainnya)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
lingkungan hidup				Program Pengelolaan Persampahan
lingkungan hidup	12.7.1.(a)		Pengembangan Regulasi terkait Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
lingkungan hidup	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkatkan pemahaman stakeholder terkait	Peningkatan koordinasi dan pemahaman stakeholder terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ramah lingkungan	
lingkungan hidup			Peningkatan dukungan menuju terwujudnya UMKM yang memproduksi produk ramah lingkungan	
lingkungan hidup	12.8.1.(a)	Meningkatkan infrastruktur publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Penyediaan konten-konten edukasi, apresiasi dan efisiensi pengelolaan SDA serta inovasi pengelolaan sampah.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup.



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
lingkungan hidup	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Peningkatan sarana dan prasarana akses pendukung	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
lingkungan hidup			Pengembangan Kompetisi dan reward konten creator berbasis lingkungan	
lingkungan hidup			Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan (jalur pejalan kaki dan sepeda).	
lingkungan hidup			Pengembangan SOP menuju infrastruktur ramah lingkungan	
kehutanan	15.1.1.(a)	Mengembangkan koordinasi lintas sektor	Pengembangan Kerjasama pengelolaan hutan berbasis jasa ekosistem	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
kehutanan	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		Penguatan implementasi Regulasi perlindungan terhadap Tutupan Hutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
kehutanan			Penguatan Lembaga Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
kehutanan			Pengembangan SDM Lembaga/ Kelompok Masyarakat Peduli Hutan	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
kehutanan			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Konservasi Lahan	
kehutanan			Pengembangan pengelolaan hutan kota	
lingkungan hidup	15.3.1.(a)	Mengembangkan pemulihan lahan kritis akses terbuka	Peningkatan partisipasi publik dalam pemanfaatan lahan akses terbuka berbasis kerjasama	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup
lingkungan hidup	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		Peningkatan kualitas dan kuantitas Restorasi lahan kritis	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
lingkungan hidup			Peningkatan kerja sama multistakeholder dalam pemulihan lahan kritis	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
lingkungan hidup			Pengembangan tata kelola pemanfaatan lahan kritis	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
lingkungan hidup			Peningkatan inovasi dan pemasaran produk hasil restorasi	
lingkungan hidup	15.6.1*	Mengembangkan system penjaminan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masyarakat lokal	Pengembangan basis data hak kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
lingkungan hidup	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.		Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam pengembangan system penjaminan Hak Kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal	
lingkungan hidup			Peningkatan sarana prasarana dalam pengembangan system penjaminan Hak Kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal	
lingkungan hidup			Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses manfaat Kerjasama dalam rangka REDD + dan mekanisme imbal jasa lingkungan lainnya	
lingkungan hidup	15.9.1.(a)	Mengembangkan koordinasi lintas sektor menuju pemanfaatan kehati berkelanjutan	Pengembangan sistem informasi Kehati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)





JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
lingkungan hidup	Dokumen rencana pemanfaatan pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Peningkatan Koordinasi dalam penyediaan data kehati	
lingkungan hidup			Pengembangan <i>mascot</i> daerah berbasis kehati	
perhubungan	9.1.2.(b)	Mengembangkan Sistem Transportasi Terintegrasi.	Penguatan Regulasi, Institusi, Teknologi dan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pelayaran
perhubungan	Jumlah dermaga penyeberangan.		Pengembangan Sarana dan Prasarana transportasi Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
perhubungan			Pengembangan Pelabuhan Sungai sesuai dengan Amanat Kawasan Pariwisata Strategis	Program Pengelolaan Penerbangan
perhubungan			Peningkatan kualitas Pelayanan Publik.	
perhubungan			Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
pariwisata	8.9.1*	Meningkatkan kualitas destinasi dan pemasaran wisata serta usaha ekonomi kreatif.	Peningkatan unsur 3 A (amenitas, atraksi dan aksesibilitas) dalam pengembangan destinasi wisata.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
pariwisata	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi SDA dan sosial budaya.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
pariwisata			Peningkatan variasi promosi wisata.	Program Pemasaran Pariwisata
pariwisata			Penguatan kerjasama industry pariwisata dengan pentahelix	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan program pengembangan SDM pariwisata dan ekraf.
pariwisata			Pengembangan destinasi wisata yang memiliki nilai jual bagi wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
pariwisata	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan	Meningkatkan kualitas promosi dan sistem pengelolaan pariwisata.	Peningkatan unsur 3 A (amenitas, atraksi dan aksesibilitas) dalam pengembangan destinasi wisata.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
pariwisata	mananegara.  8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkatkan kualitas destinasi dan industri pariwisata yang inovatif	Pengembangan sistem informasi pariwisata secara menyeluruh berbasis digital.	Program pemasaran pariwisata.
pariwisata			Peningkatan kualitas event wisata Peningkatan kerjasama pentahelix	Program Pemasaran Pariwisata
pariwisata			Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar daya tarik wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
pariwisata			Peningkatan unsur 3 A (amenitas, atraksi dan aksesibilitas) dalam pengembangan destinasi wisata.	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
pariwisata			Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi SDA dan sosial budaya.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
pariwisata			Peningkatan kerjasama lintas sektor dan pentahelix.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
pariwisata			Pemberdayaan masyarakat dan pelaku wisata.	Program pengembangan SDM pariwisata dan ekraf.
pariwisata			Intensifikasi penerapan protocol kesehatan berbasis CHSE (cleanliness, healthy, safety dan environment).	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
tenaga kerja	1.3.1.(b)	Meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
tenaga kerja	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Mengoptimalkan penataan aturan perundang undangan tentang ketenagakerjaan	Pengembangan regulasi tentang jaminan sosial bidang ketenagakeerjaan	
tenaga kerja	8.3.1.(a)		Pengembangan insentif dan disinsentif kepada pemberi kerja	
tenaga kerja	Persentase tenaga kerja formal.		Peningkatan pemahaman para pihak dibidang ketenagakerjaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
tenaga kerja	8.5.2*	Meningkatkan kesempatan kerja	Peningkatan lapangan kerja baru	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
tenaga kerja			Peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan	
tenaga kerja	8.5.2.(a)	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	Peningkatan pelatihan dan keterampilan kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
tenaga kerja	Tingkat setengah pengangguran.		Pengembangan pusat-pusat pelatihan kerja di nagari	
tenaga kerja	8.6.1*	Meningkatkan produktifitas dan keterampilan usia 15 – 24 tahun	Menambah paket pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
tenaga kerja	Persentase usia muda 15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).			
tenaga kerja	10.4.1.(b)	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keikutsertaan Jamsostek di setiap tenaga kerja di Perusahaan-Perusahaan	Pembentukan forum kepatuhan yang diprakarsai BPJS Kerenagakerjaan, terdiri dari Pemda, Kejaksaan dan Pengawas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
tenaga kerja	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang			



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
	Ketenagakerjaan.			
Pemberdayaan masyarakat & desa	10.1.1.(c)	Meningkatkan sistem tata kelola pembangunan nagari.	Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Nagari	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pemberdayaan masyarakat & desa	Jumlah desa tertinggal.		Peningkatan kualitas pengelolaan dana dan asset desa	
Pemberdayaan masyarakat & desa			Pengembangan regulasi sistem tata kelola pembangunan nagari	
pemberdayaan masyarakat & desa	10.1.1.(d)	Meningkatkan sistem tata kelola pembangunan nagari.	Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Nagari	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa
pemberdayaan masyarakat & desa	Jumlah Desa Mandiri.		Peningkatan kualitas pengelolaan dana dan asset desa	
pemberdayaan masyarakat & desa			Pengembangan regulasi sistem tata kelola pembangunan nagari	
penanaman modal	8.10.1*	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian lokal	Peningkatan perizinan UMKM pada jasa perbankan	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
penanaman modal penanaman modal penanaman modal	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa		Peningkatan kerjasama dan optimalisasi perizinan jasa perbankan Peningkatan diversifikasi jenis usaha berbasis masyarakat Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha	
Keuangan  Keuangan  Keuangan	16.6.1.(d)  Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan RB	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan entri data dalam aplikasi RB Peningkatan kapasitas personil dalam pelaksanaan evaluasi RB Pengembangan kapasitas personil dalam penyampaian informasi terkait indeks reformasi birokrasi ke dalam aplikasi RB Kemepanrb	Program Administrasi Umum
pemberdayaan masyarakat & desa	10.1.1.(e)	Meningkatkan capaian elemen nagari mandiri	Pengembangan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pendukung ekonomi pada desa tertinggal .	program penyelenggaraan jalan



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
pemberdayaan masyarakat & desa pemberdayaan masyarakat & desa pemberdayaan masyarakat & desa pemberdayaan masyarakat & desa pemberdayaan masyarakat & desa	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		Peningkatan kerjasama pembangunan antar nagari	program pengelolaan sumber daya air (sda)  program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum  Program pengelolaan pendidikan  Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat  program peningkatan kerjasama desa
tenaga kerja          tenaga kerja	4.4.1*     Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) remaja dan dewasa	Peningkatan kualitas SDM remaja dan dewasa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  Pengembangan infrastruktur TIK untuk masyarakat	Program informasi dan komunikasi publik       Program aplikasi informatika





JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
tenaga kerja			Penyediaan sarana dan prasarana TIK di area publik	
tenaga kerja			Optimalisasi kerjasama dengan provider	
komunikasi & informatika	5.b.1*	Memperkuat akses informasi dan komunikasi menuju kesetaraan gender	Penyetaraan kesempatan penggunaan akses pada sistem informasi	Program aplikasi informatika
komunikasi & informatika	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		Pengembangan regulasi menuju kesetaraan gender	
komunikasi & informatika	17.6.2.(b)	Mendorong pemasangan jaringan pitalebar	Peningkatan fasilitasi untuk pengembangan jaringan pitalebar	
komunikasi & informatika	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan fixed broadband	Peningkatan jumlah penduduk pengguna internet	
komunikasi & informatika		Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan fixed broadband	Pengembangan pemahaman masyarakat terhadap arti penting TIK	
komunikasi & informatika	17.6.2.(c)	Mendorong peningkatan pelayanan mobile broadband agar dapat terkoneksi ke jaringan internet	Penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara cepat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
koperasi, usaha kecil, & menenga	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatkan akses UMKM kepada lembaga pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan regulasi yang mendorong daya tumbuh UMKM</li> <li>2. Peningkatan kapasitas SDM UMKM dalam pengelolaan usahanya</li> <li>3. Peningkatan daya saing UMKM</li> </ol>	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program pengembangan UMKM
tenaga kerja	2.3.1*	Meningkatkan diversifikasi produk pasca panen	Pengembangan Regulasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian Terhadap Tenaga Kerja di Sektor Pertanian.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
tenaga kerja	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).		Pengembangan kapasitas SDM pengolahan produk pertanian.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
tenaga kerja			Pengembangan Infrastruktur pengolahan hasil panen pertanian.	
tenaga kerja			Peningkatan Kerjasama dengan mitra pada sektor Pertanian.	
tenaga kerja			Pengembangan sistem pemasaran produk pasca panen.	
tenaga kerja			Pengembangan pertanian berbasis wisata.	
pariwisata	8.9.1.(c)	Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif	Penetapan regulasi sesuai arah kebijakan untuk mengatur	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
pariwisata	Jumlah devisa sektor pariwisata.	serta mengoptimalkan peranan pemerintah dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif	pendapatan dibidang pariwisata	dan Ekonomi Kreatif
pariwisata			Penguatan strategi pemasaran bidang pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
pariwisata			Penguatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis	Program Pemasaran Pariwisata
pariwisata			Pengembangan industry pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
pariwisata			Mewujudkan kreativitas masyarakat dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi	
pariwisata			Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi serta kebijakan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif	
pariwisata			Membuka peluang investasi dan yang berdampak terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
perindustrian	9.3.2*	Meningkatkan fasilitasi IKM terhadap penguatan permodalan dan mengembangkan kerjasama dengan sektor pariwisata	Peningkatan kualitas IKM dan pertumbuhan IKM	Program perencanaan dan pembangunan industri
perindustrian	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		Peningkatan inovasi dan daya saing produk IKM	
perindustrian			Pengembangan infrastruktur mendorong inovasi	
penanaman modal	8.10.1.(a)	Mengembangkan kerjasama antara koperasi dengan lembaga keuangan	Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dan UMKM	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal
penanaman modal	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		Pengembangan insentif bagi pihak perbankan yang bersedia meningkatkan kerjasama dengan koperasi	
penanaman modal			Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi	
perindustrian	9.3.1*	Meningkatkan kapasitas UMKM dalam pengolahan produksi	Peningkatan sdm industri kecil dan menengah	2.18.06 Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal.
perindustrian	Proporsi nilai tambah industry kecil terhadap total nilai tambah		Peningkatan sarana prasarana pengolahan	



JENIS URUSAN	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019
perindustrian	industri.		Pengembangan kelembagaan pemasaran produk industri kecil	
statistik	16.5.1.(a)	Mengembangkan Budaya Anti Korupsi	Pengembangan kerjasama dengan BPS untuk survey/mengukur indek perilaku anti korupsi (IPAK)	Program perumusan kebijakan,
statistik	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara	pendampingan dan asistensi
statistik			Penguatan budaya anti korupsi masyarakat	
statistik			Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu	

## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026, dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung daerah dapat diketahui bahwa:
  - a. Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air.
  - b. Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir.
  - c. Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak.
  - d. Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah.
  - e. Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa



pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

2. Analisis capaian daerah Kabupaten Dharmasraya terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diketahui bahwa :

- a. Berdasarkan kewenangan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), wilayah kabupaten memiliki kewenangan terhadap 16 TPB/SDGs kecuali TPB/SDGs 14 yakni untuk tujuan Ekosistem Laut. Dalam pelaksanaannya, TPB/SDGs 7 yakni energi bersih dan terjangkau menjadi kewenangan pemerintahan provinsi. Sehingga dalam pelaksanaannya, Kabupaten Dharmasraya melakukan upaya pencapaian terhadap 15 TPB/SDGs.
- b. Indikator TPB/SDGs dibedakan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yakni, (1) Pembangunan Sosial; (2) Pembangunan Ekonomi; (3) Pembangunan Lingkungan; (4) Hukum dan Tata Kelola. Berdasarkan pilar pembangunan, diketahui capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.
  - 1) Pilar sosial, yang mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang terdiri dari 96 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
    - a) TPB 1. Tanpa kemiskinan terdiri dari 24 indikator. Delapan indikator telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 10 (Sepuluh) indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) dan 6 (Enam) indikator yang belum memiliki data (NA).
    - b) TPB 2. Tanpa kelaparan terdiri dari 11 indikator. Sembilan indikator telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), dan 2 (dua) indikator yang belum memiliki data (NA).
    - c) TPB 3. Kehidupan sehat dan sejahtera terdiri 34 indikator. Dua Puluh Satu indikator telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 9 (Sembilan) indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB) dan 4 (Empat) indikator yang belum memiliki data (NA).
    - d) TPB 4. Pendidikan berkualitas terdiri dari 13 indikator. Tiga indikator yang telah mencapai target (SS), 8 (delapan) indikator yang sudah dilakukan



- dan belum mencapai target (SB), dan 2 (dua) indikator yang belum memiliki data (NA).
- e) TPB 5. Kesetaraan gender terdiri dari 14 indikator. Tujuh indikator yang sudah dilakukan dan mencapai target (SS), 4 (Empat) indikator yang telah dilakukan dan belum mencapai target (SB) dan 3 (Tiga) indikator yang belum memiliki data (NA).
- 2) Pilar ekonomi, yang mencakup 4 (empat) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang terdiri dari 59 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
- a) TPB 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi terdiri dari 19 indikator. Empat indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 11 (Sebelas) indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), 4 (empat) indikator yang belum memiliki data (NA).
  - b) TPB 9. Industri, inovasi dan infrastruktur terdiri dari 13 indikator. Lima indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 2 (dua) indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), 3 (tiga) indikator yang belum memiliki data (NA). pada TPB ini terdapat 3 indikator yang bukan kewenangan Kabupaten Dharmasraya.
  - c) TPB 10. Berkurangnya kesenjangan terdiri dari 11 indikator. Empat indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 3 (tiga) indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), dan 4 (empat) indikator yang belum memiliki data (NA).
  - d) TPB 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan yang terdiri dari 16 indikator. Enam indikator yang telah dilakukan dan mencapai target (SS), 7 (tujuh) indikator yang telah dilakukan dan belum mencapai target (SB) dan 3 (tiga) indikator yang belum memiliki data (NA).
- 3) Pilar Lingkungan, yang mencakup 5 (lima) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang terdiri dari 42 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
- a) TPB 6. Air bersih dan sanitasi layak terdiri dari 18 indikator. Empat indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 10 indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), 3 (tiga)





- indikator yang belum memiliki data (NA). Serta terdapat 1 (satu) indikator yang bukan kewenangan Kabupaten Dharmasraya.
- b) TPB 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan terdiri dari 13 indikator. Empat indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 6 (enam) indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), 1 (satu) indikator yang belum memiliki data (NA) dan 2 (empat) indikator yang bukan kewenangan.
  - c) TPB 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab terdiri dari 5 indikator. Lima indikator tersebut telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB).
  - d) TPB 13. Penanganan perubahan iklim terdiri dari 2 indikator. Ke dua indikator tersebut telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB).
  - e) TPB 15. Ekosistem darat terdiri dari 4 indikator. Belum ada indikator yang mencapai target. Empat indikator tersebut telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB).
- 4) Pilar Hukum dan Tata Kelola, yang mencakup 1 (satu) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang terdiri dari 21 indikator, dengan capaian sebagai berikut :
- TPB 16. Perdamaian keadilan dan kelembagaan yang Tangguh terdiri dari 21 indikator. Sepuluh indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS), 7 (tujuh) indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target (SB), dan 4 (empat) indikator yang belum memiliki data (NA).
3. Berdasarkan peran OPD Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan indikator TPB/SDGs, terdapat 27 OPD dengan indikator TPB terbanyak berada di bawah Dinas Kesehatan yakni sebanyak 41 indikator. Dari indikator yang menjadi urusan Dinas Kesehatan tersebut sudah mencapai target nasional sebesar 63,41% atau sebanyak 26 indikator, dan indikator sudah dilaksanakan dan belum mencapai target yakni sebanyak 10 indikator (24,39%), dan terdapat 5 (lima) indikator (12,20%) yang belum memiliki data.
- Dalam pencapaian indikator TPB/SDGs ini, tentunya perlu adanya sinergi antar OPD sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai waktu yang ditentukan dengan



mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini begitu juga untuk OPD lainnya.

4. Rekomendasi dalam pencapaian indikator TPB/SDGs dirumuskan untuk TPB/SDGs yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target dan TPB/SDGs yang belum memiliki data yakni diprioritaskan untuk indikator yang merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).



# Lampiran 1

**SK Tim Pembuat KLHS**



**KLHS RRJMD**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2021 - 2026**



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NO: 188.45/ 20 /KPTS-BUP/2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
(KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, Pemerintah Daerah wajib membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk tim pembuatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 69/Menlhk/Setjen/kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031;
9. Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

- : Membentuk Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 -2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. Tim Teknis
    - 1) Menyusun kerangka acuan kerja KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026;
    - 2) Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik;
    - 3) Membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, Rencana, dan/atau Program Terhadap kondisi lingkungan hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau Program, dan Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
    - 4) Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
    - 5) Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
    - 6) Melaksanakan Pendokumentasian KLHS.
  - B. Tim Data
    - 1) Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk penyusunan KLHS RPJMD sesuai bidangnya;
    - 2) Berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi publik dan rapat – rapat anggota.
  - C. Sekretariat:
    - 1) Melakukan persiapan kegiatan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 -2026;
    - 2) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi data pada instansi terkait;
    - 3) Memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
- 5) Melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

**D. Tenaga Ahli Pendamping Penyusun KLHS**

- 1) Melakukan kompilasi data dan informasi yang terkait dengan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026;
- 2) Melakukan analisa data dan informasi yang terkait dengan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026;
- 3) Melakukan pendampingan dalam semua tahapan penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026;
- 4) Melakukan penyusunan dan penulisan Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026.

- KELIMA** : Kepada Tenaga Ahli Penyusun KLHS RPJMD Tahun 2021 - 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium per kegiatan sebagai berikut:
- |           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 1 Ketua   | Rp 12.500.000,- /orang/kegiatan |
| 2 Anggota | Rp 10.500.000,- /orang/kegiatan |
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- KETUJUH** : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 - 2026, dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 mendapatkan validasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 4 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala DLH Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Bappppeda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Yang Bersangkutan.



Lampiran 1

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA**

**NOMOR : 188.45/ 21 /KPTS-BUP/2021**

**TANGGAL : 4 Januari 2021**

**TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS (KLHS) RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2024**

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENYUSUN KLHS RPJMD  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2024**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	Bupati Dharmasraya	Penanggungjawab
2.	Adlisman, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Pembina
3.	Drs. Yefrinaldi, MM	Plt. Asisten II Setda	Wakil Pembina
4.	drg. Erina, MKM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
5.	Andi Sumanto, CR.A	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
6.	H. Miyarso, M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
<b>A. TIM TEKNIS</b>			
1.	Lasmiyati, M.Si	Kabid.Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Romi, SE	Kabid.Pengelolaan Sampah, LB3 dan Pertamanan	Anggota
3.	Deswati, S.Sos	Kabid.Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Frinaldi, ST, M.Sc	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda	Anggota
5.	Vintodi Fasiel, S.Pt, M.Si	Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota
6.	Silaturrahaim, SKM	Kabid Sosial dan Budaya Bappeda	Anggota
7.	Maya Sari, ST	Kabid Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah PUPR	Anggota
8.	Ari Afif Hudri, SE	Kasubbid Data dan Pelaporan Bappeda	Anggota
9.	Epon Ekanedi, SHI	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian	Anggota
10.	Asmirawati, ST	Kasi. Perumahan Dinas Perkintan	Anggota
11.	Beni Mandala, S.STP	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata	Anggota
12.	Suhaimi Nurta, SKM, MM	Kasubag Program Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Herawati Khaidir, SE, MM	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan Dinas Kumperdag	Anggota

Lampiran 1

16.	Nani Rahayu, S.Pd	Kasi PAUD Dinas Pendidikan	Anggota
17.	Damendra, S.Sos	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
18.	Rika Herlina, S.Pd	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan BKPSDM	Anggota
<b>C. SEKRETARIAT</b>			
1.	Yona Anggela, ST	Analisis Lingkungan Hidup	Sekretariat
2.	Irma Surianti, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Sekretariat
3.	Fadila Malasari, S.Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
4.	Depriandi, S.Sos	Staf Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
<b>D. TENAGA AHLI PENDAMPING PENYUSUN KLHS RPJMD</b>			
1.	Dr. Mahdi, SP, M.Si	Akademisi Sosial Ekonomi Pertanian UNAND	Ketua
2.	Dr. Ardinis Arbain	Tenaga Ahli Bidang Biologi	Anggota
3.	Desrizal, ST, M.Si	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Veronika Sriwulantari, M.Si	Tenaga Ahli Bidang Lingkungan	Anggota
5.	Rahma Wirni, ST, M.Si	Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan	Anggota


 BUPATI DHARMASRAYA,  
 SITAN RISKHA





# Lampiran 2

**Kompetensi Tanaga Ahli**



**KLHS RRJMD**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2021 - 2026**



**SERTIFIKAT PELATIHAN**

*TRAINING CERTIFICATE*

**DIBERIKAN KEPADA :**

*AWARDED TO*

**VERONIKA SRIWULANTARI, ST, M.Si**

**TELAH MENGIKUTI PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS**

*WHO HAD ATTENDED GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM TRAINING COURSE*

**YANG DISELENGGARAKAN OLEH UNIT PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PATEN DAN KERJASAMA (UP2PK)**

*ORGANIZED BY RESEARCH, COMMUNITY SERVICE, PATENT AND COOPERATION UNIT*

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN-UNIVERSITAS ANDALAS**

*FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY -ANDALAS UNIVERSITY*

**PADA TANGGAL**

**: 14 MARET S/D 19 MARET 2016**

**ON**

**DI**

**: PADANG - SUMATERA BARAT**

**AT**

**SETELAH MENGIKUTI UJIAN DINYATAKAN LULUS**

*AND HAD PASSED AN EXAMINATION*

**DENGAN HASIL SEPERTI TERTERA PADA DAFTAR PRESTASI**

*WITH THE RESULTS DESCRIBED IN THE ATTACHED TRANSCRIPT*



**DEKAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN**

*Prof. Dr. Santosa, MP*  
**Prof. Dr. Santosa, MP**  
NIP. 19640728 198903 1 003



**PADANG, 21 MARET 2016  
KETUA**

*Dr. Ir. Firdaus Ekaputra, MS*  
**Dr. Ir. Firdaus Ekaputra, MS**  
NIP. 19621205 199302 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Veronika Sriwulantari, ST., M.Si
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Tempat/tanggal lahir	Pekanbaru/ 04 Januari 1989
4	Alamat rumah	Kompek Nuansa Indah 3, Gurun Laweh, Kec. Koto Tangah Kota Padang
5	No. Telp	+6285261083332
6	Email	<a href="mailto:vesriwulantari@gmail.com">vesriwulantari@gmail.com</a>
7	Kewarganegaraan	Indonesia
8	Agama	Islam
9	Status	Menikah
10	Pengalaman	7 Tahun

### B. Riwayat Pendidikan

Sekolah	Nama Sekolah	Periode	Jurusan
Perguruan Tinggi (S1)	Universitas Andalas	2006-2012	Teknik Lingkungan
Perguruan Tinggi (S2)	Universitas Andalas	2012-2015	Ilmu Lingkungan

### C. Riwayat Pekerjaan

Nama Lembaga	Jabatan	Periode	Tempat
Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas	Asisten Tenaga Ahli	2014-Sekarang	Padang
Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND)	Ketua Jurusan Teknik Lingkungan	2015	Padang
Sekolah Tinggi Teknologi Industri (STTIND)	Staf Pengajar	2012-2015	Padang
Fakultas Teknik Universitas Andalas (FT Unand)	Asisten Wakil Dekan II	2012-2013	Padang
Jurusan Teknik Lingkungan FT Unand	Tenaga Pendidik	2012-2013	Padang

### D. Pengalaman Proyek di Bidang Lingkungan Hidup

Nama Proyek	Jabatan	Tahun
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang (Revisi RPJMD)	Tenaga Ahli	2021
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Tenaga Ahli	2020

<b>Nama Proyek</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
(KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang		
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh (Revisi RPJMD), Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Sungai Penuh Prov. Jambi, Kabupaten Tebo Prov. Jambi	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Solok Selatan	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	Tenaga Ahli	2019
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi	Tenaga Ahli	2019
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupten Kerinci Provinsi Jambi.	Tenaga Ahli	2019
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam	Tenaga Ahli	2019
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sungai Penuh (Prov. Jambi) dan Kabupaten Tebo (Prov. Jambi)	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang, Kota Pariaman dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Tenaga Ahli	2018

<b>Nama Proyek</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Padang Panjang		
Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Ahli	2018
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Pariaman	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Pasaman Barat	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman	Asisten Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat	Asisten Tenaga Ahli	2016

<b>Nama Proyek</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok	Asisten Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi	Asisten Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	Asisten Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Rencana Penutupan Tambang (RPT) PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PTBA UPO)	Asisten Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang	Asisten Tenaga Ahli	2015
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Arosuka Kabupaten Solok	Asisten Tenaga Ahli	2015
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rao Kabupaten Pasaman	Asisten Tenaga Ahli	2015
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	Asisten Tenaga Ahli	2015
Pemantauan Lingkungan Hidup Sungai Penuh PT Pertamina Geothermal Energy	Asisten Tenaga Ahli	2014

#### **E. Pengalaman Menulis Buku**

<b>Nama Buku</b>	<b>Tahun</b>
Perlindungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari Berkelanjutan melalui Kerjasama Antar Daerah	2016
Perencanaan Sektor Perkebunan di Sumatera “Langkah Startegis Pengelolaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit”	2016

#### **F. Pengalaman Mengikuti Pelatihan/Seminar (5 Tahun Terakhir)**

<b>Nama Training/Seminar</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Tempat dan Waktu</b>
Seminar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara Terpadu	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau	Pekanbaru, 27 November 2017
Seminar Lingkungan Hidup dan Konferensi BKPSL ke-23 (Berpartisipasi dalam 2 judul makalah untuk presentasi oral)	Badan Kerja Sama Pusat Studi Lingkungan Hidup (BKPSL) Indonesia	Bogor, 8-9 Desember 2016

<b>Nama Training/Seminar</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Tempat dan Waktu</b>
dan poster)		
Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Jurusan Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Unand	Padang, 14-18 Maret 2016
Workshop Analisis Data Multivariat	Jurusan Matematika FMIPA Unand	Padang, 19-22 November 2015
Seminar Internasional " <i>Green Development in Tropical Region</i> "	Program Doktor Ilmu Pertanian Unand	Padang, 28-31 Oktober 2015
<i>Sakura Exchange Program</i>	Japan Science and Technology Agency (JST)	Jepang, 8-21 September 2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Padang, April 2021



Veronika Sriwulantari

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

1.	Nama Personil	:	Dr. Ardinis Arbain
2.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
3.	Tempat / Tanggal Lahir	:	Bukittinggi/ 14 Juni 1952
4.	Alamat	:	Komp. Mawar Putih Blok N No. 13, Padang
5.	Hp	:	+62 81267 13 290
6.	Email	:	Ardinis.arbain@yahoo.com
7.	Nomor KTP	:	1371091406520003
8.	Nomor NPWP	:	08.107.085.6-201.000
9.	Pendidikan	:	a. S1 Biologi Universitas Gadjah Mada b. S3 Biologi Botani Universitas Heidelberg, Jerman
10.	Pendidikan Non Formal (Training/Kursus)	:	a. Pengelolaan Fungsi Pelatihan, 1996 b. Penyusunan Renstra Lingkungan, 1998 c. Audit Lingkungan, 2010 d. Valuasi Lingkungan, 2010 e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 2016
11.	Penggunaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	:	Baik

### II. Karya Ilmiah/Publikasi

1	Studi Populasi Tapir di Taman Nasional Kerinci Seblat	:	1998
2	DAS Sumatera Kaninchen	:	1992
3	Percabangan pada Drynaria	:	1995
4	Pteridophyta in Kayu Tanam Area	:	1996
5	Keanekaragaman Hayati di Kepulauan Mentawai. Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional tentang Pembangunan Pulau Pulau Kecil, Terpencil dan Strategis. Bukittinggi.	:	Maret 1997
6	Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Makalah disampaikan pada Kursus AMDAL. PSLH UNAND.	:	Agustus 1997
7	Biodiversitas dan Pengendalian Hama. Makalah disampaikan pada Seminar Regional Pesticida Ramah Lingkungan. UNITAS.	:	Agustus 1997
8	Kaji Ulang Manajemen Irigasi Indonesia. Makalah disampaikan pada Lokakarya Penyesuaian Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Petani. Bukittinggi.	:	Agustus 1997
9	Autensitas Hutan Dalam Penentuan Zona Penyangga. Makalah disampaikan pada interkonferensi PSL. Banda Aceh.	:	Agustus 1997
10	Penyesuaian kelembagaan pengelolaan Sumber daya air dan Pemberdayaan petani (kaji ulang manajemen irigasi Indonesia)	:	Agustus 1997
11	Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Pembagian Keuntungan Secara Adil dan Merata. Makalah disampaikan pada Seminar/Sarasehan Keanekaragaman Hayati. Padang	:	September 1997
12	Ekosistem Pesisir dan Laut. Makalah di sampaikan pada Lokakarya Pesisir dan Pelatihan Masyarakat. Padang.	:	Oktober 1997



13	Masalah Lingkungan Hidup dan Kawasan Lindung di Sumatera Barat. Makalah disampaikan pada Diklat Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Sumatera Barat. Padang.	:	Maret 1998
14	Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL. Makalah disampaikan pada Kursus AMDAL.	:	April 1998
15	Studi Perambah Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. (Kab. Solok) Laporan Penelitian.	:	April 1998
16	Studi populasi Tapir di Taman Nasional Kerinci Seblat. Bengkulu.	:	Oktober 1998
17	Arti Penting Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kawasan Penyangga. Makalah disampaikan pada Pelatihan Masyarakat Desa Penyangga TNKS. Muaro Sijunjung.	:	November 1998
18	Konservasi dan Pembangunan Daerah Terpadu. Studi ICDP TNKS. Laporan Penelitian.	:	18 Desember 1998
19	Minyak Atsiri dari Tanaman Asli Siberut. Laporan Penelitian.	:	April 1998
20	Konsep Dasar Keanekaragaman Hayati. Makalah disampaikan Pada Lokakarya antara Bappedalda Sumbar dan PWI.	:	Juli 1999
21	Pengendalian Pencemaran. Makalah disampaikan pada Pelatihan Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	:	Juli 1999
22	Pengelolaan Limbah Padat dan Permasalahannya. Makalah disampaikan pada Seminar tentang Pengelolaan Limbah di Pasca Sarjana UNP.	:	Oktober 1999
23	Keanekaragaman Hayati di TNKS dan Kegiatan Konservasi di Desa-desa TNKS. Makalah disampaikan pada Pelatihan ICDPP-TNKS. Solok.	:	November 1999
24	Studi Populasi Tapir ( <i>Tapirus indicus</i> ) di Taman Nasional Kerinci Seblat (Prosiding hasil penelitian)	:	April 2000
25	Pengelolaan lingkungan hidup dan otonomi daerah (kuliah umum Pascasarjana UNAND di UNRI)	:	Agustus 2001
26	Pengelolaan integratif Danau Singkarak menuju pemanfaatan Berkelanjutan (Makalah pada seminar lingkungan hidup dampak PLTA Singkarak)	:	Maret 2002
27	Interelasi aspek legalitas pengelolaan sumber daya air (visi irigasi no. 23 )	:	September 2002
28	Regional dialogue on water governments Bangkok Thailand (Participant)	:	November 2002
29	Peningkatan kesadaran lingkungan global dan implikasinya terhadap pengelolaan hutan dan penelitian bidang kehutanan (prosiding nasional ke-6 MAPEKI)	:	Agustus 2003
30	Pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup daerah tangkapan air Danau Singkarak, Kabupaten Solok.	:	Desember 2003
31	Workshop tentang pelestarian tapir (di Krau, Malaysia)	:	2003
32	Pengolahan limbah domestik (makalah pada diklat pengawasan serta pengendalian pencemaran)	:	Agustus 2004
33	Ekosistem danau dan pengelolaannya makalah pada sosialisasi masalah lingkungan hidup di Maninjau)	:	September 2004
34	Pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti.	:	Desember 2004

35	Kajian alternatif dalam Amdal (Makalah pada kursus Amdal PSLH Universitas Andalas).	:	Juli 2005
36	Pelingkupan (Makalah pada kursus Amdal PSLH Universitas Andalas)	:	Juli 2005
37	Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya, Alam berkelanjutan (Makalah pada pelatihan kader-kader Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan Sumatera Barat)	:	Agustus 2005
38	Seminar on Engineering for Environment in Bandung	:	November 2005
39	Studi Areal Konservasi dalam konsesi Perkebunan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.	:	November 2006
40	Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Tanah Datar	:	Desember 2006
41	Penatar pada pelatihan AA kopertis wilayah X (Aplikasi tindakan kelas)	:	Juli 2007
42	Studi Ekosistem Danau Diatas. Laporan Penelitian	:	Oktober 2007
43	Kualitas lingkungan hidup Sumatera (Anggota tim penyusun)	:	Desember 2007
44	Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Tanah Datar	:	Desember 2007
45	Manusia dan Lingkungan (Makalah pada sosialisasi masalah lingkungan hidup di Padang Panjang )	:	Juni 2008
46	Penatar pada pelatihan AA kopertis wilayah X (Aplikasi tindakan kelas )	:	Juni 2008
47	Sumatera Barat menuju propinsi Konservasi	:	Juni 2009
48	Pokok pokok pikiran untuk pengelolaan Mentawai Pasca Tsunami. Round Table Discussion.	:	November 2010
49	Taman Kehati Sumatera Barat ( disampaikan pada pertemuan Pengelolaan Kehati KLH di Banjarmasin)	:	November 2010
50	Tinjauan kritik MP3EI dari sudut lingkungan	:	2011
51	Status lingkungan hidup ekoregion Sumatera	:	2012

### III. Pengalaman Kerja

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Ketua PSLH Unand                | 1994-2004 |
| 2. Dekan FMIPA                     | 2004-2008 |
| 3. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan     | 1999-2004 |
| 4. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan     | 2008-2014 |
| 5. Ketua Senat Universitas Andalas | 2014-2017 |

### IV. Pengalaman Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup

Nama Kegiatan	Jabatan	Tahun
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Sumatera Barat	Tenaga Ahli	2019
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tenaga Ahli	2017

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Penyusunan Dokumen Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Kabupaten Pasaman Barat	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang	Tenaga Ahli	2015
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Arosuka Kabupaten Solok	Tenaga Ahli	2015

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Rao Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2015
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2015

Demikianlah Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, April 2020

Yang Menyatakan,



**Dr. Ardinis Arbain**

# RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITÄT HEIDELBERG

## DIE NATURWISSENSCHAFTLICH-MATHEMATISCHE GESAMTFAKULTÄT

verleiht

Herrn Diplom-Biologe

ARDINIS ARBAIN

aus Ladang Lawas Bukittinggi/INDONESIEN

den Grad eines DOKTORS DER NATURWISSENSCHAFTEN  
(DR. RER. NAT.)

nachdem er durch die Dissertation:

"Verzweigungssystem der Drynarioideae"

sowie durch die mündliche Prüfung seine wissenschaftliche Befähigung erwiesen  
und dabei das Gesamturteil erhalten hat:

SEHR GUT

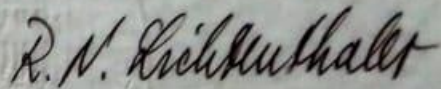
Heidelberg, den 6. Dezember 1989

DER REKTOR



(Prof. Dr. Volker Sellin)

DER DEKAN



(Prof. Dr. Rüdiger N. Lichtenthaler)







**ESP3**

**DANIDA**  
ENVIRONMENTAL  
SUPPORT  
PROGRAMME



# *Certificate of Participation*

This is to certify that :

Ardinis Arbain

has participated in

## **STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (SEA) CAPACITY BUILDING FOR ENVIRONMENT RESEARCH CENTRES : TRAINING OF TRAINERS**

Solo, November 15<sup>th</sup>-18<sup>th</sup> 2016



Laksmi Wijayanti  
Director of PDLKWS KLHK



Per Rasmussen  
Programme Advisor ESP3

PROVINSI SUMATERA BARAT  
KOTA PADANG

NIK : 1371091406520003

Nama : ARDINIS ARBAIN  
Tempat/Tgl Lahir : BUKITTINGGI, 14-06-1952  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : KOMP MAWAR PUTIH BLOK N  
NO 13  
RT/RW : 002 / 007  
Kel/Desa : KORONG GADANG  
Kecamatan : KURANJI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : DOSEN  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PADANG  
16-03-2012



 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.107.085.6-201.000

**ARDINIS ARBAIN**

KOMPLEK MAWAR PUTIH, KORONG GADANG , KURANJI  
, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT 25156

Penerbit : 201  
Tanggal Terdaftar : 25/02/2009

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## IDENTITAS DIRI

Nama : **Dr. Mahdi, SP, MSi.**  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Tarutung, Kerinci, 10 April 1971  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : Universitas Andalas  
 Alamat : Kampus Unand Limau Manis, Kec. Pauh Padang 25163  
           Telp./Faks. : 0751-72774/0751-72702  
 Alamat Rumah : Perumahan Cemara I Blok BB/3 Gn. Pangilun Padang  
           Telp./Faks. : 085272625091  
 Alamat e-mail : kuteihmahdi@gmail.com  
 Pengalaman : 16 Tahun

## RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
2008	S3	Asian Institute of Technology	Natural Resources Management
1999	S2	Universitas Andalas	Perencanaan Pembangunan
1996	S1	Universitas Andalas	Pembangunan Pedesaan

## PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2015	ToT Pendampingan Magang pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Pusrenbang SDM Kementerian LH dan Kehutanan RI
2013	Short Training on Dendrochronology	Kasetsart University, Bangkok Thailand
2011	Training Workshop: "Theory and Methodology on International Forestry Resources and Institutions (IFRI) - Asia"	IFRI-AIT, Bangkok Thailand
2009	Pelatihan Applied Approach (AA)	Universitas Andalas
2007	Kursus singkat "Legislation and Institutional Arrangements in IWRM"	CK-Net INA
2001	Pelatihan penggunaan teknik Sistem Informasi Geografis (GIS)	Ditjen PHKA Dephut RI dan Yayasan KEHATI
2001	Pelatihan Peningkatan Kemampuan Instruksional (PEKERTI)	Universitas Andalas
2001	Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tingkat dasar	IPB Bogor



## PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Ketua Program Studi	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas	2015 - sekarang
Ketua Program Studi	Program Studi Integrated Natural Resources Management (INRM) Program Pascasarjana Universitas Andalas	2010 - 2015
Sekretaris Program Studi	Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas	2002 - 2004
Ketua Unit Pengembangan Program (UPP)	Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas	2009 - sekarang

## PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2016-2017	Forest Social-Ecological System (SES) in implementing REDD+ projects in Indonesia, Thailand, Vietnam, and Myanmar	Anggota Peneliti	Toyota Foundation
2016	Perkembangan kebun kelapa sawit dalam kaitan dengan pengelolaan berkelanjutan DAS Batanghari	Ketua Peneliti	Universitas Andalas
2016	Perkembangan kebun kelapa sawit dalam kaitan dengan pengelolaan berkelanjutan DAS Batanghari	Ketua Peneliti	Universitas Andalas
2014-2015	Bridging Policy Practice Gap in the Effective Implementation of REDD+ Programs in SE Asia: Collaborative Learning among Indonesia, Thailand and Vietnam	Anggota Peneliti	Toyota Foundation
2014	Dampak intervensi program pengentasan kemiskinan pada variabel demografi di GALCILTAS Sumatera Barat	Ketua Peneliti	BKKBN

## KARYA TULIS ILMIAH

### A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2016	Impact of Market Liberalization on National Food Security and Rice Marketing in Indonesia	IAJISSET (forthcoming)
2016	Decentralization of Forest Management, Local Institutional Capacity and its Effect on Access of Local People to Forest Resources: the Case of West Sumatra, Indonesia	Book chapter: Waltham, MA: Elsevier Publishers (forthcoming)

**B. Makalah/Poster**

<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Penerbit/Jurnal</b>
2007	Institutional response to decentralization of natural resources management at local level: the case of West Sumatra, Indonesia	RECOFTC, Bangkok, Thailand
2007	Upland people's livelihood changes under changing of governance and socio biophysical of natural resource: case of Batang Lembang Watershed, West Sumatra Indonesia	Hanoi University of Agriculture, Vietnam

**PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM**

<b>Tahun</b>	<b>Judul Kegiatan</b>	<b>Penyelenggara</b>
2017	Livelihood Strategy Of Shifting Cultivator Against Market Pressure: A Case From Pasaman District, West Sumatra Province, Indonesia	Paper presented in "16th Global Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC) di Utrecht, The Netherland, 2017".
2016	Expansion of palm oil plantation and sustainable management of Batanghari River Basin of Sumatra, Indonesia	Paper disampaikan dalam seminar nasional <i>Perhimpunan Ahli Ekonomi Pertanian Indonesia</i> ". Wakatobi, 24 – 25 Januari 2016
2015	DAMPAK KOMERSIALISASI PERTANIAN RAKYAT BAGI EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI: Kasus perubahan pertanian padi sawah menjadi jagung pakan ternak di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat	Paper disampaikan dalam seminar nasional <i>Pertanian Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015</i> ". Makasar, 22 – 23 Januari 2015
2014	Assessing Indonesian Commitments and Progress on Emission Reduction from Forestry Sector	Paper presented in International Conference on Forests, Soil and Rural Livelihoods in a Changing Climate. Kathmandu University in collaboration with Norwegian University of Life Sciences, Norway; Department of Forest Research and Survey (GoN); Nepal Agroforestry Foundation and Forest Action Nepal. 27 - 30 September 2011. Dulkhel. Nepal.

## PENGALAMAN PROYEK DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

<b>Nama Proyek</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Penyusunan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kota Padang Panjang		
Penyusunan KLHS Perubahan RPJP Provinsi Sumbar	Tenaga Ahli	2019
Penyusunan DDDTLH Kabupaten Kepulauan Mentawai		
Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Padang Pariaman	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Agam	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2017
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang 2010-2030	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi	Tenaga Ahli	2016

<b>Nama Proyek</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tahun</b>
Penyusunan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kota Padang Panjang	Tenaga Ahli	2020
Penyusunan Rencana Penutupan Tambang (RPT) PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin (PTBA UPO)	Tenaga Ahli	2016
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang	Tenaga Ahli	2015

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Padang, April 2020



**Dr. Mahdi, SP, MSi.**

FINAL

Nomor : 21428/0122/F.25/S1/1996

## Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Andalas

Dengan ini menyatakan bahwa :

*M a h d i*

No. Bp. : 90115016

lahir di Tarutung tanggal 10 April 1971 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi PEMBANGUNAN PEDESAAN, oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

**Sarjana Pertanian (S.P.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam.



Dekan  
Fakultas Pertanian

*Prof. Dr. Ir. Muchlis Muchtar, MS*  
Nip : 130 318 502



Rektor  
Universitas Andalas

*Prof. Dr. Ir. Fachri Ahmad*  
Nip : 130 232 203



Nomor : 0386 / 0122 / S2 / 1999

## Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Andalas

*Dengan ini menyatakan bahwa :*

**Mahdi, S.P.**

No. Bp. : 96206004

lahir di Tarutung tanggal 10 April 1971 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi PERENCANAAN PEMBANGUNAN, Program Pascasarjana oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

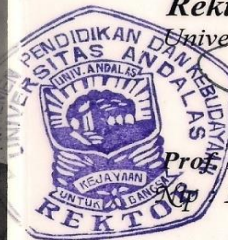
**Magister Sains (M.Si.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan.



**Prof. Dr. Ir. Hj. Nurhaji Hakim**  
Nip : 130 344 870



**Rector**  
Universitas Andalas

**Prof. Dr. H. Marlis Rahman, M.Sc**  
130 318 490



The Board of Trustees of the  
**Asian Institute of Technology**

On the Recommendation of the Academic Senate  
Has Conferred Upon

**MAHDI**

The Degree of  
**Doctor of Philosophy**


With all of its Privileges and Obligations  
Given this nineteenth day of December 2008

Professor Said Brandooust  
President of the Institute

Dr. Tej Bunnag  
Chairman of the Board

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Pribadi

1.	Nama Personil	:	Rahma Wirni., ST., MSI	
2.	Sertifikat Keahlian	:	Ahli Teknik Lingkungan – Madya. LPJK No. 1132410	
3.	Tempat / Tanggal Lahir	:	Solok, 10 Mei 1982	
4.	Hp	:	+62 813 7474 0299	
5.	Email	:	<a href="mailto:rahmawrn837@gmail.com">rahmawrn837@gmail.com</a>	
6.	Alamat	:	Komplek Perumahan Dosen Unand Blok DIII-02-04, Gadut, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang	
7.	Nomor KTP	:	1372025005820021	
8.	Nomor NPWP	:	58.311.130.7.201.000	
9.	Pendidikan	:	a. Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Bung Hatta, Tahun 2006 b. Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Andalas, Tahun 2013	
10.	Pendidikan Non Formal	:	a. Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), Institut Teknologi Bandung (ITB) b. Pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar AMDAL di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Andalas (UNAND) Padang. c. Pelatihan Audit Lingkungan, UGM d. Trainning Poka Yoke – PT. Foster Electric Indonesia, Batam e. Trainning Internal Auditor ISO TS, PT. BIZCOM, Batam	

### II. Pengalaman Penyusunan Dokumen Lingkungan

#### A. Terkait Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJMD dan RPJP Provinsi Sumatera Barat	2019
2.	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Bukittinggi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi	2018



**B. Terkait Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)**

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Tenaga Ahli Kimia Penyusunan Dokumen AMDAL Solo Techno Park, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah	2019
2.	Tenaga Ahli Kimia Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RS Kusta Dr Rivai Abdullah Mariana, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2018
3.	Penyusun Adendum ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pabrik PT Semen Padang untuk Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Melalui Pemanfaatan Sebagai Alternatif Substitusi Raw Material (AR) dan Bahan Bakar (AF) pada Proses Pembuatan Semen. Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang	2018
4.	Tenaga Ahli Kimia, Penyusunan DELH TUKS PT Bukit Asam, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang	2018
5.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Hotel dan Mall Padang Pariaman City, Jl Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman	2017
6.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pengembangan Hotel Grand Zuri Dumai Cabang Padang, Jl. M.H. Thamrin, Kelurahan Alang Laweh, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang	2017
7.	Penyusunan Adendum Rencana Penambahan Kegiatan Pendukung PLTU Teluk Sirih 2x112 MW, Jalan Lintas Padang – Painan KM 25 Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang	2017
8.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam (Bijih Besi) PT Sumber Minera Bersama, Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman	2016
9.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Jalan Jembatan Ngarai Sianok Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan pemberi kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	2016
10.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Islamic Center Padang Panjang	2016
11.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Toko Modern Hypermarket Giant Ekstra, PT. HERO HYPERMARKET, Padang.	2016
12.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Surya Padang Khatulistiwa, Kabupaten Sijunjung	2016
13.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Padang Sumatera Sawindo, Kabupaten Sijunjung.	2016
14.	Penyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat	2015
15.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit oleh PT. Oscar Padang Agro Lestari, Kabupaten Sijunjung	2015

No.	Kegiatan	Tahun
16.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Hotel dan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour PT. Trans Ritel Properti di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang.	2015
17.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan <i>Main Stadium</i> Sumatera Barat dengan pemberi kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	2014
18.	Penyusunan Dokumen Addendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana <i>Shortcut</i> Sungai Suir Pertambangan Batubara PT. Sinamarinda Lintas Nusantara Kabupaten Dharmasraya	2014
19.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, PT. Agro Sukses Plantations, Kabupaten Pesisir Selatan	2014
20.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Hotel Perwata, Kota Padang	2014
21.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Padang Green City, PT. Graha Jakarta Utama Kota Padang	2013
22.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pertambangan PT. Indomining Resources Padang Laweh Kab. Dharmasraya.	2013
23.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pertambangan PT. Karya Denai Barito Kabupaten Pesisir Selatan.	2013
24.	Penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Besi PT. Sumber Minera Bersama di Kabupaten Pasaman.	2012

**C. Terkait Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Lain-Lain**

No.	Kegiatan	Tahun
1.	Ketua Tim Ahli Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT PLN (Persero) Unit Induk Pelaksana Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Unit Pelaksana Pembangkitan Teluk Sirih (PLTU Teluk Sirih)	2020
2.	Penyusun Dokumen DPLH Cold Storage PPS Bungus, Kota Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan	2019
3.	Ketua Tim Ahli Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT PLN (Persero) Unit Induk Pelaksana Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Unit Pelaksana Pembangkitan Teluk Sirih (PLTU Teluk Sirih)	2019
4.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak, Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	2019
5.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Sijunjung untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III, RSUD Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	2019

No.	Kegiatan	Tahun
6.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan (Ruas Jalan Muaro – Silokek) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Sijunjung	2019
7.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pemboran Sumur Sinamar 3 TW di Wilayah Kerja South West Bukit Barisan, Jorong Mangkudu Kodok, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung	2019
8.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sentra IKM Garcinia Sp, Nagari Latang, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sijunjung.	2018
9.	Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pasar Guguak Kecamatan Koto VII, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaten Sijunjung.	2018
11.	Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017	2018
12.	Penyusun Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Sijunjung untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Rawatan dan Poli Paru, RSUD Sijunjung, Kabupaten Sijunjung	2018
13.	Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Bukittinggi Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	2018
14.	Penyusunan UKL-UPL Pembangunan Gedung Kantor Bupati Sijunjung	2017
15.	Penyusunan UKL-UPL Rencana Kegiatan Pabrik Pupuk An-Organik dan Organik PT. Pupuk Andalas Indonesia, Kota Pariaman	2017
16.	Penyusunan UKL-UPL Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Batu dan Kerikil (SIRTUKIL) Imzul Herry	2017
17.	Penyusunan UKL-UPL Rencana Usaha Dan/ Kegiatan Hotel Minang Jaya Syariah	2017
18.	Penyusunan UKL-UPL Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2017
19.	Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Padang Panjang Tahun 2016	2017
20.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup PT Pelabuhan Indonesia (II) Cabang Teluk Bayur	2017
21.	Penyusun UKL – UPL Ekplorasi Gas Metana Batu Bara PT Inti Gas Energi, Kabupaten Sijunjung	2016
22.	Penyusun SLHD Padang Panjang Tahun 2015	2016
23.	Penyusun UKL-UPL Kantor PT. Five Star, Kota Padang	2016
24.	Penyusun UKL-UPL Kantor PT. Sibon, Kota Padang	2016
25.	Penyusun UKL – UPL PLTMH Liki, Kabupaten Solok Selatan	2013
26.	Penyusun UKL – UPL Rumah Sakit Bersalin Permata Bunda, Payakumbuh	2013
27.	Penyusun UKL – UPL SPBU Kinali, Kabupaten Pasaman Barat	2013
28.	Penyusun UKL – UPL SPBU Koto Lolo, Kota Sungai Penuh	2013

No.	Kegiatan	Tahun
29.	Penyusun UKL – UPL Minang International Convention Center, Kota Padang	2013
30.	Penyusun UKL – UPL Hotel Kerinci, Kota Sungai Penuh	2013
31.	Penyusun UKL – UPL Hotel NZSW Kota Bukittinggi	2013
32.	Penyusun UKL – UPL PLTMh Pancuang Taba, Kabupaten Pesisir Selatan	2013
33.	Penyusun UKL – UPL Rencana Tambang Bijih Besi, PT. Selaras Bumi Banua, Kabupaten Tanah Datar	2013
34.	Penyusun UKL – UPL Soto Betawi Haji Halim, Kota Padang	2012
35.	Penyusun UKL – UPL Pabrik Minyak Atsiri, PT. Cassia Co-Op, Kota Sungai Penuh, Jambi	2012
36.	Penyusun Revisi UKL – UPL PLTD Koto Lolo, Kota Sungai Penuh, Jambi	2012
37.	Penyusun UKL – UPL SPBU Proklamasi, Kota Sungai Penuh, Jambi	2012
38.	Penyusun UKL – UPL Rencana Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit PT. Kemilau Permata Sawit, Kabupaten Pesisir Selatan	2012
39.	Penyusun UKL – UPL Body Repair Oto Body, Kota Padang	2012
40.	Penyusun UKL – UPL SPBU Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan	2011
41.	Penyusun UKL – UPL SPBU Pandan Ujung, Kota Solok	2011
42.	Penyusun UKL – UPL SPBU Kumanih, Kabupaten Sijunjung	2011
43.	Penyusun DPLH SPBU Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat	2011
44.	Penyusun DPLH SPBU Batang Kapas, Kota Sungai Penuh	2011
45.	Penyusun UKL – UPL <i>Stone Crusher</i> dan AMP, PT. Lubuk Minturun Konstruksi Perkasa , Kabupaten Pasaman Barat	2011
46.	Penyusun UKL – UPL Hau'sTea Restoran, Kota Padang	2011
47.	Penyusun UKL – UPL Rumah Makan Sederhana, Kota Bukittinggi	2011
48.	Penyusun UKL – UPL Hotel Yuriko, Kota Bukittinggi	2011
49.	Penyusun UKL – UPL Rumah Makan Simpang Raya, Kota Bukittinggi	2011
50.	Penyusun UKL – UPL Gudang Material, PT Catur Sentosa Adiprana, Kota Padang	2011
51.	Penyusun DPPL Diniyah Puteri, Kota Padang Panjang	2010
52.	Penyusun DPPL SPBU Silaing Bawah, Kota Padang Panjang	2010
53.	Penyusun DPLH Hotel Garuda, Kota Padang	2010

**D. Dan lain-lain**

No.	Pengalaman Lainnya	Tahun
1.	Production Planner and Inventory Control (PPIC), PT. Sanwa Engineering, Batam	2009
2.	Production Planner and Inventory Control (PPIC), PT. Foster Electric Indonesia, Batam	2007-2009
3.	Kerja Praktek, PT. Indo Miwon Citra Inti pada Unit Pengolahan Limbah Cair, Lampung	2004

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Padang, Agustus 2020  
Yang Membuat Pernyataan



**Bahma Wirni., ST., MSi**





# SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 01534/DIKLAT/DS.AMDAL/012/KLH/11/2014

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Kepala Pusdiklat KLH Nomor:KEP-11/DEP-VII-PD/LH/11/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat AMDAL, menyatakan bahwa :



Nama : Rahma Wirni, ST, M.Si

Tempat dan tanggal lahir : Solok, 10 Mei 1982

Jabatan :

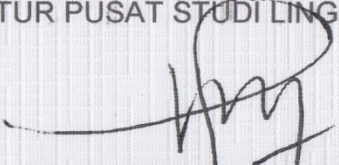
Instansi :

**L U L U S**

Kualifikasi : ***Sangat Memuaskan***

Pada pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Dasar-dasar AMDAL) Angkatan I Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Andalas dari tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2014 di Kota Padang yang meliputi 38 jam pelajaran.

Padang, 30 Oktober 2014  
UNIVERSITAS ANDALAS  
DIREKTUR PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP

  
**Drs. BUSTANUL ARIFIN, M.Si**  
NIP. 19600228199003 1 001



# Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Andalas

*Dengan ini menyatakan bahwa :*

**Rahma Wirni, ST.**

NIM : 1021209103

lahir di Solok tanggal 10 Mei 1982 telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi ILMU LINGKUNGAN Program Pascasarjana lulus pada tanggal 16 Mei 2013, oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

**Magister Sains (M.Si.)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Padang pada tanggal tujuh September dua ribu tiga belas.



**Direktur**  
Pascasarjana  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
**Dr. Syafruddin Karimi, SE., MA.**  
Nip : 19541009 198012 1 001



**Rektor**  
Universitas Andalas  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
**Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA.**  
Nip : 19601129 198603 1 003

COPY

# UNIVERSITAS BUNG HATTA

dengan ini menyatakan bahwa :

**Rahma Wirni**

NPM : 0010017411001

Lahir di Solok, tanggal 10 Mei 1982, telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan pada Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, status terakreditasi nomor 026/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003.

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar akademik :

**Sarjana Teknik (S.T.)**

beserta segala hak dan kewajibannya yang melekat pada gelar tersebut.

Tanggal kelulusan 11 Februari 2006



Ir. Ija Darmana, M.T.



Padang, 30 April 2006

Rektor,

Prof. Dr. Yunazar Manjang

SALINAN / FOTO COPY INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PADANG 22 OCT 2010  
MENGETAHUI



DEKAN  
PASYMI, S.T., M.T.  
NIK. 951 000 397





PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

# SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

**Rahma Wirni, S.T., M.Si.**

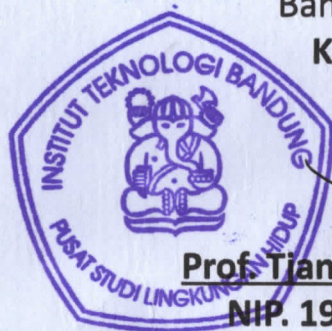
telah mengikuti

## PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 13 pada tanggal 29 Juni - 3 Juli 2020 (40 JPL)  
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor KLHS-13202026/IT1.B07.4.22/LL/2020

Bandung, 6 Juli 2020

Kepala PSLH ITB



Prof. Tjiandra Setiadi, Ph.D., IPU.

NIP. 195609061982111001





**Nama :** Rahma Wirni, S.T., M.Si.  
**Tempat, Tanggal Lahir :** Solok, 10 Mei 1982

**Tanda tangan,**

**Sertifikat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan PSLH–ITB  
Nomor : 022/IT1.B07.4.22/LL/2020 tentang Kelulusan Peserta  
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  
Gelombang 13 Tanggal 29 Juni - 3 Juli 2020**

**Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  
Gelombang 13, 29 Juni - 3 Juli 2020 (40 JPL)**

**Materi yang diberikan :**

No	Mata Ajaran	Jumlah JPL
1	Peran KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan	2
2	Peran KLHS untuk Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam RPJMD	2
3	Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	2
4	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan prioritas serta KRP	2
5	Uji Silang Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan KRP Berdampak Lingkungan Hidup	2
6	Analisis Enam Muatan KLHS Kehati	2
7	Analisis Enam Muatan KLHS Jasa Ekosistem dan Daya Dukung dan Daya Tampung	2
8	Analisis Enam Muatan KLHS Efisiensi SDA dan Analisis Risiko	2
9	Analisis Enam Muatan KLHS Risiko Perubahan Iklim	2
10	Rekomendasi KLHS RTRW dan RDTR	2
11	KLHS RZWP3K	2
12	KLHS RPJMD (Identifikasi Isu dan Analisis 17 TPB/SDGs)	3
13	KLHS RPJMD (Analisis 6 Muatan KLHS)	2
14	Rekomendasi KLHS RPJMD	2
15	Pengintegrasian KLHS Kedalam Dokumen KLHS RPJMD	3
16	Wawasan Pengelolaan Lingkungan	2
17	Daya Dukung dan Daya Tampung	2
18	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	2
19	Isu Lingkungan di Perkotaan	2
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

PROVINSI SUMATERA BARAT  
KOTA SOLOK

NIK : 1372025005820021

Nama : RAHMAWIRNI  
Tempat/Tgl Lahir : KOTA SOLOK, 10-05-1982  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A  
Alamat : JLN. TUNAS BANGSA NO. 1  
RT/RW : 002 / 005  
Kel/Desa : KAMPUNG JAWA  
Kecamatan : TANJUNG HARAPAN  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : BELUM KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 10-05-2017



KOTA SOLOK  
25-05-2017



 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 58.311.130.7-201.000  
RAHMAWIRNI  
NIK : 1372025005820021

JL TUNAS BANGSA NO. 1 RT. 002 RW. 005  
KAMPUNG JAWA TANJUNG HARAPAN  
KOTA SOLOK SUMATERA BARAT

KPP PRATAMA SOLOK



# Lampiran 3

## Pendokumentasian KLHS

- Surat-Surat
- Rapat/Pertemuan
- Foto Kegiatan



**KLHS RPJMD**  
**BUPATEN DHARMASRAYA**  
**TAHUN 2021 - 2026**



Lampiran 3

**DOKUMENTASI KLHS RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA**

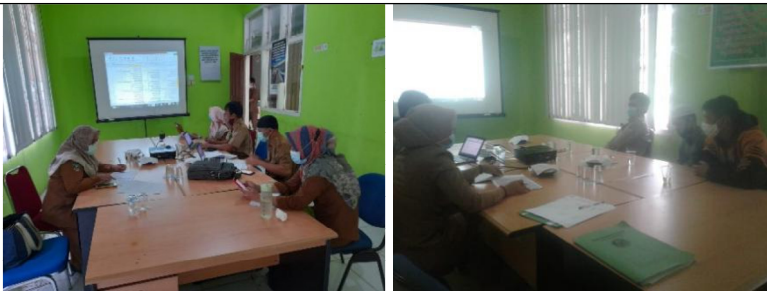

**TAHUN 2021 – 2026**

No	Hari/Tanggal	Perihal
<b>PEMBENTUKAN TIM</b>		
1	4 Januari 2021	SK Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 terbit pada tanggal 4 Januari 2021 dengan SK Bupati nomor 188.45/20/KPTS-BUP/2021 ( <b>SK Tim Terlampir</b> )
<b>PENGKAJIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		
<b>A. IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN DATA</b>		
2	29 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 660/338/DLH/XII-2020 perihal Permintaan Data untuk Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 tanggal 29 Desember 2020 (<b>Surat Terlampir</b>)</li> <li>• Surat, email, dan pemberitahuan melalui WA sekretariat oleh OPD terkait data yang diminta</li> </ul>
3	Kamis, 14 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sosialisasi Penyusunan KLHS RPJMD</b></li> <li>• Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 660/012/DLH/I-2021 tanggal 06 januari 2021 perihal Undangan Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 (<b>Surat Terlampir</b>)</li> <li>• Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 660/015/DLH/I-2021 tanggal 06 januari 2021 perihal Permintaan Narasumber untuk Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 (<b>Surat Terlampir</b>)</li> </ul>



### Lampiran 3

		<div data-bbox="662 152 1404 499" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya dilakukan di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya dihadiri oleh tenaga ahli, OPD terkait dan Camat (<b>daftar hadir terlampir</b>)</li> <li>• Sosialisasi dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Sosialisasi dilakukan dalam rangka pengenalan pentingnya KLHS dan penyampaian kebutuhan data untuk penyusunan KLHS yang dipaparkan oleh narasumber dari tenaga ahli dari PSLH Unand dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (<b>notulen acara terlampir</b>).</li> </ul>
4	<p>Jumat s/d Selasa, 15 s/d 19 Januari 2021</p>	<p><b>Coaching Data KLHS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya nomor 660/20/DLH/I-2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Undangan <i>Coaching</i> Data KLHS (<b>surat terlampir</b>)</li> </ul> <div data-bbox="662 1384 1040 1664" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1046 1384 1430 1664" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="662 1713 1040 1998" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1046 1713 1430 1998" data-label="Image"> </div>

		 <p><i>Coaching</i> data ini dihadiri oleh penanggungjawab data masing2 OPD bersama sekretariat tim pembuat KLHS yang dilakukan di Ruang Rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup selama tiga hari (Jumat, senin, dan selasa tanggal 15, 18, dan 19 Januari 2021) dengan jadwal yang dibagi menjadi beberapa sesi berbeda setiap OPD. <i>Coaching</i> data bertujuan untuk penyamaan persepsi dan memperjelas terkait maksud data yang dibutuhkan untuk pengisian indicator TPB yang dibutuhkan untuk penyusunan KLHS (<b>daftar hadir terlampir</b>).</p>
5	Rabu s/d Kamis, 20 s/d 21 Januari 2021	<p><b>Verifikasi Data Awal dengan Tenaga Ahli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya Nomor 660/024/DLH/I-2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Undangan Verifikasi Data Awal Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 (<b>surat terlampir</b>)</li> <li>• Surat Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya Nomor 660/027/DLH/I-2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Permintaan Narasumber untuk Verifikasi Data Awal Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 (<b>surat terlampir</b>)</li> </ul> 

Lampiran 3

		  <p>Verifikasi Data Awal dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap ketersediaan data dan darimana data bersumber yang dilakukan oleh tenaga ahli pendamping terhadap penanggung jawab data pada masing-masing OPD. Verifikasi data awal dilakukan selama dua hari yaitu hari Rabu s/d Kamis pada tanggal 20 s/d 21 Januari 2021 yang dilakukan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya (<b>daftar hadir terlampir</b>)</p>
<b>B. KONSULTASI PUBLIK I</b>		
6	Selasa, 26 Januari 2021	<p>Konsultasi Publik I dalam rangka Penjaringan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan untuk Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026. Surat Sekretaris daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 660/033/DLH/I-2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 -2026 (<b>surat undangan terlampir</b>)</p>




### Lampiran 3

		<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi Publik I dilakukan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya dihadiri oleh tenaga ahli, OPD provinsi Sumbar, LSM, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan OPD terkait (<b>daftar hadir terlampir</b>).</li> <li>• Acara Konsultasi Publik dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Konsultasi Publik I dilakukan dalam rangka menjaring masukan dari masyarakat terkait isu lingkungan yang muncul di Kabupaten Dharmasraya saat ini. Selain itu juga untuk menjaring masukan terkait solusi dari permasalahan lingkungan tersebut (<b>notulen acara terlampir</b>).</li> <li>• Acara dilakukan 2 sesi . Sesi I penyampaian terkait capaian TPB Dharmasraya dan isu-isu terkait lingkungan secara umum yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ardinis Arbain dan Dr. Bapak Mahdi, SP, M.Si. Sesi II dilanjutkan dengan penjaringan isu yang dipandu oleh tenaga ahli (<b>berita acara terlampir</b>)</li> </ul>
<b>C. PERUMUSAN SKENARIO/ARAH KEBIJAKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>		
7	Rabu – Jumat, 24 – 26 Februari 2021	<p>Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Surat Undangan Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya nomor 660/078/DLH/II-2021 tanggal 16 februari 2021 perihal Undangan Konsinyering KLHS di Labuan Sundai Kabupaten Pesisir Selatan (<b>Undangan terlampir</b>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Perintah Tugas Bupati Dharmasraya nomor</li> </ul>






Lampiran 3

		<p>094/100/ST/DLH-2021 tanggal 15 Februari 2021 untuk mengikuti konsinyering penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026 (<b>surat tugas terlampir</b>)</p> <div data-bbox="667 347 1417 866" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsinyering dilaksanakan di Labuan Sundai Resort Pesisir Selatan, yang dihadiri oleh tim Pembuat dan diarahkan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya dan Tim Ahli yaitu Dr. Ardinis Arbain, Dr. Mahdi, SP, M.Si dan Rahma Wirni ST, M.Si (<b>daftar hadir terlampir</b>)</li> <li>• Pada konsinyering ini, tim Pembuat diminta untuk merancang arah kebijakan dan indikasi program dari indikator-indikator SB, NA dan isu hasil konsultasi publik masing-masing OPD. Kemudian indikasi program tersebut di sinkronkan dengan Permendagri 90 Tahun 2019.</li> </ul>
8	Senin, 29 Maret 2021	<p><b>Konsultasi Publik II</b> dilakukan dalam rangka pembahasan hasil konsinyering dan menghimpun masukan untuk penyempurnaan perumusan arah kebijakan dan indikasi program isi TPB KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026. Surat Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya Nomor 660/099/DLH/III-2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Undangan Konsultasi Publik Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026 (<b>surat undanga terlampir</b>).</p>

### Lampiran 3

		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi publik II dilakukan di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya dihadiri oleh LSM, tokoh masyarakat, Akdemisi, pelaku usaha dan tenaga ahli penyusun KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya (<b>daftar hadir terlampir</b>).</li> <li>• Konsultasi Publik dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Dharmasraya. Konsultasi publik II penyusunan KLHS RJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021 – 2026, dalam rangka menghimpun masukan terkait dengan arah kebijakan dan indikasi program indikator TPB yang telah dirumuskan pada saat konsinyering sebelumnya (<b>berita acara terlampir</b>).</li> <li>• Peserta diminta untuk menambahkan atau memperbaiki arah kebijakan dan indikasi program tersebut.</li> </ul>
9	Kamis, 01 April 2021	<p>Singkronisasi hasil perumusan arah kebijakan rencana program KLHS terhadap rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya nomor 660/127/DLH/III-2021 tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permintaan Narasumber untuk Singkronisasi Arah Kebijakan KLHS RPJMD Tahun 2021 – 2026 (<b>surat terlampir</b>).</p>

### Lampiran 3

		   <p>Rapat ini dilakukan di Ruang Pertemuan Grand Inna Muara Hotel, Padang dihadiri oleh tim pembuat KLHS internal DLH, tenaga ahli penyusun KLHS, tim pokja penyusun RPJMD, dan Bapak sekretari Daerah Kab. Dharmasraya Bersama Asisten II (<b>daftar hadir terlampir</b>)</p> <p>Rapat ini dalam rangka penyamaan persepsi terkait pengintegrasian KLHS kedalam Rancangan Awal RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026</p>
10	Senin, 10 Mei 2021	<p><i>High Level Meeting</i> KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya berdasarkan surat undangan Bupati Dharmasraya No. 660/163/DLH/V-2021 tanggal 6 Mei 2021 perihal High Level Meeting KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026 (<b>undangan terlampir</b>).</p>  



### Lampiran 3



- Pertemuan ini dilakukan di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya, Sekda Kab. Dharmasraya, Asisten Setda Prov. Sumbar, Staf Ahli, Kepala OPD, Tim Ahli & Pakar KLHS, Tim Pokja KLHS internal DLH (**daftar hadir terlampir**).
- Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Bupati Dharmasraya. Rapat ini dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil KLHS yang telah disusun dan upaya percepatan pengintegrasian KLHS kedalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya (**berita acara terlampir**)

# **PERSURATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id

Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 29 Desember 2020 M  
Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 660 /334 / DLH/XII-2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permintaan Data untuk  
Penyusunan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD  
Kab. Dharmasraya Tahun 2021 -  
2024

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024, maka bersama ini kami sampaikan beberapa data yang dibutuhkan sebagaimana terlampir.

Mengingat pentingnya data tersebut, kiranya Sdr/i berkenan menyampaikan kepada kami sebelum tanggal 12 Januari 2021 melalui email [blhdharmasraya02@gmail.com](mailto:blhdharmasraya02@gmail.com) atau via wa 085272463698 (Yona Anggela)/ 081237158068 (Defriandi).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**



**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



**Daftar Instansi dan Lembaga untuk Permintaan Data untuk Penyusunan KLHS:**

1. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
3. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dharmasraya
4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya
5. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya
6. Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
7. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Dharmasraya
8. Bappeda Kabupaten Dharmasraya
9. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
11. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya
12. BPBD Kabupaten Dharmasraya
13. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
14. Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
15. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
16. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
17. Dinas P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya
18. Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
19. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
20. Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
21. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya
22. Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya
23. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya
25. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
26. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dharmasraya
28. Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
29. Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
30. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya
31. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya
32. Departemen Agama Kabupaten Dharmasraya
33. Polres Kabupaten Dharmasraya
34. BPJS Kesehatan cabang Kabupaten Dharmasraya
35. BPJS Ketenagakerjaan cabang Kabupaten Dharmasraya
36. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Barat cabang Pulau Punjung
37. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kabupaten Dharmasraya
38. Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kabupaten Dharmasraya
39. Bank Mandiri Cabang Dharmasraya
40. Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Dharmasraya



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id

Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 06 Januari 2021 M  
Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 660 / 012 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Sosialisasi Penyusunan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis  
(KLHS) RPJMD Kab. Dharmasraya  
Tahun 2021 – 2024

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**

Dengan Hormat,


Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2024, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada OPD terkait dalam rangka pengenalan konsep penyusunan KLHS dan penyampaian hal lainnya yang diperlukan untuk penyusunan KLHS tahun 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diundang Saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Aula Lt II Kantor Bupati  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab.  
Dharmasraya Tahun 2021 – 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



**DAFTAR UNDANGAN UNTUK SOSIALISASI PENYUSUNAN KLHS:**

1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dharmasraya
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya
3. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
5. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Dharmasraya
6. Bappeda Kabupaten Dharmasraya
7. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
9. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya
10. BPBD Kabupaten Dharmasraya
11. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
13. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
14. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
15. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya
16. Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
17. Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
18. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya
19. Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya
22. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
23. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dharmasraya
25. Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
26. Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya
28. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya
29. Camat Pulau Punjung
30. Camat IX Koto
31. Camat Sitiung
32. Camat Koto Salak
33. Camat Tiumbang
34. Camat Koto Baru
35. Camat Koto Besar
36. Camat Sungai Rumbai
37. Camat Asam Jujuhan
38. Camat Timpeh
39. Camat Padang Laweh



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id

Website: www.dharmasrayakab.go.id

Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 06 Januari 2021 M  
Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 660 / 014 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permintaan Narasumber untuk  
Sosialisasi Penyusunan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis  
(KLHS) RPJMD Kab. Dharmasraya  
Tahun 2021 – 2024

Kepada Yth.  
Sdr. DR. ARDINIS ARBAIN  
di

**Padang**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya akan melakukan penyusunan KLHS RPJMD dan akan dilakukan sosialisasi kepada OPD terkait dalam rangka pengenalan konsep penyusunan KLHS dan penyampaian kebutuhan data yang diperlukan untuk penyusunan KLHS tahun 2021 ini.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Narasumber pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Aula Lt II Kantor Bupati  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab.  
Dharmasraya Tahun 2021 – 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:  
Humas@dharmasraya.go.id  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id) Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 6 Januari 2021 M  
Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 660 / 015 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permintaan Narasumber untuk  
Sosialisasi Penyusunan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis  
(KLHS) RPJMD Kab. Dharmasraya  
Tahun 2021 – 2024

Kepada Yth.  
Sdr. DR. MAHDI  
di

**Padang**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya akan melakukan penyusunan KLHS RPJMD dan akan dilakukan sosialisasi kepada OPD terkait dalam rangka pengenalan konsep penyusunan KLHS dan penyampaian kebutuhan data yang diperlukan untuk penyusunan KLHS tahun 2021 ini.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Narasumber pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Aula Lt II Kantor Bupati  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab.  
Dharmasraya Tahun 2021 – 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:  
Humas@dharmasraya.go.id

Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 06 Januari 2021 M  
Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 660 / 013 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Permintaan Narasumber untuk  
Sosialisasi Penyusunan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis  
(KLHS) RPJMD Kab. Dharmasraya  
Tahun 2021 – 2024

Kepada Yth.  
Bpk. Gubernur Prov. Sumatera Barat  
Cq. Dinas Lingkungan Hidup Prov.  
Sumatera Barat  
di

**Padang**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2021 Kabupaten Dharmasraya akan melakukan penyusunan KLHS RPJMD dan akan dilakukan sosialisasi kepada OPD terkait dalam rangka pengenalan konsep penyusunan KLHS dan penyampaian kebutuhan data yang diperlukan untuk penyusunan KLHS tahun 2021 ini.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak untuk menugaskan satu orang tenaga teknis yang membidangi penyusunan KLHS untuk mengisi acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 14 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Aula Lt II Kantor Bupati  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan  
Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab.  
Dharmasraya Tahun 2021 – 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.





# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis / 14 Januari 2020  
Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2024

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	ABDI AMRI	M. Adh. C. 12	1
2	Sulharnan	B. p. 12	2
3	Udauan	W. p. 12	3
4	Frinaldi	B. p. 12	4
5	Rika Herlina	BKPSDM	5
6	Khairul. H	Ktr. Caman. Pl. Pungung	6
7	MARTIN LUKAS	D. S. 12	7
8	Abas H. Purno	Bag. P. 12	8
9	H. MIYAUSS	Sek. D. 12	9
10	Ramilus	D. 12	10
11	Rahmi Nurh	Dinas K. 12	11
12	S. 12	"	12
13	Fulga Puspa Dini	DH	13
14	APRIAL	Sek. B. 12	14
15	A. Marjani	Sek. Cam. 12	15
16	F. 12	B. 12	16
17	Pensuri	Kesbang Pol	17
18	NINGS. C. 12	K. 12	18
19	K. 12	D. 12	19
20	S. 12	K. 12	20
21	Eldison	BPBD	21
22	Renna P. 12	D. 12	22
23	S. 12	D. 12	23
24	Yulius Syuliana	Dinas 12	24
25	ALVA POZA	D. 12	25
26	Fika Novianti R	Bag. AP	26
27	Yosta de pina	D. 12	27
28	Ismirawati	Pertukutan	28
29	Nani Rahayu	D. 12	29
30	Wulan	D. 12	30
31	Nett & Girandi	Bag. Perencanaan	31
32	AFIS PASITA	D. 12	32
33	ARWINTA		33
34	Rudy M. 12	D. 12	34
35	V. 12	B. 12	35





# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis / 14 Januari 2020.  
Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2024

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
36	ARI AFRI	Bojonegara	36
37	Hendra	DLH	37
38	DESWATI	DLH	38
39	WISNI	Transnaker	39
40	marco	Ek. Kobo Sabat	40
41	APWINTA	camat	41
42	DEPRI	camat	42
43	Nata Hendri	DLH	43
44	Fadilah Malarari	DLH	44
45	Wira OGC-6	DLH	45
46	Dan Harda	Inspektorat	46
47	Bani	DLH	47
48	Budi Setiawan	Bagian Hum	48
49	Budi	Ka C. E-Baru	49
50	DPR	Mar Bg. Umuk	50
51	Andys	Prappes	51
52	Asma	Dipr	52
53	Elly Oktavia	Kemping	53
54	Porty Priy	Sarda	54
55	Yasri	BPBD	55
56	Amin Pawarti	Disemin	56
57	Yona Ausse	DLH	57
58	Dia Chandra A.	DLH	58
59	Iona Surtani	DLH	59
60	Esi Anni	Atas Seko	60
61	Ardini's Abani	Tim Ahli pendamping	61
62	Mahes	Tim Ahli pendamping	62
63	Dia Chandra A.	DLH	63
64	POTRI INDAYANI	DLH	64
65	Dewi Marlina	DLH	65
66	MITA	DLH	66
67	Eka Fitriyanti	-	67
68	Umi Kulkum	-	68
69	Yongki Sukma	DLH	69
70	Ruan Tibo	DLH	70



# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis / 14 Januari 2020  
Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharma Raya  
Acara : Sosialisasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharma Raya Tahun 2021 - 2024

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
71	Riyanti	DLH	71	
72	Desy Andriani	DLH	72	
73	Sumalita	DLH	73	
74	Wahyuni	DLH	74	
75	A Mikhail	DLH	75	
76	Erica Pindol	DLH	76	
77	Wiwid Suprudi	DLH	77	
78	Mulyadi	DLH	78	
79	Wahyuni	DLH	79	
80	Eric Pindol	DLH	80	
81	Lamuyadi	DLH	81	
82	Depriandi	DLH	82	
83	drg. Erina MKM	Kadis DLH Dharma Raya	83	
84	H. Adisman, ST-Msi	Sekda kab. Dharma Raya/Kotab	84	
85	Ir. Shi Aifah, M.Si	Narasumber DLH prov. Sumb	85	
86	Desrizal, ST	Narasumber DLH. Prov. Sumb	86	
87			87	
88			88	
89			89	
90			90	
91			91	
92			92	
93			93	
94			94	
95			95	
96			96	
97			97	
98			98	
99			99	
100			100	





## NOTULEN ACARA

### SOSIALISASI PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026

Hari/ Tanggal : Kamis/ 14 Januari 2021  
Waktu : 09.00-12.00 WIB  
Tempat : Ruang Aula Lt. II Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Sosialisasi Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026  
Narasumber : Ir. SITI AISYAH, M.Si (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat)  
Dr. Ardinis Arbain (Tenaga Ahli Bidang Biologi)  
Dr. Mahdi, SP, M.Si (Akademisi Sosial Ekonomi Pertanian UNAND)

#### Isi Konsultasi Publik

Sosialisasi Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 dihadiri oleh:

Pembuka Acara : H. Adlisman, S.Sos, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya)

Lamporan Ketua Tim : drg. Erina, MKM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

Penyusun

Moderator : Lasmiyati, M.Si

Jumlah Peserta : 80 Orang

#### Notulen Acara Inti Pelaksanaan Konsultasi Publik:

1. Sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, dan ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi :
  - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
2. Sebagai turunan dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD sebagai pedoman bagi daerah dalam membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan sehubungan dengan Kabupaten Dharmasraya sedang dalam persiapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026 maka secara parallel dilakukan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026.
4. Sebagai tahap persiapan dari rangkaian proses kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026 adalah Pembentukan Tim Penyusun dokumen KLHS RPJMD yang terdiri dari OPD teknis terkait dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi dan kegiatan sosialisasi ini, dimana kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk :
  - a. Memberi pengarahan, pembekalan, penjelasan pembuatan KLHS RPJMD kepada Tim Penyusun KLHS RPJMD dan para pihak terkait;
  - b. Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun KLHS RPJMD.
5. Peserta kegiatan sosialisasi adalah sebanyak 50 orang yang berasal dari :
  - a. Wakil dari instansi terkait se-Kabupaten Dharmasraya
  - b. Wakil dari Camat se-Kabupaten Dharmasraya
  - c. Tim Ahli penyusun dokumen KLHS RPJMD
  - d. Anggota Tim penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 - 2026
6. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026 (direncanakan mulai bulan Januari s/d April 2021) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:
  - a. Tahap Persiapan meliputi penyiapan kelengkapan administrasi (persuratan), pembentukan tim penyusun dan sosialisasi;
  - b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi identifikasi pengumpulan data, analisis data dan konsultasi publik;
  - c. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan yang meliputi, penyusunan alternatif proyeksi, konsultasi publik dan pembuatan laporan;
  - d. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian yang meliputi penjaminan kualitas dan pendokumentasian;

Notulis,



Irma Surianti, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id) Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 13 Januari 2021 M  
13 Jumadil Awal 1442 H

Nomor : 660 / 20 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Undangan *Coaching* Data KLHS

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**

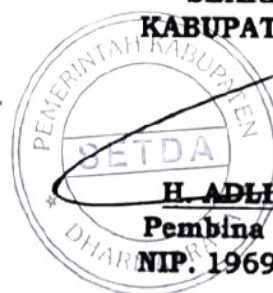
Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, salah satu tahapan penyusunan KLHS adalah inventarisasi data indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diperoleh dari OPD terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memastikan kelengkapan data TPB tersebut dibutuhkan coaching kebutuhan data bersama OPD terkait sesuai dengan jadwal terlampir. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kiranya Sdr/i dapat hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**



**H. ADLISMAN, S.Pd, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



Lampiran 3

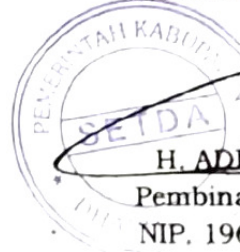
JADWAL COACHING KEBUTUHAN DATA KLHS

Lokasi

: Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Waktu	Group 1 (Dian Chandra Ardhani)	Group 2 (Yona Anggela)	Group 3 (Irma SURIANTI)
Jumat/15 Januari 2021	1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda	1. Bagian Hukum Setda	1. Badan Keuangan Daerah
	2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	2. Bagian Perekonomian dan SDA Setda	2. Dinas Komunikasi dan Informatika
	3. Bagian Organisasi Setda	3. Bappeda	3. BKPSDM
Senin/ 18 Januari 2021	1. BPBD	1. Dinas Pangan dan Perikanan	1. Dinas Pendidikan
	2. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil	2. Dinas Perkimtan	2. Dinas Perhubungan
	3. Dinas Kesehatan	3. Dinas Sosial P3AP2KB	3. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Selasa/19 Januari 2021	1. Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga	1. Dinas PU & PR	1. Kesbangpol
	2. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2. Dinas PMD	2. Dinas Pertanian
	3. DPMPTSP	3. Inspektorat	3. Dinas Lingkungan Hidup

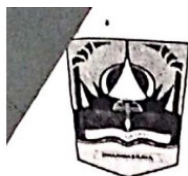
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA



H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya - IV/d

NIP. 19690825 198902 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
 Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

**DAFTAR HADIR**

Hari/ Tanggal : Jum'at / 15 Januari 2021  
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya  
 Acara : Coaching Kebutuhan Data KLHS

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1	Fika	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	1	
2	Albert	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	2	
3	Indra Chadican	Bagian Organisasi Setda	3	
4	Deswita	Bagian Hukum Setda	4	
5	Netty Susanti	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	5	
6	Ari Afif	Bappeda	6	
7	Nengsi Susti	Badan Keuangan Daerah	7	
8	Amin Parwahi	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	
9	Rika	BKPSDM	9	
10	Irma Surland	DLH	10	
11	Lagmiyati	DLH	11	
12	Dian chandra . A	DLH	12	

Mengetahui,  
 Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan LH  
 Dinas Lingkungan Hidup,

Lagmiyati, M.S.  
 NIP. 19800323 201001 2 026





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
 Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

**DAFTAR HADIR**

Hari/ Tanggal : Senin / 18 Januari 2021  
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya  
 Acara : Coaching Kebutuhan Data KLHS

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1	Zilfannur	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	
2	Fira Kristina MM	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	
3	Suhaimi NURTA	Dinas Kesehatan	3	
4	Asmaida	Dinas Pangan dan Perikanan	4	
5	ISMIRAWATI	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5	
6	Novarina	Dinas Sosial P3AP2KB	6	
7	Nani Rahayu	Dinas Pendidikan	7	
8	Iswardi (va wa e Sumt)	Dinas Perhubungan	8	
9	FAHME TRIAN	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	
10	YASRI (085263 511881)	BPBD	10	
11	Setia Bun?	DIKES.	11	
12	Ima Sunand	DLH	12	

Mengetahui,  
 Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan LH  
 Dinas Lingkungan Hidup,

Lasmiyati, M.Si  
 NIP. 19800323 201001 2 026



# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Selasa / 19 Januari 2021  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya  
Acara : Coaching Kebutuhan Data KLHS

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1	Bent mandala Putra	Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga	1	
2	Dewi Ekaunah, SE	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2	
3	Kaspul Asral	DPMPTSP	3	
4	Yuliyes Stuklana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	
5	Yuliyes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	
6	Pita Bidayanti / Darmendra	Inspektorat	6	
7	penru	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7	
8	Epon Ekanadi	Dinas Pertanian	8	
9	Hendra Yadi	Dinas Lingkungan Hidup	9	
10	Silva Pote	DPMP	10	
11	Mardizal	DPMPSP	11	
12	Pra Praja Andika	DPMPSP	12	
13	Irena Surianti	DLH	13	
14	Wira Ocha	DLH	14	
15	Lasmiyati	DLH	15	
16	Dian C.A	DLH	16	
17	Yona A	DLH	17	
18	Defri And	DLH	18	

Mengetahui,  
Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan LH  
Dinas Lingkungan Hidup,

*Lasmiyati, M.Si*

NIP. 19800323 201001 2 026



**NOTULEN ACARA  
COACHING DATA UNTUK PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026**

Hari/ Tanggal : Jumat, Senin, Selasa / 15,18 dan 19 Januari 2021  
Waktu : 08.00-16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya  
Acara : Coaching Data Untuk Penyusunan Klhs Rpjmd Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026  
Mentor : 1. Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si  
2. Yona Anggela, ST  
3. Irma Surianti, ST

**Jalannya Acara Coahing Data**

**Notulen Acara Inti Pelaksanaan Coaching Data:**

1. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari yaitu pada hari Jumat, Senin, Selasa tanggal 15, 18, dan 19 Januari 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya;
2. Kegiatan ini dipandu oleh 3 orang mentor yaitu bapak Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si, Ibu Yona Anggela, ST, dan Irma Surianti, ST;
3. Kegiatan ini bertujuan untuk pengumpulan data lebih disiplin sesuai target, karna waktu penyelesaian KLHS juga diburu degan target, selain itu coaching data juga bertujuan untuk penyamaan persepsi antara tim teknis pengumpul data pada OPD terkait dengan tenaga ahli penyusun KLHS, jika tim teknis pengumpul data merasa ada yang ragu terkait data yang harus diisikan bisa ditanyakan pada saat coahing data awal sehingga pada saat verifikasi data awal bersama tenaga ahli data yang dibutuhkan sudah tersedia.
4. Sebaliknya bagi tim perekap data dari DLH juga dapat mengkonfirmasi ulang terkait data yang sudah diberikan OPD teknis terkait jika ada yang perlu ditanyakan atau diragukan bisa dibicarakan pada saat coaging data awal ini.
5. Agar berjalan maksimal Kegiatan Coahing data awal dibagi menjadi pershif dan perkelompok dengan mentor masing-masing, sehingga mentor bertanggungjawab menghubungi OPD teknis terkait dan data yang dikumpulkan lebih dipahami masing-masing mentor.
6. Walaupun tidak semua OPD hadir akan tetapi acara tetap berjalan lancar dan para OPD pengumpul data tetap berkoordinasi via telpon dan berkomitmen akan tetap mengumpulkan data yang dibutuhkan sesuai jadwal yang telah disepakati.

Notulis,



Irma Surianti, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id

Website: www.dharmasrayakab.go.id

Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 19 Januari 2021 M  
Jumadil Akhir 1442 H

Nomor : 660 / 024 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Verifikasi Data Awal Penyusunan  
KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya  
Tahun 2021 - 2026

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh OPD terkait untuk penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2026, dan berdasarkan hasil Coaching kebutuhan data per OPD yang belum maksimal maka perlu dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan verifikasi lebih lanjut bersama Tenaga Ahli Pendamping Penyusun KLHS RPJMD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diundang penanggungjawab data terkait untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu - Kamis / 20 - 21 Januari 2021  
Pukul : 08.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat DLH  
Acara : Verifikasi Data Awal Penyusunan KLHS  
RPJMD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



Lampiran 3

**JADWAL UNDANGAN VERIFIKASI DATA AWAL PENYUSUNAN KLHS**

No	Jadwal	Instansi/ OPD
<b>1</b>	<b>Rabu / 20 Januari 2020</b>	
	Jam 09 - 10 WIB	1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda 3. Bagian Organisasi Setda
	Jam 10 - 11 WIB	1. Bagian Hukum Setda 2. Bagian Perekonomian dan SDA Setda 3. Bappeda
	Jam 11 - 12 WIB	1. Badan Keuangan Daerah 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. BKPSDM 4. BPBD
	Jam 13 - 14 WIB	1. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pangan dan Perikanan
	Jam 14 - 15 WIB	1. Dinas Perkimtan 2. Dinas P3AP2KB 3. Dinas Pendidikan
	Jam 15 - 16 WIB	1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3. Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga
<b>2</b>	<b>Kamis / 21 Januari 2020</b>	
	Jam 09 - 10 WIB	1. Diskumperdag 2. DPMPTSP 3. Dinas Lingkungan Hidup
	Jam 10 - 11 WIB	1. Dinas PUPR 2. Dinas PMD 3. Inspektorat
	Jam 11 - 12 WIB	1. Dinas Pertanian 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Badan Pusat Statistik (BPS)
	Jam 13 - 14 WIB	1. Departemen Agama Kabupaten Dharmasraya 2. Polres Kabupaten Dharmasraya 3. BPJS Kesehatan
	Jam 14 - 15 WIB	1. BPJS Ketenagakerjaan cabang 2. Bank Pembangunan Daerah (BPD) 3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kabupaten Dharmasraya
	Jam 15 - 16 WIB	1. Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kabupaten Dharmasraya 2. Bank Mandiri Cabang Dharmasraya 3. Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Dharmasraya

*Note : Demi Kelencaran acara ini diharapkan kepada bapak/ibu untuk dapat hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.*



# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

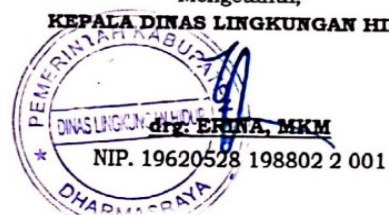
### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Rabu / 20 Januari 2021  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya  
Acara : Verifikasi Data Awal Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021 - 2026

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1	Affort H. Rumano	Bagian PB7.	1	
2	Iydra Chudican	Bjn organisasi	2	
3	Iwurdi	Dinas perhubungan	3	
4	Moffy Smanhi	Bag. Perekonomian	4	
5	Fika Nuranti. P	Bag. Adm Pembangunan	5	
6	Zilpananda	BPBD.	6	
7	Yam	BPMD	7	
8	Rika Herlina	BKPSDM	8	
9	Devi Ersanti	DUPAKAN	9	
10	Awi Kartika	DISPAKAN	10	
11	Benny Mandala Putra	DISBUDPARPORA	11	
12	St Agung Fikando	DISBUDPARPORA	12	
13	Silva Kristina	CAPN	13	
14	Yenof Patrione, H.	capil	14	
15	Zulhendri	keunenag	15	
16	Setia Budi	Dinkes	16	
17	Mega Silvana	"	17	
18	Ari Afif	Dispenda	18	
19	Nani Rahayu.	Btekel.	19	
20	Suhaimi Muta, SKM	Dinkes	20	
21	Fahmel	TransDokter	21	
22	Irena Surtaji	DLM	22	
23	Rahma Wani	TA. Pendamping	23	
24	Ardinus Abbas	TA. pendamping	24	
25	Mudis	Tum Pendamping	25	
26	B. Cukh Anas.	DLM	26	
27	Lasmiyah	DLM	27	
28	Zona A.	DLM	28	
29	Desri Nda	DLM	29	
30	Hendri Fadi	DLM.	30	
31			31	
32			32	
33			33	
34			34	
35			35	

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP







# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451306 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis / 21 Januari 2021

Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya

Acara : Verifikasi Data Awal Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021 - 2026

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
1	Kaipul Arai	DPMPTSP	1	
2	Mardisal	DPMPTSP	2	
3	Pria Prita Andika	DPMPTSP	3	
4	Amran Amir	DISEKUMPERDAG	4	
5	Devi Eta Wati	DISEKUMPERDAG	5	
6	Darmadikson		6	
7	Yose Sudarso	DISEKUMPERDAG	7	
8	Amin Perwahi	DISTOMINFO	8	
9	Putri Maharani	DISTOMINFO	9	
10	Pensuni	Kesbangpol	10	
11	Darindra	Inspektorat	11	
12	Maya Sari	DPUPH	12	
13	Deke Trismawidana	DPUPH	13	
14	Yuliusanbi	Dinas PMD	14	
15	Silvia Rani	-u-	15	
16	Yuliges Sydentana	-u-	16	
17	NOVARINA	DINSA P3 APPKB	17	
18	EMILIAWATI	Dinas Perikanan	18	
19	Doni Ekanedi	Dinas Perikanan	19	
20	Alico Harlina Septia	BPJS Kesehatan	20	
21	Charli Neryh	-u-	21	
22	Yustini Pyan W	BPJS Kesehatan	22	
23	Armanyanh	BPJS Kesehatan	23	
24	ABOET Zaidi	Batal Negeri PL. Pung	24	
25	Wira Ota-BUSMELA	BUM	25	
26	Angus S.	BUM	26	
27	Primaldi	Bappeda	27	
28	Muhammad Ridwanan	BUM	28	
29	Rahma Wirni	TA Pendamping	29	
30	ADINUS ARDIN	TA Pendamping	30	
31	Mahdi	TA Pendamping	31	
32	Doni Chandra Bala	BUM	32	
33	Irma Surtandi	BUM	33	
34	Lasmiyah	BUM	34	
35	Yona A.	BUM	35	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
drg. ERINA MKM  
NIP. 19620528 198802 2001



## NOTULEN ACARA

### VERIFIKASI DATA AWAL UNTUK PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026

Hari/ Tanggal : Rabu s/d Kamis / 21 s/d 22 Januari 2021  
Waktu : 08.00-16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya  
Acara : Verifikasi Data Awal Untuk Penyusunan Klhs Rpjmd Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026  
Narasumber : Dr. Ardinis Arbain (Tenaga Ahli Bidang Biologi)  
Dr. Mahdi, SP, M.Si (Akademisi Sosial Ekonomi Pertanian UNAND)  
Rahma Wimi, ST, M.Si (Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan)

#### Jalannya Acara Verifikasi Data Awal

##### Notulen Acara Inti Pelaksanaan Verifikasi Data Awal:

1. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut pada hari Rabu dan Kamis tanggal 21 s/d 22 Januari 2021 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya;
2. Kegiatan ini dipandu oleh 3 orang tenaga ahli pendamping yaitu bapak Dr. Ardinis Arbain selaku Tenaga Ahli Bidang Biologi, Dr. Mahdi, SP, M.Si selaku Akademisi Sosial Ekonomi Pertanian UNAND dan Ibu Rahma Wimi, ST, M.Si selaku Tenaga Ahli Teknik Lingkungan dan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Agar berjalan maksimal Kegiatan verifikasi data awal dibagi menjadi pershif, sehingga OPD pengumpul data KLHS RPJMD tidak datang bersamaan sekaligus dan tenaga ahli dapat menggali informasi lebih dalam terhadap informasi terkait ketersediaan data dan informasi cara mendapatkan data dari OPD terkait, Akan tetapi tidak semua OPD hadir sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dikarenakan urusan lain yang tidak bisa ditunda juga di kantor masing-masing;
4. Semua OPD tetap hadir pada acara verifikasi data awal, walaupun data yang harus mereka kumpulkan belum tersedia, dan pada verifikasi data awal tim teknis dari OPD terkait mengisi surat pernyataan bahwa data yang diberikan benar adanya dan bersedia melengkapi data sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelum konsultasi publik penjangkaran isu prioritas yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021.

Notulis,



Irma Surianti, ST



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id) Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 22 Januari 2021 M  
Jumadil Akhir 1442 H

Nomor : 660 / Q33 / DLH/I-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik**

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**


Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjelaskan bahwa dalam penyusunannya diperlukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait untuk menjaring isu prioritas pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan) yang terjadi di Dharmasraya. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diundang Saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 26 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya  
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung  
Acara : Konsultasi publik dalam rangka penjarangan  
isu prioritas pembangunan berkelanjutan  
untuk penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten  
Dharmasraya Tahun 2021 - 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**

  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



**DAFTAR UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK:**

1. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dharmasraya
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
8. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Dharmasraya
9. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
12. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya
13. Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
16. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
17. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
18. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya
19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
21. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya
22. Kepala Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya
23. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya
27. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dharmasraya
28. Kepala Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
29. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
30. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya
31. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya
32. Kepala RSUD Sungai Dareh
33. Kepala KPHP Kabupaten Dharmasraya
34. Polres Dharmasraya
35. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
36. Camat Pulau Punjung
37. Camat IX Koto
38. Camat Sitiung
39. Camat Koto Salak
40. Camat Tiung
41. Camat Koto Baru
42. Camat Koto Besar
43. Camat Sungai Rumbai
44. Camat Asam Juhan
45. Camat Timpeh
46. Camat Padang Laweh
47. LSM WARSI
48. LSM WALHI
49. Unand Kampus III/ LPPM Unand III
50. Ketua LKAAM Dharmasraya
51. Bundo Kanduang Dharmasraya
52. Ketua PKK Kabupaten Dharmasraya
53. Ketua MUI Kabupaten Dharmasraya
54. KNPI
55. Tokoh Masyarakat
56. Tim Penyusun RPJMD Dharmasraya Tahun 2021 – 2026
57. PT Kalidareh Cipta Sarana
58. PT Incasi Raya Group
59. PT Dharmasraya Lestarindo
60. PT Dharmasraya Sawit Lestari

61. PT Bukit Raya Mudisa
62. PT Tidar Kerinci Agung
63. PT Andalas Wahana Berjaya
64. PT KUD Sinamar
65. Tim Pembuat KLHS RPJMD Dharmasraya
66. BPJS Kesehatan cabang Kabupaten Dharmasraya
67. BPJS Ketenagakerjaan cabang Kabupaten Dharmasraya
68. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Barat cabang Pulau Punjung
69. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kabupaten Dharmasraya
70. Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kabupaten Dharmasraya
71. Bank Mandiri Cabang Dharmasraya
72. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Dharmasraya





# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Selasa / 26 Januari 2021  
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Konsultasi Publik dalam rangka Penjaringan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan  
Untuk Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Nama	HP	Instansi	Tanda Tangan
1	deg. Erinda, muk	082276892646	Kadis. DLH	1
2	H. Misyro, M.Si	081311295985	Sek. DLH	2
3	Hachul	08267241395	BKPSDM	3
4	ISWARDI	085272451179	DISHUB	4
5	Roni	081363716191	PLH	5
6	Rika Herlina	085364777589	BKPSDM	6
7	Mahes	08527264009	Unsur	7
8	Rahma Wini	081374940293	"	8
9	FAHMA TRIADI	08228382357	Dinas Transmigrasi	9
10	Arnidawati A	082284502436	Pol PP	10
11	ELISWANTRI, SH, M.H	081363467105	Polri	11
12	Syamsul Bahri	08126120262	Dist	12
13	Yetrinda	0812664216	Sek.	13
14	ISMIRAWATI	081363283721	perkimtan	14
15	Nopriadi Fani P.		Perkimtan	15
16	Ramulus		Perkimtan	16
17	Zulfanah		BPBD	17
18	Anu Surtika	081268400001	KKI WAPSI	18
19	Paryanto		BRD	19
20	ALBERT JUNAIDI	08126624022	BAK NAGARI	20
21	HENDRAWATI	081374114132	Kh Gant ptp	21
22	Suhaimi Nurta	08126727504	Dinas Kesehatan	22
23	SETIA BUDI	081363335128	"	23
24	Arman	081277773235	SEKWAN	24
25	Andy Sumah		Banyuwangi	25
26	ARWITA	082300450217	Qamul Gunung	26
27	Rudy Maru	081363201267	Dikes PI	27
28	AULIA REZKI KUSWARDI	081363175533	BWS SUMATERA V	28
29	SUGIRI	085271310680	PT. RINA	29
30	Sahroni		PT. RINA	30
31	Amanggas	08117506015	BAJS Kecamatan	31
32	Riko HS	08116613222	BAJS Kecamatan	32
33	Yusman Ban	08226025337	BAJS Kecamatan	33
34	ESWIDA Rafni		Kec. Padang L...	34
35	HILDA	08126702311	BPS	35



Lampiran 3

	Nama	HP	Instansi	Tanda Tangan
36	Fajri Usma	081277321870	K. C. Plr	36
37	Wika Bea Gurude	0811644692	DLH	37
38	Mawar	0817045575	Kusurda	38
39	HIMORA		PASER P. Rupa	39
40	FRANKY SATIA	082283272086	PT. TRANSIG perhima	40
41	Rian Afgha	082169243636	Takoh Masu	41
42	S.T.M. TAUFIK		Kadis PARILANSATA	42
43	PATNI Dwi		TP PKK Kib	43
44	HABIBULLAH	08266046379	UPTD KHP Dharm.	44
45	GUSIANO	0816655912	BSM	45
46	Asmaida	08863914020	Dispara	46
47	Netty Eusanti	08126730244	Bag. Perak	47
48	MOVOFK	08126724021	Meoni Grup	48
49	HARIFAM, ST	0812-7473-3296	PT. SAR POM	49
50	DENY		Transaker	50
51	DENY LAMAR	08126717120	DISKOMINFO	51
52	Ningsi F.	082169026060	BICD	52
53	Fika Nananti R	085386484990	Bag. AP	53
54	Yasni	085263 51881	BPD	54
55	Nann Rahayu M	081365653840	Disdik	55
56	Kadek Hanan	0812672092	DLH Siman	56
57	NOVARINA	081267923932	Dinas P3A PPKB	57
58	Kaspul Adal		DPMPTSP	58
59	ATI Afri	08176555790	B. PPKB	59
60	Busrul Indri	082283302294	PT BRN	60
61	Imam Mulyati	081272911030	Emat.	61
62	Yuli Eusanti	081363223360	Dinas PMD	62
63	Nahyu Sinaga	0852.8346.8880	PT. DSL.	63
64	Silafurrahim	081374951515	Bappeda	64
65	EDON EDAVEDI	085274052577	Distan	65
66	Fludini	081277889136	Kesbang Pol	66
67	Supari	08137455118	Keu. Tugel	67
68	Aloya	081275988801	Bank Mandiri	68
69	R. Ulhasni	081267141425	Bappeda	69
70	MANA	081266679986	Bappeda	70
71	Zulfateri	081374601635	PT. DL	71
72	PERI S	082287607347	PTAUR	72
73	Yana Anggela	085272483698	DLH	73
74	Natna Handri	081275524080	DLH	74
75	DELE	081266679986	K. Koh Pk	75
76	MASARAL	08239020771	Dr. Ambi	76
77	R. Luthi	081374601635	Koti Bar	77
78	ZUNERDI		Disbad perpora	78
79	Zulfatini	081374907860	KHP	79
80	RITANKI		DLH	80



Lampiran 3

	Nama	HP	Instansi	Tanda Tangan
81	Eka Fitriyanti		DLH	81
82	Mardiana Chan		DLH	82
83	Rania Naulin		DLH	83
84	Wahyuni		DLH	84
85	Fakwahul Anandri Akbar		DLH	85
86	Salma Achira Handri. Spd		Kumadag	86
87	Fauzan Nuzli		Kominfo	87
88	Roni			88
89	LS			89
90	Yunas			90
91	Nur Safri da			91
92	Pakso P			92
93	Yurnalis			93
94	Amdas			94
95	Zulham			95
96	Qviki			96
97	Pangul			97
98	manzul			98
99	Risa			99
100	Ua			100
101	Dian chandra		DLH	101
102	Karmiyah		DLH	102
103	Ima Sunant'			103
104	Putri Indayani			104
105	Dr. Ardus Arbain		Tim Ahli/Perasumber	105
106	Dr. Mulyadi, SP.		Tim Ahli/Perasumber	106
107	Rahma Wini, ST, M.Si		Tim Ahli	107
108	Andi Irawan - ST		DLH Prov Sumbor/Perasumber	108
109	Defri Andi		DLH Dharmasraya	109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
  
**drg. ERINA, MKM**  
 6620528 198802 2 001

## NOTULEN ACARA

### KONSULTASI PUBLIK PENJARINGAN ISU PRIORITAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026

Hari/ Tanggal : Selasa/ 26 Januari 2021  
Waktu : 09.00-12.00 WIB  
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Konsultasi Publik Penjaringan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Untuk  
Penyusunan Klhs Rpjmd Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026  
Narasumber : Dr. Ardinis Arbain (Tenaga Ahli Bidang Biologi)  
Dr. Mahdi, SP, M.Si (Akademisi Sosial Ekonomi Pertanian UNAND)  
Andi irawan, ST, MT (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya DLH Prov. Sumbar)

#### Isi Konsultasi Publik

Konsultasi Publik Penjaringan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Untuk Penyusunan Klhs Rpjmd Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 dihadiri oleh:

Pembuka Acara : H. Adlisman, S.Sos, M.Si (Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya)  
Lamporan Ketua Tim : drg. Erina, MKM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)  
Penyusun  
Moderator : drg. Erina, MKM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)  
MC : Fadhila Malasari, M.Si  
Pemimpin Lagu : Wahyuni  
Indonesia Raya  
Pembaca Do'a : H. Miyarso, S.Sos, M.Si  
Jumlah Peserta : 100 Orang

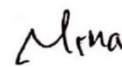
#### Notulen Acara Inti Pelaksanaan Konsultasi Publik:

1. Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 46/2016 pada pasal 8 mengenai keterlibatan pemangku kepentingan dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Maka sebagai kegiatan lanjutan, perlu dilakukan kegiatan konsultasi publik antara pemangku kepentingan yang terkait untuk menggali masukan.
2. Maksud dari konsultasi publik ini adalah memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk turut berkontribusi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD.
3. Adapun Tujuan kegiatan konsultasi publik ini adalah:
  - a. Mendapatkan masukan atas isu-isu pembangunan berkelanjutan yang relevan RPJMD di Kabupaten Dharmasraya.
  - b. Mendapatkan daftar panjang isu PB yang dijadikan sebagai bahan untuk tahapan selanjutnya pada pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
4. Peserta kegiatan konsultasi publik antara lain :
  - a. Lingkup SKPD Permerintah Kabupaten Dharmasraya
  - b. Lingkup SKPD terkait Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Bappeda, DLH, ESDM, dan PSDA)



- c. Kementerian terkait (Balai Wilayah Sungai BWS V Kementerian PU)
  - d. Akademisi (Universitas Andalas Kampus III dan Universitas Dharma Indonesia)
  - e. Pelaku usaha (perusahaan perkebunan, pertambangan, dan industri)
  - f. Lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan (Walhi, Warsi)
  - g. Keterwakilan dari pemerintah kecamatan
  - h. LKAAM
  - i. Bundo Kandung
  - j. MUI
5. Metode Penjaringan Isu Lingkungan Pada acara ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:
- a. Setelah penyampaian Materi oleh beberapa orang Narasumber terkait pentingnya penjaringan isu dan base line data dalam penyusunan KLHS RPJMD, selanjutnya peserta diberi waktu untuk diskusi dan menyampaikan pandangan terhadap kejadian dan permasalahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta memberikan saran dan masukan terhadap kondisi lingkungan dan solusi yang dapat dilakukan kedepannya untuk peningkatan kualitas lingkungan.
  - b. Setelah menerima beberapa tanggapan dan tahap diskusi selesai, lalu peserta diberikan kertas berwarna. Kemudian masing-masing peserta diminta menuliskan cukup satu isu prioritas lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya pada kertas yang tersedia,
  - c. Isu yang telah ditulis oleh masing-masing peserta dikumpulkan dan ditempelkan pada papan yang tersedia, Isu-isu utama yang banyak muncul yaitu seputar pencemaran air, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, alih fungsi lahan, pariwisata, bencana alam, dan lain lain. Isu yang telah dikelompokkan dikombinasikan ke daftar hasil sementara isu prioritas lingkungan hidup kabupaten Dharmasraya yang telah diperoleh sebelumnya.
  - d. Hasil kombinasi dan pengelompokan isu-isu yang ada diperoleh 14 (empat belas) isu lingkungan hidup, lalu dilanjutkan dengan proses skoring dan pembobotan terhadap masing-masing isu berdasarkan pada kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas.
6. Hasil perhitungan skoring dan pembobotan akan dilakukan identifikasi dan perumusan akhir isu prioritas lingkungan hidup yang dilakukan secara internal oleh Tim Penyusun KLHS bersama tenaga Ahli pendamping.

Notulis,



Irma Surianti, ST

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-Februari-2021), bertempat di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, telah dilaksanakan Konsultasi Publik dengan Metode Metaplan penjaringan isu-isu strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam rangka Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan hasil sebagai berikut :

**A. Isu Panjang Daerah sebagai berikut :**

- 1 Penurunan Kualitas Air
- 2 Peningkatan Timbulan Sampah dan rendahnya Kapasitas Pengelolaannya
- 3 *Ilegal Mining*
- 4 Alih Fungsi Lahan
- 5 Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 6 Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian
- 7 Peningkatan Kasus Narkoba
- 8 Infrastruktur Jalan
- 9 Rendahnya Kualitas Infrastruktur Jalan
- 10 Meningkatnya Kenakalan Remaja
- 11 Fasilitas Sanitasi dan Drainase yang Minimal
- 12 Peningkatan Kapasitas SDM yang Minimal
- 13 Rendahnya Pemahaman dan 43qKecintaan Terhadap Agama
- 14 Kurangnya Peluang dan Informasi
- 15 Masih Rendahnya Jumlah dan Kualitas Destinasi Wisata
- 16 Minimnya Pengembangan Perumahan
- 17 Tingginya Pemakaian Pupuk Kimia

**B. Isu Strategis Hasil Pembobotan berdasarkan PP 46 Tahun 2016 Pasal 9 (1) :**

- 1 Penurunan Kualitas Air
- 2 Peningkatan Timbulan Sampah dan rendahnya Kapasitas Pengelolaannya
- 3 *Ilegal Mining*
- 4 Alih Fungsi Lahan
- 5 Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- 6 Rendahnya Nilai Tambah Produk Pertanian
- 7 Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat

Lampiran 3

Isu-isu strategis ini akan digunakan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Pulau Punjung, tanggal sebagaimana tersebut di atas  
Perwakilan Peserta

			
Dinas Lingkungan Hidup	Bappededa	Camat	Polres Dharmasraya
			
Tim Ahli Pendamping	LSM	BUMD	Pelaku Usaha
			
Bundo Kanduang/ TP-PKK		Tokoh Masyarakat	





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id

Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id)

Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 16 Februari 2021 M

4 Rajab 1442 H

Nomor : 660 / 28 / DLH/II-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : Undangan *Konsinyering* KLHS di  
Labuan Sundai Kabupaten Pesisir  
Selatan

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setelah dilaksanakannya konsultasi publik penjaringan isu prioritas pembangunan berkelanjutan pada tanggal 26 Januari 2021, tahapan penyusunan KLHS selanjutnya yaitu identifikasi muatan Kebijakan Rencana Program (KRP) rencana pembangunan daerah terhadap analisis pengaruh isu pembangunan berkelanjutan strategis dan kajian muatan KLHS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilaksanakan analisis dan kajian bersama OPD terkait, maka diundang Saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis s.d. Jum'at/ 25 s.d. 26 Februari 2021  
Pukul : 08.00 WIB - Selesai  
Tempat : Labuan Sundai Resort Kabupaten Pesisir Selatan  
Acara : Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten  
Dharmasraya Tahun 2021-2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**



\* H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Arsip.



**Daftar Instansi untuk pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD di Labuan Sunda, Kabupaten Pesisir Selatan:**

1. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dharmasraya
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya
7. Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Dharmasraya
8. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Dharmasraya
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
10. Kepala BKPSDM Kabupaten Dharmasraya
11. Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
14. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
15. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
16. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
19. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
20. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya
21. Kepala Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya
22. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya
24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya
26. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dharmasraya
27. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya

### Lampiran 3

#### Agenda Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya 2021-2026

Hari / Tanggal : Selasa-Sabtu / 23 s.d 27 Februari 2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

No	Hari/ Tanggal/ Waktu	Kegiatan/Matari	MC/ Moderator- Narasumber/ Penanggap
1.	Selasa/23 Februari 2021		
	08.00 s/d 15.00 WIB	Keberangkatan Menuju Lokasi Kegiatan	
	15.00 WIB - Selesai	Registrasi Peserta	Panitia/Sekretariat
2.	Rabu/24 Februari 2021		
	Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB	Pembukaan dan Arahan pelaksanaan kegiatan	MC. Dinas LH Kab. Dharmasraya
	Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB	Materi I Sekanerio Pencapaian TPB	Moderator : DLH/Sekretariat. Narasumber : Tim Ahli
	Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB	Materi II Penyusunan Arah Kebijakan dan Indikasi Program berdasarkan TPB dan Isu Prioritas	Moderator : DLH/Sekretariat. Narasumber : Tim Ahli
	Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB	Materi III Penyusunan Arah Kebijakan dan Indikasi Program berdasarkan DDDTLH	Moderator : DLH/Sekretariat. Narasumber : Tim Ahli
	Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB	Ishoma	Panitia/Sekretariat
	Pukul 13.30 s/d 17.30 WIB	Kelompok I Penyusunan Bab I dan Bab II	Penyusun: DLH/Sekretariat. Narasumber : Tim Ahli
		Kelompok II Penyusunan Arah Kebijakan dan Indikasi Program	Penyusun: OPD terkait Narasumber : Tim Ahli
	Pukul 17.30 s/d 19.30 WIB	Ishoma	Panitia/Sekretariat
	Pukul 19.30 s/d 22.00 WIB	Kelompok I Penyusunan Bab III	Penyusun: DLH/ Sekretariat Narasumber : Tim Ahli
		Kelompok II Penyusunan Arah Kebijakan dan Indikasi Program	Penyusun: OPD Terkait Narasumber : Tim Ahli
3.	Kamis/25 Februari 2021		
	Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB	Kelompok I Penyusunan Bab IV	Penyusun: DLH/ Sekretariat Narasumber : Tim Ahli
		Kelompok II Penyusunan Arah Kebijakan dan Indikasi Program	Penyusun: OPD Terkait Narasumber : Tim Ahli
	Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB	Ishoma	Panitia/Sekretariat
	Pukul 13.30 s/d 17.30 WIB	Presentasi hasil penyusunan Arah kebijakan dari masing2 OPD	Tim Ahli dan Kadis Provinsi (kadis LH, Kadis PSDA, Balitbang, Kadis PUPR dan Kadis Kehutanan)
		BKD	
		DINAS PARBUDPORA	
		INSPEKTORAT	
		DINAS KUMPERDAG	
		DINKES	DINAS PERKIMTAN
		DINAS SOSP3AP2KB	DINAS PENDIDIKAN
	Pukul 17.30 s/d 19.30 WIB	Ishoma	Panitia/Sekretariat
	Pukul 19.30 s/d 22.00 WIB	Presentasi hasil penyusunan Arah kebijakan dari masing2 OPD	Tim Ahli dan Kadis Provinsi (kadis LH, Kadis PSDA, Balitbang, Kadis PUPR dan Kadis Kehutanan)
		BAPPPEDA	
		DINAS PUPR	
		DLH	
4.	Jum'at/26 Februari 2021		
	Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB	Presentasi hasil penyusunan Arah kebijakan dari masing2 OPD	Tim Ahli dan Kadis Provinsi (kadis LH, Kadis PSDA, Balitbang, Kadis PUPR dan Kadis Kehutanan)
		DINAS PMTSP	
		Dinas DUKCAPIL	
		DINAS PERTANIAN	
		DINAS PMD	
		DINAS PANGAN PERIKANAN	Dinas KOMINFO
		DINAS PERHUBUNGAN	

### Lampiran 3

	Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB	<b>Ishoma</b>		Panitia/Sekretariat
	Pukul 13.30 s/d 16.30 WIB	Presentasi hasil penyusunan Arah kebijakan dari masing2 OPD		Tim Ahli dan Kadis Provinsi (kadis LH, Kadis PSDA, Balitbang, Kadis PUPR dan Kadis Kehutanan)
		DINAS NAKERTRANS	BKPSDM	
		BPBD	KESBANGPOL	
	Pukul 16.30 s/d 17.00 WIB	Penutupan		Panitia/Sekretariat
5.	<b>Sabtu/27 Februari 2021</b>	Menuju Dharmasraya		

**Note:**

1. Peserta membawa Laptop, Renstra dan RKPD masing-masing OPD;
2. Dokumen Perencanaan yang akan dibawa : RPJPD Kab. Dharmasraya, RTRW (yang belum direvisi dan dokumen revisi), DIKPLHD Kab. Dharmasraya 5 tahun Terakhir, Hasil evaluasi RPJMD, Struktur keuangan daerah kab. Dharmasraya, Dokumen DDDTLH dan dokumen perencanaan yang disusun oleh masing-masing OPD terkait, seperti RIPD, dll

### Lampiran 3

**KONFIRMASI KEHADIRAN PELAKSANAAN KONSINYERING PENYUSUNAN KLHS RPJMD  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Instansi :

Menyatakan bersedia mengikuti kegiatan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 di Labuan Sundai Resort, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 24 s.d 26 Februari 2021.

Yang Menyatakan,

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP.

**Note:**

1. Biaya akomodasi, biaya transportasi dan uang harian dibebankan pada DPA masing-masing Perangkat Daerah;
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Irma Surianti, ST (Hp.082390834367) dan Sdri. Fadila Malasari, S.Si. (Hp.085264865041)





## BUPATI DHARMASRAYA

### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094/ 100 /ST/DLH-2021

- Dasar : 1 Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/20/KPS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026
- 2 Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026
- 3 Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya TA.2021

#### MENUGASKAN :

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	H. Adlisman, S.Sos, M.Si Nip : 19690825 198902 1 002	Sekretaris Daerah	Pembina Pokja
2	Drs. Yefrinaldi, MM Nip : 19670608 199403 1 008	Asisten Perekonomian Pembangunan	Wakil Pembina Pokja
3	drg. Erina, MKM Nip : 19620528 198802 2 001	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Pokja
4	Andi Sumanto, CR.A Nip : 19681228 199009 1 001	Kepala Bappeda	Wakil Ketua Pokja
5	H. Miyarso, S.Sos, M.Si Nip : 19700401 199503 1 001	Sek DLH	Sekretaris Pokja
6	Dr. Mahdi, SP, M.Si Nip : -	Akademisi Sosek Unand	Ketua Tim Ahli KLHS
7	Dr. Ardinis Arbain Nip : -	Akademisi MIPA Unand	Anggota Tim Ahli KLHS
8	Desrizal, ST, M.Si Nip : 19741220 201001 1 003	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov Sumbar	Anggota Tim Ahli KLHS
9	Rahma Wirni, ST, M.Si Nip : -	Akademisi TL Unand	Anggota Tim Ahli KLHS
10	Lasmiyati, M.Si Nip : 19802303 201001 2 023	Kabid P2LH DLH	Ketua Tim Teknis
11	Budi Waluyo, S.Pkp Nip : 19661003 198703 1 003	Kabag Organisasi Setda	Anggota Teknis
12	Frinaldi, ST, M.Sc Nip : 19751205 200501 1 004	Kabid Fispra Bappeda	Anggota Teknis
13	Silaturahim, SKM, MH Nip : 19790330 200604 2 003	Kabid Sosbud Bappeda	Anggota Teknis
14	Vintodi Vasiel, Spt, M.Si	Kabid Litbang Bappeda	Anggota Teknis

### Lampiran 3

	Nip : 19801210 200902 1 002		
15	Beni Mandala, S.STP	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata	Anggota Teknis
	Nip : 19861110 200602 1 001		
16	Ari Afif Hudri, SE	Kasubag Data dan Pelaporan Bappeda	Anggota Teknis
	Nip : 19810518 200902 1 001		
17	Epon Ekanedi, SHI	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pertanian	Anggota Teknis
	Nip : 19831209 201101 1 012		
18	Ismirawati, ST	Kasi Perumahan Dinas Perkimtan	Anggota Teknis
	Nip : 19830511 201001 2 029		
19	Suhaimi Nurta, SKM, MM	Kasubag Program Dinas Kesehatan	Anggota Teknis
	Nip : 19690421 199101 2 002		
20	Herawati Khaidir, SE, MM	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Dinas Kumperdag	Anggota Teknis
	Nip : 19760726 201101 2 003		
21	Nengsi Susti, SE, MM	Kasubag Keuangan dan Program BKD	Anggota Teknis
	Nip : 19771107 200701 2 001		
22	Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si	Kasi Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	Anggota Teknis
	Nip : 19820503 200902 1 005		
23	Wira Oca Gusnela, S.Farm, Apt	Kasi Pengelolaan Sampah dan LB3	Anggota Teknis
	Nip : 19850812 201101 2 018		
24	Gusmira, ST	Kasi Penychatan Lingkungan Dinas PUPR	Anggota Tim Data
	Nip : 19790825 200501 2 011		
25	Silvia Kristina, S.Sos	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Disdukcapil	Anggota Tim Data
	Nip : 19791014 200801 2 019		
26	Asmaidar, S.Pi	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pangan Perikanan	Anggota Tim Data
	Nip : 19790505 201001 2 020		
27	Novarina, SKM	Kasi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Dinsos P3AP2KB	Anggota Tim Data
	Nip : 19720908 199203 2 005		
28	Yasri, S.Sos	Pengelola Program dan Pelaporan BPBD	Anggota Tim Data
	Nip : 19870720 201101 1 002		
29	Marlisna, SE, MM.	Kabid Statistik Dinas Kominfo	Anggota Tim Data
	Nip : 19750312 200604 2 002		
30	Mardisal, SE	Kasubag Keuangan dan Pelaporan DPMPTSP	Anggota Tim Data
	Nip : 19640307 198712 1 001		
31	Yuli Susanti, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas PMD	Anggota Tim Data
	Nip : 19770701 200701 2 005		
32	Iswardi, S.Sos	Fungsional Dinas Perhubungan	Anggota Tim Data
	Nip : 197907182009011005		
33	Fahmel Triadi, SE	Kasi Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnakertrans	Anggota Tim Data
	Nip : 19780515 200901 1 007		
34	Hendrayadi Sumitri, SKM	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH	Anggota Tim Data
	Nip : 19780810 200604 1 005		
35	Nani Rahayuningsih, SPd	Kasi PAUD Dinas Pendidikan	Anggota Tim Data
	Nip : 19690317 199109 2 001		



### Lampiran 3

36	Darmendra, S.Sos Nip : 19791108 200901 1 004	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah	Anggota Tim Data
37	Rika Herlina, S.Pd Nip : 19820222 200604 2 004	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan BKPSDM	Anggota Tim Data
38	Yona Anggela, ST Nip : 19901229 201503 2 004	Analisis Lingkungan DLH	Sekretariat Pokja
39	Irma SURIANTI, ST Nip : 19910212 201902 2 005	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama DLH	Sekretariat Pokja
40	Fadila Malasari, S.Si Nip : 19941215 201902 2 005	Staf DLH	Sekretariat Pokja
41	Defriandi, S.Sos Nip :	Staf DLH	Sekretariat Pokja

- Untuk :
- 1 Mengikuti penyusunan identifikasi muatan KRP RPJMD dan analisis pengaruh pengaruh hasil isu pembangunan berkelanjutan prioritas terhadap muatan KRP dan kajian muatan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 - 2026 di Labuhan Sundai Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 24 s.d 26 Februari 2021
  - 2 Pokja melaporkan kepada Bupati Dharmasraya setelah melakukan kegiatan perjalanan dinas.
  - 3 Surat Tugas ini tanggal 23 Februari s.d 27 Februari 2021
  - 4 Biaya akomodasi selama mengikuti kegiatan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021
  - 5 Biaya transportasi dan uang harian dibebankan pada DPA masing-masing instansi yang mengirimkan
- Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Pulau Punjung  
pada tanggal : 15 Februari 2021

**BUPATI DHARMASRAYA**



**SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**



### Lampiran 3

#### Registrasi Peserta Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya Tahun 2021-2026

Hari / Tanggal : Selasa/ 23 Februari 2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kamar	Tgl Masuk	Tgl Keluar	TTd
1	Drs. Yefrinaldi, MM Nip : 19670608 199403 1 008	Asisten Perekonomian Pembangunan	VIP I	24-02-2021 (Pagi)	2 -02-2021 (Siang)	1
2	drg. Erina, MKM Nip : 19620528 198802 2 001	Kepala DLH	VIP II	23/02-21	27/02-21	2
3	Andi Sumanto, CR.A Nip : 19681228 199009 1 001	Kepala Bappeda	VIP I	23-02-2021 (sore)	27-02-2021 (sore)	3
4	H. Miyarso, S.Sos, M.Si Nip : 19700401 199503 1 001	Sekretaris DLH	Pangung I	23/2-21	27/2-21	4
5	Dr. Mahdi, SP, M.Si Nip : -	Akademisi Sosek Unand	VIP 4-1	23/2-21	27/2-21	5
6	Dr. Ardinis Arbain Nip : -	Akademisi MIPA Unand	Angler	23/2-21	27/2-21	6
7	Desrizal, ST, M.Si Nip : 19741220 201001 1 003	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov Sumbar	VIP 4-1	23/2-21	27/2-21	7
8	Rahma Wirni, ST, M.Si Nip : -	Akademisi TL Unand	VIP 7-2	23/2-21	27/2-21	8
9	Lasmiyati, M.Si Nip : 19802303 201001 2 023	Kabid P2LH DLH	VIP 7-2	23/02/21	27/02/21	9
10	Budi Waluyo, S.Pkp Nip : 19661003 198703 1 003	Kabag Organisasi Setda	VIP 4-3	23/02/21	27/02/21	10
11	Frinaldi, ST, M.Sc Nip : 19751205 200501 1 004	Kabid Fispra Bappeda	VIP 4-3	23/02-21	27/02-21	11
12	Silaturahim, SKM, MH Nip : 19790330 200604 2 003	Kabid Sosbud Bappeda	VIP 7-1	23/02-21	27/02-21	12
13	Beni Mandala, S.STP Nip : 19861110 200602 1 001	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata	VIP 4-3	23/02-21	27/02-21	13
14	Ari Afif Hudri, SE Nip : 19810518 200902 1 001	Kasubag Data dan Pelaporan Bappeda	Pangung II	23/02-21	27/02-21	14
15	Epon Ekawedi, SHI Nip : 19831209 201101 2 029	Dinas Pertanian	Pangung I	23-02-2021	27-02-2021	15
16	Ismirawati, ST Nip : 19830511 201001 2 029	Kasi Perumahan Dinas Perkimtan	Pangung II	23/02-21	27/02-21	16
17	Suhaimi Nurta, SKM, MM Nip : 19690421 199101 2 002	Kasubag Program Dinas Kesehatan	VIP 4-2	23/02-21	27/02-21	17



Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kamar	Tgl Masuk	Tgl Keluar	TTd
18	Herawati Khaidir, SE, MM Nip : 19760726 201101 2 003	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Dinas Kumperdag	VIP-7.1	23/02/21	27/02/21	18
19	Budi Sauti, SE Nip : 19710822 200501 1 006	AKP Badan Keuangan Daerah	Panggun 1.1	23/2/2021	27/2/2021	19
20	Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si Nip : 19820503 200902 1 005	Kasi Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	Panggun 1.1	23/02/21	27/02/21	20
21	Wira Oca Gusnela, S.Farm, Apt Nip : 19850812 201101 2 018	Kasi Pengelolaan Sampah dan LB3	Panggun 1.2	23/2/2021	27/2/2021	21
22	Gusmira, ST Nip : 19790825 200501 2 011	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR	Panggun 1.2	23/2/2021	27/2/2021	22
23	Silvia Kristina, S.Sos Nip : 19791014 200801 2 019	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Disdukcapil	VIP.7	23/2-2021	27/2/2021	23
24	Asmaidar, S.Pi Nip : 19790505 201001 2 020	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pangan Perikanan	Panggun 2.2	23/2-2021	27/2/2021	24
25	Novarina, SKM Nip : 19720908 199203 2 005	Kasi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Dinsos P3AP2KB	VIP. 4.2	23/2 2021	27/2/2021	25
26	Yasri, S.Sos Nip : 19870720 201101 1 002	Pengelola Program dan Pelaporan BPBD	Panggun 1.2	23-02-2021	27.02.2021	26
27	Marlisna, SE, MM Nip. 19750312 200604 2 002	Kabid Statistik Dinas Kominfo	VIP 7	23-02-2021	27.02.2021	27
28	Mardisal, SE Nip : 19640307 198712 1 001	Kasubag Keuangan dan Pelaporan DPMPTSP	Panggun 2.2	23/2-21	27/2-21	28
29	Furgon Averro Nip :	Staf Pelaporan dan Evaluasi Dinas PMD	Panggun 1.1 Pintu 1	23/2 /21	27/2-21	29
30	Iswardi, S.Sos Nip : 197907182009011005	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Panggun 1.1	23/2 /21	27/2-21	30
31	Fahmel Triadi, SE Nip : 19780515 200901 1 007	Kasi Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnakertrans	Panggun 1.2	23/ 2 /21	27 /2 /21	31
32	Hendrayadi Sumitri, SKM Nip : 19780810 200604 1 005	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Panggun-2.1	23/2/2021	27/2/21	32
33	Ansori Nip : 19800318 200501 1 003	Staf Dinas Pendidikan	Panggun 3 Pintu I	23/2 /21	27.2-21	33
34	Darmendra, S.Sos Nip : 19791108 200901 1 004	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah	Panggun 1.2	23/2-21	27/2-21	34
35	Rika Herlina, S.Pd Nip : 19820222 200604 2 004	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan BKPSDM	VIP 7.1	23/02-21	27/02-21	35

Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kamar	Tgl Masuk	Tgl Keluar	TTd
36	Yona Anggela, ST Nip : 19901229 201503 2 004	Analisis Lingkungan DLH	FM kecil 2	22/1-21	27-2.2021	36
37	Irma Surianti, ST Nip : 19910212 201902 2 005	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama DLH	FM kecil 2	23/2-21	27/2-21	37
38	Fadila Malasari, S.Si Nip : 19941215 201902 2 005	Pengendali Dampak Lingkungan DLH	FM kecil 2	23/1.21	27/2.21	38
39	Defriandi, S.Sos Nip :	Staf DLH	Panggun II-1	23/2-21	27/2-21	39

Kepala DLH,  
 drg.ERINA, M.KM.  
 Pembina Utama Muda - IV/c  
 NIP. 19620528 198802 2 001



Lampiran 3

Registrasi Peserta Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya Tahun 2021-2026

Hari / Tanggal : Selasa/ 23 Februari 2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Kamar	Tgl Masuk	Tgl Keluar	TTd
1	Talim	Auditor	Panggung I	23-2-21	27-2-21	1.
2	Juli Susanti	Kab. bag. perencanaaan & pelaksanaan	Panggung I	23-2-21	27-2-21	2.
3	Falehis Ahmad	Ket. kesbangpol	Panggung II	24-02-2021	27-02-2021	3.
4	Joni	Sopir Ka Bappeda	couple 1	23-2-21 (sore)	24-02-2021 (sore)	4.
5	Yusmardi	Sopir Ass II	couple 2	24-02-2021 (pagi)	25-02-2021 (siang)	5.
6	Yutia Puspa Rini	Kasub. DH	Panggung II	23-02-21	27-02-21	6.
7	Netty Susanti	Kasub. koord. SD				7.
8						8.
9						9
10						10
11						11
12						12
13						13
14						14
15						15

Kepala DLH,  
  
 drg.ERINA, M.KM  
 Pembina Utama Muda - IV/c  
 NIP. 19620528 198802 2 001



## Lampiran 3

**Daftar Hadir Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya Tahun 2021-2026**Hari / Tanggal : Pati / 24 - 2 - 2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
1	Drs. Yefrinaldi, MM Nip : 19670608 199403 1 008	Asisten Perekonomian Pembangunan	1.	1.	1.
2	drg. Erina, MKM Nip : 19620528 198802 2 001	Kepala DLH	2.	2.	2.
3	Andi Sumanto, CR.A Nip : 19681228 199009 1 001	Kepala Bappeda	3.	3.	3.
4	H. Miyarso, S.Sos, M.Si Nip : 19700401 199503 1 001	Sekretaris DLH	4.	4.	4.
5	Dr. Mahdi, SP, M.Si Nip : -	Akademisi Sosek Unand	5.	5.	5.
6	Dr. Ardinis Arbain Nip : -	Akademisi MIPA Unand	6.	6.	6.
7	Desrizal, ST, M.Si Nip : 19741220 201001 1 003	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov Sumbar	7.	7.	7.
8	Rahma Wirni, ST, M.Si Nip : -	Akademisi TL Unand	8.	8.	8.
9	Lasmiyati, M.Si Nip : 19802303 201001 2 023	Kabid P2LH DLH	9.	9.	9.
10	Budi Waluyo, S.Pkp Nip : 19661003 198703 1 003	Kabag Organisasi Setda	10.	10.	10.
11	Frinaldi, ST, M.Sc Nip : 19751205 200501 1 004	Kabid Fispra Bappeda	11.	11.	11.
12	Silaturahim, SKM, MH Nip : 19790330 200604 2 003	Kabid Sosbud Bappeda	12.	12.	12.
13	Beni Mandala, S.STP Nip : 19861110 200602 1 001	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata	13.	13.	13.
14	Ari Afif Hudri, SE Nip : 19810518 200902 1 001	Kasubag Data dan Pelaporan Bappeda	14.	14.	14.
15	Epon Ekanedi, S.H Nip : 19831209 201101 1 012	Dinas Pertanian	15.	15.	15.
16	Ismirawati, ST Nip : 19830511 201001 2 029	Kasi Perumahan Dinas Perkimtan	16.	16.	16.
17	Suhaimi Nurta, SKM, MM Nip : 19690421 199101 2 002	Kasubag Program Dinas Kesehatan	17.	17.	17.




Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
18	Herawati Khaidir, SE, MM Nip : 19760726 201101 2 003	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Dinas Kumperdag	18.	18.	18.
19	Budi Sauti, SE Nip : 19710822 200501 1 006	AKP Badan Keuangan Daerah	19.	19.	19.
20	Dian Chandra Ardhanl, ST, M.Si Nip : 19820503 200902 1 005	Kasi Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	20.	20.	20.
21	Wlra Oca Gusnela, S.Farm, Apt Nip : 19850812 201101 2 018	Kasi Pengelolaan Sampah dan LB3	21.	21.	21.
22	Gusmlra, ST Nip : 19790825 200501 2 011	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR	22.	22.	22.
23	Silvia Kristina, S.Sos MM Nip : 19791014 200801 2 019	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Disdukcapil	23.	23.	23.
24	Asmaidar, S.PI Nip : 19790505 201001 2 020	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pangan Perikanan	24.	24.	24.
25	Novarina, SKM Nip : 19720908 199203 2 005	Kasi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Dinsos P3AP2KB	25.	25.	25.
26	Yasri, S.Sos Nip : 19870720 201101 1 002	Pengelola Program dan Pelaporan BPBD	26.	26.	26.
27	Marlisna, SE, MM Nip : 19750312 200604 2 002	Kabid Statistik Dinas Kominfo	27.	27.	27.
28	Mardisal, SE Nip : 19640307 198712 1 001	Kasubag Keuangan dan Pelaporan DPMPTSP	28.	28.	28.
29	Furgon Avero Nip :	Staf Pelaporan dan Evaluasi Dinas PMD	29.	29.	29.
30	Iswardi, S.Sos Nip : 197907182009011005	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan	30.	30.	30.
31	Fahmel Triadi, SE Nip : 19780515 200901 1 007	Kasi Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnakertrans	31.	31.	31.
32	Hendrayadi Sumitri, SKM Nip : 19780810 200604 1 005	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	32.	32.	32.
33	Ansori Nip : 19800318 200501 1 003	Staf Dinas Pendidikan	33.	33.	33.
34	Darmendra, S.Sos Nip : 19791108 200901 1 004	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah	34.	34.	34.
35	Rika Herlina, S.Pd Nip : 19820222 200604 2 004	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan BKPSDM	35.	35.	35.

Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
36	Yona Anggela, ST Nip : 19901229 201503 2 004	Analisis Lingkungan DLH	36.	36.	36.
37	Irma Surianti, ST Nip : 19910212 201902 2 005	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama DLH	37.	37.	37.
38	Fadila Malasari, S.Si Nip : 19941215 201902 2 005	Pengendali Dampak Lingkungan DLH	38.	38.	38.
39	Defriandi, S.Sos Nip :	Staf DLH	39.	39.	39.

  
 Kepala DLH,  
 drg. ERINA, M.KM.  
 Pembina Utama Muda - IV/c  
 NIP. 19620528 198802 2 001



Lampiran 3

Daftar Hadir Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya Tahun 2021-2026

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Februari 2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
1	Drs. Yefrinaldi, MM Nip : 19670608 199403 1 008	Asisten Perekonomian Pembangunan	1.	1.	1.
2	drg. Erina, MKM Nip : 19620528 198802 2 001	Kepala DLH	2.	2.	2.
3	Andi Sumanto, CR.A Nip : 19681228 199009 1 001	Kepala Bappeda	3.	3.	3.
4	H. Miyarso, S.Sos, M.Si Nip : 19700401 199503 1 001	Sekretaris DLH	4.	4.	4.
5	Dr. Mahdi, SP, M.Si Nip : -	Akademisi Sosek Unand	5.	5.	5.
6	Dr. Ardinis Arbain Nip : -	Akademisi MIPA Unand	6.	6.	6.
7	Desrizal, ST, M.Si Nip : 19741220 201001 1 003	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov Sumbang	7.	7.	7.
8	Rahma Wirni, ST, M.Si Nip : -	Akademisi TL Unand	8.	8.	8.
9	Lasmiyati, M.Si Nip : 19802303 201001 2 023	Kabid P2LH DLH	9.	9.	9.
10	Budi Waluyo, S.Pkp Nip : 19661003 198703 1 003	Kabag Organisasi Setda	10.	10.	10.
11	Frinaldi, ST, M.Sc Nip : 19751205 200501 1 004	Kabid Fispra Bappeda	11.	11.	11.
12	Silaturahim, SKM, MH Nip : 19790330 200604 2 003	Kabid Sosbud Bappeda	12.	12.	12.
13	Beni Mandala, S.STP Nip : 19861110 200602 1 001	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata	13.	13.	13.
14	Ari Afif Hudri, SE Nip : 19810518 200902 1 001	Kasubag Data dan Pelaporan Bappeda	14.	14.	14.
15	Epon Ekanedi, SH Nip : 19831209 201101 1 012	Dinas Pertanian	15.	15.	15.
16	Ismirawati, ST Nip : 19830511 201001 2 029	Kasi Perumahan Dinas Perkimtan	16.	16.	16.
17	Suhaimi Nurta, SKM, MM Nip : 19690421 199101 2 002	Kasubag Program Dinas Kesehatan	17.	17.	17.



Lampiran 3

Daftar Hadir Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya Tahun 2021-2026

Hari / Tanggal : Rabu / 24-7-2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
1	Talun 198004092010011001	Auditor	1.	1.	1.
2	fakhr Ahmad.		2.	2.	2.
3	Muli Susanti	Kasubag perencanaan & pelaporan	3.	3.	3.
4	Yuli & puspawati	Bendahar	4.	4.	4.
5	Netty Liana Net	Korub koru SPA	5.	5.	5.
6			6.	6.	6.
7			7.	7.	7.
8			8.	8.	8.
9			9.	9.	9.
10			10.	10.	10.
11			11.	11.	11.
12			12.	12.	12.
13			13.	13.	13.
14			14.	14.	14.
15			15.	15.	15.

Kepala DLH,  
drg.ERINA,M.KM.  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19620528 198802 2 001

## Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
18	Herawati Khaidir, SE, MM Nip : 19760726 201101 2 003	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Dinas Kumperdag	18.	18.	18.
19	Budi Sauti, SE Nip : 19710822 200501 1 006	AKB Badan Keuangan Daerah	19.	19.	19.
20	Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si Nip : 19820503 200902 1 005	Kasi Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	20.	20.	20.
21	Wira Oca Gusnela, S.Farm, Apt Nip : 19850812 201101 2 018	Kasi Pengelolaan Sampah dan LB3	21.	21.	21.
22	Gusmira, ST Nip : 19790825 200501 2 011	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR	22.	22.	22.
23	Silva Kristina, S.Sos MM Nip : 19791014 200801 2 019	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Disdukcapil	23.	23.	23.
24	Asmaidar, S.Pi Nip : 19790505 201001 2 020	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pangan Perikanan	24.	24.	24.
25	Novarina, SKM Nip : 19720908 199203 2 005	Kasi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Dinsos P3AP2KB	25.	25.	25.
26	Yasri, S.Sos Nip : 19870720 201101 1 002	Pengelola Program dan Pelaporan BPBD	26.	26.	26.
27	Marlisna, SE, MM Nip : 19750312 200604 2 002	Kabid Statistik Dinas kominfo	27.	27.	27.
28	Mardisal, SE Nip : 19640307 198712 1 001	Kasubag Keuangan dan Pelaporan DPMPTSP	28.	28.	28.
29	Furgon Avero Nip :	Staf Pelaporan dan Evaluasi Dinas PMD	29.	29.	29.
30	Iswardi, S.Sos Nip : 197907182009011005	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan	30.	30.	30.
31	Fahmel Triadi, SE Nip : 19780515 200901 1 007	Kasi Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnakertrans	31.	31.	31.
32	Hendrayadi Sumitri, SKM Nip : 19780810 200604 1 005	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	32.	32.	32.
33	Ansori Nip : 19800318 200501 1 003	Staf Dinas Pendidikan	33.	33.	33.
34	Darmendra, S.Sos Nip : 19791108 200901 1 004	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah	34.	34.	34.
35	Rika Herlina, S.Pd Nip : 19820222 200604 2 004	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan BKPSDM	35.	35.	35.



Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
36	Yona Anggela, ST Nip : 19901229 201503 2 004	Analisis Lingkungan DLH	36.	36.	36.
37	Irma Sarianti, ST Nip : 19910212 201902 2 005	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama DLH	37.	37.	37.
38	Fadila Malasari, S.Si Nip : 19941215 201902 2 005	Pengendali Dampak Lingkungan DLH	38.	38.	38.
39	Defriandi, S.Sos Nip :	Staf DLH	39.	39.	39.



Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19620528 198802 2 001



Lampiran 3

**Daftar Hadir Pelaksanaan Konsinvering Penyusunan KLHS RPJMD Kab. Dharmasraya Tahun 2021-2026**

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Februari 2021

Lokasi : Labuan Sundal Resort, Kab. Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan		
			08.00-12.00	13.30-17.30	19.30-22.00
1	Talim 198004092010011001	Auditor	1.	1.	1.
2	Fakhri Ahmad.	staf kesbangpol	2.	2.	2.
3	Suli Susanti	Kasubag perencanaan dan pelaksanaan	3.	3.	3.
4	Yutia Puspa Dewi	Kasubag DLH	4.	4.	4.
5	Netty Asari	Kerub koa SDA	5.	5.	5.
6			6.	6.	6.
7			7.	7.	7.
8			8.	8.	8.
9			9.	9.	9.
10			10.	10.	10.
11			11.	11.	11.
12			12.	12.	12.
13			13.	13.	13.
14			14.	14.	14.
15			15.	15.	15.

Kepala DLH,  
  
 drg. ERINA, M.KM.  
 Pembina Utama Muda - IV/c  
 NIP. 19620528 198802 2 001



Lampiran 3

Daftar Hadir Pelaksanaan Konsinyering Penyusunan KLHS RPJMD Kab.Dharmasraya Tahun 2021-2026





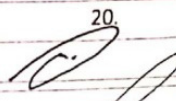
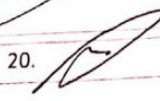
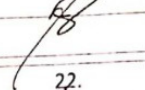


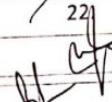
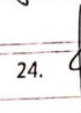
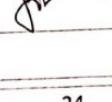
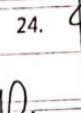
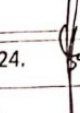

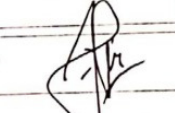
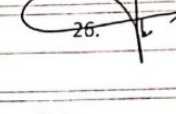
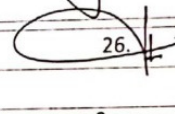
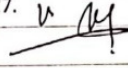
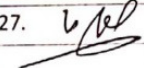
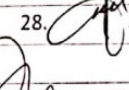
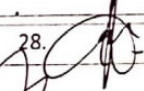
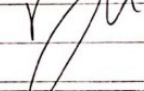
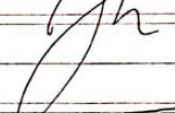


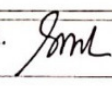
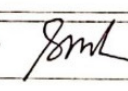
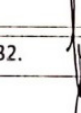
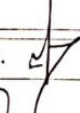


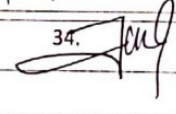
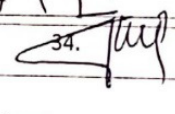
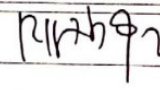
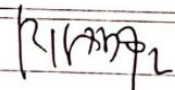
Hari / Tanggal : Jumat / 26-02-2021

Lokasi : Labuan Sundai Resort, Kab.Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan	
			08.00-12.00	13.30-17.00
1	Drs. Yefrinaldi, MM Nip : 19670608 199403 1 008	Asisten Perekonomian Pembangunan	1.	1.
2	drg. Erina, MKM Nip : 19620528 198802 2 001	Kepala DLH	2.	2.
3	Andi Sumanto, CR.A Nip : 19681228 199009 1 001	Kepala Bappeda	3.	3.
4	H. Miyarso, S.Sos, M.Si Nip : 19700401 199503 1 001	Sekretaris DLH	4.	4.
5	Dr. Mahdi, SP, M.Si Nip : -	Akademisi Sosek Unand	5.	5.
6	Dr. Ardinis Arbain Nip : -	Akademisi MIPA Unand	6.	6.
7	Desrizal, ST, M.Si Nip : 19741220 201001 1 003	Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov Sumbar	7.	7.
8	Rahma Wirni, ST, M.Si Nip : -	Akademisi TL Unand	8.	8.
9	Lasmiyati, M.Si Nip : 19802303 201001 2 023	Kabid P2LH DLH	9.	9.
10	Budi Waluyo, S.Pkp Nip : 19661003 198703 1 003	Kabag Organisasi Setda	10.	10.
11	Frinaldi, ST, M.Sc Nip : 19751205 200501 1 004	Kabid Fispra Bappeda	11.	11.
12	Silaturahmi, SKM, MH Nip : 19790330 200604 2 003	Kabid Sosbud Bappeda	12.	12.
13	Beni Mandala, S.STP Nip : 19861110 200602 1 001	Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata	13.	13.
14	Ari Afif Hudri, SE Nip : 19810518 200902 1 001	Kasubag Data dan Pelaporan Bappeda	14.	14.
15	Epon Ekaneke, SHI Nip : (98305120) 201101 1 012	Dinas Pertanian	15.	15.
16	Ismirawati, ST Nip : 19830511 201001 2 029	Kasi Perumahan Dinas Perkimtan	16.	16.
17	Suhaimi Nurta, SKM, MM Nip : 19690421 199101 2 002	Kasubag Program Dinas Kesehatan	17.	17.



Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan	
			08.00-12.00	13.30-17.00
18	Herawati Khaidir, SE, MM Nip : 19760726 201101 2 003	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Dinas Kumperdag	18. 	18. 
19	Budi Sauti, SE Nip : 19710822 200501 1 006	AKPD Badan Keuangan Daerah	19. 	19. 
20	Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si Nip : 19820503 200902 1 005	Kasi Pentaatan dan Penegakan Hukum LH	20. 	20. 
21	Wira Oca Gusnela, S.Farm, Apt Nip : 19850812 201101 2 018	Kasi Pengelolaan Sampah dan LB3	21. 	21. 
22	Gusmira, ST Nip : 19790825 200501 2 011	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas PUPR	22. 	22. 
23	Silva Kristina, MM Nip : 19791014 200801 2 019	Kasi Pengelolaan dan Penyajian Data Disdukcapil	23. 	23. 
24	Asmaidar, S.Pi Nip : 19790505 201001 2 020	Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pangan Perikanan	24. 	24. 
25	Novarina, SKM Nip : 19720908 199203 2 005	Kasi Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Dinsos P3AP2KB	25. 	25. 
26	Yasri, S.Sos Nip : 19870720 201101 1 002	Pengelola Program dan Pelaporan BPBD	26. 	26. 
27	Marlisna, SE, MM Nip : 19750312 200604 2 002	Kabid Statistik Dinas kominfo	27. 	27. 
28	Mardisal, SE Nip : 19640307 198712 1 001	Kasubag Keuangan dan Pelaporan DPMPSTP	28. 	28. 
29	Furgon Averro Nip :	Staf Pelaporan dan Evaluasi Dinas PMD	29. 	29. 
30	Iswardi, S.Sos Nip : 197907182009011005	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan Dinas Perhubungan	30. 	30. 
31	Fahmel Triadi, SE Nip : 19780515 200901 1 007	Kasi Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnakertrans	31. 	31. 
32	Hendrayadi Sumitri, SKM Nip : 19780810 200604 1 005	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	32. 	32. 
33	Ansori Nip : 19800318 200501 1 003	Staf Dinas Pendidikan	33. 	33. 
34	Darmendra, S.Sos Nip : 19791108 200901 1 004	Kasubag Program dan Pelaporan Inspektorat Daerah	34. 	34. 
35	Rika Herlina, S.Pd Nip : 19820222 200604 2 004	Kasubag Keuangan Program dan Pelaporan BKPSDM	35. 	35. 

Lampiran 3

NO	NAMA / NIP	JABATAN	Tanda Tangan	
			08.00-12.00	13.30-17.00
36	Yona Anggela, ST Nip : 19901229 201503 2 004	Analisis Lingkungan DLH	36.	36.
37	Irma Surianti, ST Nip : 19910212 201902 2 005	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama DLH	37.	37.
38	Fadila Malasari, S.Si Nip : 19941215 201902 2 005	Pengendali Dampak Lingkungan DLH	38.	38.
39	Defriandi, S.Sos Nip :	Staf DLH	39.	39.



Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19620528 198802 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id) Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 10 Maret 2021 M  
Rajab 1442 H

Nomor : 660 / 099 / DLH / III - 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Undangan Konsultasi Publik**

Kepada Yth.  
Sdr/i. Daftar Terlampir  
di

**Tempat**


Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya, telah dilakukannya konsultasi publik I pada tanggal 26 Januari 2021 dalam rangka penjaringan isu prioritas lingkungan hidup dan perumusan skenario arah kebijakan oleh OPD pada tanggal 23 s/d 27 Februari 2021. Untuk tahap selajutnya diperlukan konsultasi publik ke II dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyampaian hasil perumusan skenario arah kebijakan dan perumusan rekomendasi arah kebijakan untuk penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diundang Saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 29 Maret 2021  
Pukul : 08.30 WIB – selesai  
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya  
Jalan Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung  
Acara : Konsultasi publik dalam rangka perumusan rekomendasi arah kebijakan untuk penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya - IV/d**  
**NIP. 19690825 198902 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



**DAFTAR UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
2. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
3. Bappeda Kabupaten Dharmasraya
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
5. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
7. Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
8. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
9. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya
10. Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya
13. Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya
14. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Dharmasraya
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dharmasraya
19. Inspektorat Kabupaten Dharmasraya
20. Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
21. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya
22. BKPSDM Kabupaten Dharmasraya
23. BPBD Kabupaten Dharmasraya
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya
25. Satuan Polisi Pamong Praja
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya
27. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dharmasraya
28. RSUD Sungai Dareh
29. KPHP Kabupaten Dharmasraya
30. Polres Dharmasraya
31. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dharmasraya
32. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Dharmasraya
33. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya
34. Bagian Hukum Setda Kabupaten Dharmasraya
35. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Dharmasraya
36. Camat Pulau Punjung
37. Camat IX Koto
38. Camat Sitiung
39. Camat Koto Salak
40. Camat Tiung
41. Camat Koto Baru
42. Camat Koto Besar
43. Camat Sungai Rumbai
44. Camat Asam Jujuhan
45. Camat Timpeh
46. Camat Padang Laweh
47. LSM WARSI
48. LSM WALHI
49. Unand Kampus III/ LPPM Unand III
50. Ketua LKAAM Dharmasraya
51. Bundo Kanduang Dharmasraya
52. Ketua PKK Kabupaten Dharmasraya
53. Ketua MUI Kabupaten Dharmasraya
54. KNPI
55. Tokoh Masyarakat
56. PT Kalidareh Cipta Sarana
57. PT Incasi Raya Group
58. PT Dharmasraya Lestarindo
59. PT Dharmasraya Sawit Lestari
60. PT Bukit Raya Mudisa
61. PT Tidar Kerinci Agung

62. PT Andalas Wahana Berjaya
63. PT KUD Sinamar
64. Tim Pembuat KLHS RPJMD Dharmasraya Tahun 2021 – 2026
65. BPJS Kesehatan cabang Kabupaten Dharmasraya
66. BPJS Ketenagakerjaan cabang Kabupaten Dharmasraya
67. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Barat cabang Pulau Punjung
68. Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kabupaten Dharmasraya
69. Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Kabupaten Dharmasraya
70. Bank Mandiri Cabang Dharmasraya
71. Bank Syariah Indonesia (BSI) cabang Dharmasraya





# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin / 29 Maret 2021  
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Konsultasi Publik dalam rangka Perumusan Rekomendasi Arah Kebijakan  
Untuk Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Nama	HP	Instansi	Tanda Tangan
1	Ningsi Susti	082169026868	ISICH	1
2	M. Yusuf	085576522106	AKK	2
3	Hermin	08126741799	Prasman	3
4	Rika Herluna	085364777089	-	4 20
5	Zulfanik		BPBD	5
6	Yasni		BPBD	6
7	ISWARDI	085272451179	DISTHUB	7
8	Richa Risandy	0819401443	BPJS Kesehatan	8
9	Irma Suryani Ali	08117491119	"	9
10	Jon Hertri	082285535371	Kec. P. Pungut	10
11	Armandura A	08228458436	Pal PP	11
12	Suhaimi Nurta	08126727509	Dinas Kesehatan	12
13	martha	08537571602	DUM	13
14	Motsaf Ridele			14
15	JUP			15
16	ZULHAM			16
17	AWEN			17
18	FAHMEL	082183823579	Distransnoker	18
19	MARLISA	081362038031	OPM PTP	19
20	Yudims Pz	08226820355	BPJTK	20
21	Dody Dg			21
22	Efrizal	081374799672	Kec. Kota Gajah	22
23	NIRA AG 6	0811661463	DUM	23
24	ESWIDE Pafni		Kec. Padang Laweh	24
25	Darmawan	082130486751	Kungsang	25
26	Frinaldi	081268284884	Bapped	26
27	ISMIRAWATI	081363283721	Perkimtan	27
28	HUZRI YEP1	082170222220	PT. TKA	28
29	Fitria E. Nova	081374271666	Bag. PEG	29
30	Fitria M.1	081363302492	Bag. Pembangunan	30
31	Diego Armando	081277782116	Protokol	31
32	Dodi		Humas	32
33	Irena		Protokol	33
34	Irena		"	34
35	Silos Kristina	085363646565	Capil	35



## Lampiran 3

	Nama	HP	Instansi	Tanda Tangan
36	Dimas Alvin	08136391402	Aspale	36
37	Darrendra	085274120267	Inspektoral	37
38	Benny Montak	085222246109	BUDPARPORA	38
39	Talin	082172275145	Inspektoral	39
40	Cici Angella		Protokol	40
41	Ening		"	41
42	Diego		"	42
43	Pandi Wanyu		Bank Mandiri	43
44	GEMA PUTRI	08116603999	Bank Mandiri	44
45	Marlisna	08137489110	Kominfo	45
46	Novarina	081267923932	Dinas P3 APPKB	46
47	HILDA RAHMADAN	08239129049	Dinas P3 APPKB	47
48	AKP HARIMAN F.S.H		POLRES	48
49	SAFBI CAHITA		POLRES	49
50	HUMMA		POLRES	50
51	MAIZULR	08217241424	Distam	51
52	David HP		PT-SMP	52
53	Kuslan		PT-Insasi Kaya	53
54	Peluhun	081272889136	Kesbangpol	54
55	Fakhri Ahmad.	08216940085	Kesbangpol	55
56	HEMARA SYARI		WAKA POLRES	56
57	SYAFI NALDI	081374644099	KAPOLSEK. PR	57
58	GUSEMIRA	081266921454	Dinas PUPR	58
59	GRI Rahayu	081266150722	Kec. Ahiung	59
60	Tomy Aden	082384730895	Padaes WATHTI	60
61	ANDRE BWTAMAR	08216751182	WALHTI JUMBARCEK	61
62	SARBAINI	082384845368	Dipakan	62
63	Ali Frank	081363223368	Dinas PMD	63
64	M. S. S.	08232711036	Humas	64
65	Natasya Sranli	08126730244	Perekonomi	65
66	Huani Phandir	08527015234	Pump-and	66
67	Meg-ck ck Subekti, GUPH		PSU Sripnli	67
68	TASDIQIL HAMIDI	08122310121	Andan Watur	68
69	Wanyuni	081377992108	DLH	69
70	Gusti Sandra		DLH	70
71	Dan Candra		DLH	71
72	Mardianachan		DLH	72
73	Ryan Tito		DLH	73
74	ADE IRRAWAN		RSUD	74
75	YULIA		CS	75
76	II		CS	76
77	Suprialdi		Umcom	77
78	Zulhan		"	78
79	Sapriadi		"	79
80	Amer Sapriadi		"	80
81	Alex		"	
82	Andas		"	



Lampiran 3

	Nama	HP	Instansi	Tanda Tangan
81	Ardians Bobdy		Tim Ahli	81
82	Rahma Wismi		Tim Ahli	82
83	Mahs		Tim Ahli	83
84	Desyati		DLH prov. Sumbar	84
85	Davi Marlina			85
86	Darajat			86
87	Renia Navwin			87
88	Desy Andriani			88
89	Cushika Putri			89
90	Intan Nola Sari			90
91	Monica Rahayu			91
92	MITA			92
93	TAUFIK			93
94	Wulan Fitriani			94
95	Rafid Mubarak			95
96	Zumalita			96
97	WAFI AMIFAH			97
98	Putri Indayani			98
99	IRMA SUPRIANTI	082390834367	DLH Kab. Dharmasraya	99
100	Karmiyah	089651375225	"	100
101	Wiwid Surtadi		"	101
102	Ta Putra		"	102
103	Eka Fitriyanti			103
104	Ryanti			104
105	Defri Andri		DLH Dharmasraya	105
106	Fusa Puspa D		"	106
107	Desyati			107
108	Paula Lodi			108
109	Yena Anggela			109
110	Yongli Sukma			110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

drg. IRINA MKM  
NIP. 19620528 198802 2 001



## NOTULEN ACARA

### KONSULTASI PUBLIK PERUMUSAN REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026

Hari/ Tanggal : Senin / 29 Maret 2021  
Waktu : 09.00-selesai  
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : Konsultasi Publik Perumusan Rekomendasi Arah Kebijakan Untuk Penyusunan Klhs Rpjmd Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026  
Narasumber : Dr. Ardinis Arbain (Tenaga Ahli Bidang Biologi)  
Dr. Mahdi, SP, M.Si (Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Pertanian UNAND)  
Rahma Wimi, ST, M.Si (Tenaga Ahli Teknik Lingkungan)  
Desrizal, ST, M.Si (Kasi Kebijakan Wilayah dan Sektor DLH Prov Sumbar)

### Isi Konsultasi Publik

Konsultasi Publik Perumusan Rekomendasi Arah Kebijakan Untuk Penyusunan Klhs Rpjmd Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 dihadiri oleh:

Pembuka Acara : Drs. MP, Datuak Labuan (Wakil Bupati Dharmasraya)  
Lamporan Ketua Tim : drg. Erina, MKM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)  
Penyusun  
Moderator : drg. Erina, MKM (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)  
MC : Bagian Humas Protokoler  
Pemimpin Lagu : Bagian Humas Protokoler  
Indonesia Raya  
Pembaca Do'a : Yasri  
Jumlah Peserta : 120 Orang

### Notulen Acara Inti Pelaksanaan Konsultasi Publik:

1. Sehubungan dengan proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya, telah dilakukannya konsultasi publik I pada tanggal 26 Januari 2021 dalam rangka penjaringan isu prioritas lingkungan hidup dan perumusan skenario arah kebijakan oleh OPD pada tanggal 23 s/d 27 Februari 2021. Untuk tahap selanjutnya diperlukan konsultasi publik ke II dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyampaian hasil perumusan skenario arah kebijakan dan perumusan rekomendasi arah kebijakan untuk penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.
2. Maksud dari konsultasi publik ini adalah memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk turut berkontribusi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD.
3. Adapun Tujuan kegiatan konsultasi publik ini adalah:

### Lampiran 3

4. Menyampaikan hasil perumusan skenario arah kebijakan hasil konsinyering tanggal 24 – 26 Februari 2021;
5. Menyampaikan hasil rumusan rekomendasi arah kebijakan yang dirumuskan tenaga ahli pendamping berdasarkan isu strategis dan kondisi DDDTLH Dharmasraya;
6. Menghimpun saran dan masukan stakeholder terkait terhadap hasil perumusan skenario arah kebijakan yang telah disusun sebelumnya.
7. **Peserta kegiatan konsultasi publik antara lain :**
  - a. Lingkup SKPD Permerintah Kabupaten Dharmasraya
  - b. Lingkup SKPD terkait Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Bappeda, DLH, ESDM, dan PSDA)
  - c. Kementerian terkait (Balai Wilayah Sungai BWS V Kementerian PU)
  - d. Akademisi (Universitas Andalas Kampus III dan Universitas Dharma Indonesia)
  - e. Pelaku usaha (perusahaan perkebunan, pertambangan, dan industri)
  - f. Lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan (Walhi, Warsi)
  - g. Keterwakilan dari pemerintah kecamatan
  - h. LKAAM
  - i. Bundo Kandung
  - j. MUI
8. Metode Penjaringan isu Lingkungan Pada acara ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:
  - a. Setelah acara pembukaan oleh wakil bupati dharmasraya dilanjutkan dengan penyampaian Materi oleh beberapa orang Narasumber terkait hasil perumusan skenario arah kebijakan berdasarkan TPB dan perumusan rekomendasi arah kebijakan berdasarkan isu strategis dan daya dukung dan dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH).
  - b. Selanjutnya juga dilakukan penyampaian materi terkait validasi KLHS oleh Narasumber dari DLH Prov. Sumbar.
  - c. Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi serta penyampaian saran dan masukan publik terhadap hasil perumusan rekomendasi arah kebijakan KLHS RPJMD.

Notulis,



Yona Anggela, ST

## BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-Maret-2021), bertempat di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya, telah dilaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka Perumusan Rekomendasi Arah Kebijakan untuk Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Rekomendasi KLHS untuk RPJMD dari isu strategis berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup:

1. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan.
2. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah.
3. Memberikan perlindungan terhadap sumberdaya genetic.
4. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk.
5. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
6. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri.
7. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertikal.
8. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan.
9. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energy baru dan terbarukan.

Perumusan Skenario Arah Kebijakan dan Indikasi Program Isu Strategis Indikator TPB/SDGs berdasarkan SPM terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

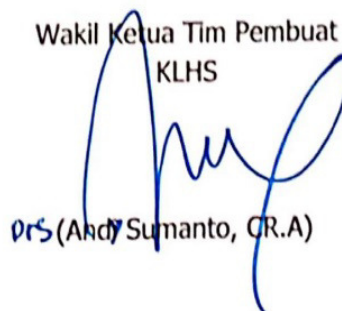
Pulau Punjung, tanggal sebagaimana tersebut di atas,

Ketua Tim Pembuat KLHS



(drg. Erina, MKM)

Wakil Ketua Tim Pembuat  
KLHS



Drs (Andi) Sumanto, CR.A)

Tenaga Ahli Pendamping  
Penyusun KLHS



(Dr. Ardinis Arbain)

Wakil Bupati Dharmasraya



(Drs. DP DATUK LABUAN)





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:  
Humas@dharmasraya.go.id  
Website: [www.dharmasrayakab.go.id](http://www.dharmasrayakab.go.id) Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 14 Maret 2021 M  
Sya'ban 1442 H

Nomor : 660 / 146 / DLH/III-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Permintaan Narasumber**  
**untuk Sinkronisasi Arah**  
**Kebijakan KLHS RPJMD**  
**Tahun 2021-2026**

Kepada Yth.  
Sdr. Dr. ARDINIS ARBAIN  
di

**Padang**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya, telah dilakukannya konsultasi publik II pada tanggal 29 Maret 2021 dalam rangka perumusan rekomendasi arah kebijakan untuk penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Untuk tahap selanjutnya diperlukan sinkronisasi hasil perumusan arah kebijakan rencana program KLHS terhadap rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan saudara untuk dapat menjadi narasumber pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 01 April 2021  
Pukul : 19.30 WIB – selesai  
Tempat : Grand Inna Muara Hotel, Padang  
Acara : Sinkronisasi hasil perumusan arah kebijakan rencana program KLHS terhadap rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
  
**H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:  
Humas@dharmasraya.go.id  
Website: www.dharmasrayakab.go.id Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 31 Maret 2021 M  
Syaban 1442 H

Nomor : 660 / *mt* / DLH/III-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Narasumber  
untuk Sinkronisasi Arah  
Kebijakan KLHS RPJMD  
Tahun 2021-2026

Kepada Yth.  
Sdr. Dr. MAHDI, SP, M.Si  
di

Padang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya, telah dilakukannya konsultasi publik II pada tanggal 29 Maret 2021 dalam rangka perumusan rekomendasi arah kebijakan untuk penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Untuk tahap selanjutnya diperlukan sinkronisasi hasil perumusan arah kebijakan rencana program KLHS terhadap rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan saudara untuk dapat menjadi narasumber pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 01 April 2021  
Pukul : 19.30 WIB – selesai  
Tempat : Grand Inna Muara Hotel, Padang  
Acara : Sinkronisasi hasil perumusan arah kebijakan rencana program KLHS terhadap rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara kami ucapkan terima kasih.

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA**  
*H. ADELISMAN, S.Sos, M.Si*  
*Penjabat Utama Madya - IV/d*  
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



Lampiran 3

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Kamis / 1 April 2021  
 Tempat : Grand Inna Muara Hotel Padang  
 Acara : Sinkronisasi hasil perumusan arah kebijakan rencana program KLHS  
 terhadap rancangan awal dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun

NO	NAMA	INTANSI	NO HP/ ALAMAT	TANDA TANGAN
1	dr. Erina, MEd.	DH		1
2	Lasmiyati	DH	089651375225	2
3	Sulhairi	Tim Ahli KJMD	081363014800	3
4	Gyandersonda	Tim Ahli RPJMD	081363945355	4
5	Bayu Budi Irawan	Tim ahli	085263052980	5
6	Miftahul Viona San	Ruska timah	082211788988	6
7	Shaturrahim	Bappeda	081379751515	7
8	Frinaldi	Bappeda	081268384884	8
9	Budi Waluyo	Bador		9
10	Adrian	GHS		10
11	Yetrinaldi	Asrih 2		11
12	DR. ARDANIS ARBAN	Tim Ahli KLHS		12
13	DR. MAHDI, SP, Msi	Tim AHLI KLHS		13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29



BUPATI DHARMASRAYA

Pulau Punjung, 05 Mei 2021 M  
Ramadhan 1442 H

Nomor : 660 / 163 / DLH/V-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **High Level Meeting KLHS RPJMD**  
**Tahun 2021 - 2026**

Kepada Yth.  
Ka. Perangkat Daerah se-Kabupaten  
Dharmasraya  
di

**Tempat**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahap penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 saat ini sudah pada tahap finalisasi menuju validasi, untuk memaksimalkan integrasi KLHS kedalam RPJMD dan penjaminan kualitas KLHS maka perlu dilaksanakan *high level meeting* bersama para pengambil kebijakan (pejabat eselon II) yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan saudara untuk dapat menghadiri acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 10 Mei 2021

Pukul : 08.30 WIB - Selesai

Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya

Acara : *High Level Meeting* KLHS Menuju Validasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih.



SUTAN RISKA, TUANKU KERAJAAN, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.

**DAFTAR UNDANGAN:**

1. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya
2. Kepala Bapppeda Kabupaten Dharmasraya
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
6. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
7. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya
8. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Dharmasraya
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya
11. Kepala Dinas Pariwisata Budaya dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya
12. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Dharmasraya
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dharmasraya
17. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya
18. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya
19. Kepala BPBD Kabupaten Dharmasraya
20. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dharmasraya
21. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Dharmasraya
22. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Dharmasraya





**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat  
Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email:

Humas@dharmasraya.go.id  
Website: www.dharmasrayakab.go.id Kode Pos 27573

Pulau Punjung, 6 Mei 2021 M  
Ramadhan 1442 H

Nomor : 660 / 164 / DLH/V-2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **High Level Meeting KLHS**  
**RPJMD Tahun 2021 - 2026**

Kepada Yth.  
1. Sdr. Dr. ARDINIS ARBAIN  
2. Sdr. Dr. MAHDI, SP, M.Si  
3. Rahma Wirni, ST, M.Si  
di

**Padang**

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tahap penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 saat ini sudah pada tahap finalisasi menuju validasi. untuk memaksimalkan integrasi KLHS ke dalam RPJMD dan penjaminan kualitas KLHS RPJMD, maka perlu dilaksanakan *high level meeting* bersama para pengambil kebijakan (pejabat eselon II) yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya kesediaan Saudara untuk dapat menjadi narasumber pada acara dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 10 Mei 2021  
Pukul : 08.30 WIB - Selesai  
Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : *High Level Meeting* KLHS Menuju Validasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
  
H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya - IV/d  
NIP. 19690825 198902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin / 10 Mei 2021  
Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : High Level Meeting KLHS Menuju Validasi

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1	SUTAN RUKA TUANKU KERASAAN, SE	BUPATI DHAR MASRAYA	1
2	Drs. DP DATUK LABUAN	WAKIL BUPATI DHARMASRAYA	2
3	ABDI AMRI	DISDukcapri	3
4	Aser	Kerbang per	4
5	Leandau	Inspektur	5
6	HASTEN	DPMD	6
7	Parisman	Kadis Pertanian & Perkebunan	7
8	IK Syad	Kep. Petak	8
9	Ranibug	Purkul	9
10	<del>REMI</del>		10
11	Marsus	Inspektur	11
12	<del>DIKUS</del>	Disdiknas	12
13	<del>Parman</del>	Kem. Perang	13
14	Safurudin	Satpol PP	14
15	MARINUS	K. Pendidikan	15
16	Benny M	BUDAPROKES	16
17	Tunaei yunus	Dinas Pupr	17
18	Karnel Annel	DPMDTSP	18
19	Paryanto	B/KS	19
20	Budi Waly	Walupr	20
21	Karladehina	Disdik	21
22	Edison	BEBD	22
23	Frinalds	8-pped-	23
24	Itom	BUDOSM	24
25	Alar H. Purwas	KAS. PDS	25
26	Yatrialdi	Acc 2	26
27	Bustaz	Dinas P&A	27
28	Purwaneto	Disdiknas	28
29	MARTOAS	Aspek 3	29
30	Melip	Geodis poli	30

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
drg. ERINA, MKM  
NIP. 19620528 198802 2 001





# PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau  
Telp. (0754) 451506 Fax. (0754) 451506 Kode Pos : 27573

### DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin / 10 Mei 2021  
Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya  
Acara : High Level Meeting KLHS Menuju Validasi

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan	
31	SUGENDY KWD	B26 P3A PPKB	1	
32	Marlisia	DISKOMUM F.	2	u asp
33	NOVARINA SKM	Disus P3A PPKB	3	
34	HILDA RAHMADAN	Disus P3A PPKB	4	
35	PRW JEN		5	
46			6	
47			7	
48			8	
49			9	
50			10	
51			11	
52			12	
53			13	
54			14	
55			15	
56			16	
57			17	
58			18	
59			19	
60			20	
61			21	
62			22	
63			23	
64			24	
65			25	
66			26	
67			27	
68			28	
69			29	
70			30	

Mengetahui,  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
drg. ERINA, MKM  
NIP. 19620528 198802 2 001

## BERITA ACARA

Pada hari ini Senin Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-Mei-2021), bertempat di Aula Lantai II Kantor Bupati Dharmasraya, telah dilaksanakan Pertemuan dalam rangka High Level Meeting untuk Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026 dengan hasil sebagai berikut:

### A. Rumusan Rekomendasi Arah Kebijakan Berdasarkan Isu Prioritas

No	Isu Prioritas	Faktor Penyebab	Rekomendasi Kebijakan	Arah
1	Penurunan Kualitas Air	Erosi, Limbah pabrik, Limbah Pertanian dan Limbah domestik, Penambangan di Sungai, Pembuangan sampah ke Sungai,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengendalian erosi melalui peningkatan tutupan vegetasi,</li> <li>2. Mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah domestik. (IPAL Komunal)</li> <li>3. Mengendalikan kegiatan pertambangan di Sungai</li> <li>4. Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah industri</li> <li>5. Memperkuat tata Kelola pengendalian pencemaran dan implementasi regulasi.</li> </ol>	
2	Peningkatan Timbulan Sampah	Peningkatan ragam sumber sampah, Rendahnya kapasitas pengelolaan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pengelolaan sampah 3R</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah.</li> <li>3. Mendorong pemanfaatan sampah untuk energi</li> </ol>	

Lampiran 3

3	Illegal Mining	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya Peluang Mata Pencaharian</li> <li>2. Tingginya permintaan bahan galian</li> <li>3. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan ragam usaha dan peningkatan akses permodalan usaha</li> <li>2. Meningkatkan upaya pencarian bahan alternatif diperbaharui dan daur ulang</li> <li>3. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk penegakan hukum.</li> </ol>
4	Alih Fungsi lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pemukiman</li> <li>2. Pengembangan infrastruktur jalan dan Gedung</li> <li>3. Pemanfaatan hutan untuk perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pemukiman hemat lahan (rumah susun sewa).</li> <li>2. Mengembangkan rekayasa pembangunan infrastruktur (jalan layang)</li> <li>3. Mengembangkan pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>4. Memperkuat implementasi regulasi pemanfaatan ruang.</li> <li>5. Mengembangkan LP2B dan mengembangkan insentif implementasi regulasi.</li> </ol>
5	Rendahnya derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan Kesehatan masyarakat</li> <li>2. Rendahnya pengetahuan Kesehatan dan perilaku hidup sehat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan</li> <li>2. Mengembangkan infrastruktur pendukung pola hidup sehat (lapangan olah raga dll)</li> <li>3. Mengintensifkan pengembangan pengetahuan pola hidup</li> </ol>

Lampiran 3

			sehat
6	Rendahnya nilai tambah produk pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum bertumbuhnya industri pengolahan hasil</li> <li>2. Belum optimalnya pengembangan pasar produk pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas pengolahan pasca panen</li> <li>3. Mengembangkan kelembagaan pemasaran yang sehat dan Tangguh.</li> </ol>
7	Rendahnya pemahaman dan kecintaan terhadap agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya intensitas perkembangan budaya hedonic.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pendidikan keagamaan formal dan non formal.</li> <li>2. Mengembangkan infrastruktur peningkatan kualitas implementasi ajaran agama (perpustakaan, museum, rumah tahfiz).</li> <li>3. Mengembangkan Pendidikan agama dalam keluarga.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam implementasi nilai-nilai agama.</li> </ol>

### Lampiran 3

#### B. Rumusan Rekomendasi Arah Kebijakan Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)

No	Isu DDDTLH	Rekomendasi Arah Kebijakan
1	<p>Daya dukung Penyediaan Pangan, Air Bersih dan Sumberdaya Genetik sebagian besar sangat rendah dan rendah</p> <p>Kepadatan penduduk pada wilayah tersebut adalah tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan</li> <li>2. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah</li> <li>3. Memberikan perlindungan terhadap sumberdaya genetik</li> </ol>
2	<p>Daya tampung jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah sebagian besar rendah dan sangat rendah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk</li> <li>2. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.</li> <li>3. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri</li> </ol>
3	<p>Daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman</li> </ol>
4	<p>Daya dukung dan daya tampung Jasa Pembentukan Lapisan Tanah dan pemeliharaan kesuburan sebagian besar rendah dan sangat rendah</p> <p>Namun sangat tinggi untuk jasa keragaman Hayati</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan</li> <li>2. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energy baru dan terbarukan.</li> </ol>



Lampiran 3

C. Rumusan Rekomendasi Arah Kebijakan Berdasarkan Ketercapaian Indikator TPB/SDGS untuk urusan SPM

No	Isu <b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>Rekomendasi Arah Kebijakan</b>
1	<p>Kesehatan (SPM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tercapai target pelayanan kesehatan, imunisasi, dan KB</li> <li>2. Masih tinggi angka kematian bayi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan layanan kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, balita, terutama bagi masyarakat miskin</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keluarga berencana dan keterlibatan PUS dalam KB</li> </ol>
2	<p>Pendidikan (SPM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dikembangkan SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana, pendidikan layanan khusus</li> <li>2. Masih tinggi anak dan remaja yang belum mencapai standar kemampuan minimum membaca, dan matematika.</li> <li>3. Belum tercapai target Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, dan SMP/MTs/ sederajat</li> <li>4. Masih rendah APK PAUD</li> <li>5. Masih rendah persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.</li> <li>6. Masih rendah angka melek aksara penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem Pendidikan layanan khusus</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi siswa terhadap literasi dan numerasi</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan</li> <li>4. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan SD dan SMP/MTs/ sederajat</li> <li>5. Mendorong pengembangan dan peningkatan mutu perguruan tinggi di Dharma Raya</li> <li>6. Meningkatkan sistem pengelolaan dan kualitas PAUD</li> <li>7. Meningkatkan kualitas Pendidikan dasar dan menengah</li> <li>8. Mengembangkan Pendidikan keaksaraan fungsional</li> <li>9. Meningkatkan kompetensi</li> </ol>

Lampiran 3

		<p>profesional Tenaga Pendidik</p> <p>10. Meningkatkan kesempatan untuk mengikuti program paket A, paket B, dan paket C</p>
3	<p>Pekerjaan Umum (SPM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi dan air minum layak dan berkelanjutan, air minum aman dan berkelanjutan</li> <li>2. Masih rendah kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industry</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi parapihak dan masyarakat dalam pengembangan sanitasi layak</li> <li>2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum</li> <li>3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) sumber Air Baku dan air minum</li> <li>4. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan implementasi konservasi sumber air minum</li> </ol>
4	<p>Perumahan Rakyat (SPM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih terbatas rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dukungan bagi ketersediaan rumah layak huni serta PSU yang layak</li> </ol>
5	<p>Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, &amp; Perlindungan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendah perlindungan masyarakat terhadap resiko bencana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pencegahan dan mitigasi bencana di daerah rawan bencana</li> <li>2. Mengembangkan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana</li> <li>3. Mengembangkan sistem pengurangan resiko bencana</li> <li>4. Mengembangkan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas pengendalian dampak bencana pada pusat-pusat</li> </ol>

Lampiran 3

		pertumbuhan berisiko tinggi
6	<p>Sosial (SPM)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendah Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.</li> <li>2. Belum terpenuhi kebutuhan dasar korban bencana sosial.</li> <li>3. Belum ada pendampingan psikososial korban bencana sosial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pendampingan psikososial</li> </ol>

Selain ketiga hal utama diatas agar dipedomani arah kebijakan dan indikasi program yang telah dicantumkan dalam laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021 – 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Punjung, tanggal sebagaimana tersebut di atas,

Ketua Tim Pembuat KLHS

  
(drg. Erina, MKM)

Wakil Ketua Tim Pembuat  
KLHS

  
(Drs. Andy Sumanto, CR.A)

Tenaga Ahli Pendamping  
Penyusun KLHS

  
(Dr. Ardinis Arbain)

Wakil Bupati Dharmasraya

  
(Drs. DP DATUK LABUAN)

Bupati Dharmasraya

  
(SUTAN RISKU TUANKU KERAJAAN, SE)



# **Lampiran 4**

## **Penjaminan Kualitas**



**KLHS RPJMD**

**BUPATEN DHARMASRAYA**

**TAHUN 2021 - 2026**

**BERITA ACARA**  
**PENJAMINAN KUALITAS KLHS RPJMD**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026**

Telah dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/20/KPTS-BUP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.

KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 telah dilakukan sesuai tata cara yang diatur dalam:

- a. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- b. Pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/KUM.I/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya selaku Penanggung Jawab Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 yang diketahui oleh Bupati Dharmasraya .

Pulau Punjung, 17 Mei 2021

**Mengetahui,**  
**BUPATI DHARMASRAYA**

  
**SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Dharmasraya

  
**drg. ERINA, MKM**  
NIP. 19620528 198802 2 001



## **PENJAMINAN KUALITAS KLHS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 - 2026**

Untuk menjamin kualitas KLHS diperlukan adanya pengawasan secara internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin mutu pelaksanaan KLHS sesuai dengan pedoman. Sedangkan pengawasan eksternal mengikuti proses pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2021 sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam upaya untuk memastikan bahwa proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme atau tahapannya, termasuk substansi hasil KLHS telah direkomendasikan untuk menjamin pengintegrasian KLHS ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan penilaian mandiri yang kriteria pokoknya adalah sebagai berikut:

<b>Nama KLHS</b>	<b>KLHS Rencana Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026</b>
<b>Nama KRP</b>	<b>Rencana Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026</b>
<b>Instansi Penanggung Jawab</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya</b>
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>2021</b>

<b>Penilaian: Desain Proses KLHS</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c	Ya	
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?	Ya	
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?	Ya	
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai pemerintah atau lainnya)	Ya	Terdapat pada Hal Lampiran SK Pokja
Ringkasan kesimpulan: Harus menjelaskan apakah proses KLHS sesuai ketentuan, dan rekomendasinya layak (relevan, memenuhi kaidah ilmiah, memenuhi kaidah peraturan perundangan yang terkait)	Ya	Terdapat pada Bab I

<b>Penilaian: Laporan KLHS</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah Laporan KLHS telah memuat:		
1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	Lengkap	Ada, terdapat pada Bab I hal 4
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan	Lengkap	Terdapat pada Bab I hal 6, Bab II hal 10 – 18 dan Bab III hal 20 - 28
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	Lengkap	Terdapat pada Bab I hal 18 dan Bab V Rumusan isu hal 112 - 129
4. Pertimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan berkelanjutan	Lengkap	Terdapat pada Bab VI hal 131 - 192
5. Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	Lengkap	Terdapat pada Bab VI hal 130 dan lampiran 6
6. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	Lengkap	Terdapat pada lampiran Pelaksanaan FGD pada Bab IV hal 83 dan Lampiran 3
7. Hasil penjaminan kualitas KLHS	Lengkap	Lampiran 4
8. Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas	Lengkap	Terdapat pada awal laporan

<b>Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas?	Sudah	Terdapat pada Bab IV hal 83
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan:		
1. Karakteristik wilayah	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 20 - 28
2. Tingkat pentingnya potensi dampak	Sudah	Terdapat pada Bab V
3. Keterkaitan antar isu strategis	Sudah	Terdapat pada Bab V
4. Keterkaitan dengan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program	Sudah	Terdapat pada Bab IV, Bab V dan Bab VI
5. Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH; dan/atau	Sudah	DDDTLH pada Bab III hal 67 - 80
6. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan,		

<b>Penilaian: Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
	dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.		
Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.	Sudah	Terdapat pada Bab V hal 114 – 121
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Sudah	Terdapat pada Bab V Hal 114 - 120
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem.	Sudah	Terdapat pada Bab V Hal 114 - 120
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam.	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 25
5.	Status mutu dan ketersediaan SDA.	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 67 - 80
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 78 - 80
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 71 - 75
8.	Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 47
9.	Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 55 - 64
10.	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 56
Apakah lingkup geografis disampaikan dengan jelas?		Sudah	Terdapat pada Bab III 20 -25
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Iya	
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?		Sudah	

<b>Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?	Sudah	Terdapat pada Bab V
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?	Sudah	Terdapat pada Bab III hal 67 – 80 dan Bab IV hal 105 - 111
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Sudah	Terdapat pada Bab IV hal 85 dan Bab VII hal 193
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Sudah	Terdapat pada Bab IV hal 105 - 111

<b>Penilaian: Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
		dan Bab V hal 122 - 129
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Sudah	Terdapat pada Bab V hal 114 - 121
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh: isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi	Tidak	

<b>Penilaian: Pengkajian</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah pengkajian memuat:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan	Sudah	Terdapat pada Bab V hal 114 - 121
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup	Sudah	Terdapat pada Bab V hal 119 - 120
3.	Kinerja layanan atau jasa ekosistem.	Sudah	Terdapat pada Bab III 67 - 80 dan Bab V 114 - 121
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.	Belum	Terdapat pada Bab III hal 67 - 80 dan Bab V 114 - 121
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan	Sudah	Terdapat pada Bab III 71 - 75 dan Bab V hal 119 - 120
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.	Sudah	Terdapat pada Bab III 78 - 80 dan Bab V hal 119 - 120
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?		Sudah	Terdapat pada Bab V hal 113 metode scoring
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?		Sudah	Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?		Sudah	Terdapat pada Bab III hal 67 - 80 dan Bab V 114 - 121
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?		Sudah	Terdapat pada Bab IV hal 88 dan Bab V 122 - 129
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?		Sudah	Terdapat pada Bab III, Bab IV, Bab V dan Bab VII
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?		Sudah	Terdapat pada Bab III, Bab IV dan Bab V

<b>Penilaian: Pengkajian</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?	Sudah	Terdapat pada Bab III, Bab IV dan Bab V
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Sudah	Terdapat pada Bab III, Bab IV dan Bab V
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Sudah	Terdapat pada Bab III dan Bab V
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Sudah	Terdapat pada Bab III dan Bab V

<b>Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Bagaimana bentuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program? Uraikan dalam bagian-bagian yang sesuai dibawah ini:			
1.	Perubahan tujuan atau target	Tidak ada	
2.	Perubahan strategi pencapaian target	Tidak ada	
3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi	Tidak ada	
4.	Perubahan, penyesuaian atau adaptasi proses atau metode terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Sudah	BAB I dan Bab IV
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	Sudah	Terdapat pada bab V dan Bab VI
6.	Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau	Sudah	Terdapat pada bab V, bab VI dan Bab VII
7.	Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risikoLingkungan Hidup	Sudah	Terdapat pada bab V dan Bab VI
Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternative KRP serta rekomendasi KLHS?		Sudah	Tedapat pada Bab I dan Bab VI
Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?		Sudah	Terdapat pada Bab V dan Bab VI
Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin/masih akan muncul?		Sudah	Terdapat pada Bab V dan Bab VI
Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?		Sudah	Terdapat pada Bab V hal 120 – 121 dan Bab VII hal 195
Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan alternatif?		Sudah	Terdapat pada bab VII 193 - 196



<b>Penilaian: Alternatif dan Rekomendasi</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Sudah	Terdapat pada bab VI

<b>Penilaian: Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah telah terpenuhi:		
Data dukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	Sudah	Terdapat pada lampiran lampiran III
Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Sudah	Pada Bab V dan Bab VI serta lampiran
Dokumen penjaminan kualitas	Sudah	Ada terdapat pada laporan lampiran 4 penjaminan kualitas
Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS	Sudah	Terdapat pada lampiran 2
SK Kelompok Kerja KLHS	Sudah	Terdapat pada Lampiran 1

<b>Penilaian: Integrasi Hasil KLHS/Pengambilan Keputusan</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah telah terpenuhi:		
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/ dimasukkan materi teknis KRP	Sudah	Terdapat pada dokumen Ranwal RPJMD dan lampiran 6 laporan KLHS
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP	Sudah	Terdapat pada dokumen Ranwal RPJMD dan lampiran 3 laporan KLHS
Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	Sudah	Terdapat pada Bab VII hal 196
Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Sudah	Terdapat pada Bab VII hal 196
Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	Sudah	Terdapat pada Bab VII hal 196
Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	-	
Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini	-	

<b>Penilaian: Partisipasi Pemangku Kepentingan</b>		
<b>Kriteria</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Ket</b>
Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Sudah	Terdapat pada Bab IV, Bab V dan Bab VII
Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Sudah	Terdapat pada lampiran 3 pendokumentasian konsultasi publik KLHS
Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Sudah	Terdapat pada lampiran 3 pendokumentasian konsultasi publik KLHS
Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Sudah	



# **Lampiran 5**

**Capaian Indikator TPB**



**KLHS RPJMD  
BUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2021 - 2026**

**Lampiran 5.1 Data Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	DinsosPKBP3A	7,86	7,08	6,64	6,38	6,26	NA
2	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	Dinas Kesehatan	70,0	50,2	45,4	54,5	83,0	53,2
3	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	DinsosPKBP3A	108,05	90,45	104,23	854,12	631,13	275,55
4	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	Dinas Kesehatan	0,074	0,070	0,029	0,041	0,081	0,240
5	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	Dinas Kesehatan	10,370	10,678	9,694	15,474	7,619	12,885
6	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	0,007	0,007	0,009	0,007	0,005	0,006
7	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	Dinas Kesehatan	8,151	7,231	5,278	6,509	5,765	9,118
8	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	35,766	33,743	40,492	29,413	19,167	12,328
9	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Disdukcapil	28,297	42,443	52,818	60,893	88,154	89,383
10	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	Dinas Kesehatan	70,133	78,052	70,551	66,351	73,345	74,194
11	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	Dinas Kesehatan	153,022	98,619	217,924	102,276	155,682	77,022
12	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan	96,449	97,242	97,824	98,898	99,896	99,616

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	14,282	10,108	9,807	9,460	9,341	8,729
14	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Dinas Kesehatan	8,980	5,138	1,750	3,231	2,557	2,439
15	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	BKD	11,830	44,925	44,242	44,323	48,403	50,755
16	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	Dinas Pangan dan Perikanan	NA	2,685	2,52	2,789	2,548	NA
17	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Dinas Pangan dan Perikanan	NA	0%	0%	0%	0%	0%
18	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Dinas Kesehatan	0	0,003	0,009	0,004	0,003	0,012
19	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	Dinas Kesehatan	82,022	136,931	93,428	105,145	216,093	NA
20	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	7,468	6,774	7,549
21	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	Dinas Kesehatan	52	52	52	52	52	52
22	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Dinas Pangan dan Perikanan	NA	235,15	188,65	201,2	214,4	191,35
23	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	DinsosPKBP3A	84,559	70,621	79,163	83,053	79,537	81,104
24	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	DinsosPKBP3A	0,000	22,280	22,111	23,973	24,461	23,378



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
25	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	100	100
26	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Dinas Kesehatan	3,613	3,550	4,221	4,206	4,241	NA
27	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	0	0	0	0	0	NA
28	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	Dinas Kesehatan	0,199	0	0	0	0	1
29	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan) yang mencapai eliminasi malaria. (jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria)	Meningkat menjadi 300 Target lokal 52 Nagari	Dinas Kesehatan	52	52	52	52	52	52
30	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (Nagari= 52)	Meningkat	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	100	100	100
31	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	1
32	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	4,800	1,654	1,104
33	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Dinas Kesehatan	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
34	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	BPBD	0	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	DinsosPKBP3A	49,388	46,089	42,525	50,103	24,934	24,225
36	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	Dinas Kesehatan	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Dinas Kesehatan	0	0	0,229	0	0	0
38	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	Disdik	78,710	89,677	93,711	92,121	93,373	NA
39	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	Disdik	54,000	58,000	60,000	65,455	81,481	NA

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. (DHARMASRAYA 11 kecamatan 52 desa/nagari)	Dinas Perkim	0	0	1	8	11	11
41	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	Disdik	103,45	97,45	99,22	96,35	99,31	0
42	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	Disdik	76,96	67,95	91,97	80,59	93,13	0
43	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	DinsosPKBP3A	0	0	0,013	0,011	0,001	0,003
44	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	DinsosPKBP3A	NA	NA	0,082	0,101	0,056	0,059
45	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	DinsosPKBP3A	NA	NA	0,017	0,013	0,008	0,007
46	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	DinsosPKBP3A	NA	NA	90,47619048	100	100	100
47	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	DinsosPKBP3A	82,03	83,37	84,92	81,24	81,99	100
48	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	DinsosPKBP3A	4,000	4,000	4,000	4,000	8,333	8,333
49	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	BKPSDM	12,739	10,274	21,290	22,876	25,000	25,342
50	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang	Meningkat	Dinas Kesehatan	21	8	8	8	18	18

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Air Besar Sembarangan (SBS).								
51	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Dinas Perkim	0	0	191,832	0,802	1,008	NA
52	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Dinas LH	50	56,667	51,818	50	53,64	55,35
53	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	Disnaker	52,95	54,51	56,22	54,39	54,78	56,39
54	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	Diskumperdag	16,507	48,447	35,263	40,411	39,460	26,981
55	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Disnaker	10.094	11.255	12.188	13.125	15.525	15.621
56	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Disnaker	19	19	18	20	48	48
57	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (Laju pertumbuhan PDRB Dharmasraya 4,98)	BPS	6,01	6,06	6,06	6	5,73	4,92
58	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	BPS	3,227	3,164	5,278	4,253	15,800	15,799
59	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Dinas Kominfo	85,206	84,080	89,778	87,993	89,839	NA
60	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Dinas Kominfo	60,38	57,81	60,1	63,86	64,16	63,45
61	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Dinas Kominfo	22,98	31,89	29,98	38,66	44,61	48,5
62	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	Bappeda	0,36	0,3	0,25	0,26	0,28	-
63	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Bappeda	NA	NA	0,003	0,003	0,003	-
64	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional) PERLU DITETAPKAN TARGET LOKAL	DPMN	NA	NA	0	16	1	8

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
65	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	0
66	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	Disdik	0	0	0	0	11	13
67	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Meningkat	Disdik	96,774	98,710	100	100	100	100
68	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada	Dinas LH	0	1	1	3	3	3
69	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	DPUPR	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00
70	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Kesbangpol	0	0	0	0	0	NA
71	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	DinsosPKBP3A	NA	NA	0,069	0,059	0,018	0,052
72	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	DinsosPKBP3A	NA	NA	0,020	0,029	0,027	0,023
73	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	DinsosPKBP3A	NA	NA	0,068	0,060	0,032	0,032

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
74	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	BKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	belum di audit BPK
75	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Bag. Organisasi	41,17	45,67	60,46	62,12	62,58	ON Proses
76	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	DinsosPKBP3A	4,00	4,00	4,00	4,00	8,33	8,33
77	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	Disdukcapil	86,344	88,141	90,063	91,292	94,037	94,940
78	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	Disdukcapil	28,297	42,443	52,818	60,893	88,154	89,383
79	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Bagian Hukum	0	0	0	0	0	0
80	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Dinas Kominfo	0,01029976	0,014	0,013	0,016	0,018	NA
81	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	100%	Dinas Kominfo	NA	82,759	82,759	61,538	58,333	50
82	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	BPS	NA	NA	NA	79,81%	88,37%	0,993
83	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Disdukcapil	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
84	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi	Meningkat	BPS	NA	NA	NA	7714	11729	10497



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		statistik melalui website.								
85	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	BPS	NA	NA	NA	100,00%	100,00%	0,9612

**Lampiran 5.2 Data Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan	183,21	199,08	215,90	228,07	225,14	221,32
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Disnaker	3	3	5	6	7	8
3	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	DinsosPKBP3A	2068	3496	3439	4924	4622	4502
4	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	Bagian Perekonomian dan SDA	NA	NA	NA	63,32	63,66	61,02
5	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	Dinas Kesehatan	9,389	9,368	8,908	8,900	8,745	9,653
6	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	23,973	15,779	14,165	14,319	16,347	14,377
7	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan	59,615	80,769	61,538	86,538	63,462	51,923
8	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	DinsosPKBP3A	61,007	60,864	59,204	23,204	32,293	58,005
9	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah (Nagari = 52 Nagari)	BPBD	0	0	0	0	3 Nagari	0
10	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	BPBD	0	0	0	0	0	0
11	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi Dharmastraya 11 kecamatan	Dinas Kesehatan	9	9	11	8	9	9

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	Dinas Kesehatan	0	0	0	0	0	0
13	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	0	0	0	0	0,404	0
14	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Dinas Kesehatan	0,613	NA	0,4587	0,1901	0,3322	0,2594
15	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	BPBD	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2
16	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	BPBD	0	0	0	0	0	0
17	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	BPBD	0	0	0	0	0	0
18	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	BPBD	0	0	0	0	0,404	0
19	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Dinas Kesehatan	15,94	10,03	9,67	9,97	9,72	11,18
20	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	Dinas Kesehatan	55,47	38,61	41,77	42,54	43,21	49,49
21	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	DPUPR	53,99%	56,02%	58,84%	60,46%	58,62%	59,86%
22	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	DPUPR	0,00	0,00	85,94	86,51	86,88	87,28
23	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Perkim	NA	NA	85,94%	86,51%	86,88%	87,28%

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
24	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	Disdik	0	0	0	0	0	0
25	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	Disdik	0	171,75	175,00	129,57	118,62	125,14
26	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Disdik	116,07	108,09	110,17	104,83	106,94	116,07
27	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	DinsosPKBP3A	0	0	0	1	0	2
28	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	DinsosPKBP3A	NA	NA	20	20	20	20
29	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	DinsosPKBP3A	8,021	15,617	11,396	11,542	10,753	10,285
30	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	DinsosPKBP3A	61,007	60,864	59,204	23,204	32,293	58,005
31	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Disdik	99,04	91,18	107,28	91,42	103,3	99,04
32	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Disdik	8,03	8,23	8,24	8,25	8,46	NA
33	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	Disdik	40,463	51,816	52,927	48,136	43,943	47,641

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
34	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	Disdik	1,32	1,42	1,39	1,38	0,97	0,79
35	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (DHARMASRAYA 11 kecamatan 52 desa/nagari)	Dinas Kesehatan	32	40	45	46	48	52
36	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	Disdik	94,85	92,74	90,93	89,21	90,34	93,42
37	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Dinas Perkim	1	1	1	1	1	1
38	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	Dinas LH	0	0	0	0	0	0
39	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	DPUPR	0	0	0	0	0	0
40	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	DPUPR	1	1	1	1	1	1
41	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	Dinas LH	1	1	1	1	1	1
42	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	Dinas LH	0	0	0	0	0	0
43	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Bappeda	5,75	5,42	5,44	5,31	4,98	0
44	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari	Bappeda	3462597261	3679538884	3845095466	4015477023	4180977789	NA



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Rp 50 juta							
45	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	BPS	11,082	3,367	3,575	-2,978	0,709	2,186
46	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	BPS	96,28	96,28	96,00	91,99	90,30	90,30
47	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	Disnaker	41,25	41,25	43,23	40,25	41,07	41,07
48	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	Disnaker	3,51	3,51	3,69	3,94	5,08	5,08
49	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Disnaker	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5
50	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Disnaker	NA	19.689	NA	NA	19.035	10.918
51	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Disbudparpora	NA	NA	305	318	372	0
52	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Disbudparpora	NA	NA	25.375	30.259	4.865	15.768
53	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	DPMPTSP	-	22	21	18	17	NA
54	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Dinas Perhubungan	2	2	2	2	2	2
55	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	BPS	7,77946E-11	7,18209E-11	6,69297E-11	6,18542E-11	5,53558E-11	6,32434E+12
56	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional) Target lokal 0	DPMN	NA	29	29	13	12	4
57	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa (Target lokal 52 Nagari)	DPMN	NA	23	23	39	40	48
58	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Disnaker	2,775	3,386	5,486	5,636	6,758	8

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
59	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	DPUPR	0	0	0	0	0	0
60	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Disdik	68,00	75,62	73,95	74,92	74,72	75,27
61	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Dinas Perkim	NA	NA	69054,49078	68,10	68,11	79,38
62	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Dinas LH	0	0	2,8	2,73	6,02	6,7
63	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	DinsosPKBP3A	4,484	4,484	4,484	5,051	2,020	20,188
64	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Dinas LH	NA	NA	NA	3092	4658	8613
65	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional) Perlu ditetapkan target lokal Dharmasraya	Dinas LH	NA	NA	3467,5	6095,5	6217,4	6217,4
66	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Dinas LH	0	1	1	1	1	1
67	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	Dinas LH	0	0	0	0	0	0
68	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	Dinas LH	0	0	0	0	0	0
69	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	DinsosPKBP3A	469	820	1086	3150	3069	17024
70	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	DinsosPKBP3A	0	0	0	0	0	0
71	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	Dinas LH	NA	NA	NA	26,00	24,89	21,98
72	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Dinas LH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
73	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	Dinas LH	0	0	0	0	0	0
74	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Dinas LH	0	0	0	0	0	0
75	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Kesbangpol	0	0	0	0	1	1
76	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Kesbangpol	90,57	89,03	88,28	88,03	86,98	#DIV/0!
77	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	BKD	94,601	89,877	94,017	96,573	95,448	91,776
78	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkat menjadi 80%	Bag. ADM Pembangunan	38,437	41,206	49,137	22,335	43,742	70,510
79	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). <b>Indikator Lokal</b> Indeks kepatuhan pelayanan publik	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	Bag. Organisasi	NA	NA	NA	NA	79,62	ON Proses
80	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	DinsosPKBP3A	14,81	16,67	12,50	8,00	8,33	4,76
81	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	Dinas Kominfo	0	0	0	0	0	0
82	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	BAPD	1,47	1,38	1,83	1,77	1,68	#DIV/0!

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	OPD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
83	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	BAPD	0,73	0,67	1,09	0,87	0,76	#DIV/0!
84	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	BKD	7,083	6,401	10,575	9,029	7,610	8,848
85	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Bag. ADM Pembangunan	0	0	0	0	0	0
86	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Bag. ADM Pembangunan	0	0	0	0	0	0
87	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	BPS	NA	NA	NA	70,00%	66,67%	0,8286
88	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	BPS	NA	NA	NA	6 instansi	6 instansi	6 instansi

### Lampiran 5.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

#### SPM Kesehatan

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	50,2	45,4	54,5	83,0	53,2	SS
3	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	90,450	104,233	854,120	631,126	275,547	SS
4	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	0,070	0,029	0,041	0,081	0,240	SS
5	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	10,678	9,694	15,474	7,619	12,885	SS
6	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	0,0075	0,0085	0,0072	0,0052	0,0061	SS
7	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	7,231	5,278	6,509	5,765	9,118	SS
8	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	33,743	40,492	29,413	19,167	12,328	SS
9	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	78,052	70,551	66,351	73,345	74,194	SS
10	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	98,619	217,924	102,276	155,682	77,022	SS
11	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	97,242	97,824	98,898	99,896	99,616	SS
12	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	9,368	8,908	8,900	8,745	9,653	SB
13	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	15,779	14,165	14,319	16,347	14,377	SB



No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
14	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	10,108	9,807	9,460	9,341	8,729	SS
15	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	5,138	1,750	3,231	2,557	2,439	SS
16	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	80,769	61,538	86,538	63,462	51,923	SB
17	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,003	0,009	0,004	0,003	0,012	SS
18	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	136,931	93,428	105,145	216,093	NA	SS
19	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	NA	NA	7,468	6,774	7,549	SS
20	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	52	52	52	52	52	SS
21	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	60,864	59,204	23,204	32,293	58,005	SB
22	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	70,621	79,163	83,053	79,537	81,104	SS
23	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	22,280	22,111	23,973	24,461	23,378	SS
24	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	NA	NA	NA	NA	NA	NA
25	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100	100	100	100	SS
26	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	3,550	4,221	4,206	4,241	NA	SS

### **SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0	#DIV/0!	SS
2	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0	0	3 Nagari	0	SB
3	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	0	0	0	SB
5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0	0	0,4039	0	SB
6	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2	SB
7	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	SS
8	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0	0	0	SB
9	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	0	0	0	0	0	SB
10	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. = 11.5.1.*	0	0	0	0,4039	0	SB

## **SPM PEKERJAAN UMUM**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	56,02%	58,84%	60,46%	58,62%	59,86%	SB
4	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0,00	85,94	86,51	86,88	87,28	SB
5	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA
6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	NA	85,94%	86,51%	86,88%	87,28%	SB
7	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	0	1	8	11	11	SS

## SPM PENDIDIKAN

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	97,45	99,22	96,35	99,31	0	SS
2	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	67,95	91,97	80,59	93,13	0	SS
3	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	0	0	0	SB
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	171,75	175,00	129,57	118,62	125,14	SB
5	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108,09	110,17	104,83	106,94	116,07	SB
6	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	91,18	107,28	91,42	103,3	99,04	SB
7	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	8,23	8,24	8,25	8,46	NA	SB
8	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	51,816	52,927	48,136	43,943	47,641	SB
9	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	1,422	1,394	1,378	0,972	0,794	SB
10	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	92,738	90,929	89,213	90,340	93,423	SB
11	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	98,710	100	100	100	100	SS
13	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	75,624	73,946	74,924	74,722	75,269	SB

### **SPM PERUMAHAN RAKYAT**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
1	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	NA	69054,49	68,10	68,11	79,38	SB

### **SPM SOSIAL**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	2016	2017	2018	2019	2020	Capaian
1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	4,48	4,48	5,05	2,02	20,19	SB
2	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	820	1086	3150	3069	17024	SB
3	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	0	0	0	0	0	SB



**Lampiran 5.4 GAP Indikator SPM Kabupaten Dharmasraya**

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Isu Prioritas TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	JENIS URUSAN	OPD	2019	Capaian	GAP
<b>SPM KESEHATAN</b>									
1	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Masih rendahnya persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	kesehatan	Dinas Kesehatan	8,75	SB	76,26
2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Masih berfluktuasinya angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Menurun	kesehatan	Dinas Kesehatan	16,347	SB	Capaian masih meningkat (berfluktuasi)
3	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi belum mencapai target nasional 95%	Meningkat menjadi 95%	kesehatan	Dinas Kesehatan	63,462	SB	31,54
4	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Masih rendahnya Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	kesehatan, PPKB	DPPKBP3A	32,293	SB	33,71
<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									
5	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Belum optimalnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah (masih 3 Nagari)	Meningkat menjadi 39 daerah (Nagari = 52 Nagari)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD	3	SB	49,00
6	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum tersedianya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD	0	SB	Belum ada
7	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang masih meningkat setiap tahunnya	Menurun	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan	BPBD	0,40	SB	Masih meningkat

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Isu Prioritas TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	JENIS URUSAN	OPD	2019	Capaian	GAP
					masyarakat				
8	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk daerah Dharmasraya masih belum terjadi penurunan menuju target 30%	Menurun menjadi 30%	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD	143,2	SB	113,20
9	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum tersedianya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD	0	SB	Belum ada
10	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum tersedianya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD	0	SB	Belum ada
11	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang masih meningkat setiap tahunnya	Menurun	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	BPBD	0,40	SB	Masih meningkat
		<b>PEKERJAAN UMUM</b>							
12	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak masih 58% dari target 100%.	Meningkat menjadi 100%	pekerjaan umum & penataan ruang	DPUPR	58,62%	SB	99,41
13	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri masih rendah	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	pekerjaan umum & penataan ruang	DPUPR	86,88	SB	31,72

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Isu Prioritas TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	JENIS URUSAN	OPD	2019	Capaian	GAP
14	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mencapai 100%	Meningkat menjadi 100%	pekerjaan umum & penataan ruang	Dinas Perkim	86,88%	SB	99,13
		<b>PENDIDIKAN</b>							
15	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Belum adanya daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	pendidikan	Disdikbud	0	SB	Belum ada
16	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Masih berfluktuasinya Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	pendidikan	Disdikbud	118,619	SB	Masih berfluktuasi
17	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat belum mencapai 114,09%.	Meningkat menjadi 114,09%	pendidikan	Disdikbud	106,94	SB	7,15
18	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat masih belum mencapai 106,94%.	Meningkat menjadi 106,94%	pendidikan	Disdikbud	103,3	SB	3,64
19	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun belum mencapai 8,8 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	pendidikan	Disdikbud	8,46	SB	0,34
20	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum mencapai 77,2%.	Meningkat menjadi 77,2%	pendidikan	Disdikbud	43,94	SB	33,26

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	Isu Prioritas TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	JENIS URUSAN	OPD	2019	Capaian	GAP
21	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	masih berfluktuasinya Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	pendidikan	Disdikbud	0,97	SB	Masih berfluktuasi
22	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun masih belum mencapai 96,1%.	Meningkat menjadi 96,1%	pendidikan	Disdikbud	90,34	SB	5,76
23	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Masih terjadi fluktuasi Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	pendidikan	Disdikbud	74,72	SB	Terjadi penurunan
<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>									
24	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	masih rendahnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	perumahan rakyat & kawasan permukiman	Dinas Perkim	68,11	SB	Masih rendah
<b>SOSIAL</b>									
25	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Masih rendahnya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	sosial	Dinas Sosial	2,02	SB	15,10
26	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	sosial, trantiblinmas	Dinas Sosial	3069	SB	Belum optimal
27	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Belum adanya pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	sosial	Dinas Sosial	0	SB	Belum ada

Lampiran 5.5. Hasil Perumusan Skenario Arah Kebijakan dan Indikasi Program untuk Target Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021- 2021

1. Bagian Adm Pembangunan

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Memberikan apresiasi bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui e procurement	1. Peningkatan sarana dan prasarana system e-produrement untuk pengadaan barang dan jasa 2. Peningkatan kapasitas SDM pengguna system e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa 3. Peningkatan system aplikasi (software) e-procurement 4. Peningkatan akses layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa	Program pengadaan barang dan jasa	Meningkat menjadi 80%	70,51%	72%	73%	74%	76%	78%	80%	500.000.000	APBD
2	17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk	Mengidentifikasi potensi-potensi kegiatan yang dapat dilaksanakan	1. Pemetaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui	Program Perekonomian dan Pembangunan	Ada	0	0	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	dengan skema KPBU	2. Identifikasi Badan Usaha yang memiliki potensi untuk dapat dikerjasamakan 3. Penyusunan regulasi dalam mendukung program KPBU											
3	17.17.1.(b) Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Meningkatkan alokasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan KPBU	Penentuan volume dan alokasi kegiatan KPBU yang proporsional	Program Perekonomian dan Pembangunan	Ada	0	0	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD

## 2. Bagian Organisasi

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Memberikan apresiasi bagi unit layanan publik yang mematuhi standar pelayanan publik.	1. Pemberian penghargaan bagi unit layanan publik yang mematuhi standar pelayanan publik 2. Pemberian insentif bagi unit layanan publik yang memperoleh nilai terbaik dalam kepatuhan standar pelayanan publik 3. Pemberian tambahan anggaran bagi perangkat daerah yang telah mematuhi standar pelayanan publik	Program Penataan Organisasi	100%	80%	82	85	90	92	95	100	400.000.000	APBD
Capaian: NA(Tidak Ada Data)														
1	16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan RB	1. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan entri data dalam aplikasi RB 2. Peningkatan kapasitas personil dalam pelaksanaan evaluasi RB 3. Pengembangan	Program Administrasi Umum	50	50	55	60	65	70	75	80	200.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kabupaten/Kota).		kapasitas personil dalam penyampaian informasi terkait indeks reformasi birokrasi ke dalam aplikasi RB Kemepanrb											

### 3. Bagian Perekonomian dan SDA

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatkan jangkauan pelayanan listrik khususnya untuk MBR	1. Pelaksanaan pendataan MBR yang terverifikasi dan tervalidasi 2. Peningkatan pelaksanaan program listrik subsidi 3. Pemetaan daerah yang berpotensi untuk Pengembangan energi terbarukan (PLTMH dan Solar Cell).	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkat menjadi 100%	61%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PLN/BUMN, SWASTA

#### 4. Bappedda

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.	1. Meningkatkan nilai tambah pada sektor pertanian melalui pemasaran hasil produksi, pengolahan pasca panen dan mendorong sektor turunan seperti industri dan UMKM  2. Mendorong nilai tambah sektor yang memberi kontribusi dominan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas petani guna meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui sekolah lapang dan pelatihan teknis</li><li>• Memberikan bantuan alat/teknologi pertanian teknologi tepat guna dan infrastruktur pertanian</li><li>• Mendorong kuantitas dan kualitas pasca panen guna mendorong nilai tambah petani</li><li>• Mendorong IKM yang bisa mengolah hasil</li></ul>	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Program Penyuluhan Pertanian 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional  1. Program	Meningkat	4,98%	4,98%	5.00%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%	500.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			pertanian lokal • Peningkatan ruang lebih besar UMKM untuk pemasaran yang lebih besar	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)										



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				7. Program Pengembangan Ukm										
2	8.1.1.(a) PDB per kapita.	idem	idem	idem	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		Meningk at	Mening kat	Mening kat	Mening kat	Mening kat	Mening kat	-	APBD
<b>Capaian: NA(Tidak Ada Data)</b>														
3	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan  Mengembangkan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas dan validitas data kemiskinan,</li> <li>Pengembangan akses permodalan usaha bagi penduduk miskin.</li> </ul>	Program perlindungan dan jaminan sosial  1. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam 2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 3. Program pengembangan UMKM 4. fasilitasi bantuan	Meningkat	NA	Meningk at	Mening kat	Mening kat	Mening kat	Mening kat	Mening kat	500.000.00 0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan infrastruktur bagi peningkatan produktivitas masyarakat miskin</li><li>• Pengembangan beasiswa pendidikan bagi Keluarga miskin</li><li>• Pengembangan pola pembayaran upah buruh tani</li><li>• Peningkatan</li></ul>	<p>modal kerja bagi KK miskin oleh Baznas</p> <p>1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>1. Program Pengelolaan Pendidikan (untuk SD dan SMP) yang dilakukan melalui belanja bansos</p> <p>2. Fasilitas Penyaluran beasiswa oleh Baznas</p> <p>1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</p> <p>2. Program</p>										

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			kualitas Penjaminan pelayanan kesehatan bagi KK miskin	penyuluhan pertanian 3. program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.										
4	9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Optimalisasi pelaksanaan urusan kelitbangan dan inovasi pada instansi pemerintah daerah guna peningkatan efektivitas dan percepatan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan jangkauan informasi hasil-hasil riset</li> <li>• Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian</li> <li>• Peningkatan dukungan penelitian dan inovasi yang ditujukan untuk percepatan pelaksanaan urusan pemerintahan pada perangkat</li> </ul>	Program Penelitian dan pengembangan daerah	Meningkat	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	200.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			daerah											
5	10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkatkan capaian elemen nagari mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan pendukung ekonomi pada desa tertinggal</li> <li>Peningkatan kerjasama pembangunan antar nagari</li> </ul>	1. program penyelenggaraa n jalan 2. program pengelolaan sumber daya air (sda) 3. program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 4. Program pengelolaan pendidikan 5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 6. Program peningkatan kerjasama desa	Meningkat	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	100.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6	17.18.1.(d) Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.			-	Meningkat	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	-	APBD,

## 5. BKD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	1. Meningkatkan pendapatan daerah  2. Meningkatkan optimalisasi penerimaan	1. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PDRD) 2. Peningkatan tatakelola PDRD 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung PDRD  1. Peningkatan tata kelola pelaporan kinerja pemerintah daerah	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Program Penyuluhan Pertanian	Meningkat	NA	Menin gkat	Menin gkat	Meni ngka t	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	150.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		daerah dari dana transfer		4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 5. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 6. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 8. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 9. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 10. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan										

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Koperasi 11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) 12. Program Pengembangan Ukm										
2	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	1. Meningkatkan pendapatan daerah	1. Peningkatan intensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah (PDRD) 2. Peningkatan tatakelola PDRD 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung PDRD	idem	Di atas 12%	NA	10%	11%	12%	13%	14%	15%	150.000.0 00	APBD
3	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Melakukan pendekatan anggaran dengan rencana strategis dan rencana kerja tahunan pemerintah	1. Penyusunan KUA dan PPAS sesuai Renstra dan RKPD Pemda; 2. Penyusunan anggaran kas dan time schedule pelaksanaan		Meningkat	91,77%	92.0%	92.5%	93%	93.5%	94.0%	94.5%	300.000.0 00	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			pekerjaan yang lebih rasional; 3. Percepatan dan optimalisasi serapan belanja dengan tetap menjaga kualitas hasil.											
4	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	1. Meningkatkan pajak daerah	1. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (PDRD) 2. Peningkatan tatakelola PDRD 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung PDRD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Meningkat	8,85%	8,85%	8,85%	9,0%	9,2%	9,4%	9,5%	250.000.000	APBD

## 6. BPBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	1.5.1.(a) Jumlah lokasi	Meningkatkan pencegahan dan	1. Peningkatan system dasar	Program Penanggulangan	Meningkat menjadi 39	3	40	42	44	46	48	52	570.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	mitigasi bencana terhadap warga Negara yang berada di daerah rawan bencana	penanggulangan bencana daerah (termasuk peningkatan koordinasi antar sektor) 2. Peningkatan kapasitas satgas dalam penanggulangan bencana 3. Pengembangan basis data penanggulangan bencana 4. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan warga Negara yang berada pada daerah rawan bencana 5. Peningkatan infrastruktur ramah lingkungan yang berfungsi mencegah dan mengurangi dampak bencana	Bencana Daerah 1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	daerah (Nagari = 52 Nagari)									

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mengembangkan basis data spasial kebencanaan	1. Pengembangan dokumen KRB, RPB, dan dokumen rencana kontigensi 2. Peningkatan koordinasi antar sektor menuju pengembangan infrastruktur tangguh bencana 3. Pengembangan regulasi menuju terwujudnya bangunan tangguh bencana 4. Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur kebencanaan	Program Penanggulangan Bencana Daerah 1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Ada	0	-	1	1	1	1	1	570.000.000	APBD
3	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	Mengembangkan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana	1. Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 2. Peningkatkan kemampuan	Program Penanggulangan Bencana Daerah 1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota	Menurun	3.119	3.000	2.700	2.500	2.300	2.000	1.800	875.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	orang.		daerah dalam penanggulangan dan penurunan resiko bencana 3. Peningkatkan kerjasama dalam penanggulangan bencana	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
4	11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunkan tingkat resiko bencana	1. Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana 2. Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana 3. Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah 1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/ Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Menurun menjadi 30%	143,2	140	135	130	125	120	115	200.000.000	APBD
5	11.b.2*	Mengembangkan	1. Peningkatan	Program	Ada	0	0	1	1	1	1	1	570.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	sistem pengurangan resiko bencana	<p>pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>2. Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana</p> <p>3. Pengembangan dan pemberdayaan komunitas yang sadar dan peduli bencana</p> <p>4. Peningkatan infrastruktur berbasis mitigasi bencana</p>	<p>Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>										
6	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Mengembangkan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim	<p>1. Pengembangan infrastruktur berbasis mitigasi bencana</p> <p>2. Pengembangan manajemen cakupan wilayah kawasan rawan bencana</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>2. Pelayanan Penyelamatan dan</p>	Ada	0	0	1	1	1	1	1	570.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Evakuasi Korban Bencana 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
7	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menekan jumlah korban bencana yang diakibatkan perubahan iklim	1. Pengembangan infrastruktur bangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim 2. Peningkatan partisipasi publik dalam mitigasi perubahan iklim. 3. Peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang diakibatkan perubahan iklim. 4. Peningkatan koordinasi lintas sektor	Program Penanggulangan Bencana Daerah 1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Menurun	3.119	3.000	2.700	2.500	2.300	2.000	1.800	875.000.000	APBD
<b>Capaian: NA(Tidak Ada Data)</b>														
8	1.5.1.(e) Indeks risiko	Meningkatkan kapasitas	1. Optimalisasi penataan ruang	Program Penanggulangan	Menurun menjadi	NA	115	113	110	108	105	102	200.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	pengendalian dampak bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi	<p>(pada pusat-pusat pertumbuhan)</p> <p>2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana</p> <p>3. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana</p> <p>4. Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana</p> <p>5. Pengembangan regulasi penurunan risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan berisiko tinggi</p> <p>6. Peningkatan sarana</p>	<p>Bencana Daerah</p> <p>1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana</p> <p>2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>	118,6									

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			prasarana pendukung penanggulangan bencana											
9	1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi bencana	1. Peningkatan ketahanan sosial ekonomi dan budaya dalam menghadapi bencana 2. Peningkatan sarana prasarana untuk pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat 3. Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana 4. Pengembangan system penyediaan pangan cadangan pasca bencana.	Program Penanggulangan Bencana Daerah 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Menurun	NA	0	25 jt	20 jt	15 jt	10 jt	5 jt	300.000.000	APB
10	11.5.2.(a)	Mengembangkan	1. Peningkatan	Program	Menurun	NA	0	25 jt	20 jt	15 jt	10 jt	5 jt	-	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	kapasitas dan kapabilitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan dampak bencana.	partisipasi masyarakat lokal dalam penanggulangan dampak bencana. 2. Pengembangan infrastruktur 3. Peningkatan kapasitas pemulihan sarana prasarana fasilitas public 4. Peningkatan kerjasama antar mitra dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana Daerah 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										

## 7. BPS

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	8.2.1* Laju pertumbuhan	Meningkatkan laju Pertumbuhan PDB	Peningkatkan laju Pertumbuhan PDB		Meningkat	2,19%	2,25%	2,30%	2,35%	2,40%	2,45%	2,50%	100.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	rill terhadap peningkatan tenaga kerja	rill											
2	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkatkan lapangan kerja sektor pertanian	Pengembangan lapangan usaha sektor pertanian berdasarkan gender		Meningkat	90,3%	90,5%	91%	92%	93%	94%	95%	100.000.000	APBD, APBN
3	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri Pemanufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Mengembangkan industri hilir	Peningkatkan nilai tambah industri manufaktur		Meningkat	6,32%	6,4%	6,5%	6,75%	7,0%	7,25%	7.5%	150.000.000	APBD, APBN
4	17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkatkan sistem pelayanan data dan informasi yang tervalidasi	Peningkatan pelayanan data dan informasi bagi masyarakat		Meningkat	82,86%	83%	85%	87,5%	90%	92,5%	95%	150.000.000	APBN
5	17.18.1.(c) Jumlah metadata	Mengembangkan metadata pada	Pengembangan Sistem data dan		Meningkat	6 instansi	6 instan	7 instan	8 instan	9 instansi	10 instans	11 instans	250.000.000	APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	lingkup sektoral dan khusus	Informasi				si	si	si		i	i		

## 8. Dinas Kesehatan

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatkan sistem pendataan kependudukan	1. Peningkatan kualitas SDM pendataan kependudukan  2. Peningkatan verifikasi dan validasi data	1. Program perlindungan dan jaminan social (social)  2. 1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Meningkat menjadi 95%	100	100	100	100	100	100	60.000.000	APBD	

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				masyarakat (dinkes)										
2	3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1. Meningkatkan layanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan	1. Peningkatan koordinasi dengan jaring dan jejaring 2. Peningkatan sistem rujukan 3. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan 4. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan 5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang persalinan di Faskes	1. 1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. 1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan	Meningkat menjadi 95%	9,65%	70	75	79	85	90	95	1.000.000.000,-	DAK
		Meningkatkan system pendataan sasaran	1. Peningkatan verifikasi dan validasi data 2. Pengembangan sarana prasarana pendukung sistem pendataan											
3	3.2.1* Angka Kematian	1. Meningkatkan layanan	1. Peningkatkan kompetensi	1. 1.02.02 Program pemenuhan	Menurun	14,37%	10.6	10	9.6	9	8.6	8	59.000.000,-	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	kesehatan pada balita   <												

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			TOMA 3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat imunisasi 4. Peningkatan promosi Kesehatan melalui sosial media	kesehatan masyarakat 2. 1.02.03 Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan										
5	3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	1. Meningkatkan sistem pencatatan	1. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan instansi terkait 2. Peningkatan SDM 3. Pengembangan prasarana pendukung 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 5. Peningkatan sistem pencatatan kependudukan di tingkat nagari	1.02.05 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Menurun  (0,71 per seratus ribu pddk)	0,25%	0,25%	0,25%	0,20%	0,20%	0,15%	0,1%	27.000.000,-	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		2. Meningkatkan kepedulian sosial	1. Peningkatan kualitas keagamaan masyarakat 2. Peningkatan kualitas hubungan kemasyarakatan											
6	3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan	1. Peningkatan sosialisasi tentang asuransi kesehatan di masyarakat 2. Pengembangan insentif untuk nagari dengan cakupan 100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)  1.02.02. Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (dinkes)	Meningkat	11,18%	75	80	100	100	100	100	20.000.000.000	APBD
7	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan cakupan JKN (Total Corporate)	1. Penguatan regulasi 2. Peningkatan pengawasan 3. Peningkatan pembiayaan dari pemerintah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial)  1.02.02. Program Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Meningkat menjadi minimal 95%	49,48%	75	80	100	100	100	100	85.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				masyarakat (dinkes)										
8	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatkan cakupan nagari STBM	1. Peningkatkan PHBS di masyarakat 2. Peningkatan akses masyarakat memanfaatkan air bersih 3. Peningkatan percepatan Universal Akses terhadap jamban sehat, atau pencapaian status Oven Defecation Free (ODF) 4. Peningkatan sarana prasarana Penguatan kelembagaan TBM	1.02.02 Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat  1.02.05 Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional) (DHARMA SRAJA 11 kecamatan 52 desa/nagari)	52	55	60	65	70	80	90	85.000.000,-	DAK
<b>Capaian : NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)</b>														
9	1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49	Meningkatkan layanan pada ibu hamil dan ibu melahirkan bagi masyarakat miskin	1. Peningkatan akses pelayanan dan dukungan persalinan bagi masyarakat	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan	Meningkat menjadi 70%	NA	60	62,5	65	67,5	70	70	97.500.000,-	DAK

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		miskin 2. Peningkatan verifikasi dan validasi data 3. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	upaya kesehatan masyarakat Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan										
10	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Meningkatkan kualitas hidup remaja	1. Peningkatan Sosialisasi tentang bahaya merokok dan pandangan agama terhadap kebiasaan merokok di sekolah dan masyarakat 2. Penguatan peran keluarga dalam mencegah perokok pada anak dan remaja 3. Penguatan implementasi dan pengawasan PERDA rokok 4. Pengembangan regulasi tentang rokok di sekolah 5. Pengembangan	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan	Menurun menjadi 5,4%	NA	10%	9%	8%	7%	6%	5%	67.000.000,-	DAK

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			sarana prasarana pendukung 6. Pemberian reward dan punisment pada nagari dan komunitas remaja dalam penegakan PERDA rokok 7. Pengembangan komunitas remaja anti rokok 8. Peningkatan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan											
11	3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Meningkatkan kualitas hubungan sosial di kalangan remaja	1. Pengawasan tempat – tempat peredaran alkohol di masyarakat 2. Pengembangan regulasi bahaya mengkonsumsi alkohol 3. Kerjasama dengan pihak sekolah dalam penanganan siswa pencandu alkohol	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Menurun	NA	20	15	10	7,5	5	2,5	36.000.000,-	DAK

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4. Peningkatan apresiasi dan insentif pada komunitas remaja yang tidak mengkonsumsi alkohol 5. Pengembangan komunitas remaja anti alkohol											
12	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatkan kualitas kesehatan remaja dan dewasa	1. Peningkatan Sosialisasi tentang bahaya rokok ke masyarakat 2. Penguatan implementasi dan pengawasan PERDA rokok 3. Pengembangan sarana prasarana pendukung 4. Pemberian reward dan punishment pada nagari dan komunitas dalam penegakan PERDA rokok 5. Pengembangan	1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Menurun	NA	35	30	25	20	10	5	55.000.000,-	DAK

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			komunitas anti rokok											
13	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Pemicuan dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkat	NA	30	40	50	60	70	80	Kegiatan Di PUPR	APBD,

## 9. Dinas Kominfo

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	16.10.2.(c)  Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan dokumentasi publik	1. Peningkatan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan transparansi informasi publik 2. Penguatan kelembagaan PPID 3. Peningkatan kualitas	Program informasi dan komunikasi publik	Meningkat	0	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngka t	Meni ngkat	Menin gkat	150.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		jangkauan informasi dokumentasi daerah											
<b>Capaian: NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)</b>														
2	4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) remaja dan dewasa	1. Peningkatan kualitas SDM remaja dan dewasa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 2. Pengembangan infrastruktur TIK untuk masyarakat 3. Penyediaan sarana dan prasarana TIK di area publik 4. Optimalisasi kerjasama dengan provider	Program informasi dan komunikasi publik  Program aplikasi informatika	Meningkat	NA	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngka t	Meni ngkat	Menin gkat	150.000.0 00	APBD
3	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Memperkuat akses informasi dan komunikasi menuju kesetaraan gender	1. Penyetaraan kesempatan penggunaan akses pada sistem informasi 2. Pengembangan regulasi menuju kesetaraan gender	Program aplikasi informatika	Meningkat	NA	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngka t	Meni ngkat	Menin gkat	150.000.0 00	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4	17.6.2.(b) Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	1. Mendorong pemasangan jaringan pitalebar 2. Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan fixed broadband 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan <i>fixed broadband</i>	1. Peningkatan fasilitasi untuk pengembangan jaringan pitalebar 2. Peningkatan jumlah penduduk pengguna internet 3. Pengembangan pemahaman masyarakat terhadap arti penting TIK	Program aplikasi informatika	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	NA	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngka t	Meni ngkat	Menin gkat	150.000.0 00	APBD, APBN
5	17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Mendorong peningkatan pelayanan mobile broadband agar dapat terkoneksi ke jaringan internet	1. Penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara cepat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Program aplikasi informatika	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	NA	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngkat	Meni ngka t	Meni ngkat	Menin gkat	-	APBD, APBN, SWASTA

## 10. Dinas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Meningkatkan penataan penggunaan air untuk lahan pertanian/ perkebunan dan industri	1. Pengembangan regulasi penataan penggunaan air, <i>Cleaner production</i> bagi industri, dan regulasi menuju penerapan <i>polluter must pay principle</i> 2. Peningkatan infrastruktur penataan penggunaan air 3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kelompok pengguna air 4. Penguatan kelembagaan kelompok pengguna air 5. Pengembangan kerjasama	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	ada	0	0	0	1	1	1	1	100.000.000	APBD, APBN, SWASTA

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			pemanfaatan air berbasis jasa ekosistem 6. Peningkatan pemanfaatan limbah agro industri. 7. Peningkatan kapasitas aparat pengelola sumber daya air.											
2	6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai	1. Peningkatan kepedulian masyarakat pada lokasi tangkapan sungai 2. Pengembangan regulasi terkait daerah tangkapan sungai 3. Peningkatan pelestarian daerah tangkapan sungai 4. Pengembangan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	10 WS (skala nasional)	1 (Batang Hari)	1	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			kerjasama pengelolaan daerah tangkapan sungai berbasis jasa ekosistem dengan daerah tetangga 5. Pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai 6. Sinkronisasi pengembangan pemeliharaan daerah tangkapan air. 7. Pengembangan Kerjasama pengelolaan daerah tangkapan sungai dengan instansi vertikal.											

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3	6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Mengembangkan koordinasi dengan Lembaga-lembaga pengelola sumber daya air	1. Pengembangan basis Kerjasama dalam penataan kelembagaan sumber daya air 2. Pengembangan forum pengelolaan Sungai Batanghari	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.	ada	0	0	1	1	1	1	1	200.000.000	APBD, APBN
4	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatkan pengelolaan sampah	1. Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan sampah 2. Peningkatan	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penghargaan Lingkungan	Meningkat menjadi 80%	6,7	73	73	74	76	76,5	77	3.6 Miliar	APBD, APBN



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			sarana prasarana pengelolaan sampah 3. Pengembangan dan peningkatan pengetahuan pengelolaan sampah berbasis 3R 4. Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam pengelolaan sampah 5. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan sampah 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan	Hidup Untuk Masyarakat 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			7. sampah Pengembangan regulasi dalam pengelolaan sampah 8. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis <i>sircular economy.</i> 9. Pengembangan kapasitas pengelolaan sampah spesifik 10. Pengembangan Kerjasama menuju waste energy 11. Pengembangan regulasi pengurangan sampah dari sumber											
5	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan	Meningkakan pengelolaan limbah B3 dan proporsi	1. Pengembangan regulasi pengelolaan	1. Program Pengendalian Bahan	Meningkat menjadi 150 juta ton	8.613	10.00 0	12.00 0	12.00 0	1300 0	14.00 0	15.00 0	150.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	limbah B3 yang diolah sesuai peraturan	limbah B3 dan Proporsi limbah B3 2. Penguatan pentaatan perizinan pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3 3. Pengembangan kerjasama dengan mitra dalam penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 4. Peningkatan SDM pengelolaan limbah B3 dan proporsi limbah B3 5. Peningkatan infrastruktur pengelolaan limbah B3 dan Proporsi limbah	Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	(skala nasional)									

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			6. B3 Pengembangan regulasi menuju penerapan <i>polluter must pay principle</i>											
6	12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatkan tanggungjawab penghasil sampah dalam pengelolaan sampah	1. Pengembangan regulasi pengelolaan sampah untuk penghasil sampah (Perda 9/2015, Perbub jakstrada) 2. Pengembangan punishment dan reward bagi penghasil sampah 3. Peningkatkan Kerjasama dengan penghasil sampah dalam pengelolaan persampahan 4. Peningkatan advokasi	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20 ton per hari (skala nasional)	6.217,4 (Perlu ditetapkan target lokal Dharmasr aya)	10.00 0	12.00 0	13.00 0	14.00 0	15.00 0	16.00 0	451.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			penggunaan produk atau bahan baku ramah lingkungan oleh penghasil sampah 5. Peningkatan intensitas implementasi regulasi											
7	12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Mengembangkan dukungan menuju penerapan standar sertifikasi lingkungan.	1. Peningkatan edukasi kepada pelaku agroindustry dalam penerapan sertifikasi ISO 14001 2. Pengembangan insentif dan reward 3. Pengembangan regulasi untuk akselerasi sertifikasi (ISO, ISPO, RSPO dan lainnya)	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 3. Program Pengendalian	Meningkat	1	1	1	1	1	1	1	150.000.000	APBD, SWASTA

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 4. Program Pengelolaan Persampahan										
8	12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkatkan pemahaman stakeholder terkait	1. Pengembangan Regulasi terkait Pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan 2. Peningkatan koordinasi dan pemahaman stakeholder terkait dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ramah lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup	Meningkat	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			3. Peningkatan dukungan menuju terwujudnya UMKM yang memproduksi produk ramah lingkungan											
9	12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkatkan infrastruktur publik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	1. Penyediaan konten-konten edukasi, apresiasi dan efisiensi pengelolaan SDA serta inovasi pengelolaan sampah 2. Peningkatan sarana dan prasarana akses pendukung penduduk 3. Pengembangan Kompetisi dan reward konten creator berbasis lingkungan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkat	0	0	0	1	1	1	1	500.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4. Pengembangan infrastruktur ramah lingkungan (jalur pejalan kaki dan sepeda). 5. Pengembangan SOP menuju infrastruktur ramah lingkungan											
10	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Mengembangkan koordinasi lintas sektor	1. Pengembangan Kerjasama pengelolaan hutan berbasis jasa ekosistem 2. Penguatan implementasi Regulasi perlindungan terhadap Tutupan Hutan 3. Penguatan Lembaga Masyarakat dalam Perlindungan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	Meningkat	21,97%	21,97 %	21,97 %	21,97 %	21,97 %	21,97 %	21,97 %	200.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4. Hutan Pengembangan SDM Lembaga/ Kelompok Masyarakat Peduli Hutan 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Konservasi Lahan 6. Pengembangan pengelolaan hutan kota	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
11	15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Mengembangkan pemulihan lahan kritis akses terbuka	1. Peningkatan partisipasi publik dalam pemanfaatan lahan akses terbuka berbasis kerjasama 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Restorasi lahan kritis	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (Kehati) 3. Program	5,5 juta ha (skala nasional)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	2.500.000.00 0	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			3. Peningkatan kerja sama multistakeholder dalam pemulihan lahan kritis 4. Pengembangan tata kelola pemanfaatan lahan kritis 5. Peningkatan inovasi dan pemasaran produk hasil restorasi	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
12	15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Mengembangkan sistem penjaminan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) masyarakat lokal	1. Pengembangan basis data hak kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal 2. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam pengembangan system penjaminan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	ada	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Hak Kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal 3. Peningkatan sarana prasarana dalam pengembangan system penjaminan Hak Kekayaan intelektual (HAKI) masyarakat lokal Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses manfaat Kerjasama dalam rangka REDD + dan mekanisme imbal jasa lingkungan											

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			lainnya.											
13	15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Mengembangkan koordinasi lintas sektor menuju pemanfaatan kehati berkelanjutan	1. Pengembangan sistem informasi Kehati 2. Peningkatan Koordinasi dalam penyediaan data kehati Pengembangan <i>mascot</i> daerah berbasis kehati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkat	0	0	0	1	0	0	1	100.000.000	APBD

## 11. Dinas Pangan

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Capaian: NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)															
1	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan	1.Meningkatkan ketersediaan Pangan	1. Penjaminan ketersediaan dan stock pangan 2. Pengembangan SDM petugas /	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Menurun	NA (Kabupaten) 5,12 (Nasional)	Menurun  -	Menurun  140.000.0 00	Menurun  145.000.0 00	Menurun  180.000.0 00	Menurun  200.000.0 00	Menurun  200.000.0 00	865.000.00 0	APBD, APBN	



[illegible]

			dalam penganekaroma n konsumsi pangan 4. Pengembangan SDM petugas Analisis pangan Peningkatan Pangan aman											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 12. Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberanga n.	Mengembangk an Sistem Transportasi Terintegrasi.	1. Penguatan Regulasi, Institusi, Teknologi dan Sumber Daya Manusia 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana transportasi Terintegrasi 3. Pengembangan Pelabuhan Sungai sesuai dengan Amanat Kawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li><li>• Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li><li>• Program Pengelolaan Penerbangan</li></ul>	Meningkat	2 Dermaga	2	2	2	2	2	2	2.591.122.000	APBN dan APBD
						0 Jalan Tol	0	1	0	0	0	0	20.000.000.00 0	APBN
						0 Bandara	0	0	0	1	0	0	40.000.000.00 0	APBN dan APBD
						0 Jalur KA	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Pariwisata Strategis 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik. 5. Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Dalam Penyelenggara an transportasi											

### 13. Dinas Perkim

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatkan kepedulian dan partisipassi parapihak dan masyarakat dalam pengembangan sanitasi layak	1. Pengembangan basis data untuk penyediaan sanitasi yang layak  2. Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkat menjadi 100%	87,28%	87,5%	90%	92,5%	95%	97,5%	100%	1.000.000.0 00	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			3. Pengembangan kapasitas kelompok untuk pengelola sanitasi komunal 4. Pengembangan pemanfaatan sistem pengolahan air limbah setempat dan terpusat 5. Pengembangan kerjasama dengan tokoh masyarakat lokal / pemangku adat/ ulama dalam upaya merubah perilaku masyarakat. 6. Peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi											

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
2	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Mengembangk n tatakelola menuju pengelolaan lumpur tinja optimal	1. Peningkatan jumlah lumpur tinja yang masuk dan dikelola IPLT 2. Peningkatan regulasi pengelolaan limbah tinja 3. Peningkatan infrastruktur IPLT 4. Pengembangan kerjasama pengangkutan lumpur tinja ke IPLT dengan pihak ketiga (swasta) 5. Pengembangan lembaga pengelola layanan lumpur tinja 6. Pengembangan insentif pengelolaan lumpur tinja	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Meningkat menjadi 409 kabupaten/ kota	1	1	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD, APBN
3	11.1.1.(a) Proporsi rumah	Meningkatkan dukungan bagi	1. Peningkatan kerjasama	1. Program pengembang	3,7 juta rumah	79,37%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	1.000.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	ketersediaan rumah layak huni serta PSU yang layak	penyediaan rumah layak huni 2. Pengembangan basis data untuk penyediaan hunian layak 3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang urgensi rumah layak huni	an perumahan 2. Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh 3. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	tangga									
<b>Capaian : NA (belum dilakukan atau tidak ada data)</b>														
4	1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatkan Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) air minum	1. Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air minum yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat (pemangku adat, nigari) dan OPD terkait dalam	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Meningkat menjadi 100%	NA	70%	75%	80%	85%	90%	95%	1.000.000.000	APBD, APBN



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			menjaga keberlangsungan sumber air. 3. Pengembangan regulasi dalam menjaga K3 sumber daya air. 4. Peningkatan infrastruktur penyediaan air minum											
5	1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Mengembangkan dukungan untuk ketersediaan sanitasi yang layak	1. Pengembangan basis data untuk penyediaan sanitasi yang layak 2. Penyediaan sanitasi berbasis masyarakat 3. Pembentukan kelompok pengguna pengelola sanitasi komunal 4. Pengembangan pemanfaatan sistem pengolahan air	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Meningkat menjadi 100%	NA	65%	67,5%	70%	75%	80%	85%	1.000.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			limbah setempat dan terpusat 5. Peningkatan partisipasi masyarakat											
6	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Mengembangk n sarana prasarana (infrastruktur) pengelolaan limpur tinja yang aman dan berkelanjutan	1. Pengembangan regulasi pengelolaan limbah tinja 2. Peningkatan infrastruktur IPLT 3. Pengembangan kerjasama pengangkutan lumpur tinja ke IPLT. 4. Pengembangan lembaga pengelola layanan lumpur tinja	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Meningkat	NA	Meningk at	Mening kat	Meningk at	Meningk at	Meningk at	Meningk at	500.000.00 0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaar
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)														
1	2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkatkan diversifikasi produk pasca panen	1. Pengembangan Regulasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian Terhadap Tenaga Kerja di Sektor Pertanian. 2. Pengembangan kapasitas SDM pengolahan produk pertanian. 3. Pengembangan Infrastruktur pengeolahan hasil panen pertanian. 4. Peningkatan Kerjasama dengan mitra pada sektor Pertanian. 5. Pengembangan sistem pemasaran produk pasca	1. Program penyediaan dan pengembang an prasarana pertanian 2. Program penyediaan dan pengembang an sarana pertanian	Meningkat	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	1.000.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			panen. 6. Pengembangan pertanian berbasis wisata.											

#### 14. Dinas Sosial PPKBP3A

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatkan akses penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terhadap layanan publik	1. Pengembangan regulasi pelayanan publik yang inklusif 2. Peningkatan infrastruktur publik yang ramah disabilitas 3. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang miskin dan rentan 4. Pengembangan	<b>Program :</b> Rehabilitasi sosial <b>Sub Program:</b> Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Meningkat menjadi 17,12%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	3.683.059.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			teknologi pelayanan publik yang ramah bagi disabilitas 5. Peningkatan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas baik secara psikis maupun fisiologis.											
2	1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	1. Meningkatkan kualitas verifikasi dan validasi data DTKS sebagai syarat penerima bantuan tunai bersyarat/PKH	1. Peningkatan kemampuan petugas pendata DTKS 2. Pengembangan regulasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data (kaitkan dengan program pelayanan kesehatan, kriteria PKH) 3. Peningkatan sarana verifikasi	<b>Program:</b> perlindungan dan jaminan sosial <b>Sub Program :</b> Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurun menjadi 2,8 juta	4.502	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	8.620.037.750	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		2. Meningkatkan kemandirian keluarga penerima PKH	<p>dan validasi data</p> <p>4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam verifikasi dan validasi data</p> <p>1. Peningkatan kualitas pendampingan terhadap penerima PKH</p> <p>2. Peningkatan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam indikator program PKH Pengembangan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemandirian KPM.</p>											
3	1.5.1.(b) Pemenuhan	Mengembangkan tata kelola	1. Peningkatan kemampuan	<b>Program:</b> penanganan	Meningkat menjadi	17.024	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	4.185.950.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	kebutuhan dasar korban bencana sosial.	penanganan tanggap darurat dan kejadian luar biasa	petugas dalam penyediaan layanan tanggap bencana (tagana) 2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan tanggap bencana 3. Peningkatan koordinasi system layanan tanggap bencana 4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	bencana <b>Sub Program:</b> 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	151 ribu									
4	1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Mengembangkan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pendampingan psikososial	1. Peningkatkan kualitas SDM tenaga pendamping korban bencana sosial 2. Peningkatan sarana dan prasarana pendampingan	<b>Program:</b> Penanganan bencana <b>Sub Program:</b> Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkat menjadi 81,5 ribu	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	3.602.967.500	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			psikososial 3. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal (ada pelibatan guru BK, Alim Ulama, ninik mamak)											
5	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatkan keterlibatan PUS dalam ber-KB	1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap program KB 2. Peningkatan jumlah tenaga penyuluh KB di Kecamatan dan kader KB 3. Peningkatan akses terhadap layanan KB 4. Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja 5. Peningkatan sarana dan	<b>Program :</b> pembinaan keluarga berencana (kb) <b>Sub Program:</b> 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	Meningkat menjadi 66%	58%	60%	61%	63%	64%	65%	66%	3.542.697.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			prasarana pendukung pelayanan KB 6. Pengembangan kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 7. Pengembangan system insentif dan dis intensif terhadap peserta KB	(PKB/PLKB)										
6	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	1. Penguatan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan 2. Pengembangan regulasi berbasis gender 3. Peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik 4. Peningkatan kapasitas SDM perempuan	2 08 02 Pemberdayaan perempuan	bertambah sebanyak 16	2	1	1	1	1	1	1	958.054.520	APBD & DAK
7	5.3.1.(a)	1. Meningkatkan	1. Peningkatan	Program	Meningkat	20	20	20	20	20	20	20	2.810.5	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			masyarakat 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah human trafficking 8. Peningkatan kualitas system pelaporan indikasi praktek Human Trafficking.											
8	5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	1. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana	1. Peningkatan kualitas pelayanan KB 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB 3. Penguatan regulasi tentang program KB 4. Peningkatan Pengendalian pengelolaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Menurun menjadi 9,9%	10,28%	10,25 %	10,22 %	10,20 %	10,15 %	10,05 %	9,9%	5.500.589.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KB	1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang KB 2. Pengembangan system insentif dan disentif terhadap peserta KB 3. Peningkatan peran ninik mamak dan alim ulama											
9	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatkan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang program KB	1. Peningkatan kualitas dan frekuensi penyuluhan dan konseling KB 2. Pengembangan sarana edukasi penyuluhan KB 3. Pendampingan Peningkatan Partisipasi masyarakat melalui kampung KB 4. Pengembangan	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Meningkat menjadi 85%	58%	60,0%	62.5%	65,0%	67.5%	70%	75%	5.500.589.000	APBD & DAK



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			konseling pranikah.											
10	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Mengembangkan upaya peningkatan persepsi tentang kemampuan perempuan	1. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan 2. Peningkatan advokasi pada pengambil kebijakan tentang pengembangan karir perempuan 3. Peningkatan kesempatan pengembangan karir perempuan	5.04 pendidikan dan Pelatihan 5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.04.02.2.02.01 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Meningkat	8,33%	8,33%	8,33%	12.5%	12.5%	17%	17%	5.500.589.000	APBD & DAK
Capaian : NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)														
11	10.2.1* Proporsi penduduk	Meningkatkan kesejahteraan	1. Peningkatan koordinasi dan	1. Program pengarus	Menurun	NA	Menur	Menur	Menur	Menur	Menur	Menur	1.234.336.083	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	penduduk yang hidup di bawah 50 persen berdasarkan Kesetaraan Gender dan inklusif	regulasi ketersediaan data 2. Peningkatan penyediaan lapangan kerja berbasis gender dan inklusif 3. Peningkatan akses permodalan bagi disabilitas dalam pengembangan usaha 4. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan berdasarkan Kesetaraan Gender dan inklusif.	utamaan gender dan 2. Pemberdayaan perempuan Program peningkatan kualitas keluarga 3. Program pengelolaan sistem data 5Gender dan anak			un	un	un	un	un	un		
12	3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	Meningkatkan kualitas pengelolaan keluarga berencana	1. Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi sehat 2. Peningkatan	2 08 04 Program peningkatan kualitas keluarga 2 14 03 Program pembinaan keluarga	Menurun menjadi 38	NA	40	40	40	39	39	38	5.500.589.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Fertility Rate/ASFR).		koordinasi dan regulasi ketersediaan data berbasis gender 3. Pendewasaan usia kawin 4. Peningkatan pembangunan keluarga dan genre 5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait tentang kesehatan reproduksi 6. Peningkatan pengetahuan kelompok sasaran terhadap reproduksi sehat dan program KB.	berencana (kb)										
13	5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	Meningkatkan pengembangan perlindungan anak dan perempuan	1. Peningkatan edukasi pada kelompok sasaran tentang hak anak dan	1. 2 08 03 program perlindungan perempuan 2 08 07 program perlindungan	Menurun menjadi 38 tahun	NA	40	40	40	39	39	38	4.525.045.313	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Fertility Rate/ASFR).		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait</li> <li>3. Penguatan implementasi regulasi perlindungan anak dan perempuan</li> </ul>	husus anak										
14	5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Merevitalisasi kearifan lokal dalam pengembangan hubungan sosial dan keagamaan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kualitas pengetahuan masyarakat tentang kearifan lokal</li> <li>2. Peningkatan peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama</li> <li>3. Penguatan kelembagaan lokal</li> <li>4. Peningkatan kemampuan SDM</li> </ul>	2 14 03 Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Menurun	NA	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	5.500.589.000	APBD & DAK

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			penyelenggara program terkait											

#### 15. Dinas BUDPARPORA

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	meningkatkan kualitas destinasi dan pemasaran wisata serta usaha ekonomi kreatif	1.Peningkatan unsur 3 A (amenitas, atraksi dan aksesibilitas) dalam pengembangan destinasi wisata 2.Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi SDA dan sosial budaya 3.Peningkatan variasi promosi wisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li><li>• program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li><li>• program pemasaran pariwisata</li></ul>	Meningkat menjadi 8%	NA	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	600.000.00 0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			4. Pengembangan ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan program pengembangan SDM pariwisata dan ekraf</li> </ul>										
			5. Peningkatan kerjasama lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> </ul>										
2	8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.	meningkatkan kualitas promosi dan sistem pengelolaan pariwisata	1. Peningkatan unsur 3 A (amenitas, atraksi dan aksesibilitas) dalam pengembangan destinasi wisata 2. Pengembangan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> <li>program pemasaran</li> </ul>	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	0	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	600.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			pariwisata secara menyeluruh berbasis digital  3.Peningkatan kualitas <i>event</i> wisata  4.Peningkatan kerjasama <i>pentahelix</i>	pariwisata  • program pemasaran pariwisata  • program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata										
3	8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkatkan kualitas dan industri pariwisata yang inovatif	1.Peningkatan unsur 3 A (amenitas, dan atraksi dan aksesibilitas) dalam pengembangan destinasi wisata  2.Pengembangan pariwisata	• program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata  • program peningkatan	Meningkat	15.768	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500	300.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			berkelanjutan berbasis potensi SDA dan sosial budaya	daya tarik destinasi pariwisata										
			3.Peningkatan kerjasama lintas sektor dan <i>pentahelix</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> </ul>										
			4.Pemberdayaan masyarakat dan pelaku wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• program pengembangan SDM pariwisata dan ekraf</li> </ul>										
			5.Intensifikasi penerapan protocol kesehatan berbasis CHSE ( <i>cleanliness, healthy, safety dan environment</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> </ul>										
Capaian : NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)														

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
4	8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif serta mengoptimalkan peranan pemerintah dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Penetapan regulasi sesuai arah kebijakan untuk mengatur pendapatan dibidang pariwisata 2. Penguatan strategi pemasaran bidang pariwisata 3. Penguatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis 4. Pengembangan industry pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi 5. Mewujudkan kreativitas masyarakat dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• Program Pengembang an Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> </ul>	Meningkat	NA	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	600.000.00 0	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			berorientasi kepada pergerakan ekonomi 6. Mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi serta kebijakan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Membuka peluang investasi dan yang berdampak terhadap pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif											

## 16. Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Mengembangkan system Pendidikan layanan khusus	1. Pengembangan SDM untuk Pendidikan layanan khusus 2. Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana Pendidikan layanan khusus 3. Pengembangan model Pendidikan layanan khusus 4. Pengembangan regulasi Pendidikan layanan khusus 5. Peningkatan peran serta stakes holder dalam pengembangan Pendidikan layanan khusus.	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.  1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum.	Meningkat menjadi 450	0	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	500.000.00 0	APBD
2	4.1.1* Proporsi anak-anak	Meningkatkan kompetensi siswa	1. Peningkatan sarana prasarana	1.01.02. Program pengelolaan	Meningkat	0	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	500.000.00 0	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	terhadap literasi dan numerasi	penunjang pencapaian kompetensi minimum 2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan 3. Peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pencapaian standar kompetensi minimum 4. Pengembangan perpustakaan masyarakat.	Pendidikan.										
3	4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pendidikan	1. Penyediaan reward dan punishment bagi keluarga anak usia SD 2. Peningkatan peran serta	'2.01.02.Program pengelolaan Pendidikan. '2.01.02.1.01.03 s.d. 05.	Meningkat menjadi 114,09%	106,62	105,62	106,62	107,62	108,62	109,62	110,62	29 Miliar	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			masyarakat dalam menyediakan bantuan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu 3. Penguatan Kerjasama dengan Lembaga dan pihak swasta terkait 4. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang Pendidikan 5. Peningkatan muatan bahan ajar berbasis keagamaan dan muatan lokal. 6. Peningkatan akhlak pendidik dan tenaga kependidikan.											
4	4.1.1.(e) Angka Partisipasi	Meningkatkan akses dan kualitas	1. Peningkatan sarana dan	'2.01.02. Program pengelolaan	Meningkat menjadi	99,04%	100%	101%	100%	100%	100%	100%	11.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Pendidikan SMP/MTs/ sederajat.	prasarana SMP sesuai dengan standar kelayakan 2. Pengembangan transportasi untuk Pendidikan 3. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang pendidikan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyediakan bantuan Pendidikan bagi keluarga kurang mampu 5. Pengembangan muatan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat.	Pendidikan. '1.01.03 s.d. 05.	106,94%									
5	4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk	1. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran	1. Peningkatan kampanye atau sosialisasi	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.	Meningkat menjadi	8.2 tahun	8.3 tahun	8.4 tahun	8.5 tahun	8.6 tahun	8.7 tahun	8.8 tahun	100.000.00 0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	umur ≥15 tahun.	masyarakat tentang pentingnya Pendidikan	tentang Pendidikan 2. Pemberian beasiswa atau bantuan bagi siswa yang kurang mampu 3. Pengembangan SMK yang relevan 4. Penguatan program satu rumah satu sarjana.		8,8 tahun									
		Mendorong pengembangan dan peningkatan mutu perguruan tinggi di Dharmasraya	1. Pengembangan Kerjasama dengan PTN dan PTS. 2. Pengembangan kemudahan pendirian kampus.											
6	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatkan sistem pengelolaan dan kualitas PAUD	1. Penataan sarana dan prasarana PAUD sesuai dengan standar 2. Peningkatan	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan. 1.01.03 Program	Meningkat menjadi 77,2%	47,64	65,56	68,52	69,77	73,00	75,50	78,00	6.487.664.400	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			SDM 3. Pengembangan kurikulum PAUD (termasuk Pendidikan keagamaan) 4. Peningkatan peran nagari dalam pengembangan PAUD  <u>Note.</u> Memikirkan alternatif pengelolaan PAUD	Pengembangan Kurikulum.										
7	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	1. Meningkatkan kualitas Pendidikan dasar dan menengah	1. Peningkatan akreditasi sekolah dari SD, SMP, dan SMA 2. Peningkatan peran stakeholder dalam mendorong angka partisipasi sekolah 3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.	Meningkat	99,31	99,39	99,47	99,85	99,63	99,71	99,79	29,147,607,849	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	2. Meningkatkan akses ke perguruan tinggi	<p>pentingnya pendidikan dasar dan menengah</p> <p>4. Peningkatan kualitas administrasi pendidikan</p> <p>1. Pengembangan Kerjasama dengan PTN dan PTS</p> <p>2. Penguatan program satu rumah satu sarjana</p> <p>3. Peningkatan peran serta</p>											
8	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Mengembangkan Pendidikan keaksaraan fungsional	<p>1. Pengembangan Lembaga Pendidikan Non Formal</p> <p>2. Pengembangan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional</p> <p>3. Peningkatan dukungan</p>	<p>1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.</p> <p>1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	Meningkat menjadi 96,1%	93,42%	93,50 %	94,00 %	94,50 %	95,00 %	95,50 %	96,00 %	240.000.00 0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			penyelenggaraan Pendidikan keaksaraan fungsional.											
9	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkatkan kompetensi profesional Tenaga Pendidik	1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 2. Peningkatan Kesempatan Untuk memenuhi standar kompetensi professional 3. Pengembangan klinik menuju peningkatan akreditasi 4. Peningkatan koordinasi untuk mendorong peningkatan peluang akreditasi	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.  1.01.04. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkat	75,27%	75,50 %	75,75 %	76,0%	76,25 %	76,50 %	77,00 %	240.000.000	APBD
<b>Capaian: NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)</b>														
10	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara	Meningkatkan kesempatan untuk mengikuti program	1. Pengembangan Lembaga Pendidikan non	1.01.02. Program pengelolaan Pendidikan.	Meningkat	NA	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	Menin gkat	240.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendana an
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	paket A, paket B, dan paket C	2. Pengembangan Tenaga Pendidik Keaksaraan Fungsional Peningkatan infrastruktur Pendidikan keaksaraan											

## 17. Disdukcapil

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: NA (belum dilakukan atau tidak ada data)														
1	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatkan integrasi layanan kependudukan	1. Penguatan regulasi layanan kependudukan 2. Pendekatan akses layanan kependudukan 3. Peningkatan SDM dan Teknologi di nagari 4. Pengoptimalan	<b>Program</b> Pencatatan Sipil <b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pencatatan Sipil - <u>Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil</u> - Pelayanan	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4%	NA	60,0 0%	65,0 0%	70,0 0%	72,5 0%	75,0 0%	77,5 0%	300.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			5. pelayanan publik Pengembangan integrasi layanan kependudukan	secara aktif pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil.	pada tahun 2019									

#### 18. Disnaker

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatkan cakupan peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	1. Peningkatan sosialisasi dan pembinaan 2. Pengembangan regulasi tentang jaminan sosial bidang ketenagakeerjaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	7,88%	8,5%	9,5%	10,5 %	11,5 %	12,5 %	13,50 %	455.000.0 00	APBD
2	8.3.1.(a) Persentase tenaga	Mengoptimalkan penaatan aturan	1. Pengembangan insentif dan	Pengesahan Peraturan	51%	41,07%	41,5 %	42,0 %	42,5 %	43,5 %	44,0 %	44,5 %	225.000.0 00	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	kerja formal.	perundang undangan tentang ketenagakerjaan	disinsentif kepada pemberi kerja 2. Peningkatan pemahaman para pihak dibidang ketenagakerjaan	Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.										
3	8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan kesempatan kerja	1. Peningkatan lapangan kerja baru 2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru 3. Peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Menurun	5,08%	5,00 %	4.75 %	4,50 %	4,25 %	4,00 %	3,50 %	2.360.000.000	APBD
4	8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan pelatihan dan keterampilan kerja 2. Pengembangan pusat-pusat pelatihan kerja di nagari	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Menurun	5,0%	5,00 %	4.75 %	4,50 %	4,25 %	4,00 %	3,50 %	3.150.000.000	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				Kompetensi										
5	8.6.1* Persentase usia muda 15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatkan produktifitas dan keterampilan usia 15 – 24 tahun	1. Menambah paket pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkat	32,90%	35,0 %	37,5 %	40,0 0%	42,5 %	45,0 0%	47,5 %	3.450.000.000	APBD
6	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keikutsertaan Jamsostek di setiap tenaga kerja di Perusahaan-Perusahaan	Pembentukan forum kepatuhan yang diprakarsai BPJS Kerenagakerjaan, terdiri dari Pemda, Kejaksaan dan Pengawas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	7,87%	8,50 %	9,00 %	9,50 0%	10,00 %	11,0 0%	12,00 %	1.350.000.000	APBD

## 19. Diskumperdag

NO	INDIKATOR SDGs/ TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian : NA (belum dilakukan atau tidak ada data)														
1	8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap	Meningkatkan akses UMKM kepada lembaga	1. Pengembangan regulasi yang mendorong daya	1. Program pemberdayaan Usaha	Meningka t	28,26 %	29,46%	30,66%	31,86%	33,06%	34.26%	35,46%	100 %	APBD dan

NO	INDIKATOR SDGs/ TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	total kredit.	pembiayaan	tumbuh UMKM 2. Peningkatan kapasitas SDM UMKM dalam pengelolaan usahanya 3. Peningkatan daya saing UMKM.	Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program pengembangan UMKM			Rp.240.685.000	Rp.264.753.500	Rp.288.822.000	Rp.312.890.500	Rp.336.459.000	Rp.361.027.500	Rp.1.805.137.500	APBN ( DAK )
2	9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkatkan fasilitas IKM terhadap penguatan permodalan dan mengembangkan kerjasama dengan sektor pariwisata	1. Peningkatan kualitas IKM dan pertumbuhan IKM 2. Peningkatan inovasi dan daya saing produk IKM 3. Pengembangan infrastruktur mendorong inovasi	Program perencanaan dan pembangunan industri	Meningkat	NA	10%  20 IKM  Rp.100.000.000	10%  20 IKM  Rp.100.000.000	12,5%  30 IKM  Rp.150.000.000	15%  40 IKM  Rp.200.000.000	17,25%  50 IKM  Rp.250.000.000	20%  60 IKM  Rp.300.000.000	80%  220 IKM  Rp.1.000.000.000	APBD, APBD Provinsi dan APBN

## 20. Dinas PMD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Capaian: SB (Target tidak tercapai)															
1	10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal.	Meningkatkan sistem tata kelola pembangunan nagari.	1. Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Nagari 2. Peningkatan	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Berkurang sebanyak 5.000 desa	4	erkur ang	erkura ng	erkur ang	erkura ng	erkur ang	erkur ang	1.000.000. 000	APBD, APBN	

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			kualitas pengelolaan dana dan asset desa 3. Pengembangan regulasi sistem tata kelola pembangunan nagari.		(skala nasional) Target lokal 0									
2	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri.	Meningkatkan sistem tata kelola pembangunan nagari.	1. Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Nagari 2. Peningkatan kualitas pengelolaan dana dan asset desa 3. Pengembangan regulasi sistem tata kelola pembangunan nagari.	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkat paling sedikit 2.000 desa Target lokal 52 Nagari	48	48	49	49	50	51	52	1.000.000.000	APBD, APBN
<b>Capaian : NA (belum dilakukan atau tidak ada data)</b>														
3	10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	Meningkatkan peluang kerja dan kesempatan berusaha penduduk miskin di daerah tertinggal	1. Pengembangan proyek padat karya yang mempekerjakan penduduk miskin. 2. Penguatan lembaga bumhag	2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Menurun menjadi 14%	NA	25,0 %	22,5%	20%	17,5%	15,0 %	14,0+ %	1.000.000.000	APBD, APBN



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			dalam peningkatan usaha penduduk miskin 3. Peningkatan keterampilan penduduk miskin dalam pengembangan usaha. 4. Peningkatan dana UMKM untuk masyarakat miskin											

## 21. DPMPTSP

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaa	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Capaian: SB (Target tidak tercapai)															
1	8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian lokal	1. Peningkatan perizinan UMKM pada jasa perbankan 2. Peningkatan kerjasama dan optimalisasi	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkat	17 Unit	17 unit	22 unit	27 unit	32 unit	37 unit	42 unit	42.000.000.000	APBD	

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			perizinan jasa perbankan 3. Peningkatan diversifikasi jenis usaha berbasis masyarakat 4. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha.											
<b>Capaian : NA (belum dilakukan atau tidak ada data)</b>														
2	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Mengembangkan kerjasama antara koperasi dengan lembaga keuangan	1. Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dan UMKM 2. Pengembangan insentif bagi pihak perbankan yang bersedia meningkatkan kerjasama dengan koperasi 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Menurun (Mendekat)	NA	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m	500 m	250.000.000	APBD, APBN
3	9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai	Meningkatkan kapasitas UMKM dalam pengolahan produksi	1. Peningkatan sdm industri kecil dan menengah 2. Peningkatan sarana	2.18.06 Program Pengelolaan Data dan sistem Informasi	Meningkat	NA	0,12 %	0,14 %	0,16 %	0,18 %	0,20 %	0,25 %	500.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	tambah industri.		prasarana pengolahan 3. Pengembangan kelembagaan pemasaran produk industri kecil	Penanaman Modal.										

## 22. DINAS PUPR

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air minum	1.Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air minum yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya. 2.Pengembangan partisipasi pemangku adat, nagari dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%)	60%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	63.000.000.000	APBD, DAK, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			3. Pengembangan regulasi dalam menjaga k3 sumber daya air. 4. Pengembangan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan bagi masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM pengelola sumber daya air											
2	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) sumber Air Baku	1. Pengembangan basis data dan identifikasi sumber air baku yang tersedia di Kabupaten Dharmasraya. 2. Peningkatan Kerjasama dengan pemangku adat, nagari dan OPD terkait dalam menjaga keberlangsungan sumber air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60	87,28%	88,0 %	88,5 %	89,0 %	89,5 %	90,0 %	90,5 %	152.084.700.000	APBD, DAK

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			3. Pengembangan regulasi dalam menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3) sumber daya air. 4. Pengembangan sistem sistem sarana dan prasarana air baku (embung, waduk sebagai cadangan sumber air baku)		pulau.									
3	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber air permukaan	Pelestarian Sempadan DAS dan Restorasi DAS	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Ada, Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	0	1	1	1	1	1	1	2.000.000.000	APBD, APBN
4	6.5.1.(c) Jumlah jaringan	Meningkatkan koordinasi antara	Peningkatan intensitas koordinasi antara pihak	Program pengelolaan sumber	Pembentukan jaringan	1	1	1	1	1	1	1	150.000.000	APBD, APBN

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	informasi sumber daya air yang dibentuk.	pihak-pihak pemakai air dengan pihak jasa penyedia air dan antar pemanfaat air.	pengguna air dengan pihak penyedia air	daya air	informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai									
5	11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Mwningkatkan koordinasi dengan lembaga pembiayaan infrastruktur	Peningkatan intensitas koordinasi antara pihak Pemerintah dengan lembaga terkait	-	Ada	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD, APBN
<b>Capaian: NA (belum dilakukan atau tidak ada data)</b>														
6	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan implementasi konservasi sumber air minum	1. Pengembangan basis data penduduk yang memiliki sumber air minum aman dan berkelanjutan. 2. Peningkatan Kerjasama konservasi sumber-sumber air antar para pihak 3. Penguatan Kerjasama dengan tokoh adat/pemangku adat/nagari untuk menjaga kelestarian hutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkat menjadi 100%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	63.000.000.000	APBD



NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Pengembangan infrastruktur pengolahan air minum											

### 23. INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: NA (belum dilakukan atau tidak ada data)														
1	16.5.1.(a)  Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Mengembangkan Budaya Anti Korupsi	1. Pengembangan kerjasama dengan BPS untuk survey/mengukur indek perilaku anti korupsi (IPAK)  2. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara  3. Penguatan budaya anti korupsi masyarakat  4. Penegakan hukum yang tegas, konsisten dan terpadu	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Meningkat menjadi 4,0	NA	20%	20%	20%	20%	20%	20%	480.000.000	APBD

## 24. KESBANGPOL

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Capaian: SB (Target tidak tercapai)														
1	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Meningkatkan Jaminan Keamanan Masyarakat	1. Peningkatan Paham Keagamaan Kepada Masyarakat 2. Peningkatkan Penerapan Norma Sosial dalam Kehidupan 3. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu POLRI dan TNI Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Menurun	1	Men urun	Men urun	Men urun	Men urun	Men urun	Men urun	120.000.00 0	APBD
Capaian : NA (belum dilakukan atau Tidak ada data)														
2	10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil.	Mengembangkan Kebebasan Berorganisasi dan menyampaikan pendapat	1. PeningkatanPembinaan terhadap organisasi pemuda dan masyarakat 2. Pengembangan kepemimpinan Organisasi Pemuda dan ormas Pengembangan Keterbukaan dalam	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkat menjadi 87	NA	80	82	84	85	86	87	120.000.00 0	APBD

NO	INDIKATOR SDGs/TPB	ARAH KEBIJAKAN	INDIKASI PROGRAM	SINKRONISASI PERMENDAGRI 90/2019	Target Sesuai Perpres 59/2017	Baseline capaian TPB Tahun 2020	Target						Indikatif Alokasi Anggaran s/d 2026	Sumber Pendanaan
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			menyampaikan pendapat dalam masyarakat.											
3	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Meningkatkan Jaminan Keamanan Masyarakat	1. Peningkatan Paham Keagamaan Kepada Masyarakat 2. Peningkatan Penerapan Norma Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat 3. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu POLRI dan TNI 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Menurun	NA	0,1 %	0,08 %	0,06 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %	120.000.000	APBD

**Total Indikasi Alokasi Anggaran untuk TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB) adalah Rp. 273.106.611.344**

**Total Indikasi Alokasi Anggaran untuk TPB yang tidak ada data (NA) adalah Rp. 93.346.196.896**



# Lampiran 6

**Pengintegrasian KLHS  
kedalam RPJMD Kabupaten  
Dharmasraya Tahun 2021-  
2026**



**KLHS RPJMD  
BUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2021 - 2026**

**BERITA ACARA**  
**PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RPJMD**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026**

Telah dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya oleh Tim Pembuat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/20/KPTS-BUP/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026. Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 telah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan:

- a. Pasal 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/KUM.I/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan;
- b. Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda selaku Penanggung Jawab Pengintegrasian Rekomendasi Hasil KLHS ke RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 yang diketahui oleh Bupati Dharmasraya.

Pulau Punjung,                  Juni    2021

**Mengetahui,**  
**BUPATI DHARMASRAYA**

  
**SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, SE**



Kepala Bappeda  
Kabupaten Dharmasraya

**Drs. ANDY SUMANTO, CR, A**  
NIP. 19681228 199009 1 001

**BERITA ACARA**  
**PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RPJMD**  
**KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026**

Telah dilakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya oleh Tim Pembuat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/20/KPTS-BUP/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 – 2026.

Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 telah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan:

- a. Pasal 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/KUM.I/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan;
- b. Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda selaku Penanggung Jawab Pengintegrasian Rekomendasi Hasil KLHS ke RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 yang diketahui oleh Bupati Dharmasraya.

Pulau Punjung,                  Juni    2021

**Mengetahui,**  
BUPATI DHARMASRAYA

Kepala Bappeda  
Kabupaten Dharmasraya

**SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, SE**

**Drs. ANDY SUMANTO, CR, A**  
NIP. 19681228 199009 1 001



**PENELAAHAN/ PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KEDALAM RPJMD KABUPATEN  
DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026**

**A. Tabel Penelaahan KLHS Kedalam RPJMD untuk Indikator yang Sudah Dilakukan dan Belum Mencapai Target (SB)**

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
TPB/SDGs 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	2	1	1	2	1	6-4	Sosial	Bidang Kesehatan
2	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	2	1	2	-	-	-	Sosial	Bidang Tenaga Kerja
3	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	3	1	2	-	-	8-6	Sosial	Bidang Sosial
4	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3	2	1	-	-	-	Sosial	Bidang Sosial
5	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	3	1	2	-	-	-	Sosial	Bidang Sosial

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
6	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	5	1	1	-	-	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
7	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	5	1	2	-	-	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
8	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	5	1	2	-	-	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
9	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	5	1	2	-	-	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
10	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	5	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TPB/SDGs 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
11	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	2	1	1	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan
12	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	2	1	1	-	-	8-4	Sosial	Bidang Kesehatan
13	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	2	1	1	1	3	4-6	Sosial	Bidang Kesehatan
14	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan) dengan eliminasi Kusta.	2	1	1	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan
15	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	2	1	1	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan
16	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	2	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Sosial

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
17	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	2	1	1	-	-	-	Sosial	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
18	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	2	1	1	2	1	6-4	Sosial	Bidang Kesehatan
19	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	2	1	1	2	1	6-4	Sosial	Bidang Kesehatan
TPB/SDGs 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat										
20	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	2	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Pendidikan
21	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan
22	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan
23	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan
24	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
25	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan
26	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur $\geq 15$ tahun.	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan
27	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	2	1	2	1	1	8-4	Sosial	Bidang Pendidikan
TPB/SDGs 5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
28	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	2	1	2	1	1	5-5	Sosial	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
29	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	2	1	1	1	1	5-5	Sosial	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
30	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	2	1	1	2	2	8-9	Sosial	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
31	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	2	1	1	2	2	8-9	Sosial	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
TPB/SDGs 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										
32	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1	1	2	1	1	6-2	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
33	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	1	1	2	1	2	6-2	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
34	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	1	1	2	5	1	5-4	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
35	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1	1	2	7	1	6-2	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
36	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	1	1	2	5	1	4-7	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
37	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	1	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Pertanian
38	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	1	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
39	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	1	1	4	1	4	6-2	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
40	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	2	1	2	6-2	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
41	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	1	1	2	1	2	6-2	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TPB/SDGs 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
42	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	3	1	3	1	2	5-5	Ekonomi	Perencanaan
43	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	3	1	3	1	2	5-5	Ekonomi	Perencanaan
44	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Perencanaan
45	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	3	1	1	1	3	5-5	Ekonomi	Bidang Tenaga Kerja
46	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Tenaga Kerja
47	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	3	1	2	2	1	5-5	Ekonomi	Bidang Tenaga Kerja
48	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Tenaga Kerja
49	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Tenaga Kerja
50	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Pariwisata

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
51	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3	1	1	2	1	8-12	Ekonomi	Bidang Pariwisata
52	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Perencanaan
TPB/SDGs 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
53	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Perhubungan
54	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	3	1	1	1	3	5-5	Ekonomi	Bidang Perindustrian
TPB/SDGs 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar negara										
55	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	4	2	1	1	1	5-6	Ekonomi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
56	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	4	2	1	1	2	5-6	Ekonomi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
57	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	4	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
TPB/SDGs 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
58	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	1	1	3	1	1	5-4	Lingkung an	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
59	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	1	-	-	-	-	-	Lingkung an	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
60	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	5	-	-	-	-	-	Lingkung an	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
61	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	5	1	2	-	-	-	Lingkung an	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
62	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	1	1	2	5	1	8-8	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
63	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	5	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TPB/SDGs 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan										
64	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	1	1	2	5	1	8-8	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
65	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	1	1	2	5	1	4-9	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
66	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	3	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
67	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	5	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
68	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	4	-	-	-	-	2-11	Lingkungan	Perencanaan

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
TPB/SDGs 13. Penanganan Perubahan Iklim										
69	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	5	1	1	1	1	-	Lingkungan	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
70	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	5	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TPB/SDGs 15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati										
71	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	5	1	1	1	1	8-8	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
72	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5	1	1	1	1	8-8	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
73	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	5	-	-	-	-	-	Lingkungan	Sekretariat Daerah



No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
74	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	5	1	1	1	1	4-9	Lingkungan	Bidang Lingkungan Hidup
TPB/SDGs 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan										
75	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	2	-	-	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
76	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	4	-	-	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
77	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	4	8 Prioritas pembangunan	8 Prioritas pembangunan	8 Prioritas pembangunan	8 Prioritas pembangunan	6-9	Hukum dan Tata Kelola	Keuangan
78	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	4	-	-	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Sekretariat Daerah

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
79	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). <b>Indikator Lokal</b> Indeks kepatuhan pelayanan publik	4	-	-	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Sekretariat Daerah
80	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	2	-	-	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Bidang Pemberdayaa n Perempuan Dan Perlindungan Anak
81	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	4	-	--	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Bidang Komunikasi Dan Informatika
TPB/SDGs 17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)										
82	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	4	1	1	1	2	3-27	Ekonomi	Keuangan
83	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	4	1	1	1	2	3-27	Ekonomi	Keuangan
84	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	4	-	-	-	-	-	Ekonomi	Keuangan

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
85	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	4	-	-	-	-	-	Ekonomi	Sekretariat Daerah
86	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	4	-	-	-	-	-	Ekonomi	Sekretariat Daerah
87	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	4	1	1	1	1	-	Ekonomi	Bidang Statistik
88	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	4	1	1	1	1	-	Ekonomi	Bidang Statistik

**B. Tabel Penelaahan KLHS Kedalam RPJMD untuk Indikator yang Belum Memiliki Data (NA)**

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
TPB/SDGs 1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun										
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	2	1	1	1	3	-	Sosial	Bidang Kesehatan
2	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	1	1	2	1	1	5-4	Sosial	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	1	2	1	1	5-4	Sosial	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	5	1	1	1	3	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	5	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
6	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	3	1	3	1	2	-	Sosial	Bidang Sosial
TPB/SDGs 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)										
7	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	3	1	1	1	11	8-4	Sosial	Bidang Pangan
8	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	3	1	1	1	3	-	Sosial	Bidang Pertanian
TPB/SDGs 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
9	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	2	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan
10	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	2	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan
11	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2	1	1	1	3	8-9	Sosial	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
12	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	2	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
TPB/SDGs 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat										
13	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	2	1	3	1	2	-	Sosial	Bidang Komunikasi Dan Informatika
14	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	2	1	2	1	1	-	Sosial	Bidang Pendidikan
TPB/SDGs 5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan										
15	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	2	1	1	1	3	8-9	Sosial	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
16	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	2	-	-	-	-	-	Sosial	Bidang Kesehatan
17	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	2	1	3	1	2	-	Sosial	Bidang Komunikasi Dan Informatika
TPB/SDGs 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan										



No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
18	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	1	1	2	1	1	5-5	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
19	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	2	1	2	6	1	-	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
20	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	1	1	2	6	1	4-7	Lingkungan	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
TPB/SDGs 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua										
21	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	3	1	1	2	1	-	Ekonomi	Bidang Pariwisata
22	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	3	1	1	2	1	-	Ekonomi	Bidang Pariwisata
23	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Sekretariat Daerah

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
24	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	3	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
TPB/SDGs 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
25	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	1	1	1	1	2	--	Ekonomi	Bidang Perindustrian
26	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	1	-	-	-	-	-	Ekonomi	Bidang Perindustrian
27	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	4	-	-	-	-	-	Ekonomi	Penelitian Dan Pengembangan
TPB/SDGs 10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara										
28	10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	3	1	1	1	1	-	Ekonomi	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
29	10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	3	1	1	1	1	-	Ekonomi	Bidang Sosial
30	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,	3	1	3	1	4	-	Ekonomi	Bidang Sosial

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
		menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								
31	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	-	-	-	-	-	-	Ekonomi	Sekretariat Daerah
TPB/SDGs 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan										
32	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	5	-	-	-	-	-	Lingkungan	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TPB/SDGs 16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan										
33	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	2	-	-	-	-	-	Hukum dan Tata Kelola	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
34	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	1	1	1	4	5-5	Hukum dan Tata Kelola	Sekretariat Daerah
35	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	4	1	1	1	1	5-5	Hukum dan Tata Kelola	Sekretariat Daerah

No.	No. Indikator	Indikator TPB	NO. MISI BUPATI	Integrasi dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026				Keterangan (halaman dalam dok RPJMD)	Pilar	Kategori Jenis Urusan
				Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
36	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	4	1	2	4	1	8-8	Hukum dan Tata Kelola	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
TPB/SDGs 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)										
37	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	4	1	2	4	2	-	Ekonomi	Bidang Komunikasi Dan Informatika
38	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	4	1	2	4	2	-	Ekonomi	Bidang Komunikasi Dan Informatika
39	17.18.1.(d )	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	4	-	-	-	-	-	Ekonomi	Perencanaan